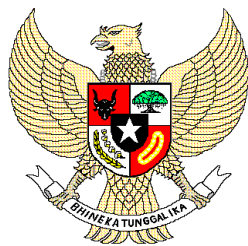




**Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021
tentang**

RP JMD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021 - 2026**



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9)
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
25. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau

- yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
 28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 29. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
 - a. Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih Tahun 2021-2026; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. RTRW;
 - c. KLHS;
 - d. Pengembangan Wilayah Terpadu; dan
 - e. RPJMD kabupaten/kota Sekitar.

Pasal 4

- RPJMD menjadi pedoman :
- a. penyusunan RKPD yang memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, Renstra dan Renja PD;
 - b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang mengampu perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah ;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-165/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026



SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI RUMINGSIH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saat ini Pemerintah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan baik.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan, Bab II membahas tentang gambaran umum kondisi daerah, Bab III membahas tentang gambaran keuangan daerah, Bab IV membahas permasalahan dan isu strategis daerah, Bab V membahas visi, misi, tujuan dan sasaran, Bab VI membahas strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, Bab VII membahas kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, Bab VIII membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Bab IX penutup.

RPJMD ini telah mengalami pentahapan mulai dari konsultasi publik rancangan awal, pembahasan rancangan awal dengan DPRD, konsultasi rancangan awal ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Musrenbang RPJMD, pembahasan raperda dengan DPRD Kota Pekalongan, evaluasi raperda oleh Gubernur Jawa Tengah dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Aamiin ya Robbal'alamiin

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekalongan, 25 Agustus 2021
WALI KOTA PEKALONGAN,

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025	8
1.3.2. RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024	9
1.3.3. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	11
1.3.4. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023	13
1.3.5. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)	15
1.3.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	15
1.3.7. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral	15
1.4. Maksud Dan Tujuan	16
1.4.1. Maksud	16
1.4.2. Tujuan	16
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	19
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	19
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif	19
2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah	23
2.1.3. Geologi	24
2.1.4. Hidrologi	25
2.1.5. Klimatologi	27
2.1.6. Penggunaan Lahan	28
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	30
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	36
2.1.9. Aspek Demografi	38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	41
2.2.2. Struktur Ekonomi	43
2.2.3. Inflasi	48
2.2.4. PDRB per Kapita	50
2.2.5. Indeks Gini	51
2.2.6. Kemiskinan	51
2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja	58
2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani	59
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia	59

2.2.10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	61
2.2.11.	Harapan Lama Sekolah	61
2.2.12.	Usia Harapan Hidup	62
2.2.13.	Pengeluaran Per Kapita	63
2.2.14.	Angka Partisipasi Kasar	64
2.2.15.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	65
2.2.16.	Angka Partisipasi Murni (APM)	65
2.2.17.	Angka Kematian Bayi (AKB)	66
2.2.18.	Angka Kematian Balita (AKABA)	67
2.2.19.	Angka Kematian Ibu (AKI)	68
2.2.20.	Angka Kesakitan	68
2.2.21.	Prevalensi Balita Stunting	69
2.2.22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69
2.2.23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70
2.2.24.	Kebudayaan	71
2.2.25.	Pemuda dan Olahraga	72
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	73
2.3.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	73
2.3.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	103
2.3.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	143
2.3.4.	Unsur Penunjang	153
2.3.5.	Unsur Pendukung	158
2.3.6.	Unsur Pengawasan	163
2.3.7.	Unsur Pemerintahan Umum	164
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	166
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	166
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah	167
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	171
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	173
2.4.5.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	174
2.5.	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020	180
2.5.1.	Hasil Evaluasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020	180
2.5.2.	Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020	217
2.5.3.	Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) Tahun 2020	224
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	253
3.1.	Kinerja Keuangan Daerah	255
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	255
3.1.2.	Neraca Daerah	261
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	262
3.2.1.	Rasio Kemandirian Daerah	263
3.2.2.	Proporsi Penggunaan Anggaran	263
3.2.3.	Rasio Belanja Modal	264
3.2.4.	Analisis Pembiayaan	264
3.3.	Kerangka Pendanaan	265

3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	265
3.3.2.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	273
3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	273
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	277
4.1.	Permasalahan Pembangunan	277
4.1.1.	Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	277
4.1.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	285
4.2.	Isu Strategis	292
4.2.1.	Isu Internasional	292
4.2.2.	Isu atau Kebijakan Nasional	294
4.2.3.	Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	296
4.2.4.	Hasil Telaahan RPJP Kota Pekalongan	296
4.2.5.	Hasil Telaahan KLHS Kota Pekalongan	297
4.2.6.	Hasil Telaahan RPJMD terhadap RPJMD Wilayah Sekitar	306
4.2.7.	Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan	312
4.2.8.	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS	325
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	331
5.1.	Visi	331
5.1.1.	Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026	331
5.1.2.	Lebih Sejahtera	333
5.1.3.	Lebih Mandiri	334
5.1.4.	Lebih Religius	334
5.2.	Misi	335
5.2.1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	335
5.2.2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan	336
5.2.3.	Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman	336
5.2.4.	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan	336
5.2.5.	Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	337
5.2.6.	Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah	337
5.2.7.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	338
5.3.	Tujuan Dan Sasaran	339
5.3.1.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	339
5.3.2.	Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan	339
5.3.3.	Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman	339
5.3.4.	Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	340

5.3.5.	Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	340
5.3.6.	Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah	340
5.3.7.	Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	340
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	351
6.1.	Strategi	351
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan	358
6.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan	366
6.3.1.	Kawasan Strategis Kota	366
6.3.2.	Keterkaitan Kota Pekalongan dengan Wilayah Sekitar (Petanglong)	368
6.4.	Penjabaran Implementasi Program Unggulan	375
6.5.	Program Pembangunan Daerah	380
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	415
7.1.	Kerangka Pendanaan	415
7.2.	Program Perangkat Daerah	416
7.2.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	416
7.2.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	421
7.2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	429
7.2.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	432
7.2.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	433
7.2.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	435
7.2.7.	Unsur Kewilayahan	435
7.2.8.	Unsur Pemerintahan Umum	436
7.2.9.	Non Urusan	437
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	473
BAB IX	PENUTUP	487
9.1.	Pedoman Transisi	487
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	487
DAFTAR PUSTAKA		489

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025-----	9
Tabel 1.2	Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 -----	10
Tabel 1.3	Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 -----	14
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan -----	22
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020-----	27
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	28
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	39
Tabel 2.5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020 -----	40
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)-----	41
Tabel 2.7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen) -----	43
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	48
Tabel 2.9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	50
Tabel 2.10	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 -----	50
Tabel 2.11	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2020-----	51
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 -----	52
Tabel 2.13	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	59
Tabel 2.14	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	61
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 -----	64
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	65
Tabel 2.17	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019-----	65
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 -----	65
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020 -----	66
Tabel 2.20	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	67
Tabel 2.21	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	68
Tabel 2.22	Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	69
Tabel 2.23	Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	69
Tabel 2.24	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	72

Tabel 2.25	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	72
Tabel 2.26	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	72
Tabel 2.27	Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	73
Tabel 2.28	Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	74
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	74
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	74
Tabel 2.31	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	75
Tabel 2.32	Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	75
Tabel 2.33	Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	76
Tabel 2.34	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	76
Tabel 2.35	Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	77
Tabel 2.36	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	77
Tabel 2.37	Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020-----	78
Tabel 2.38	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 – 2020 -----	78
Tabel 2.39	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs-----	78
Tabel 2.40	Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	79
Tabel 2.41	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 -----	79
Tabel 2.42	Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	79
Tabel 2.43	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	80
Tabel 2.44	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020 -----	80
Tabel 2.45	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	81
Tabel 2.46	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	81
Tabel 2.47	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020-----	82
Tabel 2.48	Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	82
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	83
Tabel 2.50	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020-----	83
Tabel 2.51	Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020 -----	84
Tabel 2.52	Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	85
Tabel 2.53	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	85

Tabel 2.54	Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	86
Tabel 2.55	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020 -----	87
Tabel 2.56	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020 -----	88
Tabel 2.57	Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	88
Tabel 2.58	Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	89
Tabel 2.59	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	90
Tabel 2.60	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	90
Tabel 2.61	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	91
Tabel 2.62	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	91
Tabel 2.63	Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	91
Tabel 2.64	Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2020-----	92
Tabel 2.65	Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	92
Tabel 2.66	Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020 -----	93
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	94
Tabel 2.68	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW-----	95
Tabel 2.69	Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	96
Tabel 2.70	Data Kebutuhan Rumah (Backlog) di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	96
Tabel 2.71	Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	96
Tabel 2.72	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	97
Tabel 2.73	Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	98
Tabel 2.74	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020 -----	98
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020-----	99
Tabel 2.76	Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	100
Tabel 2.77	Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	100
Tabel 2.78	Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	101
Tabel 2.79	Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	102
Tabel 2.80	Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	102
Tabel 2.81	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 -----	103
Tabel 2.82	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	104
Tabel 2.83	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	105
Tabel 2.84	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020 -----	105
Tabel 2.85	Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	106
Tabel 2.86	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	107

Tabel 2.87	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	109
Tabel 2.88	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	110
Tabel 2.89	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	110
Tabel 2.90	Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	111
Tabel 2.91	Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	111
Tabel 2.92	Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ----	113
Tabel 2.93	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	113
Tabel 2.94	Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	114
Tabel 2.95	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020 -----	115
Tabel 2.96	Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	117
Tabel 2.97	Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	118
Tabel 2.98	Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	118
Tabel 2.99	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	119
Tabel 2.100	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	119
Tabel 2.101	Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	120
Tabel 2.102	Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	120
Tabel 2.103	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	121
Tabel 2.104	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan -----	122
Tabel 2.105	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan -----	123
Tabel 2.106	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 ----	125
Tabel 2.107	Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	126
Tabel 2.108	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	127
Tabel 2.109	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	127
Tabel 2.110	Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	128
Tabel 2.111	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020-----	128
Tabel 2.112	Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2016 – 2020-----	128
Tabel 2.113	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	129
Tabel 2.114	Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	130
Tabel 2.115	Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	130
Tabel 2.116	Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	131
Tabel 2.117	Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	131
Tabel 2.118	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020-----	132

Tabel 2.119	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020 -----	133
Tabel 2.120	Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	133
Tabel 2.121	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020 -----	134
Tabel 2.122	Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	134
Tabel 2.123	Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020 -----	134
Tabel 2.124	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	136
Tabel 2.125	Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	136
Tabel 2.126	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	137
Tabel 2.127	Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	137
Tabel 2.128	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	138
Tabel 2.129	Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	138
Tabel 2.130	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	139
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	140
Tabel 2.132	Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020 -----	140
Tabel 2.133	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	141
Tabel 2.134	Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	141
Tabel 2.135	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	142
Tabel 2.136	Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020-----	143
Tabel 2.137	Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020-----	143
Tabel 2.138	Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (kg) -----	144
Tabel 2.139	Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun) -----	144
Tabel 2.140	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	145
Tabel 2.141	Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton)-----	145
Tabel 2.142	Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	146
Tabel 2.143	Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019-----	146
Tabel 2.144	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	147
Tabel 2.145	Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	147
Tabel 2.146	Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	148
Tabel 2.147	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	148
Tabel 2.148	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	148
Tabel 2.149	Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	149
Tabel 2.150	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	150
Tabel 2.151	Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	151
Tabel 2.152	Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	151
Tabel 2.153	Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	151

Tabel 2.154	Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	152
Tabel 2.155	Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	152
Tabel 2.156	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	153
Tabel 2.157	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	153
Tabel 2.158	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	155
Tabel 2.159	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	155
Tabel 2.160	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 -----	157
Tabel 2. 161	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	158
Tabel 2.162	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020 -----	160
Tabel 2.163	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020 -----	160
Tabel 2.164	Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	162
Tabel 2.165	Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	162
Tabel 2.166	Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	164
Tabel 2.167	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	164
Tabel 2.168	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020-----	165
Tabel 2.169	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	165
Tabel 2.170	Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	165
Tabel 2.171	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020 -----	166
Tabel 2.172	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	167
Tabel 2.173	Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020-----	169
Tabel 2.174	Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	170
Tabel 2.175	Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	171
Tabel 2.176	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha -----	171
Tabel 2.177	Inovasi Daerah Lainnya -----	178
Tabel 2.178	Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan-----	179
Tabel 2.179	Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan -----	180
Tabel 2.180	Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan Tahun 2020 -----	181
Tabel 2.181	Hasil Identifikasi Penyebab ketidaktercapaian IKD dan Pertimbangan Evaluasi -----	211
Tabel 2.182	Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	218
Tabel 2.183	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020-----	219
Tabel 2.184	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	221
Tabel 2.185	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020-----	221

Tabel 2.186	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	222
Tabel 2.187	Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	223
Tabel 2.188	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	225
Tabel 2.189	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	235
Tabel 2.190	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020-----	241
Tabel 2.191	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020 -----	247
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	258
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	259
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	260
Tabel 3.4	Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	261
Tabel 3.5	Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	263
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	263
Tabel 3.7	Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 -----	264
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	264
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	265
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020 -----	265
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 -----	270
Tabel 3.12	Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 -----	271
Tabel 3.13	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 -----	272
Tabel 3.14	Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	274
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2021-2026-----	275
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 -----	276
Tabel 4.1	Keterkaitan Masalah Pokok Kondusivitas Wilayah, Masalah dan Akar Masalah -----	279
Tabel 4.2	Keterkaitan Masalah Pokok Tata Kelola Pemerintahan, Masalah dan Akar Masalah -----	279
Tabel 4.3	Keterkaitan Masalah Pokok Banjir dan Rob, Masalah dan Akar Masalah -----	281
Tabel 4.4	Keterkaitan Masalah Pokok Sarana Prasarana Perkotaan, Masalah dan Akar Masalah -----	281
Tabel 4.5	Keterkaitan Masalah Pokok Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Masalah dan Akar Masalah-----	282
Tabel 4.6	Keterkaitan Masalah Pokok Kualitas Permukiman, Masalah dan Akar Masalah -----	282
Tabel 4.7	Keterkaitan Masalah Pokok Derajat Kesehatan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah -----	283
Tabel 4.8	Keterkaitan Masalah Pokok Kesejahteraan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah -----	283
Tabel 4.9	Keterkaitan Masalah Pokok Kualitas SDM, Masalah dan Akar Masalah -----	284

Tabel 4.10	Keterkaitan Masalah Pokok Daya Saing Ekonomi, Masalah dan Akar Masalah -----	285
Tabel 4.11	Keterkaitan Masalah Pokok Pelestarian Budaya, Masalah dan Akar Masalah -----	285
Tabel 4.12	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah -----	286
Tabel 4.13	Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Keterkaitan dengan Target TPB -----	298
Tabel 4.14	Permasalahan dan Isu Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS-----	303
Tabel 4.15	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 -----	308
Tabel 4.16	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 -----	311
Tabel 4.17	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS -----	326
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” -----	342
Tabel 5.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 -----	346
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 -----	356
Tabel 6.2	Keterkaitan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026-----	362
Tabel 6.3	Analisis LQ Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	369
Tabel 6.4	Analisis Shift-Share Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	370
Tabel 6.5	Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026-----	376
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota -----	381
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026-----	415
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan -----	438
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan -----	474
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan -----	476

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen -----	8
Gambar 1.2	Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang -----	13
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan -----	21
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan -----	22
Gambar 2.3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan -----	23
Gambar 2.4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan -----	25
Gambar 2.5	Wilayah Sungai Pemali-Comal -----	25
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan -----	29
Gambar 2.7	Peta Rencana Struktur Ruang -----	31
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang -----	32
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	39
Gambar 2.10	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	39
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin -----	41
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	42
Gambar 2.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020 -----	43
Gambar 2.14	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020 -----	49
Gambar 2.15	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020 -----	49
Gambar 2.16	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	52
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa) -----	53
Gambar 2.18	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	54
Gambar 2.19	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 -----	54
Gambar 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	55
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	56
Gambar 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	57
Gambar 2.23	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	57
Gambar 2.24	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	58
Gambar 2.25	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	59
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020 -----	60
Gambar 2.27	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 -----	61

Gambar 2.28	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 -----	62
Gambar 2.29	Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 -----	63
Gambar 2.30	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020-----	63
Gambar 2.31	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020-----	67
Gambar 2.32	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 -----	70
Gambar 2.33	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020-----	71
Gambar 2.34	Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020 -----	84
Gambar 2.35	Perkembangan Persebaran Covid-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020 -----	86
Gambar 2.36	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	104
Gambar 2.37	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	106
Gambar 2.38	Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	107
Gambar 2.39	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	108
Gambar 2.40	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	108
Gambar 2.41	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	112
Gambar 2.42	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020 -----	112
Gambar 2.43	Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 -----	114
Gambar 2.44	Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	115
Gambar 2.45	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	116
Gambar 2.46	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	117
Gambar 2.47	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	121
Gambar 2.48	Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan -----	123
Gambar 2.49	Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019 -----	135
Gambar 2.50	Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 -----	142
Gambar 2.51	Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	150
Gambar 2.52	Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 -----	166
Gambar 2.53	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	167
Gambar 2.54	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020-----	168
Gambar 2.55	Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	169
Gambar 2.56	Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	170
Gambar 2.57	Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020 -----	172

Gambar 2.58	Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 -----	173
Gambar 2.59	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020-----	173
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (dalam jutaan) -----	256
Gambar 4.1	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dengan Masalah Utama-----	278
Gambar 5.1	Ilustrasi Visi dan Misi -----	338
Gambar 6.1	Skema Strategi Pencapaian Misi 1-----	352
Gambar 6.2	Skema Strategi Pencapaian Misi 2-----	352
Gambar 6.3	Skema Strategi Pencapaian Misi 3-----	353
Gambar 6.4	Skema Strategi Pencapaian Misi 4-----	354
Gambar 6.5	Skema Strategi Pencapaian Misi 5-----	354
Gambar 6.6	Skema Strategi Pencapaian Misi 6-----	355
Gambar 6.7	Skema Strategi Pencapaian Misi 7-----	356
Gambar 6.8	Kawasan Strategis Kota Pekalongan-----	367

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**”. Dengan visi ini, maka Kota Pekalongan pada periode RPJMD ini digambarkan sebagai Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan.

Produk unggulan batik tidak hanya dipandang dari *brand image* saja, namun juga dihadapkan pada permasalahan daya saing, keharusan berinovasi secara dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Disamping itu, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*).

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan menjadi daya tarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan

signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi *Covid-19* belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menyasar permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain, mulai dari pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga berkontraksi 1,87. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Pekalongan.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 berada pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan juga periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Kota Pekalongan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya dengan sektor unggulan berupa pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan Pedagan Kaki Lima.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah “Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Pengembangan wilayah Petanglong ini ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama pada tahun 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen sampai dengan 5,60 persen, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5 persen sampai dengan 9,13 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05 persen sampai dengan 5,55 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13.

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan beberapa upaya, antara lain : pemantapan konektivitas dan aksesibilitas; pemenuhan kebutuhan air baku melalui pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan); serta pengelolaan lingkungan diantaranya : utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang) serta konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; penanganan limbah batik dan TPST Regional.

Sedangkan mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kota Pekalongan antara lain sudah menjadi bagian dari daftar proyek prioritas strategis berupa pengamanan pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, berupa teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Proyek ini dilatarbelakangi oleh banjir rob yang terjadi di beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (termasuk juga di Petanglong), serta kualitas air di 10 (sepuluh) wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat. Sedangkan indikasi target yang akan diwujudkan adalah berupa terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah, terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai, terbangunnya SPALDT (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat)

permukiman dan perkotaan, serta terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu melalui *online monitoring* (ONLIMO). Selain itu, terdapat juga pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala kota dan kawasan, jalan lingkar pekalongan; serta penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

Gambaran ringkas tersebut serta berbagai permasalahan dan isu strategis lain berdasarkan gambaran umum yang ada, maka perlu mempertimbangkan aspek sinergitas antara berbagai sumber daya dan pemerintahan di dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam mengimplementasikannya selama periode tahun 2021-2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah

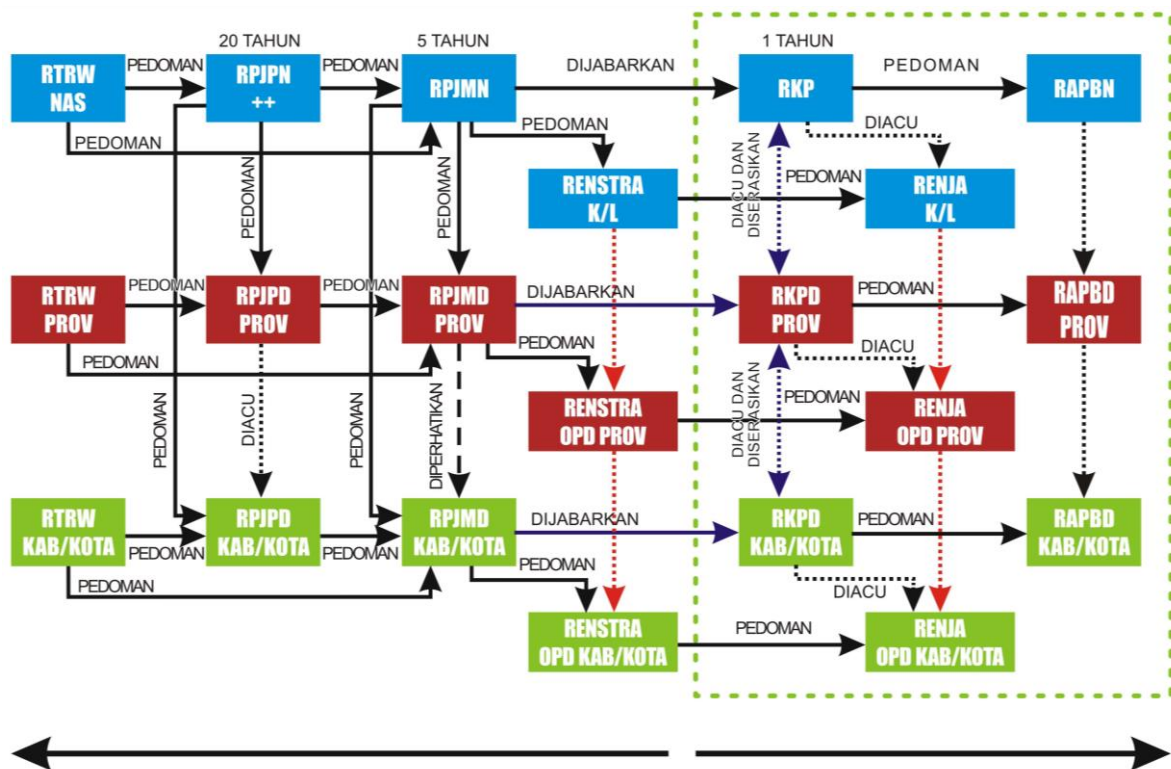
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
48. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
49. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
50. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
51. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
52. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
60. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025, dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi
3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam
4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas.

Hubungan antar dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

NO	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025)	RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
VISI	<i>Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera</i>	<i>Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</i>
1	Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.	6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
3	Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam	3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman. 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan
4	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas	5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.2. RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0 persen;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen;
- c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 persen;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3 persen.

Hubungan antar dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	RPJMN 2020-2024		RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan	
VISI	<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>		<i>Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</i>
1.	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan
4.	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

NO	RPJMN 2020-2024		RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan	
5.	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
6.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
8.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
9.	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.3. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** Kawasan Perkotaan Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pusat Kegiatan wilayah ini adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, sehingga sarana prasarana dan fasilitas kota yang ada harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029).

Selain Pusat Kegiatan Wilayah, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Sistem Perwilayahan dilakukan dengan pembagian Wilayah Pengembangan dan penentuan arah pengembangan. Kota Pekalongan masuk dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang berpusat di Kawasan Perkotaan Pekalongan, dengan arah pengembangan meliputi : memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan Wilayah sekitarnya, dan pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan (industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana.

Pusat Pelayanan Kota / PPK yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional berada di kelurahan Kauman dan Benda Kergon. Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota / SPPK tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di : 1) SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto; 2) SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; 3) SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaras; dan 4) SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip. Pelayanan Lingkungan / PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di : 1) PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo; 2) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang; 3) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; 4) PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; 5) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan 6) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

Selanjutnya untuk pedoman penataan ruang yang mendukung pelaksanaan RTRW telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab serta KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Kawasan Tirto, Koridor Batas Barat s.d. Jl Gajah Mada, 2) Kawasan Koridor Jl. Hayam Wuruk-Jl. Dr. Cipto dan Alun-alun, 3) Kawasan Koridor Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Gatot Subroto dan Jl. Pelita II, 4) Kawasan Koridor Jl. W.R. Supratman-Jl. Pantai Sari-Jl. Samudra, Kawasan Teknopark Perikanan, 5) Kawasan Terpadu Kuripan dan Koridor Jl. H.O.S. Cokroaminoto, dan 6) Kawasan Batas Kota sebelah Timur dan Koridor Jl. Dr. Sutomo.



Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.4. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 4 (empat) misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Hubungan antar dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditunjukkan dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

NO	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
	Visi Misi RPJMD Prov	Program Unggulan	
VISI	<i>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>		<i>Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</i>
1.	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK 2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama 	6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlak Karimah
2.	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
3.	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda 6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

NO	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
	Visi Misi RPJMD Prov	Program Unggulan	
4.	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni 7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi 9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman. 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.3.7. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's); 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD; 4) *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SiDA); 5) *Masterplan Smart City* dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJMD disusun untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Disusunnya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa bakti 2021-2026. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Menjabarkan visi misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- 2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 3) Menjadi tolak ukur kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dan instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- 4) Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang

- meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- Dalam Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
- Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX : Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Program Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut khususnya dalam hal penanganan masalah banjir rob.

Perkembangan terakhir, pandemi **Covid-19** (*corona virus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial-budaya dan politik sebagian besar dunia, termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Pekalongan. Dampak pandemi pun telah berimplikasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2020 ini dan tentunya masih akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6

50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km². Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Perubahan ini dikarenakan adanya :

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,50 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,69 persen. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,79 persen, penyumbang terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,88 persen dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,63 persen. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



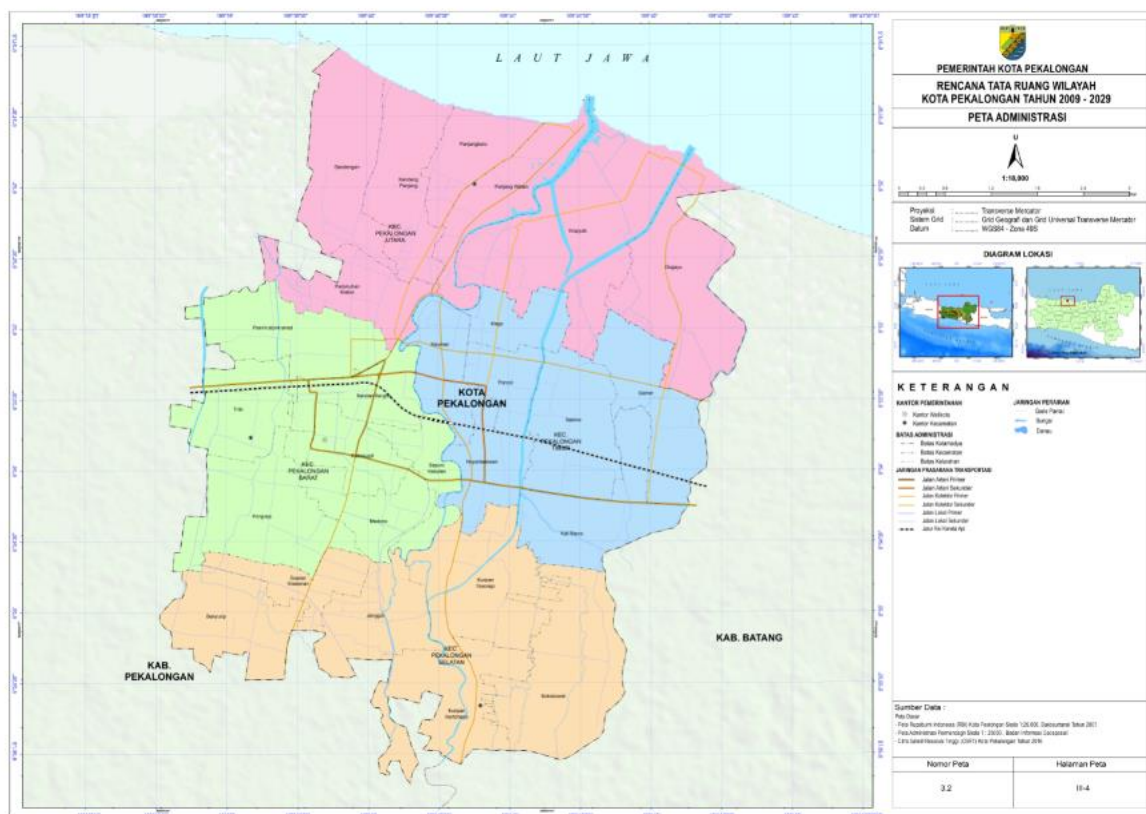
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

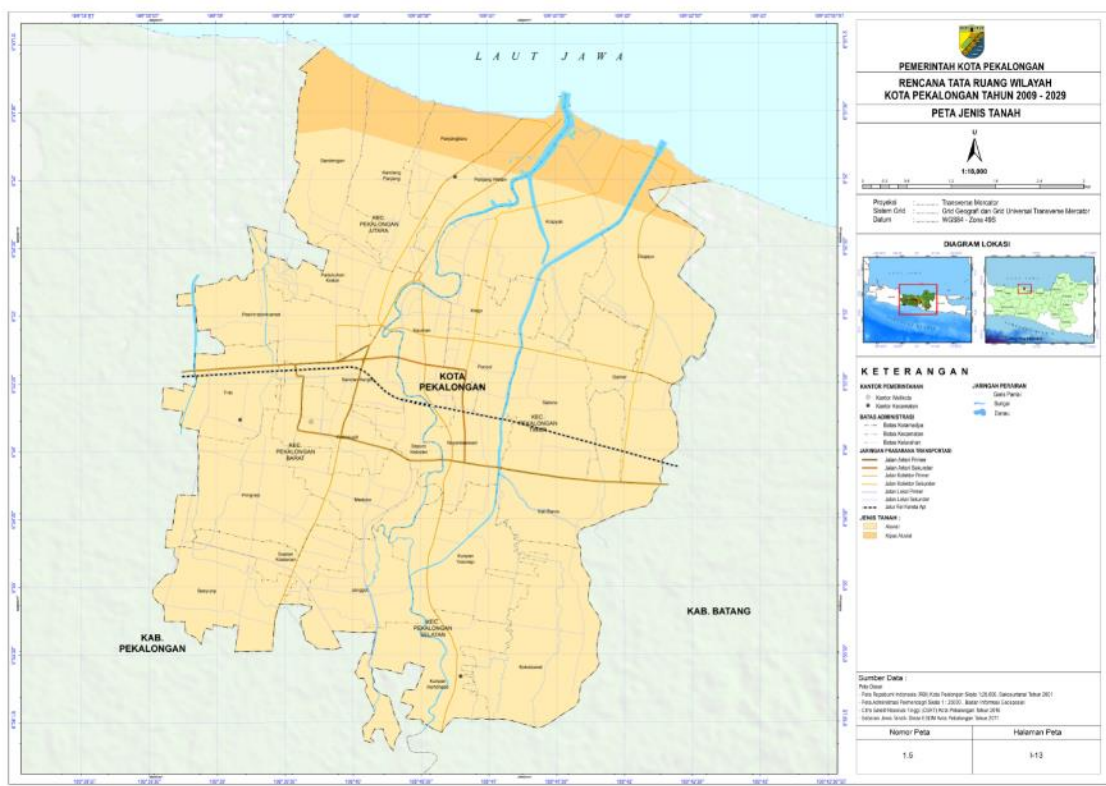
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirta dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km² atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.



Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambangan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambangan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambangan dan permukiman.

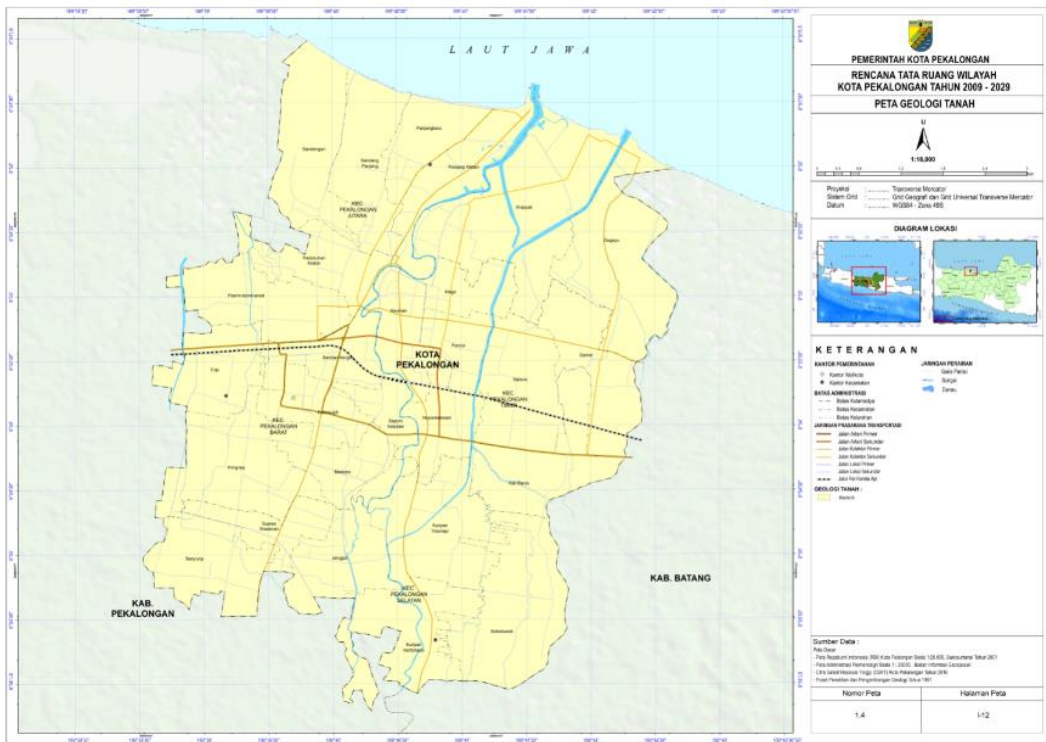
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

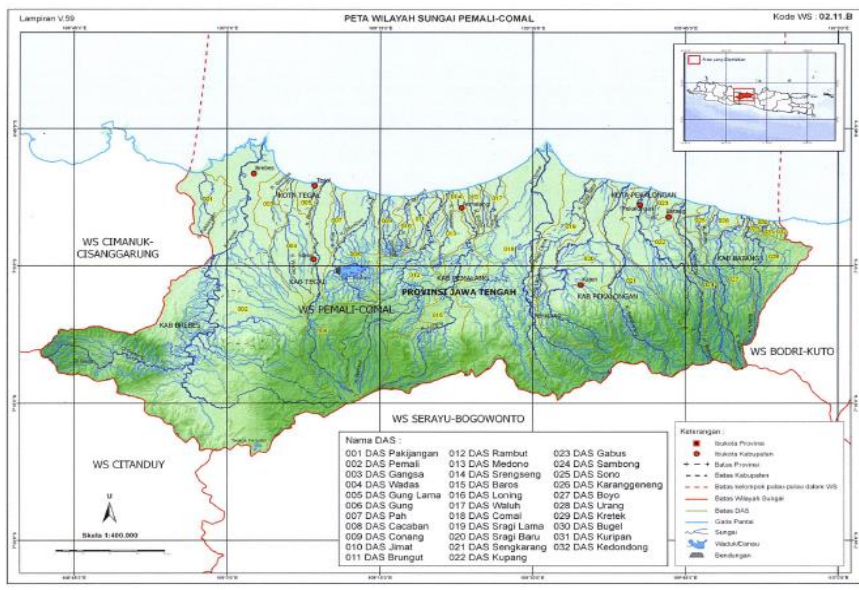


Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

2.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah

Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 11 centimeter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 sedang melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.5. Klimatologi

Iklm Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan paling banyak terjadi pada tahun 2016, dengan hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.896 mm. Sementara itu selama lima tahun terakhir jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari dan curah hujan sebanyak 1.647 mm³.

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen. Sementara itu suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020 berkisar antara 23,40°C – 33,1°C.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	497
2	Februari	17	763
3	Maret	13	351
4	April	9	203
5	Mei	6	252

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
6	Juni	4	20
7	Juli	4	15
8	Agustus	7	76
9	September	9	135
10	Oktober	6	76
11	Nopember	9	196
12	Desember	15	312
TOTAL		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710
Tahun 2017		104	1.647
Tahun 2016		140	2.477

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2020, luas tanah sawah adalah 886 Ha, hal ini berkurang sekitar 4,22 persen dari luas 925 Ha pada tahun 2019. Sedangkan untuk tanah kering meningkat menjadi 3.756 Ha, dimana ada penambahan sekitar 4,33 persen dari luas 3.600 Ha pada tahun 2019.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81,00	918,70	999,70
2	Pekalongan Timur	271,00	692,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	419,00	728,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	115,00	1.416,50	1.531,50
TOTAL		886,00	3.756,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00
Tahun 2017		980,00	3.545,00	4.525,00
Tahun 2016		1.152,00	3.373,00	4.525,00

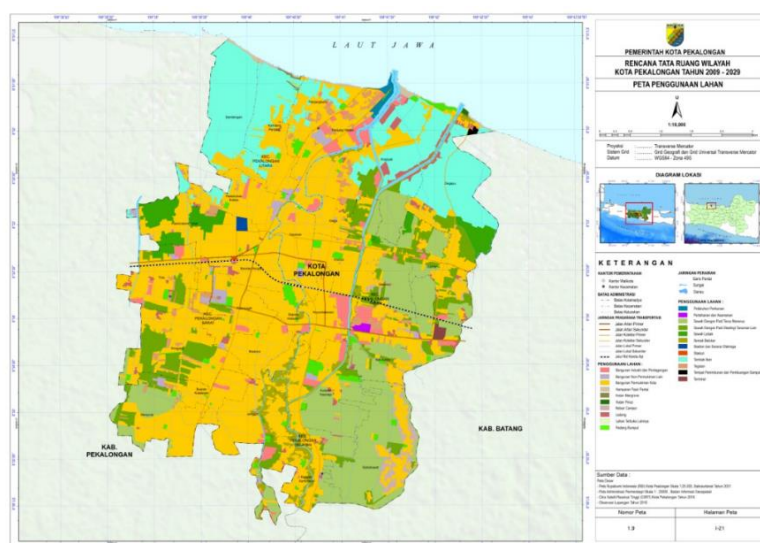
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2020 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2016 seluas 1.152 Ha dan tahun 2017 seluas 980 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2018 dan 2019 seluas 969 Ha dan 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

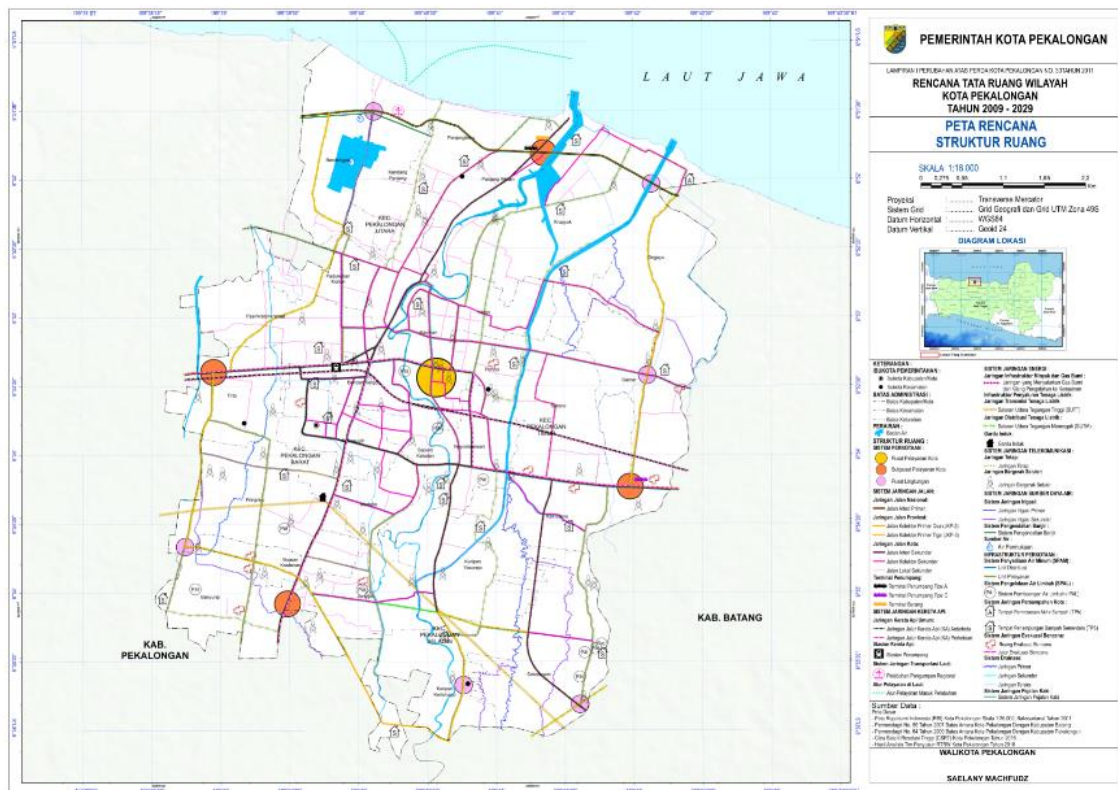
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan

terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

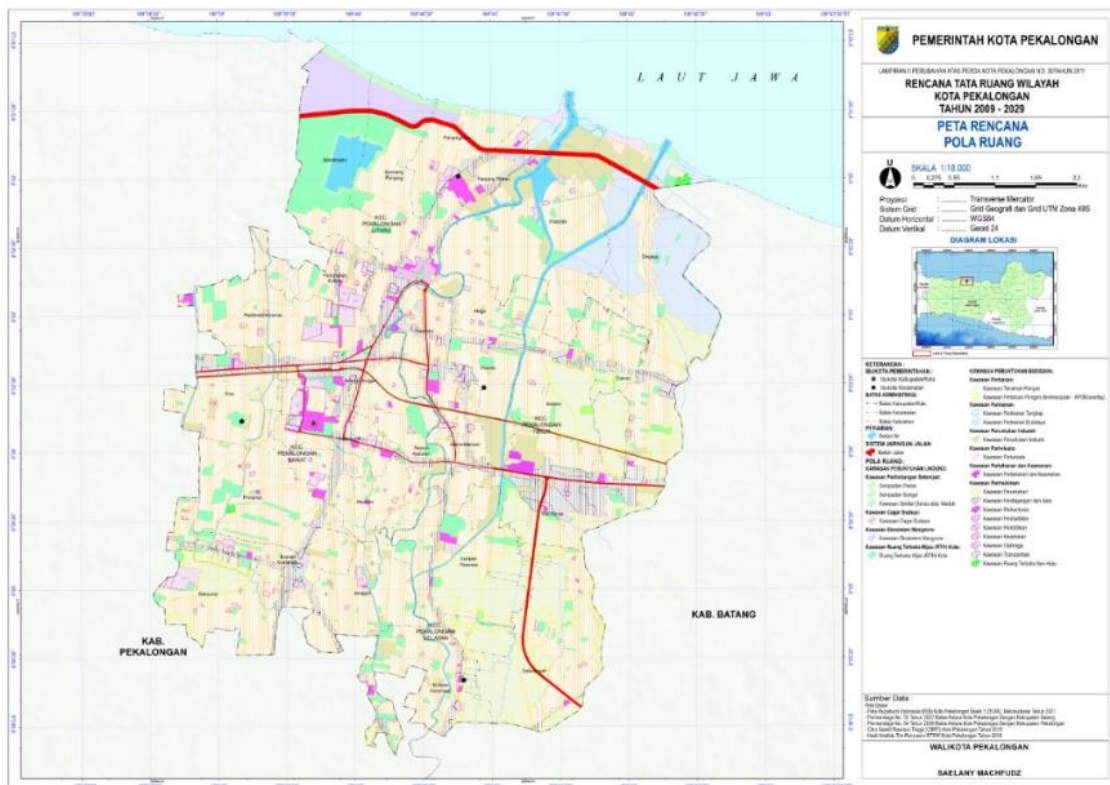
Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 23 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggung dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan seluas kurang lebih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebh 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.
- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar.

- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar berada di :

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:

- 1. Kelurahan Banyurip;
- 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
- 3. Kelurahan Jenggot;
- 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
- 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.

b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:

- 1. Kelurahan Bandengan;
- 2. Kelurahan Krapyak;
- 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
- 4. Kelurahan Panjang Wetan;
- 5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
- 6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:

- 1. Kelurahan Gamer;
- 2. Kelurahan Kali Baros;
- 3. Kelurahan Klego;
- 4. Kelurahan Noyontaansari;
- 5. Kelurahan Poncol; dan
- 6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

- 1. Kelurahan Bendan Kergon;
- 2. Kelurahan Medono;
- 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
- 4. Kelurahan Pringrejo;
- 5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
- 6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali

Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

a) Struktur Ruang

- 1) Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.
- 2) Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

b) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss dan Damage Assesment in Pekalongan City* dan

Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

c) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang *outputnya* akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan *output* kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana

wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 Kepala Keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu :

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
 - c. Pengaturan kegiatan industri;
 - d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - h. Peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
 - i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi :
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
 - c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;

- d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
- e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari :

- a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:
 - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
 - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
 - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
- d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain :

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.1.9. Aspek Demografi

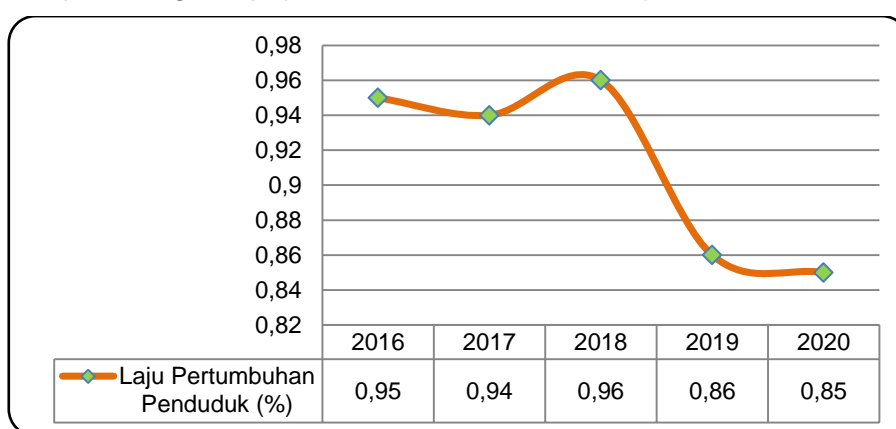
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,07 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102,07 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

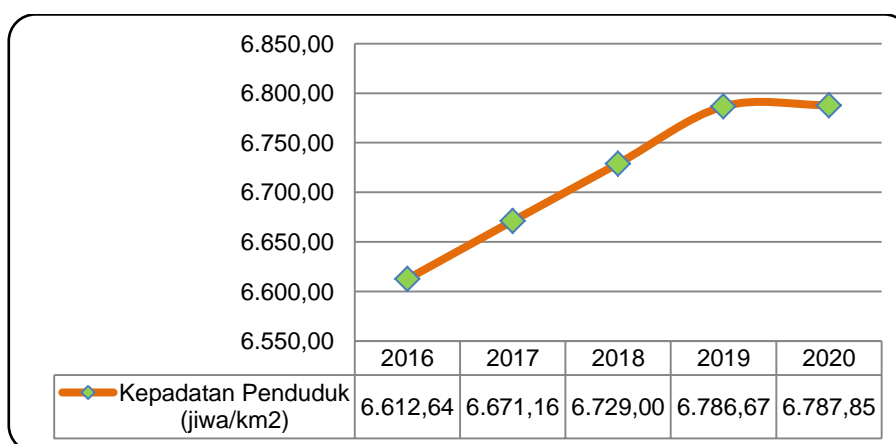
Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sekitar 2.625 jiwa. Pada tahun 2020 bertambah 53 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen.



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Gambar 2.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85 persen. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun.



Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke Kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam gambar 2.10.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2020, pendidikan SD ke bawah sebanyak 52.326 jiwa (35,79 persen), diikuti SMP sebanyak 29.357 jiwa (20,08 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 64.536 jiwa (44,13 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2020 berjumlah 146.219 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2016, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 52.326 jiwa (35,79 persen) dan tingkat SLTP 29.357 jiwa (20,08 persen). Namun pada tingkat pendidikan SM (sekolah menengah) ke atas meningkat yaitu 64.536 jiwa (44,13 persen). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2016	58.503	40,80	30.951	21,59	53.922	37,61	143.376
2017	61.346	41,03	30.055	20,11	58.086	38,86	149.487
2018	61.358	40,47	31.072	20,50	59.167	39,03	151.597
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219

Sumber : diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat *trendnya* selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61 persen dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.536 jiwa atau setara 44,13 persen. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

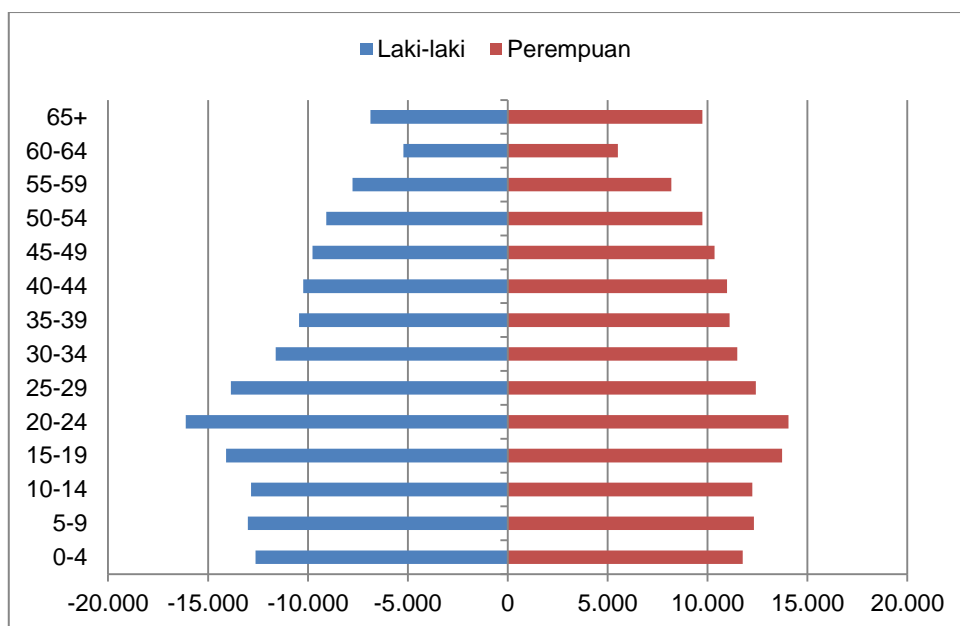
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 25.645 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.585 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 16.721 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.254	11.703	23.957
5-9	12.600	11.956	24.556
10-14	12.639	11.832	24.471
15-19	13.086	12.291	25.377
20-24	13.023	12.144	25.167
25-29	13.443	12.202	25.645
30-34	13.395	12.190	25.585
35-39	12.737	12.109	24.846
40-44	12.004	11.861	23.865
45-49	10.130	10.510	20.640
50-54	8.981	9.632	18.613
55-59	7.628	8.052	15.680
60-64	5.793	6.234	12.027
65+	7.432	9.289	16.721
Jumlah	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dan disajikan dalam bentuk diagram piramida seperti berikut.



Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

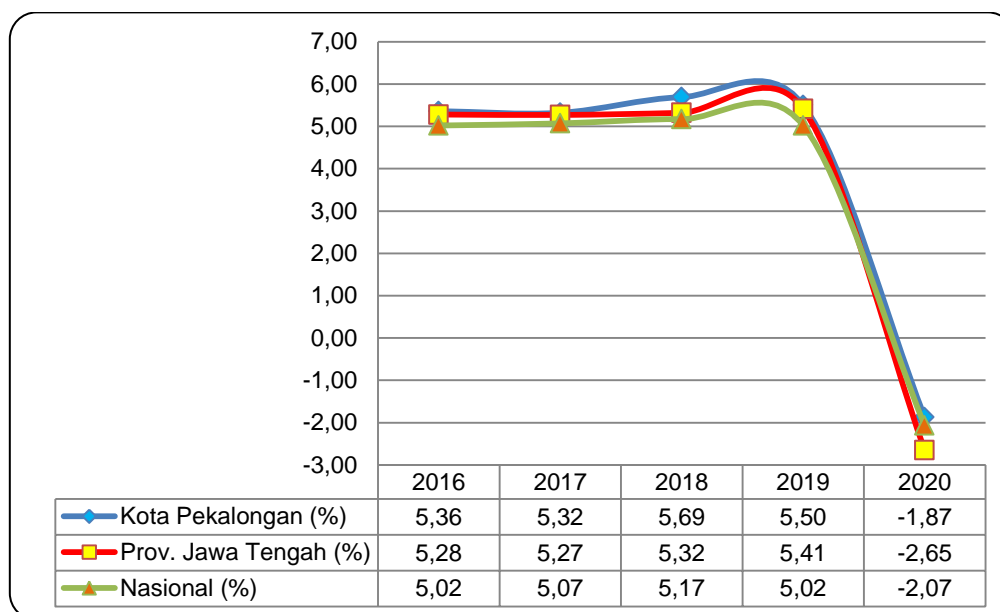
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016

sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *Covid-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan *lockdown*. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

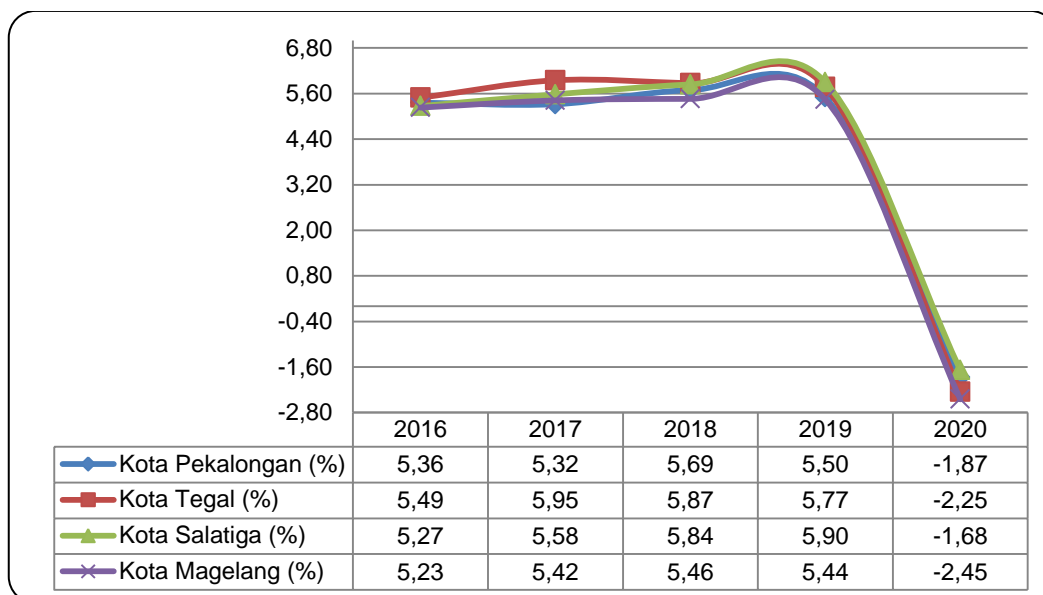


Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam gambar 2.13 berikut.



Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan disajikan dalam tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2020, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,10 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2016, peranan kategori ini sebesar 5,26 persen, kemudian melemah tahun 2017 sebesar 4,74 persen, dan semakin menurun tahun 2018 sebesar 4,67 persen, tahun 2019 sebesar 4,66 persen dan meningkat 5,10 persen di tahun 2020.

INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,

Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,40 persen pada tahun 2020.

Peran kategori ini cenderung mengalami pelemahan hingga tahun 2019, yakni pada tahun 2016 sebesar 21,43 persen, pada tahun 2019 makin lemah menjadi 20,85 persen.

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2020, sama seperti tahun 2019 yaitu 0,16 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2016 hingga tahun 2020 peran kategori ini sebesar 0,16 persen.

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2015-2018 yaitu sebesar 0,11 persen dan menurun 0,10 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat 0,12 persen pada tahun 2020.

KONSTRUKSI

Pada tahun 2020 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,60 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2016 sebesar 14,36 persen, tahun 2017 sebesar 14,39 persen, tahun 2018 sebesar 14,60 persen dan tahun 2019 sebesar 14,64 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarnya tahun 2020 adalah -1,09 persen pada tahun 2016 pertumbuhannya 4,52 persen. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2017 besarnya 5,51 persen, 5,59 persen pada tahun 2018, dan 4,71 persen pada tahun 2019.

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2020, peranan kategori ini sebesar 21,16 persen lebih kecil dibandingkan peranan di tahun 2019 yang sudah mencapai 21,80 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,01 persen di tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari 2016 – 2020 peran kategori ini berfluktuatif. Tahun 2016 6,05 persen, tahun 2017 naik menjadi 6,32 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 6,28 persen, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,40 persen.

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,32 persen. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan tahun 2019 merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 5,42 persen, tahun 2017 sebesar 5,39 persen, tahun 2018 sebesar 5,42 persen dan tahun 2020 sebesar 5,32 persen.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2016 sebesar 3,88 persen, tahun 2017 sebesar 4,15 persen, tahun 2018 sebesar 4,21 persen, tahun 2019 sebesar 4,36 persen dan tahun 2020 sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2016 sebesar 8,47 persen, tahun 2017 sebesar 11,94 persen, tahun 2018 sebesar 10,43 persen, tahun 2019 sebesar 10,57 persen, dan tahun 2020 sebesar 17,20 persen.

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020, perannya sebesar 6,22 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, selama empat tahun terakhir peran kategori ini pada perekonomian berfluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 6,14 persen, tahun 2017 sebesar 6,26 persen, tahun 2018 sebesar 6,27 persen, dan tahun 2019 sebesar 6,13 persen.

REAL ESTATE

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,7 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2016-2020 sebesar 2,68 persen, 2,68 persen, 2,71 persen, 2,71 persen dan 2,74 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 5 persen pada tahun 2016-2019, namun melambat pada tahun 2020 dikisaran -0,08 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2016-2019 adalah tahun 2016 sebesar 6,54 persen, pada tahun 2017 5,84 persen, 5,97 persen di tahun 2018, dan 5,62 persen di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,08 persen.

JASA PERUSAHAAN

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,40 persen pada tahun 2016, tahun 2017 menjadi sebesar 0,41 persen, tahun 2018 sebesar 0,42 persen, tahun 2019 sebesar 0,44 persen dan tahun 2020 turun menjadi 0,43 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,28 persen, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,85 persen, ditahun 2018 tumbuh sebesar 7,95, tahun 2019 tumbuh sebesar 8,31 persen dan melambat sebesar -4,32 persen di tahun 2020.

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2016-2019 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2016 sebesar 4,75 persen, tahun 2017 sebesar 4,72 persen, tahun 2018 sebesar 4,58 persen, tahun 2019 sebesar 4,47 persen dan meningkat di tahun 2020 sebesar 4,50 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung fluktuatif, yaitu dari sebesar 2,58 persen di tahun 2016 menjadi 3,75 persen di tahun 2017. Pertumbuhan pada 2018 sebesar 3,99 persen, 3,82 persen di tahun 2019 dan -1,00 persen di tahun 2020.

JASA PENDIDIKAN

Pada tahun 2020, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,73 persen dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang peranannya sebesar 4,65 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2016-2018 yaitu tahun 2016 sebesar 4,58 persen, tahun 2017 sebesar 4,67 persen, dan di tahun 2018 sebesar 4,75 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016 – 2020, masing-masing yaitu 7,49 persen di tahun 2016, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,82 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 7,59 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 2,63 persen dan pertumbuhannya melambat di tahun 2020 sebesar -0,56 persen.

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2020 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 1,25 persen, tahun 2018 sebesar 1,26 persen, tahun 2019 sebesar 1,29 persen dan tahun 2020 sebesar 1,44 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen melambat di tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar masing-masing 7,74 persen, 7,93 persen dan 7,84 persen, dan meningkat pertumbuhannya di tahun 2020 sebesar 8,35 persen.

JASA LAINNYA

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2016 sebesar 1,82 persen, tahun 2017 sebesar 1,84 persen, tahun 2018 sebesar 1,87 persen, tahun 2019 sebesar 1,90 persen dan tahun 2020 sebesar 1,91 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama tahun 2016-2020, yaitu tahun 2016 sebesar 7,23 persen, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 8,09 persen, tahun 2018 naik menjadi 9,02 persen, tahun 2019 pertumbuhannya melambat menjadi 8,47 persen dan tahun 2020 kembali turun menjadi -1,19 persen.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,36 persen pada tahun 2016 dan 5,50 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 10,28 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,65 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,03 persen. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 persen dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,91 persen. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *Smart City*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

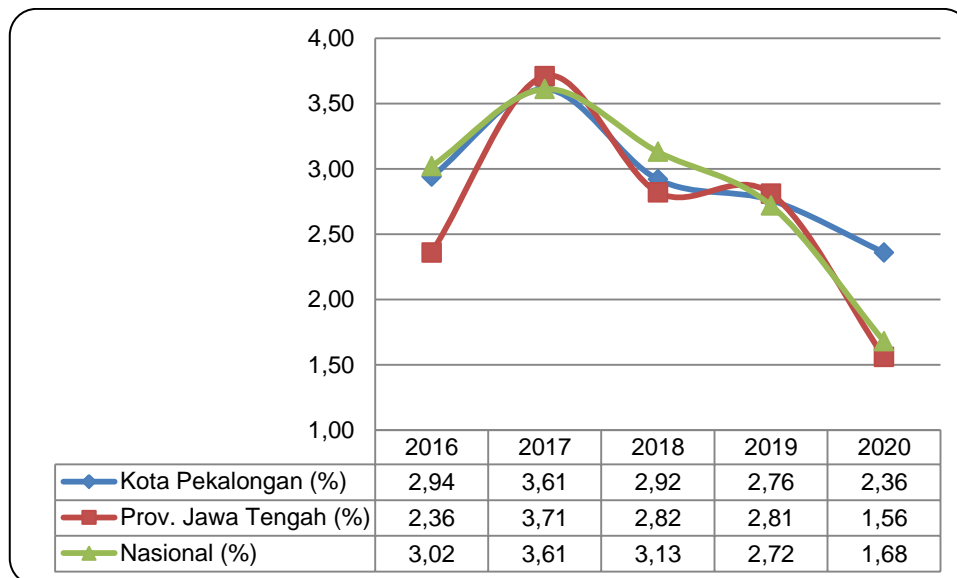
Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

2.2.3. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan

cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

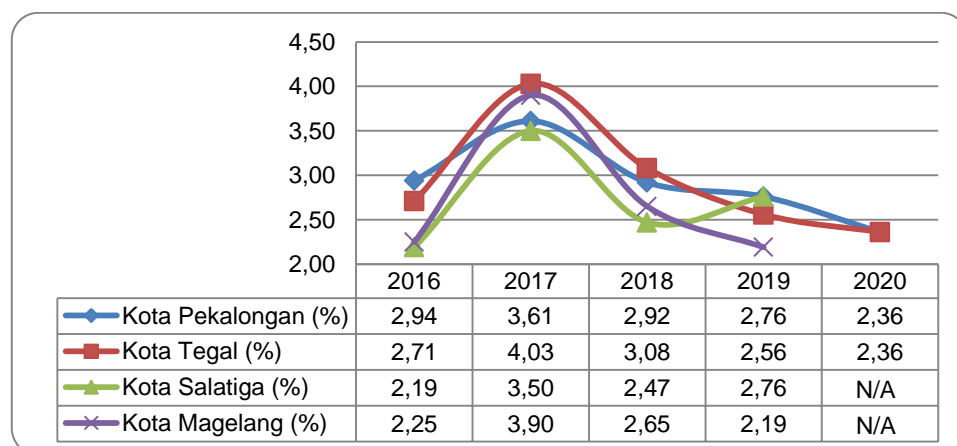
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam gambar 2.14 berikut.



Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), inflasi Kota Pekalongan tahun 2016 berada di posisi paling atas yaitu 2,94%. Tahun 2017 di urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Tegal (4,03%), Kota Magelang (3,90%), Kota Pekalongan (3,61%) dan Kota Salatiga (3,50). Tahun 2018 berada pada urutan tertinggi kedua yaitu Kota Tegal (3,08%), Kota Pekalongan (2,92%), Kota Magelang (2,65%) dan Kota Salatiga (2,47%). Tahun 2019 berada pada urutan tertinggi bersama Kota Salatiga yaitu 2,76%, dan untuk Kota Tegal sebesar 2,56% dan Kota Magelang sebesar 2,19%. Untuk tahun 2020, inflasi Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal yaitu 2,36%, sementara Kota Salatiga dan Kota Magelang tidak dilakukan penghitungan laju inflasi.



Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Disajikan dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	0,33
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	2,89
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	1,33
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	1,20
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	1,76
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.4. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp. 35,22 juta menurun sebesar 0,53 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 35,41 juta.

2.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,50 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Indeks gini Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Indeks Gini
2018	0,336
2019	0,305
2020	0,314

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

2.2.6.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

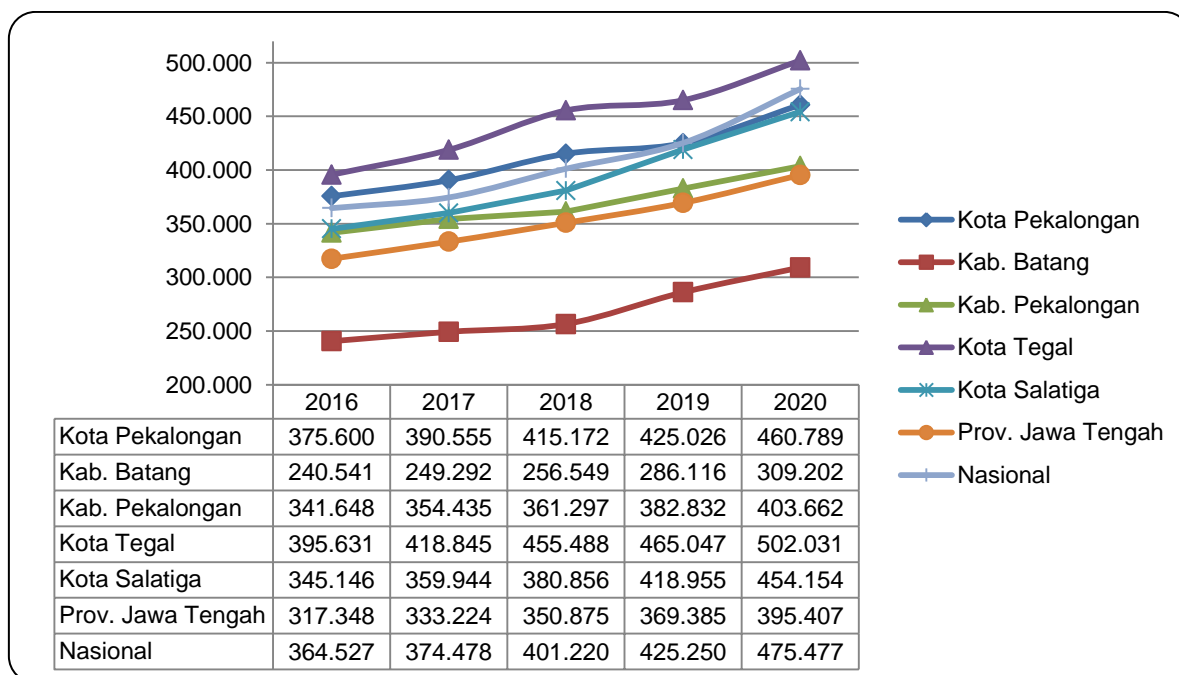
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan pada Februari 2021, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789/kapita/bulan. Angka ini sedikit di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.475.477. Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407,00.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2020 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407 dan garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789.



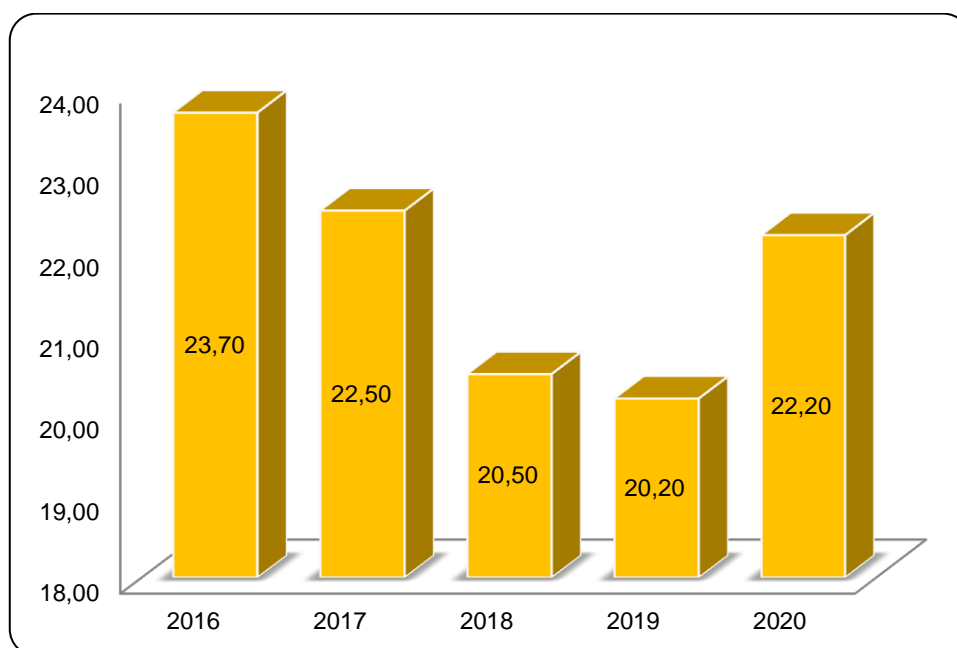
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

2.2.6.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.



Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

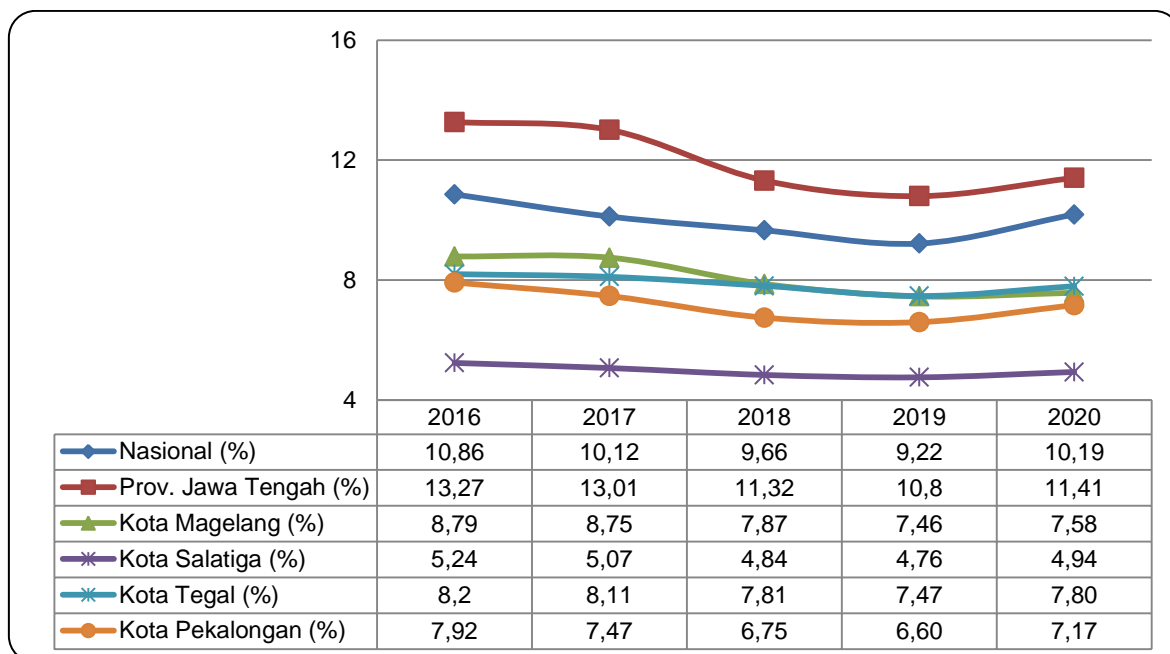
Sepanjang kurun waktu tahun 2016-2019, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 22,20 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *Covid-19*. Namun jika dibandingkan dengan Daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang, namun lebih rendah dari Kota Tegal, serta lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 angka ini terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami kenaikan menjadi 7,17 persen.

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan 7,92 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 13,01 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,45 persen sehingga menjadi 7,47 persen.

Tahun 2018 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan Kota Pekalongan mencapai 6,75 persen. Kemudian pada tahun 2019 tingkat kemiskinan

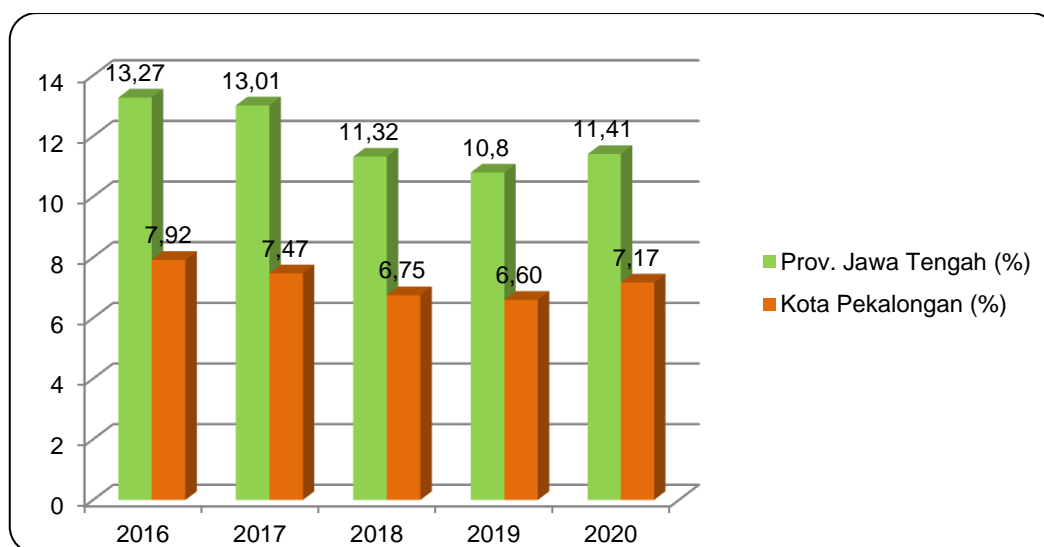
rata-rata Provinsi sebesar 10,80 persen, sedangkan Kota Pekalongan menduduki angka 6,60 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 11,41 persen, begitu juga dengan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan meningkat sebesar 0,57 persen sehingga menjadi 7,17 persen.



Gambar 2.18 Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan meski belum signifikan. Namun dengan ada pandemi *Covid-19* di tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali meningkat di angka 7,17 persen.



Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

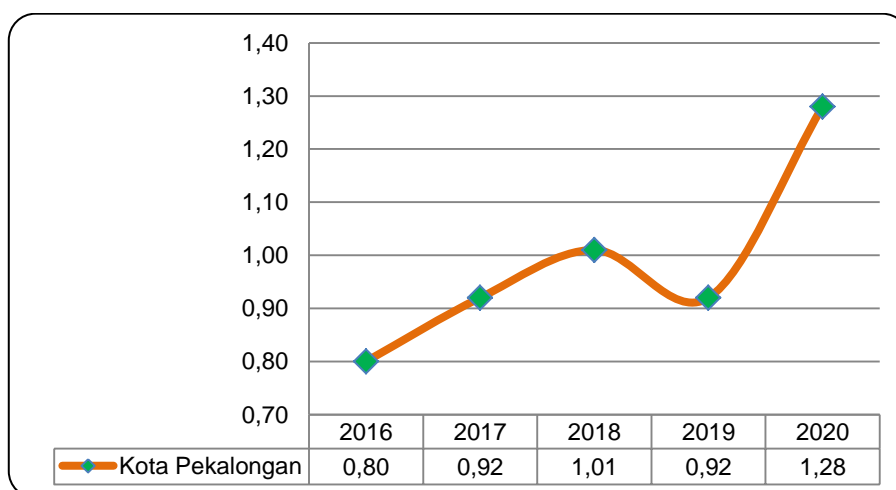
Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada rata-rata provinsi, di mana tingkat kemiskinan rata-rata provinsi tahun 2020 sebesar 11,41 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan jauh di bawahnya, yaitu 7,17 persen. Jika diurutkan, maka tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada urutan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,80. Selanjutnya naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,92. Namun pada tahun 2018 indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,09 yaitu menjadi 1,01. Dan pada tahun 2019 mencapai 0,92 serta mengalami kenaikan kembali menjadi 1,28 di tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam gambar 2.20 berikut.

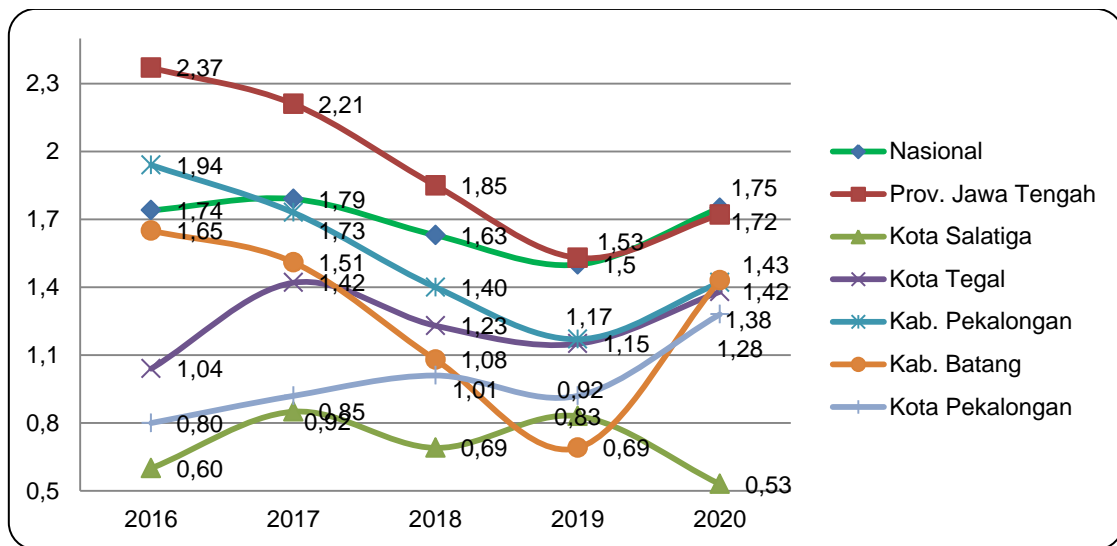


Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung stagnan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

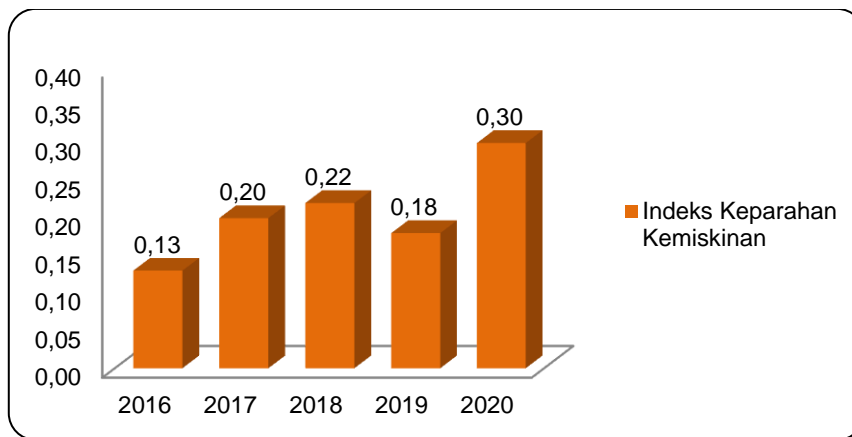
Sumber : Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

2.2.6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index–P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,13. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,20, yang berarti kondisi memburuk. Kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2018 menjadi 0,22 dan di tahun 2019 turun menjadi 0,18. Namun indeks P2 ini meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019.

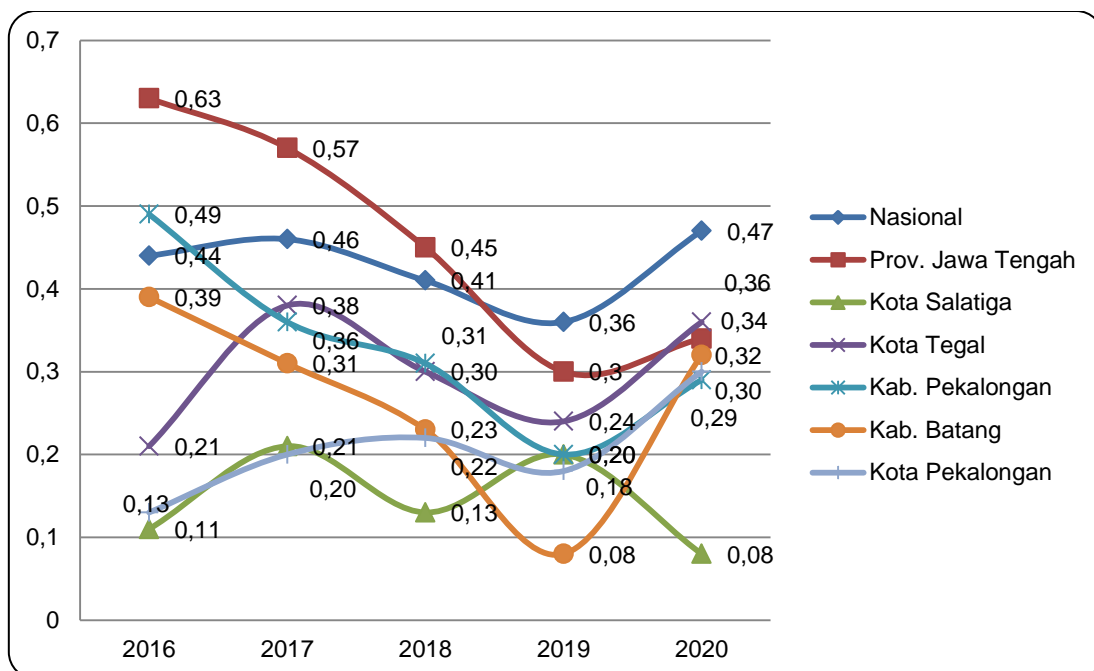
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Namun pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan Kota Tegal dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga. Kondisi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.



Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

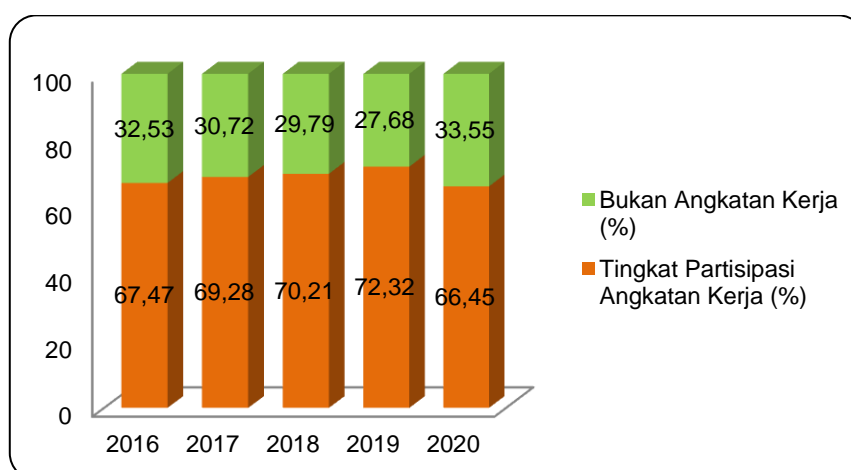
Sumber: BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

Pasca pandemi *Covid-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2020 tercatat sekitar 236.675 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 33,55 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.

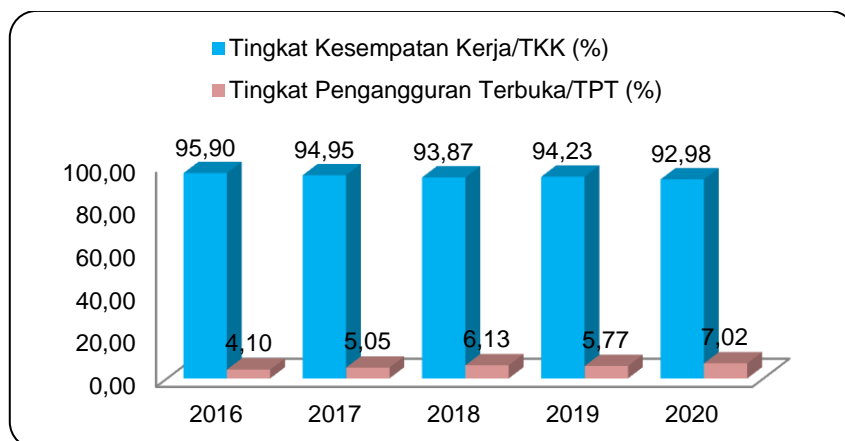


Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 92,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,02 persen atau meningkat 1,25 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.



Gambar 2.25 Rasio TTK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Upaya yang telah dilakukan antara lain menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2016 berada di angka 3,34 dan menurun di angka 1,03 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat di angka 3,78 dan kembali melonjak di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 4,59 dan 4,69. Sepanjang lima tahun terakhir, rata-rata kasus tertinggi ada pencurian.

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Kriminalitas
2016	3,34
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59
2020	4,69

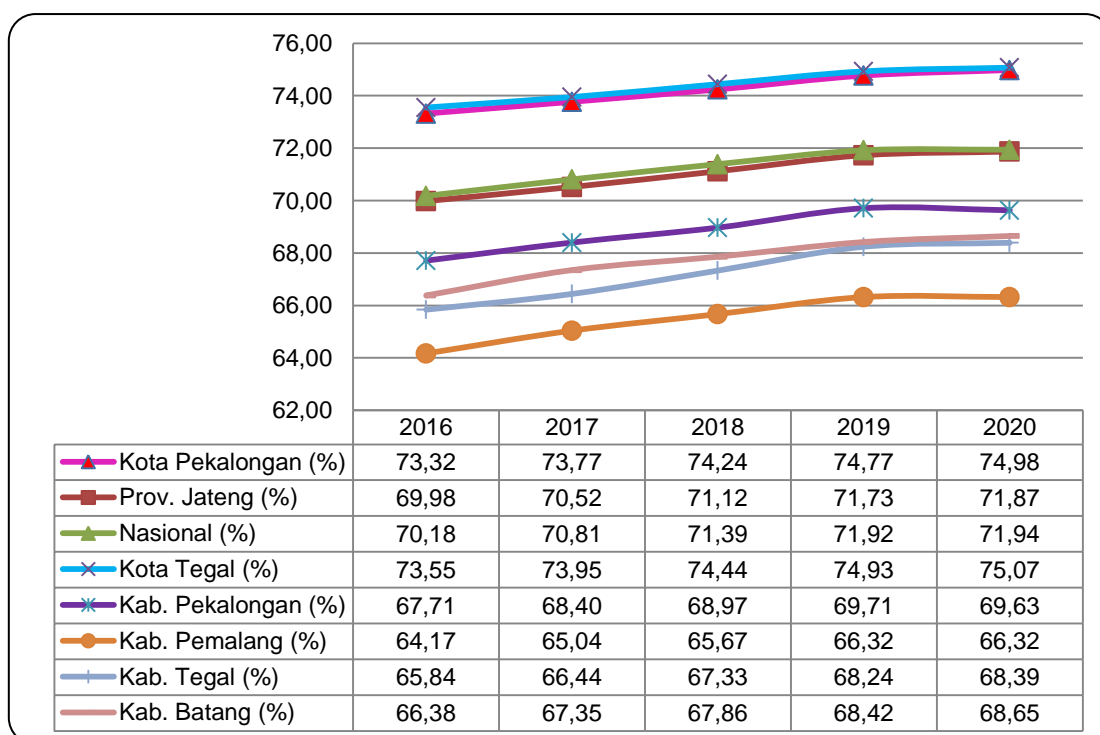
Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 73,32 menjadi 74,98 di tahun 2020. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2016 sampai 2020, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membuat ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.



Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat

tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel 2.14 berikut.

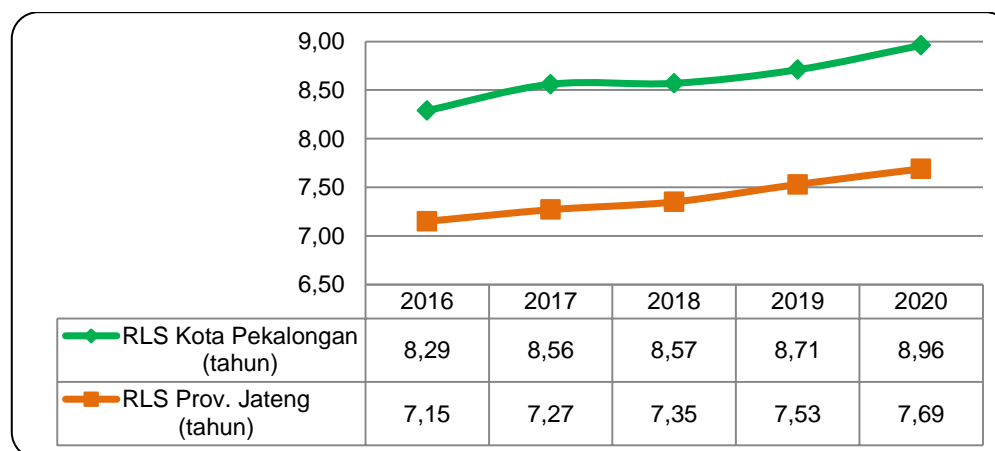
Tabel 2.14 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2016	8,29	12,77	73,32	11.721,00	73,32
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 8,29 tahun, pada tahun berikutnya, 2017 menjadi 8,56 tahun. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah menjadi 8,57 tahun, di tahun 2019 sebesar 8,71 tahun dan tahun 2020 menjadi 8,96 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 berada pada angka 7,69.



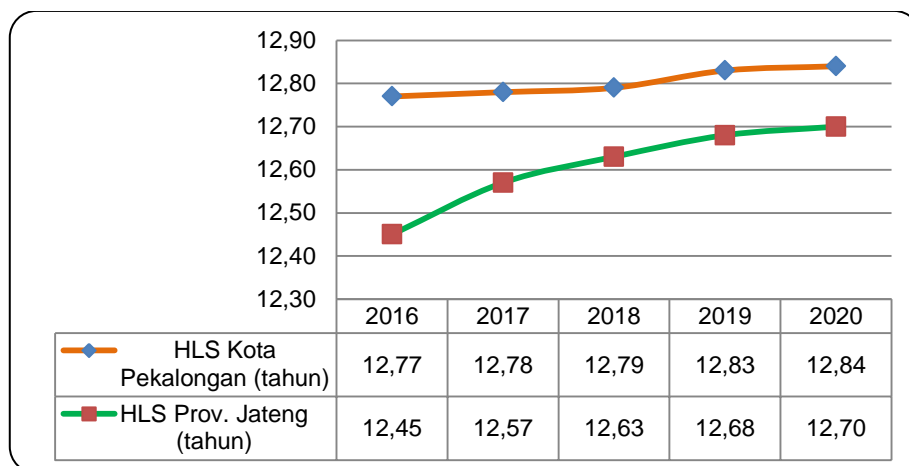
Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

2.2.11. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

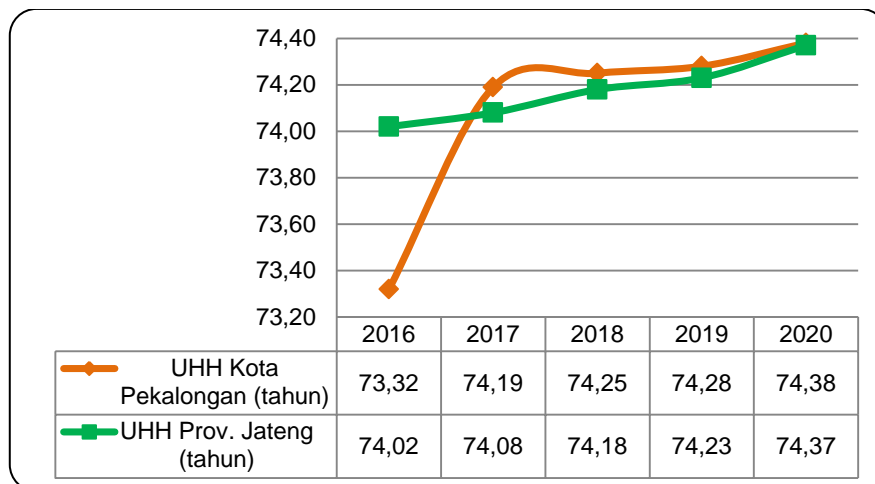
Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.2.12. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016 - 2020, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,32 pada tahun 2016 menjadi 74,38 di tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).



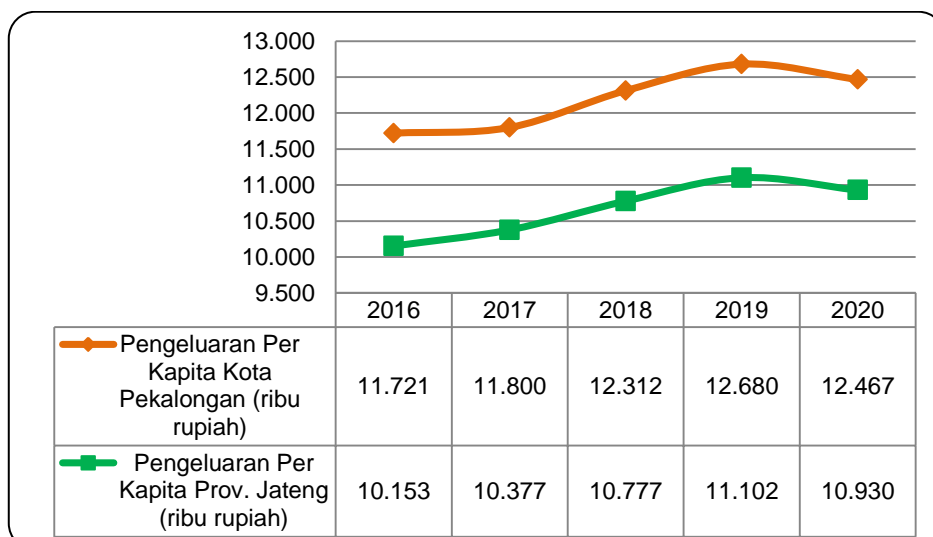
Gambar 2.29 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.29. Dari tahun 2016 - 2020, UHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.2.13. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2019. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.800.000 pada tahun 2017. Di tahun 2018 berada di angka Rp.12.312.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.12.680.000. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan menurun sebesar Rp.12.467.000.



Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.14. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	116,78	109,46	79,95	89,96	119,17	86,27
2017	114,47	108,44	82,97	91,09	92,04	84,35
2018	110,86	108,18	74,54	91,96	74,41	84,15
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI/ sederajat sebesar 116,78 persen, tahun 2017 sebesar 114,47 persen, pada tahun 2018 menurun sebesar 110,86 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 112,45 persen. Pada akhir periode (tahun 2020) APK jenjang SD/MI/ sederajat kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 110,98 persen. APK di jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi seperti APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 79,95 persen menjadi 82,97 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 turun menjadi 74,54 persen, meningkat kembali di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 75,91 persen dan 79,36 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari awal periode (tahun 2016) hingga tahun 2019 dan di akhir periode (tahun 2020) meningkat menjadi 78,66 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2016-2020, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020, yaitu sebesar 106,32 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 89 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 84-86 persen. Secara umum, APK Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih didominasi laki-laki dengan nilai 102,02. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/ setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 110,31. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	102,02	100,56
	SMP/Setara (persen)	100,98	110,31
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.15. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/ sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/ sederajat lebih tinggi daripada SMP/ sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah dimana pada jenjang SMP/ sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/ sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/S1/S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/II/III/Sarjana Muda dalam kurun waktu 2017-2019. Untuk kategori Tidak/Belum Tamat SD/ sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka \pm 1 persen. Untuk tahun 2020 BPS tidak menghitung angka pendidikan yang ditamatkan sehingga tidak tersedia data.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2017	1,87	15,86	28,04	21,42	26,73	1,35	4,74
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55
2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : pekalongankota.bps.go.id, 2021

2.2.16. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 jenjang SD/MI berada di kisaran 98 persen sampai dengan 100 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Demikian juga APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2020) mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	100,00	96,64	74,49	78,89	52,91	58,49

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2017	98,23	97,13	74,08	79,13	55,32	59,20
2018	100,00	97,75	74,54	79,31	74,41	59,31
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2020, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	83,73	82,07
	SMP/Setara	59,28	62,97
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.17. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka trend Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2016 sampai 2020 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka 987,64 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 990,92 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Namun mulai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 989,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan turun kembali menjadi 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pneumonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

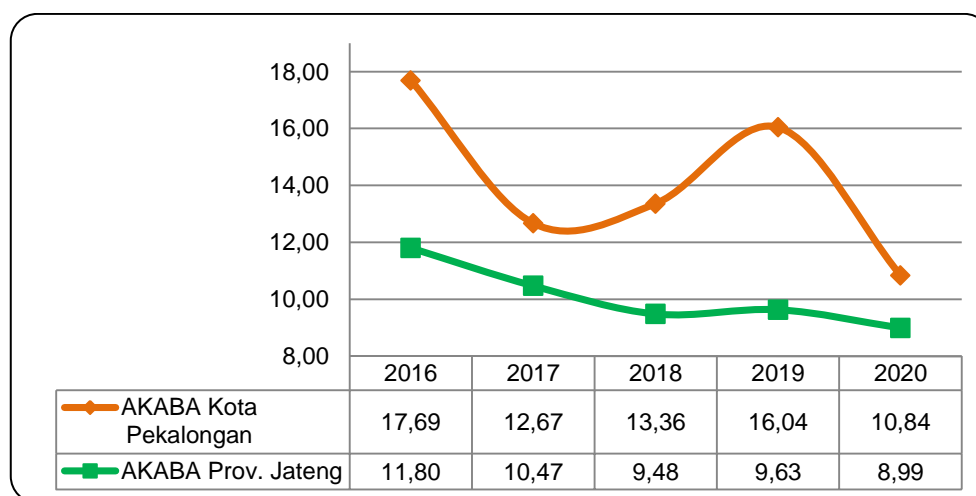
Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2016	12,36	987,64
2017	9,08	990,92
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

2.2.18. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2020 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2020 Dinkes Jawa Tengah, 2021

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,69 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 12,67 per 1.000 KH pada Tahun 2017. Namun mulai tahun 2018 sampai 2019 meningkat kembali dari 13,36 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi 16,04 per 1.000 KH pada tahun 2019. Namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 10,84 per 1.000 KH. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 – 2020 mengalami trend yang cenderung

menurun. Pada tahun 2016, AKABA sebesar 11,80 per 1.000 KH, kemudian turun ditahun 2017 menjadi 10,47 per 1.000 KH, tahun 2018 menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH, naik menjadi 9,63 per 1.000 KH pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 8,99 per 1.000 KH di tahun 2020.

2.2.19. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.21 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2016	8	5824	137,36
2017	10	5839	171,26
2018	7	5911	118,42
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2016 AKI sebesar 137,36 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus meningkat menjadi 171,26 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 10 kasus. Namun mulai tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 118,42 per 100.000 KH pada tahun 2018 dan kemudian menurun lagi menjadi 101,30 per 100.000 KH pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 AKI kembali meningkat menjadi 152,41 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 9 kasus. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus pre eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban.

2.2.20. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, angka kesakitan berada di angka 10,59 persen. Angka

tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68 persen dan di tahun 2020 menurun menjadi 12,89 persen. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2016	10,59
2017	13,33
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89

Sumber : jateng.bps.go.id, 2021

2.2.21. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

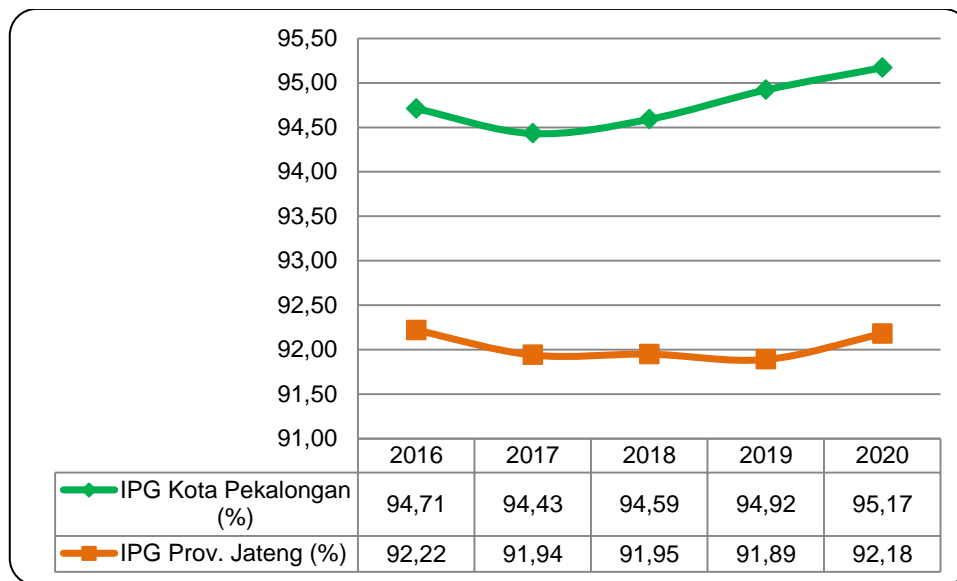
Tahun	Prevalensi Stunting
2016	8,90%
2017	8,06%
2018	6,99%
2019	6,87%
2020	9,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.53 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 8,9% di tahun 2016 menjadi 6,87% di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,42%.

2.2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.



Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

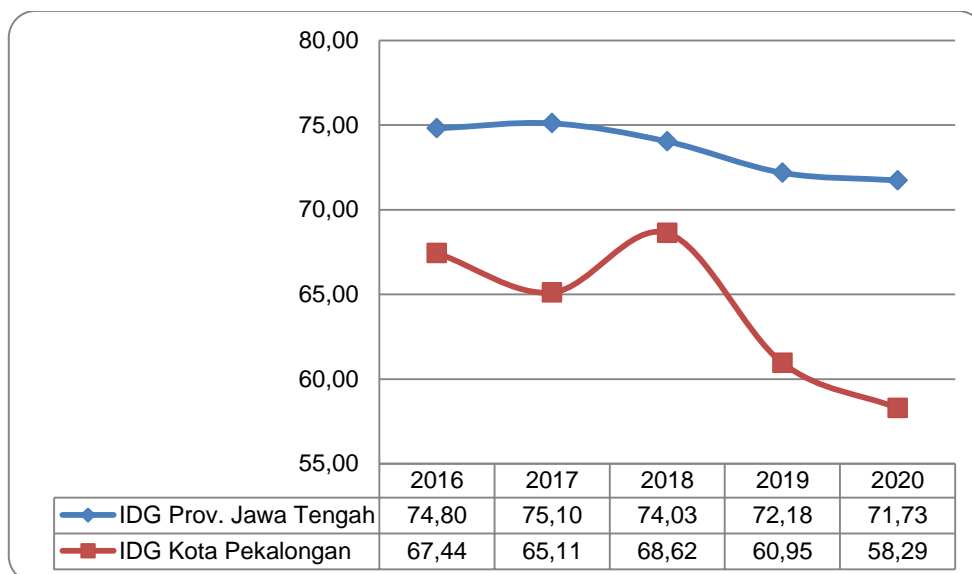
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,17 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

2.2.23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi. Pada tahun 2016, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 67,44, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 65,11 dan meningkat kembali di tahun 2018 di angka 68,62. Pada tahun 2019 menurun cukup drastis di angka 60,95 dan kembali menurun di tahun 2020 di angka 58,29.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disajikan dalam gambar 2.33, dimana kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

2.2.24. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain : Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.24 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dibandingkan pada tahun 2016 maka jumlah kelompok kesenian pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai hampir dua kali lipat. Jumlah kelompok kesenian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit penyusutan dibandingkan tahun 2018. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016 sampai 2020 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian, sehingga persentase sarana budaya per jumlah kelompok menunjukkan kecenderungan penurunan karena belum adanya penambahan sarana budaya selama tahun 2016 s.d. 2020.

Tabel 2.24 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kesenian	82	109	164	162	162
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	4,87	3,67	2,44	2,47	2,47

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.2.25. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2016 jumlah organisasi pemuda yaitu 8 organisasi. Jumlahnya relatif tetap, dimana pada tahun 2017 dan 2018 hanya 9 organisasi dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 26 organisasi pemuda. Sementara itu jumlah kegiatannya tidak berubah banyak, antara 8 sampai 10 kegiatan kepemudaan sepanjang lima tahun terakhir.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2016-2020 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	8	9	9	26	24
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Tidak banyak jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan, jumlahnya 20 klub. Dari tahun 2016, jumlah klub olahraga adalah 19 klub, berkurang menjadi 16 klub pada tahun 2017, dan bertambah lagi menjadi 20 klub pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Sementara itu fasilitas gedung olahraga yang tersedia sampai saat ini berjumlah 2 unit.

Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	19	16	20	20	20
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2016 berjumlah 30 organisasi dan jumlahnya masih tetap hingga tahun 2018 dan terdapat penambahan 1 (satu) organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga. Begitu pula

dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2020, dimana sebelumnya di tahun 2016 hanya berjumlah 12 lapangan. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.27 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	12	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	5	7	7	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2020 menurun. Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2020 menurun cukup banyak, semula 9.019 siswa menjadi 7.485 siswa. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2016	7.901	15.422	51,23
2017	8.107	15.873	51,07
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2016-2020 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 110,93 di tahun 2016 menjadi 103,79 di tahun 2020. Sementara itu capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung meningkat dari 102,67 di tahun 2016 menjadi 103,67 di tahun 2020. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Hal ini karena adanya kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 ditunjukkan dalam tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	110,93	110,57	106,97	98,67	103,79
APS SMP/MTs	102,67	104,21	104,67	97,69	103,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

3) Usia 6-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan oleh tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun		Jumlah anak usia sekolah TK s.d. SMP	Jumlah penduduk usia 6-15 thn	APS (persen)
2016	L	26.481	28.331	93,47
	P	25.853	26.439	97,78
				95,55

Tahun		Jumlah anak usia sekolah TK s.d. SMP	Jumlah penduduk usia 6-15 thn	APS (persen)	
2017	L	27.187	29.166	93,21	94,84
	P	26.245	27.172	96,59	
2018	L	28.202	29.456	95,74	98,65
	P	28.051	27.569	101,75	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung naik namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 145 sekolah dan di tahun 2020 sebanyak 146 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD/MI	145	146	149	149	146
Jumlah SMP/MTs	37	38	38	38	38
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	30.519	29.873	30.524	32.855	31.581
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.682	15.229	15.330	15.385	15.067

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2016	39,61
2017	40,57
2018	40,78
2019	38,76
2020	39,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersediaan

guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rasio sebesar 599,41, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menjadi 586,37 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.889	1.763	1.887	1.840	1.841
	Jumlah Murid	32.242	32.121	32.210	32.092	31.752
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	1.015	963	993	933	932
	Jumlah Murid	16.206	16.168	15.905	15.759	15.539
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.904	2.726	2.880	2.773	2.773
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.448	48.289	48.115	47.851	47.291
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		599,41	564,52	598,57	579,51	586,37

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.34, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dan berakhir menurun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2016	2.904	1.654	1,76	48.448	0,360
2017	2.726	1.708	1,6	48.289	0,331
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,5 di tahun 2016, mengalami naik turun sampai tahun 2020 dengan kondisi terakhir di angka 0,46 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.35 berikut.

**Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI*)	1.889	1.763	1.887	1.840	1.856
Rombongan Kelas*)	1.161	1.195	1.215	1.173	1.265
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,62	1,47	1,55	1,57	1,47
Murid SD/MI*)	32.242	32.121	32.210	32.855	31.995
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,5	0,46	0,48	0,48	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berada di angka 1,27, kemudian turun di tahun 2017 dan 2018. Namun kembali naik di tahun 2019 di angka 1,26 dan menurun di tahun 2020 menjadi 1,18. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.36 berikut.

**Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SMP/MTs*)	1.015	963	933	933	945
Rombongan Kelas*)	493	513	516	481	505
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	2,06	1,88	1,81	1,94	1,87
Murid SMP/MTs*)	16.206	16.168	15.905	15.385	15.887
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,27	1,16	1,14	1,26	1,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2016-2020, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kondisi bangunan SD/setara meningkat, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai di angka 73,30 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,87 persen dan pada tahun 2017 menjadi 94,82 persen. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 86,80 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,10 persen dan menurun drastis di tahun 2020 mejadi 68,95 persen. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	86,51	91,65	95,01	92,72	73,30
SMP/MTs (persen)	77,87	94,82	88,86	94,13	68,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,07 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 0,29 persen. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	0,09	0,07	0,07	0,10	0,29
SMP/MTs (persen)	0,43	0,14	0,15	0,46	0,97

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2016-2020 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/ sederajat selama kurun waktu 2016-2020 dapat mencapai 100 persen di tahun 2017 sampai 2020. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	99,98	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	7,30	7,53	7,26	69,69	0,00
	MI	7,26				
2	SMP	6,088	6,13	5,74	59,02	0,00
	MTs	5,393				

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 telah diatas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif. Sementara itu untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun dan sempat berada di bawah 100 persen di tahun 107 dan 2018. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	113,35	111,82	102,44	104,78	102,79
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	105,12	98,41	98,00	101,25	102,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	90,45	94,23	92,42	92,80	93,53
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	92,12	93,39	93,96	94,96	95,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.43 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.43 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	-	3	8	18	18
- Jumlah Sekolah	104	108	109	110	110
- Persen	0,00	2,78	7,34	16,36	16,36
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	85	99	95	102	99
- Jumlah Sekolah	145	146	149	149	146
- Persen	58,62	76,81	63,76	68,46	67,81
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	18	23	23	26	26
- Jumlah Sekolah	37	38	38	38	38
- Persen	48,65	60,53	60,53	68,42	68,42
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	103	122	122	146	143
- Jumlah Sekolah	286	292	292	297	294
- Persen	36,00	41,78	42,57	49,16	48,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2.44 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2018	297	100	142	47,81	73,90
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2016	406	21.420	18,95
2017	407	22.933	17,75
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
Rata-rata			18,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Jumlah Posyandu dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 adalah 18,00 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 56 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 berdasarkan data pada tabel 2.46, secara agregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2016	299.222	14	0,047	27	0,090	22	0,074	8	0,027
2017	301.870	14	0,046	27	0,089	14	0,046	8	0,027
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	8	8	8	9	9
Jumlah seluruh rumah sakit	8	8	9	9	9
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2016 – 2020, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2018 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk dokter gigi per 1.000 penduduk. Secara umum rasio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 dan sedikit meningkat di tahun 2020. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	0,42	0,48	0,53	0,39	0,42
Dokter Umum	0,52	0,79	0,91	0,60	0,66
Dokter Gigi	0,1	0,17	0,16	0,11	0,12
Rasio Dokter per satuan penduduk	0,94	1,45	1,60	1,1	1,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus

ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2016 – 2020 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Perawat	2,23	2,32	2,58	2,63	2,71
Rasio Bidan	0,95	1,00	1,20	1,08	1,09
Rasio Farmasi	0,44	0,93	1,18	0,84	0,90
Perawat	698	709	804	827	832
Bidan	286	304	375	339	335
Tenaga Farmasi	133	285	348	265	276

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPSTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam tabel 2.50 berikut.

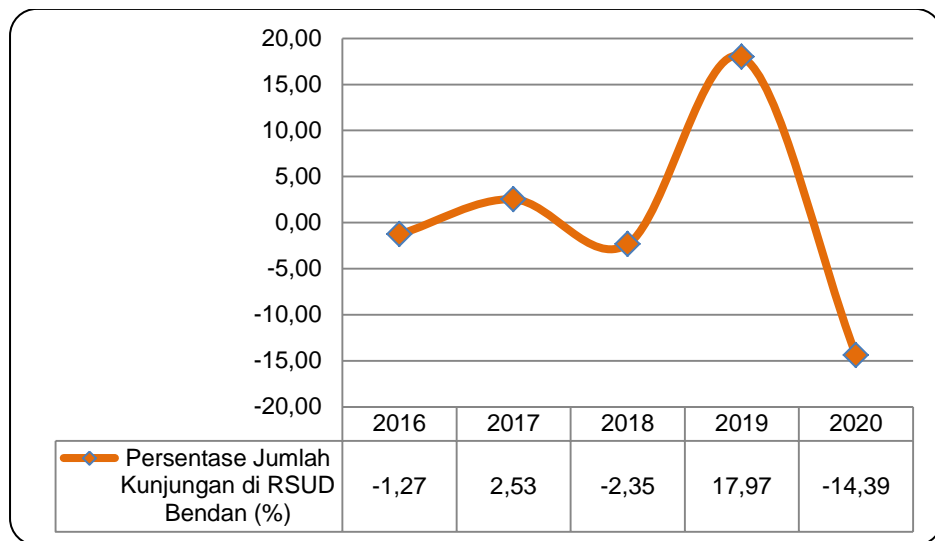
Tabel 2.50 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020

Uraian	2019	2020
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPSTSP)	544	698
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *Covid-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *Covid-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -14,39 persen. Secara rinci disajikan dalam gambar 2.34 berikut.



Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020

Sumber : RSUD Bendan, 2021

Jumlah Kunjungan pasien pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan adanya pengembangan pelayanan di RSUD Bendan. Namun sejak terjadinya Pandemi *Covid-19* secara global termasuk Kota Pekalongan mulai bulan Maret 2020 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *Covid-19* secara signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rasio kunjungan pasien di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar -14,39 persen.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	364	50	161	102	61
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	420	60	208	115	68
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	86,67	83,33	77,40	88,70	89,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai

dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2020 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 53,40 persen. Angka ini sudah memenuhi presentase yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 47 persen. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (persen)
2016	1.996	1.731	86,72
2017	5.066	2.168	42,80
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan 2020 sebesar 0,16 persen. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada penurunan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 35 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.53 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2016	37	23.468	0,16
2017	31	22.933	0,14
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) disajikan dalam tabel 2.54 berikut.

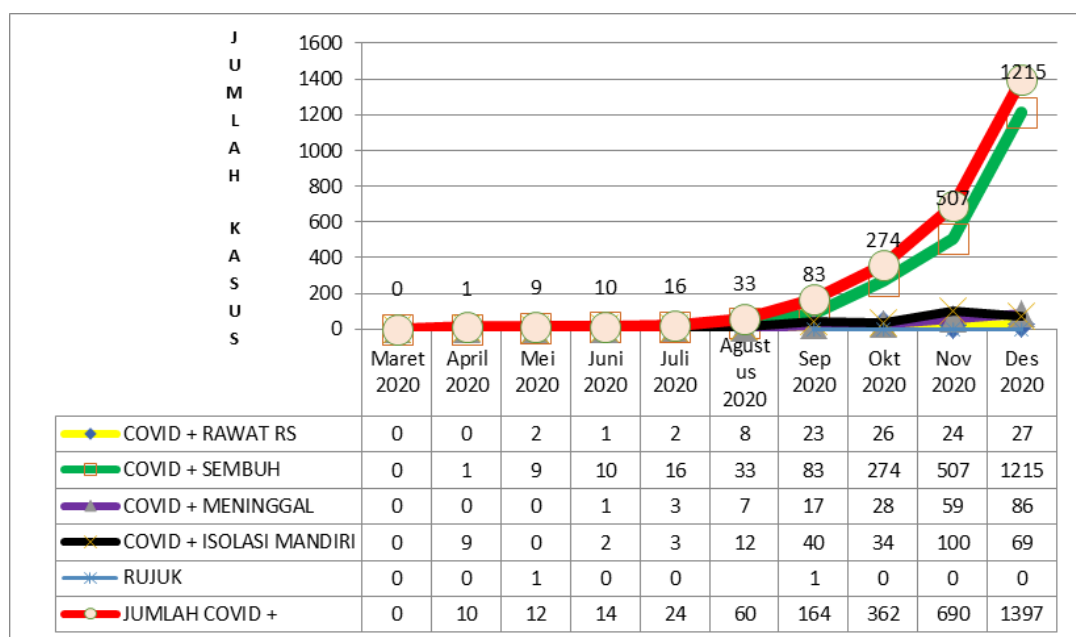
Tabel 2.54 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2016	15,56	0,00	5,33	193,97	14	14
2017	14,42	4,55	5,9	214,72	32	16
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Pandemi *Covid-19* yang melanda secara global termasuk Kota Pekalongan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini sangat berpengaruh pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Indonesia terus mengalami peningkatan tajam dalam jumlah *Covid-19* kasus di berbagai provinsi dan kabupaten dalam beberapa bulan terakhir. Penyebaran virus *Covid-19* juga terjadi di Kota Pekalongan. Data penderita *Covid-19* bersifat fluktuatif yang mengalami perubahan setiap hari.



Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran Covid-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), 2021

Secara umum Pandemi *Covid-19* di Kota Pekalongan naik secara signifikan. Persebaran kasus *Covid-19* mulai terkonfirmasi pada bulan April 2020 sejumlah 10 kasus. Terhitung sampai bulan Desember 2020 ada 1.397 kasus jumlah orang yang sudah terjangkit *Covid-19*. Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 27 dirawat RS, 1.215 kasus sudah sembuh, 86 kasus meninggal, dan isolasi mandiri 69 kasus.

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan / atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	249	105	161	2.008	648
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	270	135	208	2.104	654
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	92,22	77,78	77,40	95,44	99,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat dapat dilihat dalam Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	825	772	770	606	609
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	869	826	849	658	664
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	94,94	93,46	90,69	92,10	91,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

I. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun kembali melonjak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22.160 orang. Dan pada kenyataannya penerima BPJS Kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2020 adalah PBI APBN sebanyak 88.685 jiwa dan Jamkesda sebanyak 70.307 jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) disajikan dalam tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2016	299.222	23.650	77.379	25,86	36.060	12,05
2017	301.870	22.510	77.464	25,66	50.621	16,77
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu :

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;

- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tersebut menunjukkan bahwa hingga Bulan Maret 2019 pendataan PIS-PK dinilai masih rendah. Dari jumlah 97.594 jumlah KK hanya 59.593 KK yang telah dilakukan pendataan PIS-PK atau sekitar 61 persen. Dari jumlah 59.593 KK yang didata, angka IKS baru mencapai 0,16 persen. Sedangkan angka ideal IKS yaitu 0,8 persen dari jumlah data.

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2017 dan 2018 meningkat cukup signifikan. Dari target 75,20 persen di tahun 2017, terealisasi 83,51 persen, dan target 75,40 persen di tahun 2018, terealisasi 96,34 persen, namun pada tahun 2019 menurun 94,60 persen dan meningkat kembali ditahun 2020 dengan realisasi 96,78 persen. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2016	92,66
2017	83,51
2018	96,34
2019	94,60
2020	96,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2016-2020, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Perubahan panjang jalan Negara terjadi mulai tahun 2017, dimana sebelumnya 10,37 Km berkurang menjadi 9,090 Km. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kembali bertambah menjadi 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen.

Tabel 2.59 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2016–2020

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	10,73	10,73	0	0	100	0	0
2017	9,090	8,585	0,505	0	94,44	5,56	0
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami perubahan seiring bertambahnya panjang jalan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi maupun penambahan ruas jalan kota. Pada tahun 2016 panjang jalan kota semula 140,49 km berubah menjadi 153,41 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 sepanjang 104,71 km. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	140,49	108,29	12,92	19,27	77,08	9,20	13,72
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan

penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.61.

Tabel 2.61 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun (tahun 2016 sampai dengan tahun 2018). Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 76,43 persen, tahun 2019 menurun menjadi 70,43 persen dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	76,43	76,43	76,43	70,43	66,14

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2016-2020, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen berkurang dari tahun 2014 sebesar 40 persen. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sempadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

c. Drainase

Selain saluran irigasi, yang setiap tahunnya menjadi perhatian pemerintah adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 sepanjang 31.715 meter, terdiri dari saluran drainase primer dan sekunder. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- 1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremsi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
- 2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
- 3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremsi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 15.287 meter, kondisi rusak sepanjang 7.534 meter dan kondisi sebagian rusak sepanjang 8.894 meter.

Tabel 2.64 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2020

FUNGSI	KONDISI			Jumlah (meter)
	Baik (meter)	Sebagian Rusak (meter)	Rusak (meter)	
Sekunder	7.317	6.284	5.838	19.439
Primer	7.970	2.610	1.696	12.276
Total	15.287	8.894	7.534	31.715

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan ditunjukkan dalam Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan	Luas Genangan	Persentase
2016	4.525 Ha	1.870 Ha	41,33
2017	4.525 Ha	1.396 Ha	30,85
2018	4.525 Ha	1.391 Ha	30,75
2019	4.525 Ha	1.057 Ha	23,35
2020	4.642 Ha	1.730 Ha	37,27

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen

- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Revetment (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan *long storage* sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan

penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi :

- a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
- b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
- d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
- f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
- g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
- h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,40	18,40	18,60	18,60	18,60
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,2	0,3	0,16	0,17	0,17

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	95	96	98	98	98

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,6 persen dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020 dari 0,2 pada tahun 2016 menjadi 0,17 pada tahun 2020. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2016-2020. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2016 sebesar 95 persen. Namun secara kinerja pada akhir tahun 2018, 2019 dan 2020 membaik menjadi 98 persen.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 30/2011 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	Kawasan Lindung			
1.	Jalur Hijau Sepanjang Pantai	39,31	1,07	38,24
2.	Jalur Hijau Sepanjang Sungai	153,95	48,16	105,79
3.	TPU	32,07	1,56	30,50
4.	Taman Kota	28,17	4,54	23,64
B	Kawasan Budidaya			
1.	Perkantoran Pemerintah	7,34	0,67	6,66
2.	Perkantoran Swasta	5,51	0	5,51
3.	Peruntukan Industri	103,30	0	103,30
4.	Peruntukan Pariwisata	42,68	17,17	25,51
5.	Perdagangan dan jasa	538,08		538,08
6.	Perikanan Tangkap	82,03	4,55	77,48
7.	Perikanan Budidaya	277,54	11,20	266,34
8.	Pertanian	1116,31	54,41	1061,90
9.	Perumahan Kepadatan Rendah	1033,31	17,26	1016,05
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	1020,29	15,55	1004,74
11.	Perumahan Kepadatan Tinggi	8,26	0	8,26
12.	RTNH	37,14	2,15	34,99
	Luas Total (Ha)	4525,28	178,29	4346,99
	Persentase (%)		3,94	96,06

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2016 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 8,68 persen, setara dengan 6.448 unit rumah. Tahun 2016-2020 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun, artinya kondisi ini semakin membaik. Pada tahun 2016 sebesar 8,68 persen menjadi 2,57 persen pada tahun 2020. Perkembangan rumah tidak layak huni dan rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat di Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2016	74.313	6.448	8,68	67.865	91,32
2017	74.970	5.159	6,88	69.811	93,12
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Selain data tentang rumah tidak layak huni dan rumah layak huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. secara lengkap, kebutuhan rumah (*backlog*) disajikan dalam tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Data Kebutuhan Rumah (Backlog) di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kecamatan	Backlog Kepemilikan	Backlog Penghunian
Pekalongan Barat	7271	6513
Pekalongan Timur	5281	4813
Pekalongan Utara	6267	5849
Pekalongan Selatan	4020	3825

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

b. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 85,89 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 88,79 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan.

Tabel 2.71 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	257.002	255.724	265.430	272.090	272.718
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	85,89	84,71	87,18	88,60	88,79

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

Sementara itu berdasarkan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Nilai Daya Dukung Air Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,81 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

c. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44 persen pada tahun 2019. Namun persentase pengguna listrik menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 113,07 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel 2.72 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penduduk Bersanitasi

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Perkembangan penduduk bersanitasi di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel 2.73 berikut.

**Tabel 2.73 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Bersanitasi (jiwa)	276.810	284.029	297.839	305.009	304.969
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Rasio Penduduk Bersanitasi (persen)	92,51	94,09	97,82	99,32	99,29

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan sebesar 92,51 persen dan pada tahun 2020 mencakup 99,29 persen.

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 185,89 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 9,7 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2017-2020.

**Tabel 2.74 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan
sampai dengan Tahun 2020**

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (persen)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2020 (persen)	Sisa Kumuh Sd 2020 (persen)
			2017	2018	2019	2020		
1	Padukuhan Kraton	30,84	9,95	10,83	5,31	3,93	30,02	0,82
2	Bandengan	23,92	3,32	15,28	2,95	0	21,55	2,37
3	Panjang Baru	40,85	6,27	20,78	11,08	0,52	38,65	2,20
4	Panjang Wetan	13,85	5,52	6,06	1,84	0,28	13,70	0,15
5	Krapyak	11,90	7,55	3,32	0,63	0	11,50	0,40
6	Kandang Panjang	28,22	5,53	18,99	0,56	3,14	28,22	0,00
7	Tirto	3,70	0,47	0,24	2,06	0	2,77	0,93
8	Poncol	9,21	3,05	4,29	1,67	0	9,01	0,20
9	Pasirkratonkramat	22,46	2,83	17,25	0,00	0	20,08	2,38
10	Banyurip	6,78	0,80	5,73	0,00	0	6,53	0,25
11	Klego	2,89	0,29	2,60	0,00	0	2,89	0,00
12	Degayu	0,17	0,00	0,17	0,00	0	0,17	0,00
13	Jenggot	0,80	0,00	0,80	0,00	0	0,80	0,00
	Total	195,59	45,58	106,34	26,10	7,87	185,89	9,70

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 0,77 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,76 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat cukup tajam untuk rasio menjadi 1,31 atau 40 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,91 atau 28 personel dan mengalami penurunan rasio kembali di tahun 2020 sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2016 untuk ratio sebesar 3,44 atau 103 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 4,17 atau 126 personil, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,58 atau 109 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan kembali menjadi 3,45 atau 106 personil dan pada tahun 2020 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 120 personil setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 4,21 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 4,94 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlahnya masih sama dengan tahun 2017 yaitu 149 personil. Tetapi rasionya menurun menjadi 4,89 per 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan menjadi 4,36 personel per 10.000 penduduk dan pada tahun 2020 rasionya mengalami kenaikan menjadi 4,79 personel per 10.000 penduduk.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2016	23	0,77	103	3,44	126	4,21	299.222
2017	23	0,76	126	4,17	149	4,94	301.870
2018	40	1,31	109	3,58	149	4,89	304.477
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2016 pelanggaran Perda sebanyak 1.337 kasus, dan pada tahun 2017 melonjak menjadi 2.003 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pelanggaran Perda dapat ditekan menjadi 1.382

kasus dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pelanggar Perda sebanyak 1.782 kasus. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.76 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2016	1.337	1.217	91,02
2017	2.003	1.883	94,01
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2016 adalah 48,36 atau 1.447 personil dan pada tahun 2020 turun menjadi 47,27 atau 1.452 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 1,04 atau 31 personil. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan rasio sebesar 1,14 atau 35 personil per 10.000 penduduk.

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2016	1.447	48,36	299.222	31	1,04
2017	1.533	50,78	301.870	35	1,16
2018	1.417	46,54	304.477	35	1,15
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berjumlah 432 pos siskamling, meningkat menjadi 514 pada tahun 2017 dan 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 441 pos.

Tabel 2.75 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2016	432	27	16
2017	514	27	19
2018	514	27	19
2019	441	27	16
2020	441	27	16

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2020 adalah 20 panti, bertambah 12 Panti dibandingkan tahun 2019. Namun untuk jumlah anak yang diasuh juga lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2016-2020) disajikan dalam tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2016	9	260
2017	7	237
2018	7	545
2019	8	354
2020	20	1.052

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2020 jumlah PMKS adalah 27.499 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 22.683 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) disajikan dalam tabel 2.79 berikut.

**Tabel 2.79 Kategori dan Jumlah PMKS
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	254	105	12	3	-
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	942	337	21	164	145
Wanita Rawan Sosial	865	361	827	-	8
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	4.545	-	-	-	-
Anak Nakal	51	69	50	-	98
Korban Penyalahgunaan Narkoba	74	67	6	2	-
Penyandang Cacat :	966	1.142	343	535	1.354
- Tubuh	297	316	110	357	234
- Netra	170	174	58	103	107
- Mental	328	449	132	-	429
- Ganda	30	56	12	-	484
- Wicara	141	147	31	75	100
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	542	-	-	-
Gelandangan	-	16	-	-	3
Tuna Susila	-	-	-	-	-
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	-	87	30	3	1
Bencana Alam	-	-	2.623	-	3107
Fakir Miskin	115.796	75.839	63.829	24.116	22.683
Jumlah	124.459	79.707	67.741	24.823	27.499

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2020 untuk organisasi sosial berjumlah 20 organisasi, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS sebanyak 5 orang dan jumlah PSM sebanyak 63 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap disajikan dalam tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	0	9	6	0
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	87	87	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	288	288	88	53	63
Karang Taruna	27	32	91	32	32
Organisasi Sosial	8	7	7	9	20

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date. Untuk mendapatkan

data yang up to date tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2020.

Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436

Sumber : Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan Rumah Tangga Sasaran sebanyak 336 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 29.282 RTS dan penurunan Anggota Rumah Tangga Sasaran dari 112.613 jiwa pada tahun 2019 menjadi 108.436 jiwa pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya intervensi penanggulangan kemiskinan yaitu melalui program pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan keberlanjutan UMKM dan adanya sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan lintas program dan lintas sektor.

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan *Social-Next Generations* (SIKS-NG), jumlah rumah tangga miskin di Kota Pekalongan tahun 2019 sebanyak 33.282 rumah tangga, terdiri dari desil 1 sebanyak 20.807 rumah tangga, desil 2 sebanyak 6.246 rumah tangga, desil 3 sebanyak 1.583 rumah tangga, desil 4 sebanyak 1.299 rumah tangga, desil 4+ sebanyak 1.335 rumah tangga, dan tanpa desil sebanyak 2.012 rumah tangga.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke

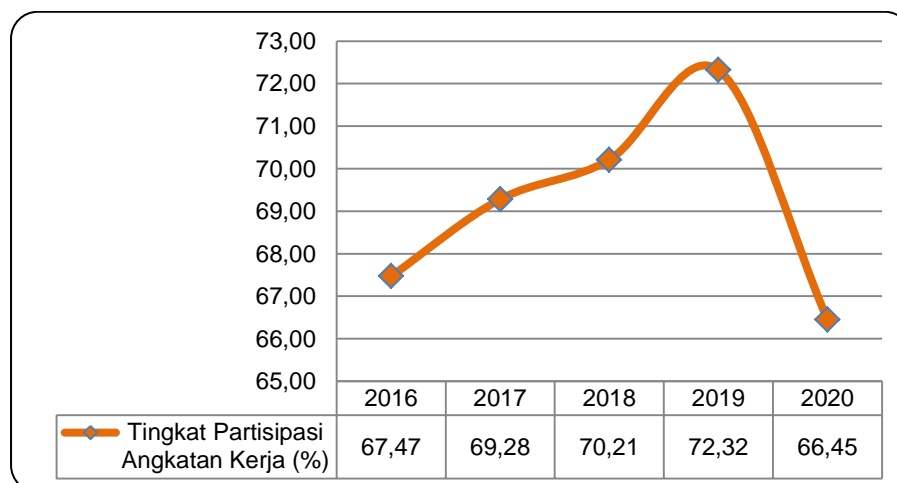
atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2016 s.d. 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 157.260 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2016	149.507	67,47
2	2017	157.445	69,28
3	2018	161.502	70,21
4	2019	168.339	72,32
5	2020	157.260	66,45

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari 67,47 persen di tahun 2016 menjadi 72,32 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,45 persen. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) menurun.



Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : jateng.bps.go.id, 2021

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2016	11	368	2,99
2017	13	382	3,40
2018	13	365	3,60
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2020 sebesar 66,45 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan berakhir tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, begitu juga dengan AKAD dan AKAN memiliki nilai yang berfluktuasi. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2016	58	3	20
2017	104	33	200
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24

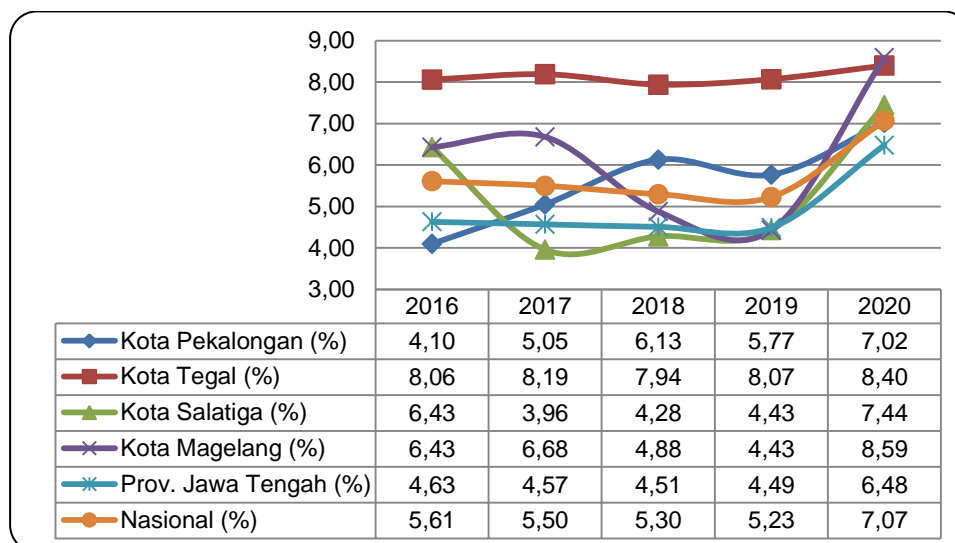
Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar 7,02 persen atau meningkat 1,25 poin dari tahun 2019, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

Nilai TPT mengalami kenaikan yang disebabkan terjadinya pandemi *Covid-19* menyebabkan banyak tempat usaha gulung tikar. Sedangkan faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi

wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.



Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Pada tahun 2016, TPT Kota Pekalongan memiliki nilai dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tetapi pada tahun 2017 melonjak melampaui TPT Provinsi Jawa Tengah bahkan pada tahun 2020 melampaui TPT Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT Kota Pekalongan masih berada di bawahnya, tetapi lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan penerapan K3 perusahaan di Kota Pekalongan, mulai dari 300 perusahaan di tahun 2016 hingga meningkat menjadi 410 perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2018, namun sangat menurun di tahun 2019 menjadi 319 perusahaan dan 360 perusahaan di tahun 2020. Jika dilihat dari sisi persentase akan terlihat fluktuatif dan puncaknya pada tahun 2017 sebesar 96,86 persen. Fluktuasi ini dikarenakan jumlah perusahaan yang juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2016	300	368	81,52
2017	370	382	96,86
2018	410	425	96,47
2019	319	376	84,84
2020	360	416	86,54

Sumber : Diperinaker Kota Pekalongan, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun n dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun n. Tahun 2019 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.616 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 66.690.

Tabel 2.86 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

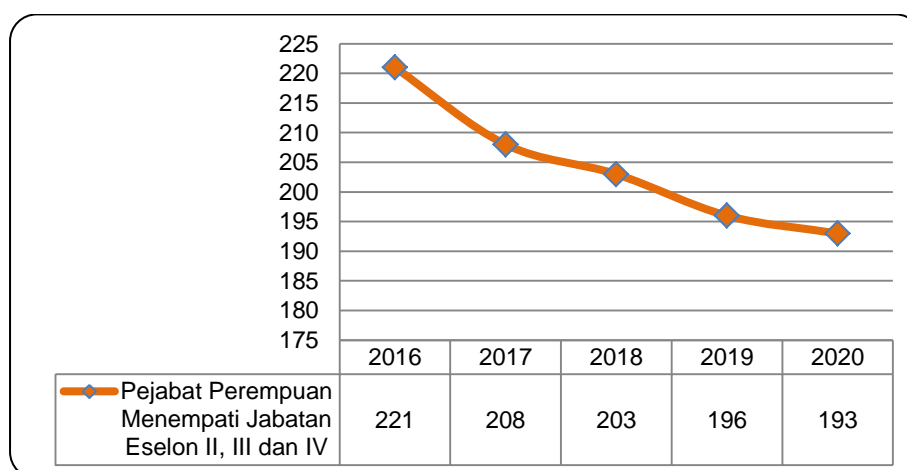
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.007	1.621	1.540	2.322	1.616
Jumlah pekerja perempuan (org)	56.536	9.799	9.870	45.571	66.690
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	3,55	16,54	15,60	5,10	2,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 2.322 orang pada tahun 2019 menjadi 1.616 orang pada tahun 2020.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 terus menurun. Pada tahun 2016 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 208 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 193 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.38 berikut.



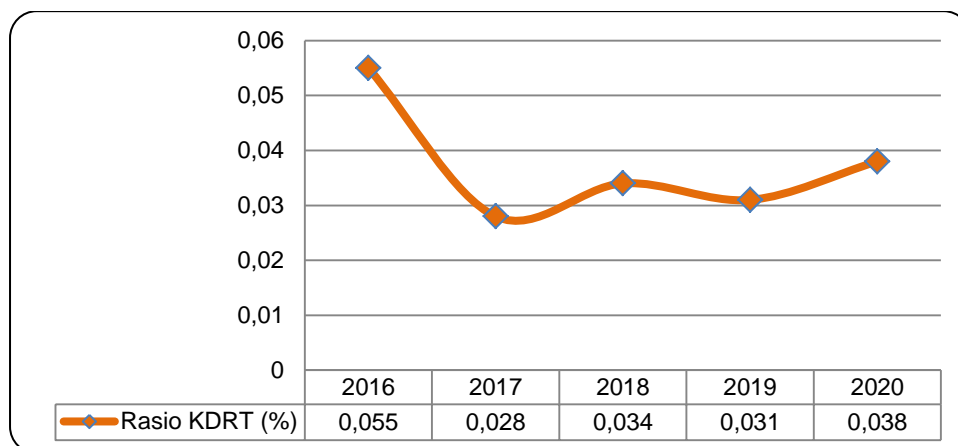
Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio KDRT mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukkan indikasi yang semakin baik. Rasio KRDT terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka rasio 0,031 persen.

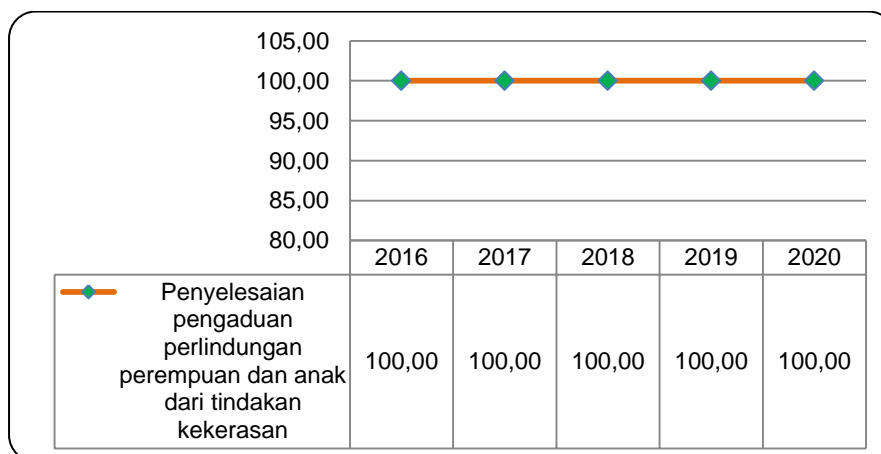


Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KRDT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2018, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama dengan nilai 565 dari nilai maksimal 1000. Upaya terus ditingkatkan, salah satunya adalah fokus pada sarana dan prasarana mengenai informasi layak anak seperti baliho, dan sebagainya. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2019 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berupaya serius untuk mengejar peringkat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional. Komitmen ini dibuktikan dengan dibukanya layanan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP PKSAI) yang akan bertugas melakukan penjangkauan kepada anak-anak rentan di Kota Pekalongan. Dengan berdirinya UP PKSAI ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah membangun mekanisme layanan terpadu bagi anak di tingkat masyarakat.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu : (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.87 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	6.855.003	299.222	22,91
2017	7.382.286	301.870	24,46
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada tabel 2.87 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016-2017 ketersediaan pangan utama mengalami kecenderungan naik, dari 6.855.003 di tahun 2016 menjadi 7.382.286 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 5.860.781 dan pada tahun 2019 dan 2020 lebih menurun lagi menjadi 5.400.416 dan 4.769.190. Secara otomatis persentase ketersediaan pangan juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan, yaitu meningkat pada tahun 2016-2017 dan semakin menurun pada tahun 2018-2020.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif

terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir terus membaik. Skor PPH Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik pada tahun 2016-2020. Jika skor PPH tahun 2016 sebesar 88,70 maka pada tahun 2020 semakin naik menjadi 92,01. Capaian skor PPH disajikan dalam tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2016	88,70
2017	89,71
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 sebesar 108,7 kg per kapita/tahun. Begitu pula dengan sayur dan buah bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, yaitu 82,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 70,0 kg per kapita/tahun pada tahun 2020. Di urutan ketiga ditempati kelompok pangan hewani (45 kg/kapita/tahun tahun 2019) dan menurun menjadi 36,8 kg perkapita/tahun pada tahun 2020, selanjutnya diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kg/Kap/th	101,5	107,0	98,8	102,0	108,7
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,0	16,5	16,5	18,8	7,9
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	38,3	40,2	47,0	45,0	36,8
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	17,2	12,2	11,8	5,7	6,6
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	3,5	2,6	2,8	2,3	0,8
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	13,8	19,0	18,0	23,5	8,4
Gula	Kg/Kap/th	9,5	10,0	9,5	5,9	7,7
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	78,4	74,1	73,8	82,2	70,0
lain-lain	Kg/Kap/th	2,8	1,3	1,4	2,3	44,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun, konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dengan jumlah 1.006,1 kkal/kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020. Urutan berikutnya selalu berubah jenis kelompok pangannya. Pada tahun 2020, di urutan kedua ada pangan hewani sebesar 272,5 kkal/kapita/tahun,

diikuti oleh minyak dan lemak sebanyak 160,7 kkal/kapita/tahun. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1.000,8	1.055,0	974,9	1.006,1	1251,5
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	48,0	49,5	49,6	56,3	24,7
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	217,2	228,1	266,7	255,4	272,5
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	410,7	289,8	280,1	136,8	160,7
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	60,2	45,3	49,1	40,6	12,7
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	124,9	172,1	163,4	213,2	53,8
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	94,9	99,8	94,7	58,7	77,5
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	111,4	105,3	104,9	116,8	97,3
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	22,6	10,3	11,1	18,5	56,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Pertanian

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel 2.91 berikut.

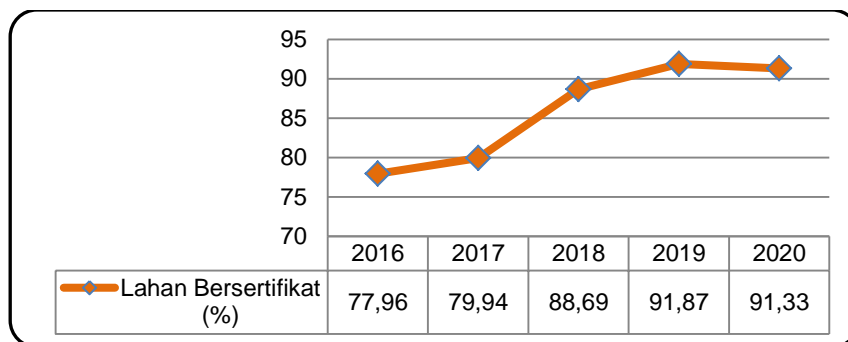
Tabel 2.91 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.525	4.642
Luas tanah bersertifikat	3.690,93	3.778,43	4.013,28	4.157,29	4.239,50
Hak Milik	2.939,78	3.013,55	3.192,36	3.320,74	3.360,02
HGB	289,49	293,52	305,94	13,21	322,95
Hak Guna Usaha	5,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Hak Pakai	394,95	403,04	444,70	451,53	481,01

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Hak Wakaf	56,96	58,57	60,5396	62,06	63,76
Lahan Bersertifikat (persen)	77,96	79,94	88,69	91,87	91,33

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat adalah 77,96 persen, dalam kurun waktu tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun sebanyak 91,33 persen dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

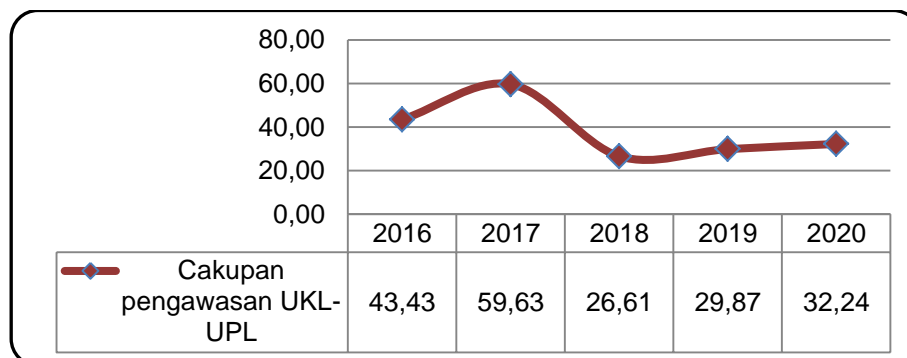


Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL mengalami pasang surut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.42.

Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 43,43 persen. Pada akhir tahun 2017, pengawasan UPL-UKL mengalami kenaikan menjadi 59,63 persen. pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 26,61 persen dan 29,87 persen. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 32,24 persen.

Peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/ atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	4	5	6	8	12
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	99	109	124	154	158
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,04	4,59	4,84	5,19	7,59

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2016-2020 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

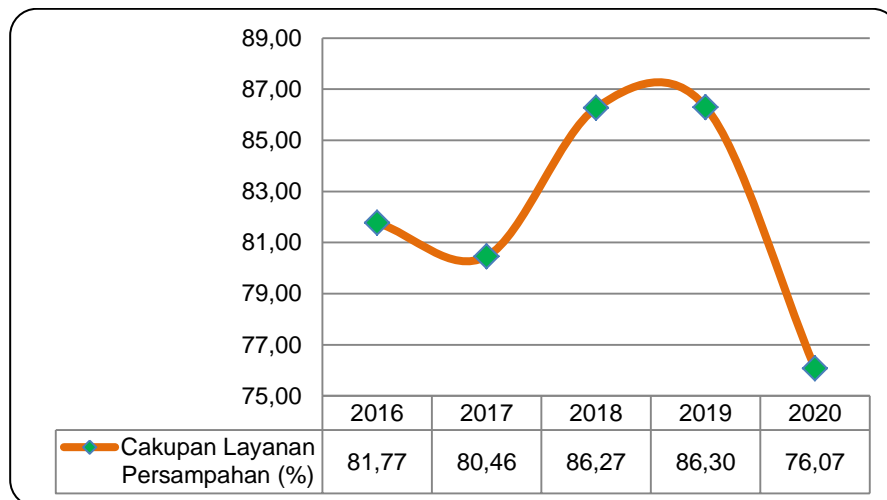
Tabel 2.93 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

IPAL	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
Kauman	29	100	26	100	29	120	20	150	20	125
Jenggot	75	400	75	400	102	700	80	700	80	600
Industri Kecil	83	425	83	426	83	426	83	426	73	426
IPAL Bersama	3	500	3	500	3	500	3	500	2	700
Industri Besar	5	700	5	700	5	700	5	900	3	500
IPAL Biogas Duwet	125	160	28	90	125	120	125	120	30	70

IPAL	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	210	7	210	7	75	-	-
IPAL Pringrejo	-	-	-	-	70	180	20	50	25	60
IPAL Banyurip	-	-	-	-	-	-	69	150	55	125
JUMLAH	327	2.495	227	2.426	424	2.956	412	3.071	288	2.606

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung tetap seperti ditunjukkan dalam gambar 2.43.



Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016 - 2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016-2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2016-2019 pengelolannya setiap hari semakin membaik.

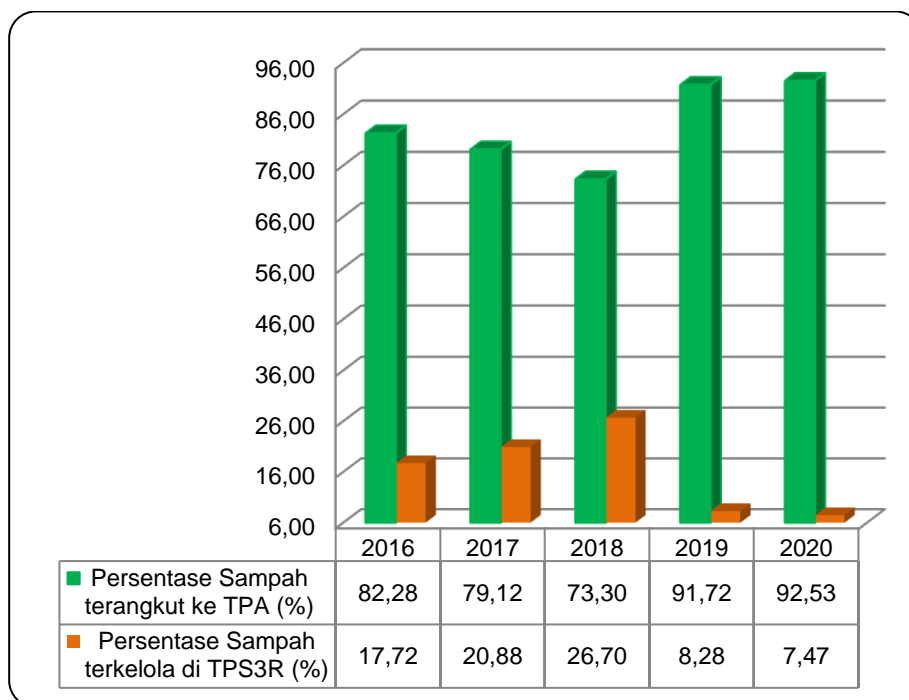
Tabel 2.94 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Data Sampah per Hari	2016		2017		2018		2019		2020	
	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%
Timbulan sampah			153.788							
Sampah terangkut ke TPA	650	82,28	530	79,12	271,87	73,30	353,93	91,72	382,19	92,53
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	140	17,72	140	20,88	99	26,70	31,97	8,28	30,87	7,47
Jml Sampah tertangani (m ³)	790	95,40	670	100	370,87	54,48	385,91	86,30	413,06	76,07

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan *control landfill*. Jarak

TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.



Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016–2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016–2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodoqoh sampah selama tahun 2016–2020 pengelolaannya setiap hari semakin menurun. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2017-2020 yang disajikan dalam tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	44,67	99,29	23,5	52,59
2018	46,00	98,82	23,5	52,85
2019	46,00	99,05	23,5	52,92
2020	35,33	79,96	23,6	50,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami tren naik 0,165 setiap tahunnya, jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH,

sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84, kondisi ini dikarenakan terjadinya penurunan pada komposisi IKA dan IKU.

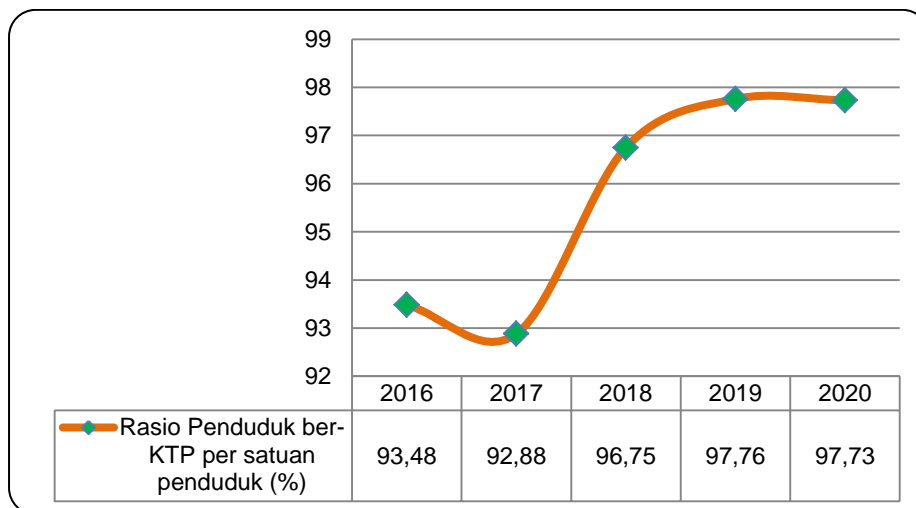
Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (grey water) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Sementara itu Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2019 masih sama dengan nilai IKTL yang sangat kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.



Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2020 telah melaksanakan perekaman KTP-el mencapai 227.268 jiwa (97,73 persen) dan

kepemilikan KTP-el telah mencapai 227.268 jiwa (97,76 persen) dari target wajib KTP-el sebesar 232.540 jiwa.

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

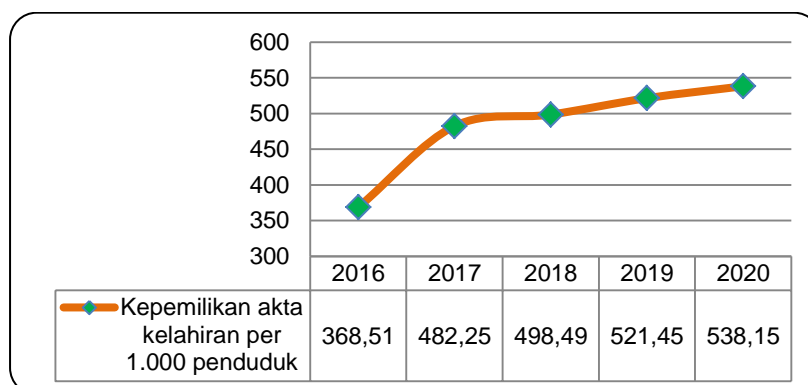
Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK (persen)
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2016 sampai dengan 2020 ditunjukkan dalam gambar 2.46.



Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terakhir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 1.133 akta, pada tahun 2017 diterbitkan sebanyak 1.473 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220 akta sebagaimana disajikan dalam tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2016	1.133
2017	1.473
2018	2.691
2019	2.797
2020	3.220

Sumber : Dindukcapi Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

Tabel 2.98 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2016	62
2017	43
2018	60
2019	46
2020	45

Sumber : Dindukcapi Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan

tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 sampai sekarang dikarenakan penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah LPM
2016	27
2017	27
2018	27
2019	27
2020	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2016 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Tabel 2.100 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2016	32
2017	32
2018	32
2019	32
2020	32

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2020 terdapat tambahan 3 Posyandu dari 411 pada tahun 2019 menjadi 414 ditahun 2020. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2016	406
2017	407
2018	409
2019	411
2020	414

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, BPS Kota Pekalongan, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2016 - 2017 terus mengalami penurunan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin berkurang. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 kembali meningkat di diatas 27.000 orang. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.102 berikut.

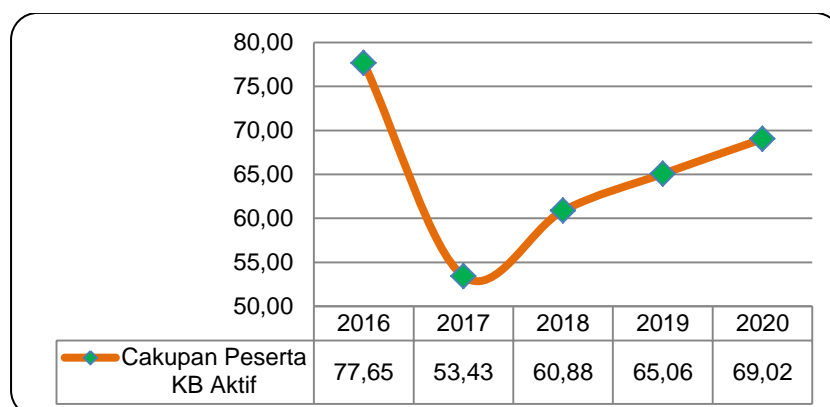
Tabel 2.102 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2016	45.805	35.570	77,65
2017	44.965	24.027	53,43
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif sebagaimana Gambar 2.47 berikut.



Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2016	77.747	55.032	70,78
2	2017	77.575	46.478	59,91
3	2018	77.817	44.487	57,71
4	2019	80.653	41.938	51,99
5	2020	80.840	38.563	47,70

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Hal ini berdampak pada meningkatnya VC ratio yang semula sebesar 0,87 di tahun 2016, meningkat menjadi 0,88 di tahun 2017. Pada tahun 2018, VC ratio mengalami penurunan menjadi 0,39, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah operasional jalan tol trans Jawa. Dengan adanya jalan tol yang pada saat itu masih dalam tahap uji coba dan tidak dikenakan biaya, banyak kendaraan yang lebih memilih menggunakan jalan tol dibandingkan menggunakan jalan kota sehingga VC ratio menurun. Setelah tol trans Jawa secara resmi beroperasi pada tahun 2019 dan dikenakan biaya, sebagian kendaraan yang

semula menggunakan jalan tol beralih melewati jalan kota, sehingga VC ratio meningkat menjadi sebesar 0,45.

Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.104 berikut.

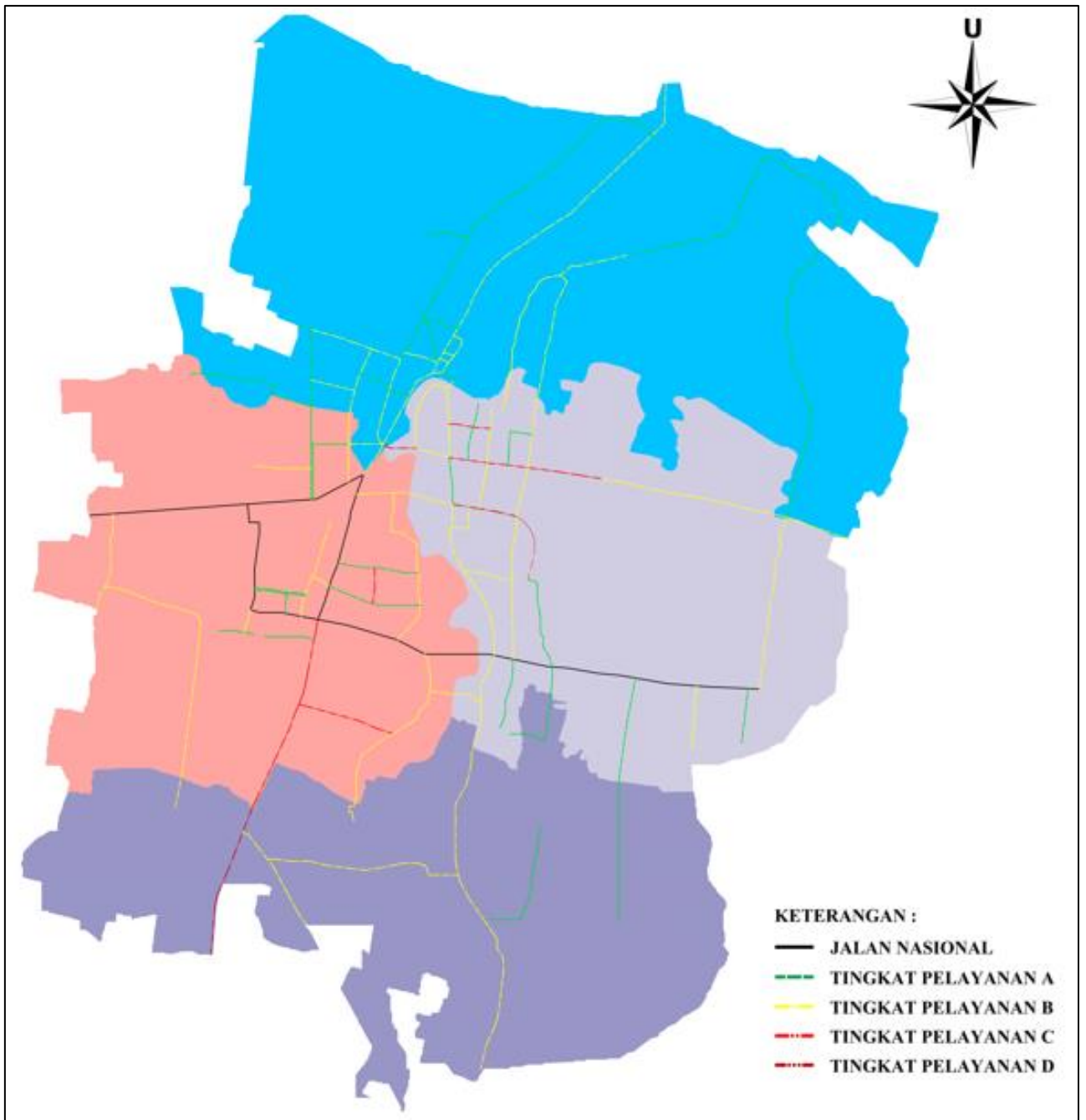
Tabel 2.104 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatakan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta tingkat pelayanan jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam gambar 2.48 berikut.



Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan gambar diatas, kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan yang diukur dari tingkat pelayanan disajikan dalam tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Ahmad Yani	Jl. Angkatan 45	Jl. Bandung	Jl. Dr. Cipto
Jl. Asem Binatur	Jl. Angkatan 66	Jl. Kalimantan	Jl. Gatot Subroto
Jl. Bahagia	Jl. Argopuro	Jl. Karya Bhakti	-
Jl. Barito	Jl. Belimbing	Jl. Manggis	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Cempaka	Jl. Cenderawasih	Jl. Melati	-
Jl. Hasanudin	Jl. Dharma Bhakti	Jl. P. Kemerdekaan	-
Jl. Indragiri	Jl. Diponegoro	Jl. Pintas Sapuro	-
Jl. Interchange Duwet	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	Jl. Semarang	-
Jl. Jawa	Jl. Dr. Wahidin	Jl. Seruni	-
Jl. Jeruk	Jl. H. Agus Salim	Jl. Tondano	-
Jl. Kenanga	Jl. Hayam Wuruk	Jl. Urip Sumoharjo	-
Jl. KH. Hasyim Ashari	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-
Jl. Ki Hajar Dewantara	Jl. Imam Bonjol	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Irian	-	-
Jl. Labuan	Jl. Jetayu	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. Mataram	Jl. Kemakmuran	-	-
Jl. Merak	Jl. KH. Ahmad Dahlan	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Pramuka	Jl. Kurinci	-	-
Jl. Raden Saleh	Jl. Letjen Suprpto	-	-
Jl. Samudera Pasai	Jl. Maninjau	-	-
Jl. Sumatera	Jl. Manunggal	-	-
Jl. Surabaya	Jl. Merpati / Parkit	-	-
Jl. Tentara Pelajar	Jl. Nusantara	-	-
Jl. Trikora	Jl. Parang Garuda Raya	-	-
Jl. Tritura	Jl. Patriot	-	-
-	Jl. Pattimura	-	-
-	Jl. Pelita III	-	-
-	Jl. Progo	-	-
-	Jl. R.A Kartini	-	-
-	Jl. Salak	-	-
-	Jl. Sulawesi	-	-
-	Jl. Sultan Agung	-	-
-	Jl. Sunan Ampel	-	-
-	Jl. Supriyadi	-	-
-	Jl. Tembus Hos Cokro	-	-
-	-	-	-
-	Jl. Teratai	-	-
-	Jl. Truntum	-	-
-	Jl. Untung Suropati	-	-
-	Jl. Veteran	-	-
-	Jl. Wachid Hasyim	-	-
-	Jl. WR. Supratman	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota serta tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa yang terbatas, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya jalan lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/ atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,00028. Hal ini memiliki makna 2,8 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 sebesar 0,00032 mengalami kenaikan atau 3,2 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 stagnan di angka 0,00032 atau 3,2 izin per 10.000 penduduk dan di tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00031 atau 3,1 izin per 10.000 penduduk.

Tabel 2.106 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2016	83	299.222	0,00028
2017	97	301.870	0,00032

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2018	97	304.477	0,00032
2019	97	307.097	0,00032
2020	95	307.150	0,00031

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No : SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (*load factor*) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai *load factor* antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai *load factor* lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai *load factor* kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai *load factor* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan *load factor* angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dikisaran 30 persen sampai 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan *online*, sehingga *load factor* angkutan kota kurang dari 70 persen.

Tabel 2.107 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Faktor Muat (<i>Load Factor</i>) (persen)	30	33	35	37	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2017 berjumlah 1.912.577 orang dan naik di tahun 2018 menjadi 1.938.614 orang, Pada tahun 2019 turun sebesar 1.876.174 orang dan kembali turun ditahun 2020 menjadi 771.497 orang. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi,

juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP di tahun 2017 berjumlah 377.428 unit dan menurun di tahun 2018 menjadi 339.637 unit. Per tahun 2019, jumlah otobis berjumlah 294.470 unit dan tahun 2020 berjumlah 125.162 unit, sehingga dapat dikatakan bahwa persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Otobis AKAP AKDP	600	377.428	339.637	294.470	125.162
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	n/a	1.912.577	1.938.614	1.876.174	771.497
Persentase Angkutan Darat	n/a	19,8	17,6	15,7	16,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2020 kembali menurun. Pada tahun 2016, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 743 kendaraan. Tahun 2017 meningkat menjadi 800 kendaraan, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 788 kendaraan dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 829 kendaraan dan menurun di tahun 2020 sebesar 817 kendaraan.

Tabel 2.109 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	743	800	788	829	817
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	3.785	3.902	4.002	4.166	4.267
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	19,63	20,50	19,69	19,90	19,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendara ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi

pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (*Smoke Tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan *Pit Lift* dan *Play Detector*, uji lampu utama; uji *side slip*; uji *axle load*; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam tabel 2.110.

Tabel 2.110 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Pengujian (Menit)	20	20	30	30	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2016-2020 tidak ada kenaikan yaitu Rp.40.000.

Tabel 2.111 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 424 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir off street (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.112 berikut.

Tabel 2.112 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah parkir yang berizin	326	344	361	418	419
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	17	15	14	16	15

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah seluruh parkir	343	359	375	434	434
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	95,04	95,82	96,27	96,31	96,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengendara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakit dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *Covid-19* yang berdampak pada *refocusing* anggaran.

Tabel 2.113 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	21	95	141	2	33
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	321	300	290	150	100
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	6,54	31,67	48,62	1,33	33,00
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	5	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	20	15	15	10	10
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	2	1	1	2	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	8	6	5	4	2
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	25,00	16,67	20,00	50,00	0,00
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	4	0	0

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	14	14	14	10	10
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	27 lokasi	20 lokasi	25 lokasi	13 lokasi	12 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	18,00	13,33	16,67	8,67	8,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.114 berfluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Perkembangan dari tahun 2016-2019 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, karena pandemi *Covid-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah.

Tabel 2.114 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2016	537.704
2017	585.215
2018	821.085
2019	863.851
2020	271.920

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

Tabel 2.115 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	9	9	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	155,44	155,44	155,44	155,44	153,41
Jumlah Kejadian Kecelakaan	121	60	91	122	121
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,78	0,39	0,59	0,78	0,79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel 2.117 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Korban Kecelakaan	149	77	116	145	142
Luka-luka	113	54	86	117	134
Meninggal Dunia	36	23	30	28	8
Jumlah Penduduk	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	12,03	7,62	9,85	9,12	2,60

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi

berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	BAPPEDA	1000	Informatif
2	BKPPD	995	Informatif
3	DPMPTSP	980	Informatif
4	DINSOS P2KB	976	Informatif
5	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	970	Informatif
6	DINKOMINFO	950	Informatif
7	RSUD BENDAN	940	Menuju Informatif
8	DPMPPA	910	Menuju Informatif
9	KESBANGPOL	910	Menuju Informatif
10	BPBD	849	Menuju Informatif
11	DINPERPA	824	Menuju Informatif
12	DLH	809	Menuju Informatif
13	DPUPR	796	Cukup Informatif
14	DINDAGKOP UKM	769	Cukup Informatif
15	DINPERINAKER	769	Cukup Informatif
16	DINPERKIM	764	Cukup Informatif
17	DINARPUS	755	Cukup Informatif
18	SATPOL PP	682	Cukup Informatif
19	DINDUKCAPIL	677	Cukup Informatif
20	DINKES	664	Cukup Informatif
21	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	642	Cukup Informatif
22	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	610	Cukup Informatif
23	DKP	606	Cukup Informatif
24	INSPEKTORAT	600	Cukup Informatif
25	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	579	Cukup Informatif
26	DINPARBUDPORA	548	Cukup Informatif
27	SETDA	526	Cukup Informatif
28	DINDIK	516	Cukup Informatif
29	SEKRETARIAT DPRD	512	Cukup Informatif
30	BKD	455	Kurang Informatif
31	DINHUB	417	Kurang Informatif

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana tabel 2.119 berikut.

**Tabel 2.119 Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SIM	53	55	76	92	107

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat <http://pusaka.pekalongankota.go.id>. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 di Kota Pekalongan sebanyak 80 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.120 berikut.

**Tabel 2.120 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jaringan telepon genggam	12	12	12	7	7
Stasioner	84	84	80	80	80
Rasio jaringan komunikasi	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Keterangan : jaringan telepon genggam : Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan

Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Surat Kabar	10	10	15	15	15

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyiaran Radio	10	13	14	17	8
Jumlah Penyiaran TV	15	15	16	20	20

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2016-2020 semakin menurun. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 14.271 orang. Jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 15.096 orang. Namun jumlah tersebut menurun secara signifikan di tahun 2019 menjadi 10.531 orang dan 11.254 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.123.

Tabel 2.123 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2016	14.271	74.313	19,20
2017	14.671	74.970	19,57
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81
2020	11.254	84.296	13,35

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

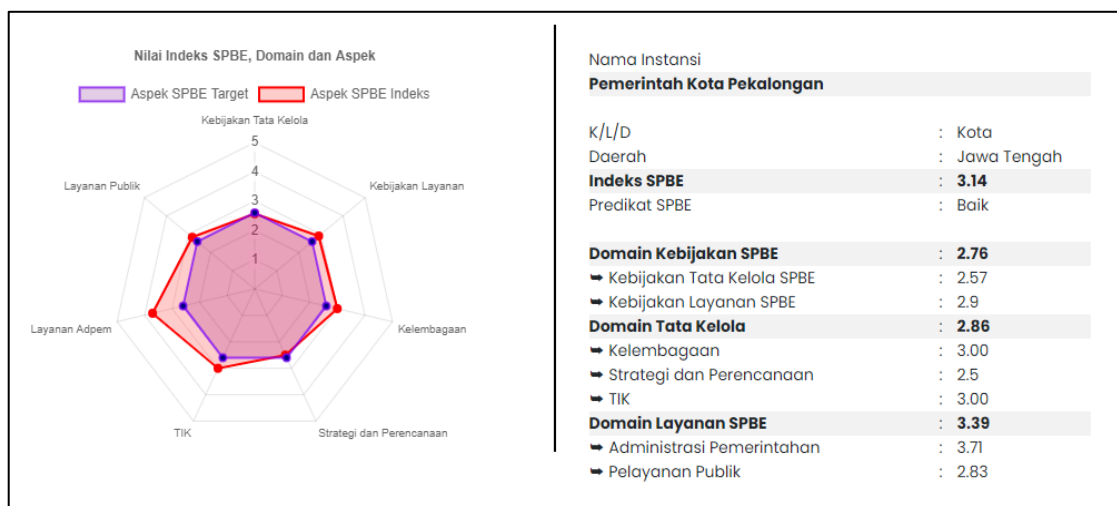
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

- a) domain arsitektur Proses Bisnis;
- b) domain arsitektur Data Dan Informasi;
- c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f) domain arsitektur Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, SPBE Kota Pekalongan telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut :

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola : 2,86
- Domain Layanan SPBE : 3,39

Adapun indeks SPBE Kota Pekalongan tahun 2019 yaitu 3,14 dengan predikat "Baik". Informasi secara lengkap disajikan dalam gambar 2.49 berikut.



Gambar 2.49 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : spbe.go.id, 2020

Tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi target survey dari Kemenpan, sehingga tidak ada penilaian, namun tahun selanjutnya akan diadakan penilaian mandiri tidak melalui Kemenpan.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Akan tetapi persentase koperasi aktif di Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif. Kondisi pada tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, kemudian terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 89,77 persen.

Tabel 2.124 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah IMKM mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 berjumlah 19.820 UMKM, menurun cukup drastis dari tahun 2016 yaitu 23.681. Kemudian jumlahnya terus naik menjadi 23.233 UMKM di tahun 2020, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.125 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

TAHUN	KOMPONEN UMKM				JUMLAH
	PERDAGANGAN (SIUP)	INDUSTRI KECIL MENENGAH	PEDAGANG PASAR	PEDAGANG KAKI LIMA	
2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Hal ini disajikan dalam tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor (PMA/PMDN)	385	304	202	745	181
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	460	233	175	3.294,76	196.116
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	2.825	1.274	1.351	8.377	2.349
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,34	4,19	6,68	11,24	12,97

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2016-2020, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 8.377 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 11,24. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang dengan rasio daya serap tenaganya sebesar 4,19.

Tabel 2.127 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	460,727	232,835	175,150	3.294,76	193,116

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.127 menjelaskan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2016-2020 atas realisasi PMDN tahun evaluasi, dimana realisasinya cenderung menurun. Pada tahun 2016, realisasi PMDN tahun evaluasi sebesar Rp.460,727 miliar. Tahun 2017 dan 2018 terus menurun menjadi Rp.175,150 miliar di tahun 2018. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar Rp.3.294,76 miliar, dan kembali menurun di tahun 2020 sebesar Rp.193,116 miliar.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 8 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, namun di tahun 2017–2020 kegiatan kepemudaan menjadi 8 kegiatan. Pada tahun 2019 terjadi penambahan organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi sesuai yang tercatat di Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.128 Perkembangan Kepemudaan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Kepemudaan	8	9	9	26	24
Jumlah kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olahraga. Pada tahun 2019, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 8 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.129 Perkembangan Olahraga
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Jumlah kegiatan Olahraga	5	7	7	8	8
Jumlah Lapangan Olahraga	12	55	55	55	55

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 even pada tahun 2018, menjadi 57 even di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan even tersebut. Namun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya ada 6 event.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	23	29	42	57	6
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 even sebagaimana tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pekalongan Art Festival	1 – 8 Sept 2020	Kota Pekalongan
2	Festival Bubur Suro	19 – 20 Sept 2020	Kota Pekalongan
3	Kauman Art	10 Okt 2020	Kota Pekalongan
4	Pentas Peringatan Hari Batik	1 Okt 2020	Kota Pekalongan
5	Sadranan	16 Nov 2020	Kota Pekalongan
6	Pentas Wayang Kulit Virtual	11- 13 Nov 2020	Kota Pekalongan

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dari berbagai festival seni budaya yang diselenggarakan, jika dikelompokkan ada 17 jenis seni budaya sebagaimana disajikan dalam tabel 2.132. Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan *event*. Sehingga pelestarian seni budaya dapat tercapai 100 persen.

Tabel 2.132 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame	Reklame
14	Dekorasi	Dekorasi	Dekorasi
15	Seni Lukis	Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra	Sastra	Sastra

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung

perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 87.849 orang, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 89.682 pengunjung. Pada tahun 2018 jumlahnya menurun lagi menjadi 83.068, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.150. dan dikarenakan pandemi jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media *online* yang saat ini sudah dalam genggaman. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.133 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2016	87.849	299.142	0,29
2017	89.682	268.070	0,33
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34
2020	39.885	258.543	0,16

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 328 perpustakaan di tahun 2016, berkurang menjadi 105 di tahun 2017, di tahun 2019 dan 2020 kembali berkurang menjadi 94 dan 90. Hal ini dikarenakan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian Data	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	4
Perpustakaan RW	328	105	105	94	90
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

18. Kearsipan

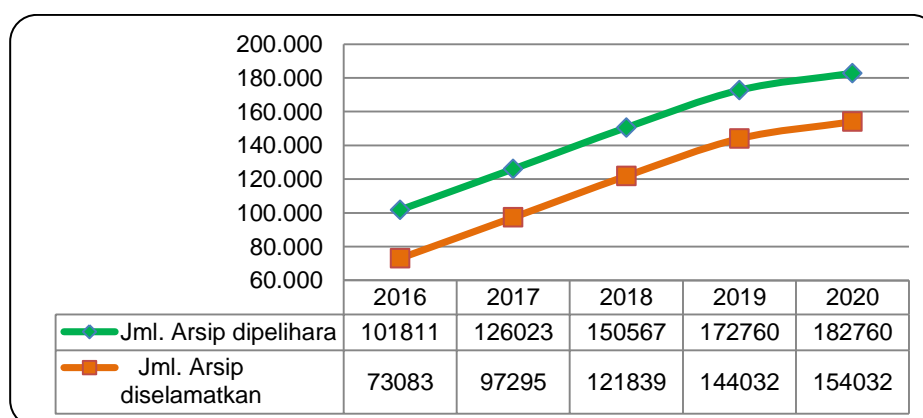
Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2016 - 2020 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan PD yang mengelola arsip secara baku, stagnan di angka 22 OPD. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio (persen)
2016	34	22	64,71
2017	66	22	33,33
2018	66	49	74,24
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam gambar 2.50 berikut.



Gambar 2.50 Jumlah Arsip yang Dipeliharakan dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2016-2020 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan. Pada tahun 2017, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 23 orang, pada tahun 2018 sebanyak 28 orang, pada tahun 2019 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 50 orang.

Tabel 2.136 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2017	6	16	1	orang
2018	7	20	1	orang
2019	10	36	2	orang
2020	7	42	1	orang

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2017 ada sebanyak 4 orang arsiparis, lalu berkurang menjadi 3 orang di tahun 2018 karena mengundurkan diri, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2020 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel 2.137 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2017	4	0	0
2018	3	0	0
2019	3	0	0
2020	7	0	0

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 90,76 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 13.887 ton. Pencapaian Target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton dapat terpenuhi, dengan realisasi 7.173 ton (597,75 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar pada tahun 2020 sebesar 91,7 ton dari target sebesar 83 ton, atau hanya tercapai 110,5 persen. Perkembangan produksi budidaya air payau dan budidaya air tawar mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, namun untuk perikanan tangkap mengalami penurunan atau berkurang.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2016-2020) disajikan dalam tabel 2.138 berikut.

**Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Perikanan
di Kota Pekalongan Tahun 2016- 2020 (kg)**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	15.641	10.475	10.980	14.992	13.887
b. Target Daerah	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	104,27	68,46	71,76	97,99	90,76
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.392	1.578,50	1.698,30	1.746,2	7.173
b. Target Daerah	745	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	186,85	131,54	141,53	145,51	597,75
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	110	46,7	46,90	11,3	91,7
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	132,53	56,27	56,51	13,61	110,5
Jumlah Produksi (ton)	17.143	12.100	12.725	16.750	21.152
Target Produksi	15.828	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 belum bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 30 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2018 sudah dapat melampaui target yaitu 31,60 kg/kapita/tahun dengan persentase 105,33 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 jumlah konsumsi ikan mencapai 32,12 kg/kapita/tahun dengan persentase 107,07 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 32,64 kg/kapita/tahun dengan persentase 108,80 persen. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.139 berikut.

**Tabel 2.139 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun)**

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2016	25,2	30	84,00
2017	26,7	30	89,00
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

**Tabel 2.140 Cakupan Bina Kelompok Nelayan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (persen)
2016	1	34	2,94
2017	0	34	0
2018	0	35	0
2019	0	35	0
2020	4	36	11,11

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu 14.991 ton (tahun 2018 sebesar 10.980 ton) dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 13.887 ton. Sedangkan jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 471,82 ton di tahun 2016 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.141 berikut.

**Tabel 2.141 Produksi Ikan Kelompok Nelayan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton)**

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2016	471,82	15.641	3,02
2017	259,48	10.475	2,48
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan mengalami penurunan jumlahnya dari 31 hotel pada tahun 2016 menjadi 28 hotel pada tahun 2017. Tahun 2018 jumlah hotel di Kota Pekalongan bertambah 2 sehingga menjadi 30 hotel. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 2 hotel yang direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 28 hotel. Pada tahun

2020, kedua hotel tersebut dibuka kembali sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 3.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 132 di tahun 2016, sekarang telah berkembang menjadi 150 restoran di tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata sebesar 283.882 pada tahun 2020, turun sekitar 60 persen dari tahun 2019.

Tabel 2.142 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2016	31	132	363.585
2017	28	137	387.417
2018	30	138	784.254
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2018 dan 2019 tingkat okupansinya tidak signifikan. Untuk hotel kelas melati berada di angka 22 persen, hotel bintang 1 sebesar 18 persen, hotel bintang 2 sebesar 18 persen, dan hotel bintang 3 mengalami kenaikan dari 33 persen di tahun 2018 menjadi 36 persen di tahun 2019. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.143 berikut.

Tabel 2.143 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelas Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata Okupansi (%)	
			2018	2019
Melati	20	445	22	22
Bintang 1	1	65	13	13
Bintang 2	1	47	18	18
Bintang 3	8	739	33	36

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam tabel 2.144.

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan, antara lain di pantai Pasir Kencana, pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang

menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Bahkan Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Jumlah pengunjung wisata bahari mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah abrasi yang merusak kawasan pantai, adanya rob dan adanya pandemi *Covid-19* di tahun 2020.

Tabel 2.144 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan	23	35	42	57	6

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Sementara itu kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel 2.145 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	6	2	0
	2). Wisnus	109.057	105.360	69.184	69.057	7.429
	B. Pendapatan (Rp.)	509.935.500	529.565.500	360.360.250	355.370.750	39.449.750
2	Slambaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	7.437	9.134	7.641	11.283	10.426
	B. Pendapatan (Rp.)	27.310.000	31.851.500	32.826.750	44.572.750	33.759.750
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	265	358	454	286	138
	2). Wisnus	21.834	23.044	25.154	28.312	9.982
	B. Pendapatan (Rp.)	70.653.000	84.254.000	96.861.000	100.530.000	31.447.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	40.901	0	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2017 sebesar 7,29 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 6,36 ton per hektar di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 3,16 ton per hektar dan tahun 2020 menurun lagi pada posisi 2,92 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman padi (ton)	11.793,00	12.425,00	10.077,00	5.131,09	4.769,19
Luas areal tanaman padi (Ha)	2.771,00	1.704,00	1.584	1.618,74	1.631,53
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	4,25	7,29	6,36	3,16	2,92

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2018, dari 67 kelompok tani pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok tani di tahun 2018, 87 kelompok tani di tahun 2019 dan 88 kelompok tani di tahun 2020. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak 28 kelompok, kelompok tani sebanyak 28 kelompok dan kelompok ternak sebanyak 24 kelompok.

Tabel 2.147 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	0	3	28	40	40
Jumlah kelompok tani	66	67	80	87	88
Cakupan bina kelompok petani (persen)	0,00	4,48	35,00	45,98	45,45

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

JenisPasar / Toko	2016	2017	2018	2019	2020
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	11	11	11
- Toko	247	247	74	74	74
- Kios	1.652	1.685	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726

JenisPasar / Toko	2016	2017	2018	2019	2020
Toko Modern :					
- Minimarket	26	41	42	43	53
- Supermarket	2	2	3	3	5
- Department store	4	4	3	3	4
- Hypermarket	2	2	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2020, pedagang/usaha informal sebanyak 1.043 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	30
2	Jl. Hasanudin	6
3	Jl. Urip Sumoharjo	57
4	Jl. Gatot Subroto	61
5	Jl. Kurinci	23
6	Jl. Kusuma Bangsa	44
7	Jl. Tentara Pelajar	16
8	Jl. Merak	3
9	Jl. WR. Supratman	13
10	Jl. Progo	10
11	Jl. Merpati	16
12	Jl. Mawar	18
13	Jl. Melati	38
14	Jl. Kepodang	16
15	Jl. Mataram	50
16	Alun-alun timur	22
17	Alun-alun utara	30
18	Alun-alun konveksi	209
19	SKLP	82
20	Tentara Pelajar	18
21	Jl. Veteran	50
22	Jl. Angkatan 45	6
23	Resimen	5
24	Gajahmada	9
25	Jl. Ahmad Dahlan	14
26	Jl. HOS cokroaminoto	43
27	Jl. RA Kartini	24
28	Jl. Wahid Hasyim	15
29	Jl. Agus Salim	11
30	Jl. Dr Wahidin	16
31	Jl. Cendrawasih	36

No.	Lokasi	Jumlah
32	JL. Rajawali	52
	Total	1.043

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2021

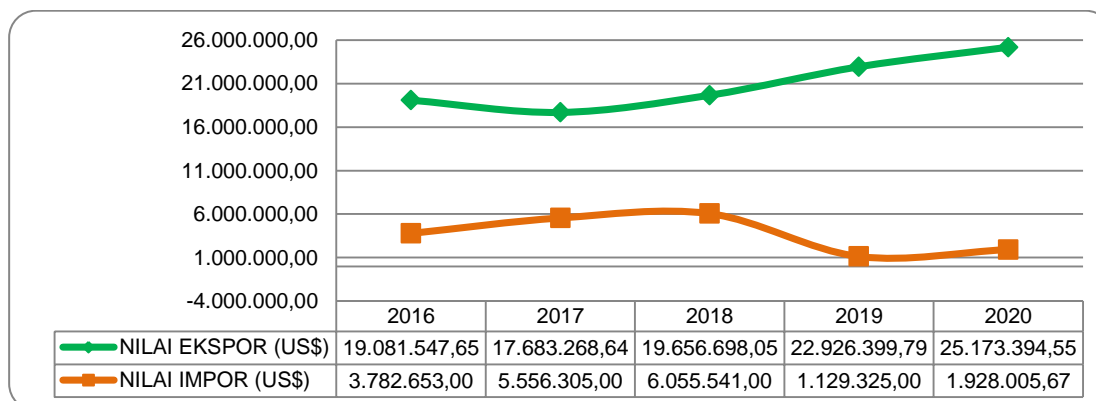
Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meroket dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar Rp.1,847 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,370 triliun di tahun 2019. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,407 triliun di tahun 2016 menjadi Rp.1,655 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.289 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.150 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.847.835,00	2.019.945,16	2.195.304,05	2.370.293,83	2.289.121,10
		Kontribusi (persen)	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
2	ADHK 2010	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	1.655.883,36	1.578.463,62
		Kontribusi (persen)	22,10	22,18	22,15	22,15	21,51

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan tidak sejalan dengan perkembangan nilai ekspor yang cenderung naik dari tahun 2016 sampai 2020, meskipun sempat menurun di tahun 2017. Nilai ekspor semula 91,081 juta US\$ di tahun 2016, turun menjadi 17,683 juta US\$ di tahun 2017. Namun setelah itu terus naik menjadi 25,173 juta US\$ di tahun 2020. Sementara itu untuk impor terus ditekan, namun dalam perjalanannya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Data selengkapnya dapat disajikan dalam gambar 2.51 berikut.



Gambar 2.51 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 terdapat 36 unit industri, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 20 unit dan di tahun 2018 penurunannya menjadi 14 unit, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit dan di tahun 2020 menurun kembali menjadi 8 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	8	14	4
Industri Aneka (IA)	36	20	6	47	3
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	6	1
JUMLAH	36	20	14	89	8

Sumber : DPMPSTSP Pekalongan, 2021

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.152 berikut.

Tabel 2.152 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	933,00	9.412,03	955,00
Industri Aneka (IA)	13.779,40	9.683,00	11.682,00	69.483,30	7.184,00
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	2.721,41	1.450,00
JUMLAH	13.779,40	9.683,00	12.615	81.616,74	9.589,00

Sumber : DPMPSTSP Kota Pekalongan, 2021

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2016-2020 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.153 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	878	760	770	781	1.457
Pakaian jadi dari tekstil	606	913	913	953	941
Pembekuan ikan	6	NA	NA	NA	NA

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	53	22	22	23	26
Penggaraman/Pengeringan Ikan	25	5	5	9	38
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	44	7	7	8	88
Pengolahan Teh dan Kopi	41	8	8	11	31
Pertununan	151	31	31	34	33

Sumber : Dinperinaker, 2021

Tabel 2.154 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	12.937	12.104	5.197	5.278	7.964
Pakaian jadi dari tekstil	6.751	5.630	5.849	6.047	6.600
Pembekuan ikan	50	30	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	396	477	477	583
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	175	102	56	59	52
Penggaraman/Pengeringan Ikan	681	390	71	75	190
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	639	380	58	58	227
Pengolahan Teh dan Kopi	1.478	450	1.066	1.174	1.834
Pertununan	4.055	760	595	595	466

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.155 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	49.235	45.760	n/a	n/a	10.041
Pakaian jadi dari tekstil	33.540	25.750	n/a	12.573	2.098
Pembekuan ikan	406	215	n/a	n/a	n/a
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	11.500	n/a	n/a	n/a
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	278	210	n/a	n/a	14,2
Penggaraman/Pengeringan Ikan	1.218	560	n/a	n/a	135
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7.542	3.950	n/a	n/a	72.15
Pengolahan Teh dan Kopi	46.530	19.115	n/a	n/a	3.550
Pertununan	33.533	7.250	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2016-2020 terus meningkat baik berdasarkan ADHB. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.822.761,68 Juta (21,43 persen dari total PDRB), dan terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi Rp. 2.315.321,70 juta (21,40 persen dari total PDRB), meskipun secara persentase

berfluktuasi. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam tabel 2.156.

Tabel 2.156 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.822.761,68	1.959.739,49	2.112.720,60	2.267.013,33	2.315.321,70
	Kontribusi (persen)	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
ADHK (2010)	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89
	PDRB Perindustrian	1.356.596,75	1.415.641,58	1.478.741,06	1.550.360,71	1.542.947,72
	Kontribusi (persen)	21,31	21,11	20,86	20,73	21,03

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

2.3.4. Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.157 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	72	118	150	136	93

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2021

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu :

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat <https://jdih.pekalongankota.go.id>.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2020 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,07 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.158 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	15.05	19.95	24,42	24,53	24,70
2	Pengukuran Kinerja	25	9.48	10.39	17,07	17,54	17,92
3	Pelaporan Kinerja	15	9.65	8.56	10,46	11,09	11,17
4	Evaluasi Internal	10	4.31	5.12	7,24	7,29	7,39
5	Capaian Kinerja	20	9.04	11.71	11,69	12,14	11,89
	Nilai SAKIP	100	47.53	55.73	70,88	72,59	73,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C	CC	BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 80,42 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	79,24	Baik
2	Dinas Kesehatan	82,18	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	85,68	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77,42	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	75,76	Kurang Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja	85,59	Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,99	Baik
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	79,98	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	79,48	Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	79,53	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlind Anak	83,19	Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	79,08	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	75,91	Kurang Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	79,44	Baik
15	Dinas Perhubungan	77,20	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	80,60	Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	75,99	Kurang Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	86,18	Baik

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	78,75	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	78,51	Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78,00	Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	83,98	Baik
23	Badan Keuangan Daerah	78,63	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	81,54	Baik
25	Sekretariat DPRD	78,61	Baik
26	Inspektorat	80,19	Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	78,15	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	84,67	Baik
29	Bagian Organisasi Setda	86,01	Baik
30	Bagian Umum Setda	81,89	Baik
31	Bagian Hukum Setda	84,23	Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	80,38	Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	81,94	Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	85,12	Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	80,80	Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	81,37	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	79,95	Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	81,08	Baik
39	Kelurahan Krapyak	77,32	Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	80,66	Baik
41	Kelurahan Degayu	80,88	Baik
42	Kelurahan Bandengan	80,07	Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	80,92	Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	81,62	Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	87,17	Baik
46	Kelurahan Jenggot	79,13	Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	77,02	Baik
48	Kelurahan Banyurip	79,52	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	80,53	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	79,60	Baik
51	Kelurahan Medono	78,14	Baik
52	Kelurahan Podosugih	80,37	Baik
53	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	82,04	Baik
54	Kelurahan Tirto	81,09	Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	80,02	Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	79,16	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	78,36	Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	80,97	Baik
59	Kelurahan Kauman	83,22	Baik

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
60	Kelurahan Poncol	82,64	Baik
61	Kelurahan Klego	79,43	Baik
62	Kelurahan Gamer	78,93	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	80,85	Baik
64	Kelurahan Setono	80,16	Baik
65	Kelurahan Kalibaros	78,21	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	80,42	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekaongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.160 berikut.

Tabel 2.160 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	36,11	35,32
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,33	33,65
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	66,44	68,97

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan

pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 161 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,41
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,08
	III. Reform	30,00	18,88
Total Komponen Pengungkit		60,00	39,37
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,08
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,25
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,58
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,63
Total Komponen Hasil		40,00	29,54
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	68,91

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 2021

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2020, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari 1 Raperda inisiatif dan 14 Raperda usulan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak 7 Perda, terdiri dari 1 Perda inisiatif dan 6 Perda usulan Wali Kota.

2.3.5. Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan yakni tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu RPJMD tahun 2021-2026 yang saat ini sedang disusun merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 3.142 orang, kemudian berkurang menjadi 2.956 orang di tahun 2020. Berkurangnya jumlah ASN dikarenakan adanya ASN yang pensiun dan beberapa meninggal dunia dikarenakan pandemi *Covid-19*.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	22	6	28	23	4	27
Eselon III	69	34	103	70	35	105
Eselon IV	216	156	372	207	154	361
Fungsional Umum	681	406	1.087	627	378	1.005
Fungsional Tertentu	538	1.014	1.552	511	947	1.458
Jumlah Total	1.526	1.616	3.142	1.438	1.518	2.956

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana/ dokter/ Ph.d	803	1.171	1.974	765	1.080	1.845
Diploma III/ Sarjana Muda	140	218	358	137	222	359
Diploma I, II	24	16	40	22	11	33
SMA/ Sederajat	383	202	858	342	174	516
SLTP/ sederajat	101	8	109	93	7	100
SD	75	1	76	61	0	61
Jumlah Total	1.526	1.616	3.142	1.438	1.518	2.956

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Upaya lain yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

- a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
- b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
- c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan Sistem Merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP No. 11 tahun 2017 yaitu :

- a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Pada tahun 2020, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 204 dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan

prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detil disajikan dalam tabel 2.164 berikut.

Tabel 2.164 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Diklat	2016	2017	2018	2019	2020
Teknis	250	455	350	366	151
Fungsional	206	231	285	166	75
Kepemimpinan	35	5	52	8	1
Prajabatan	65	2	3	251	0

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat prajabatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya pengangkatan CPNS pada tahun 2018 sejumlah 251 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan *general check-up* dan mengikuti diklat purna tugas terhitung fluktuatif, tergantung dari jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun. ASN yang melakukan *general check-up* tahun 2016 sebanyak 64 orang, tahun 2017 sebanyak 75 orang, tahun 2018 sebanyak 53 orang, tahun 2019 sebanyak 343 orang dan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Sementara ASN yang mengikuti diklat purna tugas 2016 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 45 orang, tahun 2018 sebanyak 90 orang, tahun 2019 dan 2020 sebanyak 60 orang.

Tabel 2.165 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2016	2017	2018	2019	2020
General Check-Up	64	75	53	343	11
Diklat Purna Tugas	26	45	90	60	60

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

RUD dilaksanakan berdasarkan seleksi oleh tim reviewer terhadap proposal yang sudah masuk. Pada tahun 2020, telah ditetapkan 5 pemenang sebagai berikut :

1. Universitas Diponegoro, dengan judul “Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis”;
2. Universitas Pekalongan, dengan judul “Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 : Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah”;
3. STIMIK Widya Pratama Pekalongan “Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring”;
4. Universitas Selamat Sri, dengan judul “Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga Guna Membangun Problem Solving Anak”;
5. STIMIK Widya Pratama Pekalongan, dengan judul “Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan”.

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan. Hasil riset bersama tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Tim Peneliti Poltekkes, dengan judul “Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan”;
2. CV. Monalisa Art, dengan judul “Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru”;
3. CV. Tunas, dengan judul “Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan”;
4. CV. Pijar Mulya Wasesa, dengan judul “Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa”.

2.3.6. Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

- (1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;

- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 2 sampai level 3 dengan rincian sebagaimana disajikan tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tingkat Maturitas SPIP	2016	2017	2018	2019	2020
Level	Level 2 infrastruktur penuh	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2021

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 – 2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkoba. Pada tahun 2020 kasus tindak kejahatan narkoba dan psikotropika mengalami kenaikan. Selengkapnya disajikan dalam tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tindak Kejahatan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembunuhan	0	0	1	0	2
Pemeriksaan	1	0	2	0	0
Penganiayaan	1	1	6	7	3
Pencurian	47	25	45	71	33
Penipuan	18	0	11	19	18
Penadahan	2	2	0	0	0
Narkoba dan Psikotropika	31	3	50	44	64

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.168 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 2.168 Jumlah Kasus Konflik Sosial
di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Konflik Sosial	14	1	2	1	1

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu pada tahun 2016 dan 2017 tidak dilakukan kegiatan pembinaan politik karena pada tahun tersebut tidak ada pemilihan umum di Kota Pekalongan.

**Tabel 2.169 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	0	0	32	32	38

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

**Tabel 2.170 Tingkat Partisipasi Politik
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

JENIS PEMILIHAN UMUM	2016	2017	2018	2019	2020
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	-	-	-	79,35
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	64,00	-	-
Pemilu Presiden (persen)	-	-	-	85,88	-
Pemilu Legislatif (persen)	-	-	-	85,51	-

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun

2016-2020 masing-masing sebanyak 1 kali pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Sedangkan di tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali dan 3 kali di tahun 2020.

Tabel 2.171 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020

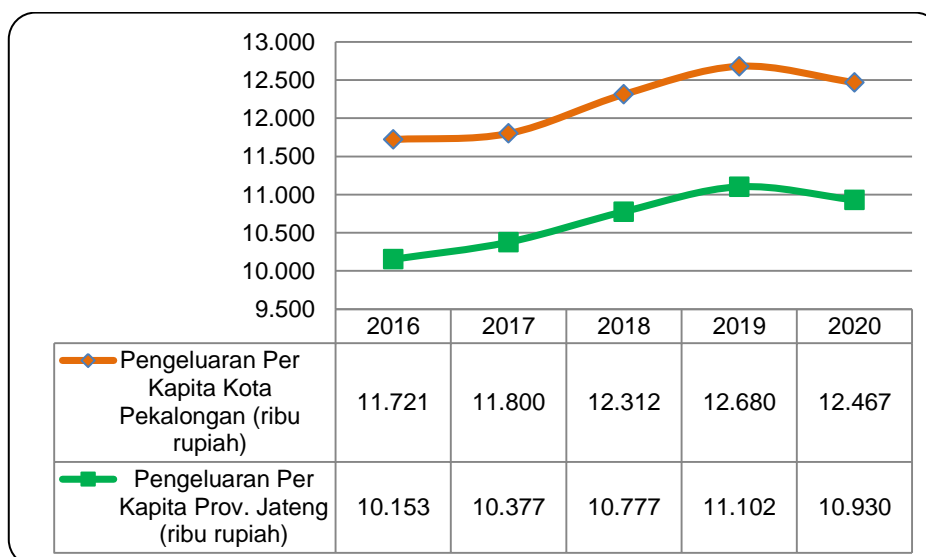
Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	1	1	3

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



Gambar 2.52 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2020. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000. Di tahun 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000 dan menurun sebesar Rp. 12.467.000 di tahun 2020. Gambar 2.47 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Di Kota Pekalongan, jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2016 sampai 2020 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Kondisi selengkapnya disajikan dalam tabel 2.172.

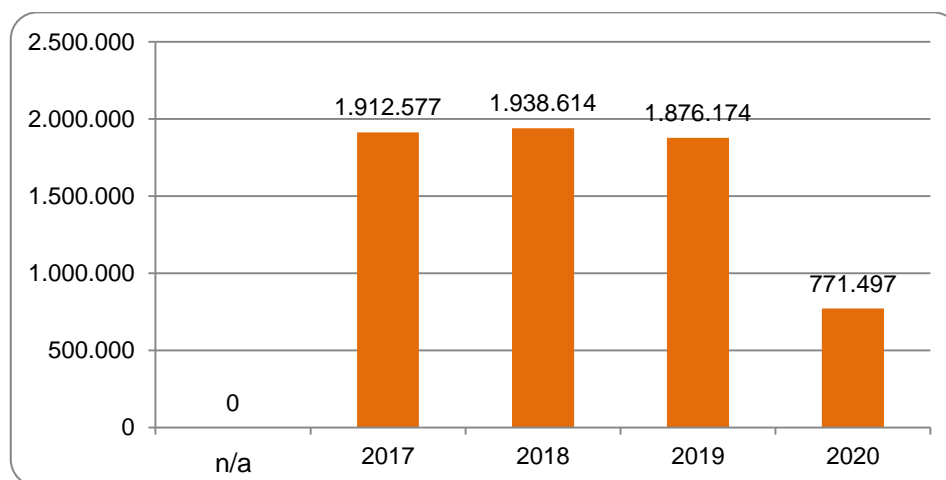
Tabel 2.172 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2016	155,44	182.944	0,0008
2017	155,44	147.135	0,0008
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu dari 1.912.577 penumpang menjadi 1.938.614 penumpang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.876.174 penumpang. Kemudian mengalami penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis di tahun 2020 menjadi 771.497 penumpang. Adapun perkembangannya disajikan dalam gambar 2.53 berikut.

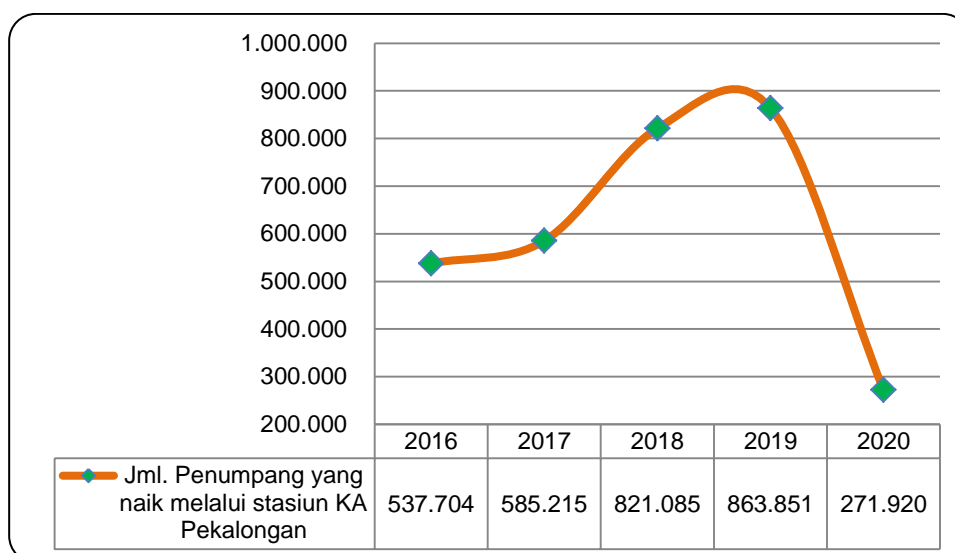


Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Gambar 2.54 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

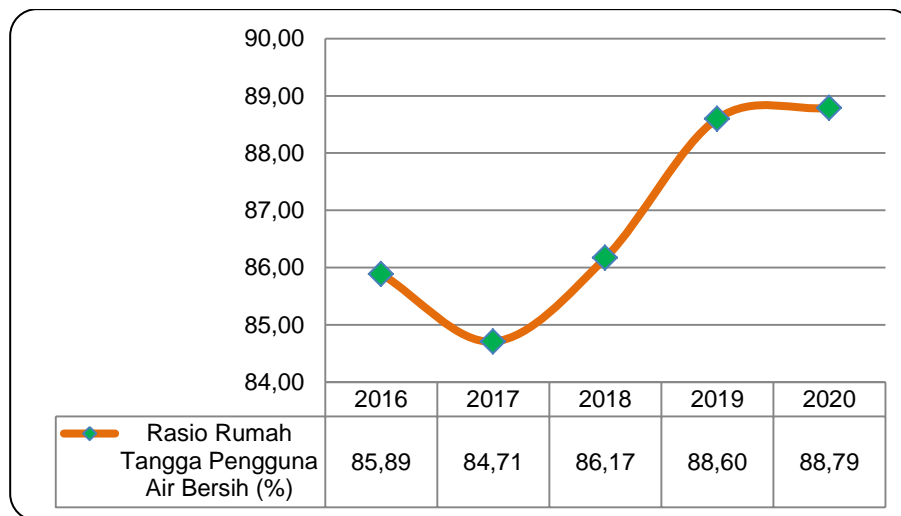
Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam gambar 2.54. Tahun 2016 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 537.704 penumpang. Dalam kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2019 sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis di tahun 2020 sebanyak 271.920 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *Covid-19*.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100 persen terlayani. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 85,89 persen, pada tahun 2017 menurun menjadi 84,17 persen, dan

meningkat dengan kondisi akhir di tahun 2018 sebesar 86,17 persen, 88,60 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 rasionya menjadi 88,79 persen. Data selengkapnya disajikan dalam gambar 2.55 berikut.



Gambar 2.55 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Di Kota Pekalongan, layanan air bersih disediakan oleh PDAM dan Pamsimas. Pada tahun 2020, jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan PDAM dengan air bawah tanah sebanyak 19.120 SR menurun dari 22.160 SR di tahun 2019, sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan Pamsimas dan sumur (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 21.663 SR. Dengan demikian total SR yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebanyak 40.783 SR menurun dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 44.093 SR. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa, jika diasumsikan bahwa 1 SR digunakan untuk 5 orang maka total kebutuhan SR untuk seluruh penduduk yaitu sebanyak 61.430 SR. Sehingga persentase sambungan rumah (SR) yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebesar 66,39 persen. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

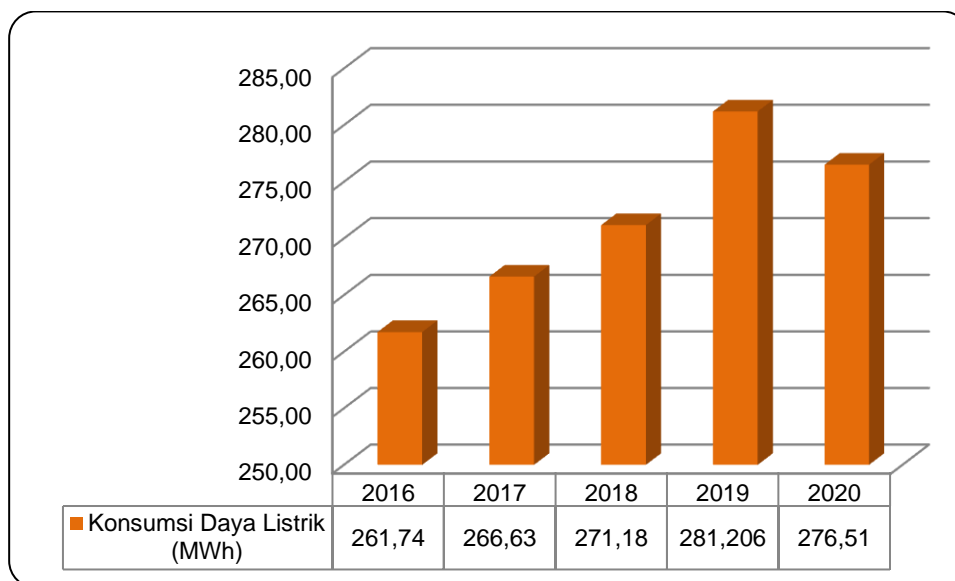
Tahun	SR dari PDAM	SR dari PAMSIMAS dan Sumur	Jumlah SR pengguna air bawah tanah	Jumlah kebutuhan SR	Persentase penggunaan air tanah untuk kebutuhan sambungan rumah
2019	22.160	21.933	44.093	61.419	71,79
2020	19.120	21.663	40.783	61.430	66,39

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2016 sebesar

261,74 MWh, maka pada akhir tahun 2020 sebesar 276,51 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020.



Gambar 2.56 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2016-2020 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44 persen pada tahun 2019. Secara lengkap disajikan dalam tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2021

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di

samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang *representative* salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.175 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Akomodasi	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Berbintang	9	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	22	18	20	20	25

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2018, telah dibuka layanan perijinan untuk 83 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-12 menit. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 16 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.176 berikut.

Tabel 2.176 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

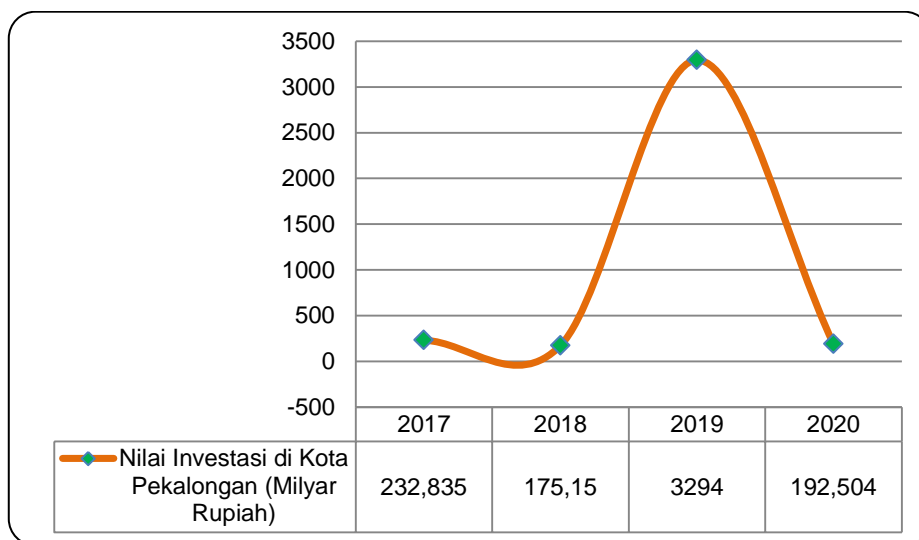
No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Potongan Hewan Dan Retribusi Rumah Potongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

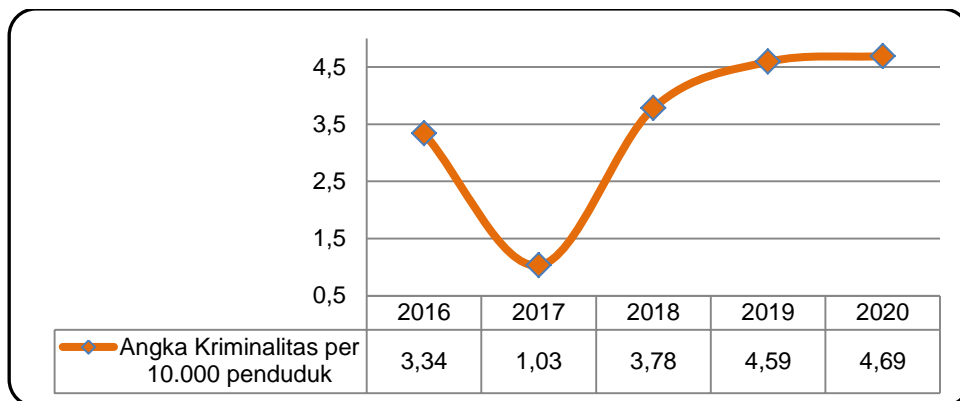


Gambar 2.57 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam gambar 2.58 berikut.



Gambar 2.58 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

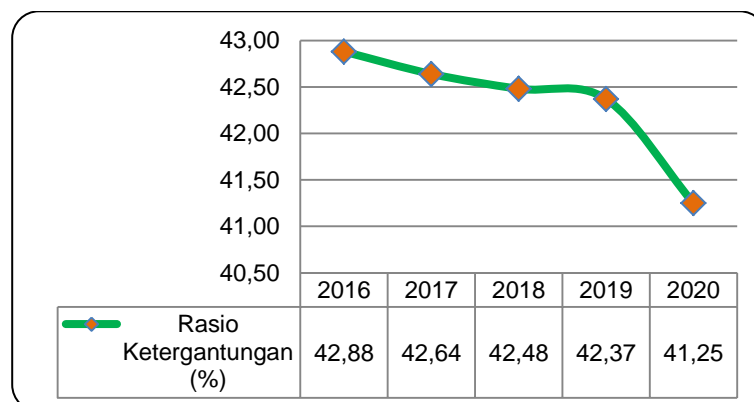
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2016 – 2020 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,88 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam gambar 2.59 berikut.



Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2018, beberapa SIM/aplikasi dibangun/dikembangkan sebagai bentuk inovasi tata kelola, antara lain sebagai berikut :

- a. Penambahan fitur peta lokasi pada SIMRAL (SIM Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi). Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan menjadi objek pembangunan, misalnya lokasi pembangunan jalan. Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.
- b. Penambahan fitur evaluasi pada SIMRAL. Fitur ini berfungsi untuk mendukung SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
- c. Pembangunan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City*. Aplikasi ini berbasis android, berisikan berbagai macam aplikasi yang telah dibangun sebelumnya (baik aplikasi untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun aplikasi untuk layanan publik), serta fitur-fitur baru yang dikembangkan. Dengan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* ini semua informasi yang berkaitan dengan Kota Pekalongan dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah.

- d. Pembangunan aplikasi PUSAKA. Aplikasi ini merupakan salah satu wujud dari pengelolaan satu data terpadu Kota Pekalongan. Dengan SIM/aplikasi diharapkan dapat menjadi portal pengelolaan satu data terpadu, sehingga tidak ada lagi perbedaan data atas jenis data yang sama. Selain itu, data yang ada nantinya akan dapat diolah dan diintegrasikan.
- e. Integrasi data pendidikan. Integrasi ini mencakup data pendidikan Kota, Kemenag, dan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan data siswa yang merupakan penduduk Kota Pekalongan, sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan, misalnya pemberian beasiswa agar tepat sasaran.

Inovasi tata kelola lainnya adalah pengendalian administrasi kegiatan, yaitu dengan membubuhkan paraf pengendali program (Kepala Bidang) di lembar A2. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya, dimana Kepala Bidang tidak melakukan pengecekan terhadap administrasi kegiatan, yang secara otomatis tidak dapat mengendalikan program sepenuhnya. Atas dasar itulah maka mulai tahun 2019 Kepala Bidang sebagai pengendali program harus membubuhkan paraf sebagai bukti telah mengecek administrasi kegiatan.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

- a. P21 (Puskesmas 21) atau Pusdalul (Puskesmas Buka Sampai Dalu). Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggot dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari.
- b. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dibuka 6 hari (senin-sabtu). Pada dasarnya hari kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 5 hari kerja (Senin-Jumat). Namun demikian layanan kependudukan dan pencatatan sipil dibuka sampai hari Sabtu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya percepatan untuk mencapai target kinerja Dindukcapil.
- c. Aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* berbasis android. Aplikasi ini tidak hanya memuat layanan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga menyediakan portal layanan informasi publik seperti kesehatan, pendidikan, SPBU, ATM dan Bank, kuliner, property, hotel dsb. Dengan layanan ini masyarakat dimudahkan dengan ketersediaan berbagai informasi dalam satu aplikasi.
- d. SMS LBA (*Location Based Advertising*). Merupakan metode pengiriman SMS dengan memanfaatkan informasi lokasi keberadaan telepon seluler sesuai cakupan BTS provider. Inovasi ini dilakukan dalam rangka merespon adanya jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Pekalongan dimana para pengendara tidak lagi masuk ke Kota Pekalongan. Untuk menarik minat para pengendara tersebut, digunakan SMS LBA berisi berbagai informasi yang disebarkan kepada pengguna ponsel sebelum masuk Kota Pekalongan. Dengan strategi ini diharapkan para pengguna jalan akan transit di Kota Pekalongan untuk menikmati wisata dan berbagai layanan lainnya.

- e. Sistem Informasi Kodifikasi Regulasi Perizinan Terpadu (SIKAREP) adalah sebuah sistem informasi penunjang pelayanan publik yang digunakan di DPMPTSP Kota Pekalongan yang bertujuan untuk mempermudah bagi pemohon izin yang ingin mengetahui tentang regulasi-regulasi produk pelayanan perizinan. Sikarep sangat membantu pemohon izin untuk mengetahui regulasi tanpa harus bertanya kepada petugas informasi karena SIKAREP didesain mudah untuk digunakan oleh user (*user friendly*). Bahkan pemohon izin yang ingin menggunakan SIKAREP tidak harus datang ke kantor DPMPTSP untuk mengoperasikannya karena SIKAREP sudah dapat diakses melalui koneksi internet di alamat berikut : sikarep.pekalongankota.go.id sehingga SIKAREP dapat diakses dimana saja bahkan bisa menggunakan smartphone selama masih terkoneksi dengan internet.
- f. PETROC (*Pekalongan Trading Online Creativity*) Layanan Cyber UMKM. Perkembangan *Online Marketing* di Indonesia sangat cepat. Perubahan gaya hidup masyarakat, telah menggeser pola jual beli di pasar konvensional. Masyarakat yang semula melakukan transaksi jual beli di pasar Konvensional, kini telah banyak beralih ke pasar dunia maya (*online*). Beberapa pasar elektronik di Jakarta melakukan penutupan kios-kiosnya. Banyak pasar yang tutup dikarenakan penjualannya menurun. Ada juga butik batik asal Pekalongan yang terpaksa menutup beberapa tokonya di Jakarta. Selama mudik lebaran 2016, penjualan di pasar batik Grosir Setono mengalami penurunan yang sangat drastis. Penjualan menurun hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. (Moneter.co.id: 11/7/2016). Melihat kemungkinan bertambah buruknya iklim perekonomian di Pekalongan, terutama dari sektor UMKM, Dindagkop Kota Pekalongan berinisiatif membuat layanan khusus UMKM. Layanan tersebut berupa edukasi dan transformasi cara berjualan. Dari yang semula berjualan secara konvensional, dialihkan menjadi berjualan *online*. Layanan Cyber UMKM ini diberi nama PETROC (*Pekalongan Trading Online Creativity*). Dindagkop Kota Pekalongan membuat tim layanan, yang bertugas memberikan wawasan, pembelajaran tentang *Internet marketing*.
- g. DAYA LEKAT (swaDAYA LElang masyaraKAT). Pudarnya “Sambatan” atau yang disebut juga gotong-royong merupakan latar belakang munculnya inovasi swadaya lelang masyarakat sebagai wadah untuk melestarikan budaya gotong-royong agar tetap terjaga yang beriringan dengan program pengentasan kemiskinan. Dimana program tetap berjalan dan gotong royong masyarakat dapat dibangkitkan kembali, karena roh dari pemberdayaan ialah gotong royong. Out put dari pelaksanaan lelang swadaya antara lain; terbangunnya budaya swadaya dimana pelaksana kegiatan ialah lembaga masyarakat yang berhasil mengajukan swadaya tertinggi, karena besarnya nilai swadaya masyarakat merupakan salah satu indikator potensi pembangunan di Kelurahan; terjaganya nilai kebersamaan atau gotong-royong; membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mampu, mandiri secara sinergi, partisipatif dan terpadu berdasarkan nilai-nilai religiusitas; pengelolaan pasca kegiatan, karena masyarakat merasa ikut terlibat dalam pembangunan. Sehingga ikut serta dalam merawat atau menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan; Efisiensi dana pemerintah dan luasnya jangkauan pembangunan berbasis masyarakat, dengan adanya swadaya masyarakat ikut berperan dalam menambah volume kegiatan.
- h. SIMPATIKK adalah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara Online (Jaringan Internet dan Intranet) untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada warga kelurahan yang diintegrasikan dengan pelayanan di kecamatan dan dengan data base kependudukan (E-KTP) di Dindukcapil serta menggunakan teknologi dan tata kelola Tanda Tangan Elektronik. SIMPATIKK

terselenggara bekerjasama dengan Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai dinas teknis.

- i. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hak bagi semua masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mempermudah pemohon informasi tidak harus data dengan mengisi lewat *online* aplikasi ppid.pekalongankota.go.id lalu mengisi Pemohon Informasi. Dalam hal pemohon informasi tidak dibatasi dan proses pelaksanaan sudah diatur dalam Perwal Nomor 555/126 Tahun 2017. Semua permohonan informasi akan diproses asal tanda dukung KTP dalam bentuk *scanning* sama dengan pemohon. Adapun kemudahan lainnya akan disediakan member yang telah membutuhkan aplikasi ini, agar lebih cepat dan mudah. Selain dari sisi pengguna juga dari sisi penyedia informasi untuk OPD Kota Pekalongan dan jajarannya agar selalu mengisi data informasi yang telah ditetapkan sebagai standar penyedia informasi lewat user dan login pengisian yang telah didaftarkan. Adapun monitoring evaluasi yang dilakukan setiap semester sekali untuk dilakukan evaluasi oleh Lembaga PPID yang terdiri dari Wali Kota (penanggungjawab Dinkominfo), Lembaga Pattiro, Perguruan Tinggi dan LSM. Diadakan desk bagi yang belum mengisi informasi yang harus dipenuhi agar informasi selalu update dan tercukupi. Dari proses kerja penyedia informasi dan pengguna informasi, aplikasi ini ngelink ke tapd.pekalongankota.go.id (merupakan Transparansi Pengelolaan Anggaran) Proses permohonan informasi setiap tahap bisa dilacak sehingga pemohon mengetahui secara langsung surat berjalan. Selain itu system juga ngelink dengan twitter @kiprovjateng, twitter @pkl_diskominfo dan twitter @pemkotpkl juga dengan website pekalongankota.go.id.
- j. PAPERLESS OFFICE. Istilah kantor berhubungan dengan kertas dan berkas, sehingga di zaman serba elektronik perlu memanfaatkan elektronik sebagai sarana yang tidak harus membutuhkan kertas banyak dan tenaga kurir banyak. Untuk itu disusunlah e-paperless sebagai surat sekali klik berjalan sampai ke sasaran lewat media elektronik berbasis android. Tentunya ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk diterima agendaris lalu ke Kepala Unit kemudian di disposisi kembali ke agendaris dan dibagikan ke alamat tujuan. Sedangkan surat keluar membuat surat lalu digandakan/dicopi untuk di cap basah lalu dibuatkan tanda terima dan dikirim sesuai alamat, hal ini bias memakan berhari-hari apalagi yang jauh alamatnya sehingga proses ini selain memakan waktu banyak juga pemborosan kertas otomatis anggaran (dalam bentuk kertas, tinta disposisi dan biaya transpot). Semua itu sudah dirancang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sehingga tidak mempersulit operator yang pemula surat diterima atau belum akan kelihat warna tulisan dan dimanapun berada selaku pimpinan yang mendisposisi surat akan mendistribusikan/memerintahkan kebawahnya untuk menindaklanjuti yang hanya makan waktu hitungan detik sekali klik asal surat sudah terbaca. Demikian Kota Pekalongan sudah menerapkan dan keunggulan lainnya unit kerja dan Kepala atau pejabat dibawahnya sudah *by job* dan *by name* yang terintegrasi langsung dengan database simpeg (sistem informasi manajemen kepegawaian) sehingga apabila sudah dilantik sehingga pejabat yang menduduki sudah berganti nama sesuai dengan kondisi pejabat yang baru.
- k. iPekalongankota (Perpustakaan Digital Berbasis Media Sosial). Di era globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali di bidang perpustakaan yang penyampaiannya telah sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Penerapan aplikasi multimedia pada teknologi informasi memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi yang diperlukannya dalam bentuk informasi maya (*virtual*

information) secara mudah dan cepat tanpa batasan ruang serta waktu. iPekalongankota perpustakaan digital berbasis media sosial menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi. Diluncurkan pada bulan april tahun 2018 oleh Wali Kota pekalongan sampai dengan saat ini aplikasi sudah sangat berkembang. Beberapa keunggulan iPekalongan adalah:

1. Buku digital gratis;
 2. Aplikasi berbasis android & dekstop sehingga *user friendly*;
 3. Metode 2 arah penyampaian informasi, karena setiap anggota dapat berinteraksi;
 4. Menunjang koleksi perpustakaan sekolah;
 5. Penerbitan karya tulis dalam bentuk digital;
 6. Menyelamatkan infromasi konten lokal daerah.
- I. Aplikasi Pendaftaran BeMO (*Bendan Mobile*). Peningkatan jumlah pengguna jasa kesehatan di RSUD Bendan Kota Pekalongan selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2018, hal ini disebabkan oleh tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang meningkat setiap tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah pasien perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan peforma pelayanan yang baik dan memudahkan pelayanan, baik dari pelayanan kesehatan, pelayanan adminisrasi dan pelayanan penunjang lainnya. Sejak awal berdiri pelayann rawat jalan meningkat berbagai kualitas pelayanan, mula dari penambahan dokter speialis, peningkatan kompetensi tenaga medis, peningkatan administrasi dll. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai masalah dalam pelayanan mulai timbul, sebagai contoh pada pendaftaran pasien rawat jalan yang menggunakan nomor antrian konvensional, ternyata menimbulkan banyak permasalahan seperti pasien harus antri pada dini hari untuk mendapatkan nomer pendaftaran hari berikutnya, adanya calo nomer antrian yang merugikan pasien. Dengan adanya permasalahannya tersebut, pihak manajemen RSUD Bendan menghadirkan inovasi peayanan pendaftaran rawat jalan via SMS yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah, seiring perkembangan jalan, sistem SMS dikembangkan menjadi pelayanan berbasis Android, dimana pelayanan ini akan memberikan informasi tambahan yang lengkap, seperti nomor antrian, riwayat periksa, jadwal dokter yang real time, dan bisa daftar di rumah, pasien cukup melakukan pendaftaran dan cetak SEP BPJS Kesehatan, karena semua telah dilakukan secara *online*.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Pemerintah Kota Pekalongan tidak hanya dituntut menciptakan inovasi dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, tetapi juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.177 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Kran Air Cuci Tangan Tangkal <i>Covid-19</i> (Kran Air Robotic Menggunakan Sistim Sensor Ultrasonik)	Benni Ismail	Inovasi yang diciptakan dalam menghadapi masa pandemi <i>Covid-19</i> dengan membuat Kran Air Cuci Tangan tanpa harus menyentuh kran, tetapi cukup menggunakan sistem sensor ultrasonik

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
2.	Pertanian Apung sebagai Alternatif Budidaya Pertanian dan Ekowisata Terpadu Pada Lahan Terdampak Banjir dan Rob di Kampung Iklim RW 09 Kelurahan Gamer Kota Pekalongan	Pokja Proklim Gamer	Inovasi yang diciptakan dalam pemanfaatan lahan terdampak banjir untuk Budidaya Pertanian Apung dan Ekowisata terpadu yang dapat menciptakan lokasi wisata baru di Kota Pekalongan
3.	Kaori-dama: Si Penyejuk Mata Bikin Harum Ruangan (sebuah inovasi Florikultura dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu)	Fla Gardenia	Inovasi yang diciptakan dalam menggabungkan konsep tanaman hias yang bisa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan menggunakan limbah serbuk kayu yang dibentuk pot sebagai tempatnya
4.	"Sablak" Menurunkan Sisa Tembakau Akhir Proses di Area Giling di Kelompok 4	PT. Urip Sugiharto	Inovasi yang diciptakan dalam proses pelintingan rokok untuk mengurangi tembakau yang terbuang
5.	Tas Recycle	Afni Dhia Aqmarina, S.I.Kom	Inovasi yang diciptakan dalam memanfaatkan limbah plastik menjadi tas dengan didahului proses pemanasan plastik untuk menghilangkan bakteri yang menempel

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2021

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.178 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	September 2020	32	642	-	674
2.	STMIK Widya Pratama	Oktober 2020	66	296	-	362
3.	Akbid Harapan Ibu	November 2020	12	-	-	12
4.	AKN	Oktober 2020	38	-	-	38
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2020	12	658	35	705

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2021

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di

Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.179 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5. HASIL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

2.5.1. Hasil Evaluasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Perubahan RPJMD sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi ditunjukkan dengan Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Tabel 2.180 Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan Tahun 2020

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
1	IPM	Indeks	71,53	75,33	76,12	-	74,77	74,98	74,98	76,90	Akan Tercapai
2	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,34	-	0,305	0,31	0,31	0,34	Tercapai
3	Inflasi	persen	3,46	3 ± 1	3 ± 1	-	2,76	2,36	2,36	3 ± 1	Tercapai
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,36	5,75	5,87	2,65	5,5	-1,87	-1,87	6,00	Belum Tercapai
5	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	persen	3,99	4,7	4,90	2,21	4,84	-0,48	-0,48	5,10	Belum Tercapai
6	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	persen	3,62	5,4	5,60	2,53	5,72	-4,37	-4,37	5,80	Belum Tercapai
7	Harapan Lama Sekolah (expected Years Of Schooling)	Tahun	11,93	13	13,10	13,1	12,83	12,84	12,84	13,21	Akan Tercapai
8	Angka Kemiskinan	persen	8,02	6,28	5,70	8,75	6,6	7,17	7,17	5,14	Belum Tercapai
9	Konflik Sosial	kasus	34	0	0	-	1	1,00	1,00	-	Belum Tercapai
10	Angka Partisipasi Sekolah	persen	-	97	98,00	-	97,13	96,99	96,99	99,00	Akan Tercapai
11	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	persen	-	52	57,00	49,16	49,16	48,64	48,64	60,00	Belum Tercapai
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,09	74,32	74,36	-	74,28	74,38	74,38	74,41	Akan Tercapai
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,42	3,7	3,60	5	5,77	7,02	7,02	3,50	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan PMKS	persen	-	8,78	9,62	-	12,83	14,01	52,56	41,68	Tercapai
15	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	persen	42,43	18,54	9,30	-	23,36	37,27	37,27	9,04	Belum Tercapai
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	persen	-	1,03	0,45	0,39	0,39	0,21	0,21	0	Akan Tercapai
17	Persentase penurunan kasus konflik sosial	persen	-	14,29	16,67	-	50	0,00	0,00	20,00	Belum Tercapai
18	Persentase Implementasi pendidikan	persen	-	55	60,00	-	83,67	100,00	100,00	65,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	keagamaan dan pendidikan karakter										
19	Persentase seni budaya yang dilestarikan	persen	-	100	100,00	-	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	persentase peningkatan penyelenggaraan event	persen	16,00	70,97	83,87	0	183,87	80,65	80,65	100,00	Belum Tercapai
Aspek Pelayanan Umum											
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK	persen	-	65	67,50	-	70,00	60,28	60,28	70,00	Belum Tercapai
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang DIKDAS	persen	-	100	100,00	-	100,00	102,65	102,65	100,00	Tercapai
3	Persentase Penyelenggaraan PAUD Berakreditasi A	persen	-	3,5	4,50	9,00	5,50	9,09	9,09	5,50	Tercapai
4	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A	persen	-	75	80,00	68,45	85,00	69,57	69,57	85,00	Belum Tercapai
5	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	persen	-	10	20,00	-	30,00	100,00	100,00	30,00	Tercapai
6	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	persen	100,00	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Angka Kenakalan Pelajar	per 100 Siswa	-	4	3,00	-	NA	n/a	n/a	2,00	Belum Tersedia Data
8	APS 3-6 tahun	persen	-	67,5	68,00	-	91,44	85,28	85,28	68,50	Tercapai
9	APK PAUD	persen	-	61	62,00	-	69,64	60,28	60,28	62,50	Akan Tercapai
10	APM PAUD	persen	-	60	65,00	-	64,10	58,37	58,37	70,00	Belum Tercapai
11	APS 5-6 tahun	persen	-	75	78,00	-	99,16	105,81	105,81	80,00	Tercapai
12	APK TK/RA	persen	-	76	78,00	-	81,16	71,70	71,70	81,00	Belum Tercapai
13	APM TK/RA	persen	-	75	77,00	-	34,49	37,26	37,26	80,00	Belum Tercapai
14	APS 7-12 tahun	persen	-	100	100,00	-	98,67	103,79	103,79	100,00	Tercapai
15	APK SD/MI	persen	-	100	100,00	-	98,32	101,31	101,31	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	APM SD/MI	persen	-	94,5	95,50	-	79,03	82,93	82,93	96,00	Belum Tercapai
17	APS 13-15 tahun	persen	-	100	100,00	-	97,69	103,67	103,67	100,00	Tercapai
18	APK SMP/MTs	persen	-	100	100,00	-	106,27	105,44	105,44	100,00	Tercapai
19	APM SMP/MTs	persen	-	76,5	77,00	-	61,14	61,04	61,04	77,50	Belum Tercapai
20	Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	persen	-	21	25,00	-	306,69	0,33	0,33	29,00	Belum Tercapai
21	Angka Partisipasi Kesetaraan	persen	-	36	40,00	-	239,63	81,78	81,78	45,00	Tercapai
22	Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesetaraan	persen	-	80	90,00	-	3,67	93,86	93,86	95,00	Akan Tercapai
23	Angka Partisipasi LKP	persen	-	20	25,00	-	NA	n/a	n/a	30,00	Belum Tersedia Data
24	Angka Partisipasi PKBM	persen	-	7	9,00	-	NA	n/a	n/a	12,00	Belum Tersedia Data
25	Angka Melek Huruf	persen	-	98,5	99,50	-	99,98	99,98	99,98	100,00	Akan Tercapai
26	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SD)	persen	-	SD : 87.5	SD : 90	-	90,81	91,05	91,05	SD : 95	Akan Tercapai
27	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SMP)	persen	-	SMP : 96	SMP : 97.5	-	86,41	98,15	98,15	SMP : 100	Akan Tercapai
28	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (TK)	persen	-	TK : 100	TK : 100	-	104,97	109,80	109,80	TK : 100	Tercapai
29	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SD)	persen	-	SD : 20	SD : 30	-	3,76	64,08	64,08	SD : 50	Tercapai
30	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SMP)	persen	-	SMP : 67.5	SMP : 70	-	57,35	144,12	144,12	SMP : 80	Tercapai
31	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (TK)	persen	-	TK : 37.5	TK : 40	-	NA	100,00	100,00	TK : 60	Tercapai
32	Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs berijazah S1/DIV	persen	-	90	95,00	-	91,20	91,99	91,99	100,00	Akan Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	persen	-	59	60,00	-	52,71	50,47	50,47	62,00	Belum Tercapai
34	Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	persen	-	35	50,00	-	32,51	62,14	62,14	75,00	Belum Tercapai
35	Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	persen	-	30	50,00	50,00	71,01	73,21	73,21	75,00	Akan Tercapai
36	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
37	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
38	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	-	0,05	0,04	-	0,12	0,29	0,29	0,03	Tercapai
39	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	-	0,1	0,09	-	0,46	0,97	0,97	0,08	Tercapai
40	Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	persen	-	100	100,00	-	104,78	102,79	102,79	100,00	Tercapai
41	Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	persen	-	100	100,00	-	101,25	102,44	102,44	100,00	Tercapai
42	Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal	persen	-	100	100,00	-	870,73	-69,67	-69,67	100,00	Belum Tercapai
43	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	persen	-	65	70,00	-	62,77	71,13	71,13	75,00	Akan Tercapai
44	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas	persen	-	100	100,00	-	107,49	113,72	113,72	100,00	Tercapai
45	Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung	persen	-	65	67,50	-	65,44	72,83	72,83	70,00	Tercapai
46	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	persen	-	70	80,00	-	85,86	99,71	99,71	90,00	Tercapai
47	Angka Lulus Jenjang Dikdas	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
48	Nilai Rata-rata UN SD/MI	nilai	-	76	76,50	0,00	69,69	0,00	0,00	77,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	nilai	-	60	62,00	0,00	59,02	0,00	0,00	65,00	Tercapai
50	Persentase Sekolah Jenjang dikdas yang terfasilitasi Penilaian Akreditasi	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
51	Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	indek	-	3,3	3,30	-	2,67	2,72	2,72	3,30	Belum Tercapai
52	Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi pembinaan oleh pengawas	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
53	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	persen	-	80	85,00	-	100,00	100,00	100,00	90,00	Tercapai
54	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
55	Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/madin	persen	-	20	15,00	-	NA	n/a	n/a	10,00	Belum Tersedia Data
56	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang terfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
57	Persentase Satuan Pendidikan PAUD&PNF yang terfasilitasi penilaian akreditasi	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
58	Persentase satuan pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi pembinaan oleh Pengawas/penilik	persen	-	92	94,00	-	100,00	100,00	100,00	95,00	Tercapai
59	Persentase organisasi mitra PAUD & PNF yang terfasilitasi pemberdayaan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
60	Persentase Satuan Pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi lomba	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan apresiasi										
61	Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	persen	-	100	100,00	-	71,87	100,00	100,00	100,00	Tercapai
62	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	persen	-	25	40,00	-	100,00	100,00	100,00	60,00	Tercapai
63	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	persen	-	10	20,00	-	100,00	100,00	100,00	30,00	Tercapai
64	Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin	Rasio	-	50	60,00	-	NA	n/a	n/a	70,00	Belum Tersedia Data
65	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalam kegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
66	Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatan kepramukaan	Rasio	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
67	AKI	persen	-	105	102,00	-	101,30	152,41	152,41	102,00	Belum Tercapai
68	AKB	persen	-	9,7	9,60	-	11,99	8,81	8,81	9,60	Tercapai
69	AKABA	persen	12,50	12,35	12,30	-	16,04	10,84	10,84	12,25	Tercapai
70	Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit	persen	-	71,35	71,50	-	79,74	107,62	107,62	71,70	Tercapai
71	BOR (Bed Occupation Rate)	%	-	76	78,00	-	57,36	57,66	57,66	80,00	Belum Tercapai
72	NDR (Net Death Rate)	%	-	≤ 22/1000 pasien	≤ 21/1000 pasien	-	18,04	32,67	32,67	≤ 20/1000 pasien	Belum Tercapai
73	GDR (Gross Death Rate)	persen	-	≤ 42/1000 pasien	≤ 41/1000 pasien	-	47,36	54,57	54,57	≤ 40/1000 pasien	Belum Tercapai
74	ALOS	hari	-	6-9	6-9	-	3,92	4,14	4,14	6-9	Tercapai
75	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	persen	-	90	95,00	-	88,70	89,71	89,71	95,00	Akan Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Persentase temuan makanan berbahaya	persen	-	4	3,50	-	4,56	0,92	0,92	3,00	Tercapai
77	Persentase kasus balita gizi buruk	persen	13,00	0,05	0,05	-	0,05	0,07	0,07	0,05	Belum Tercapai
78	Persentase ibu hamil KEK	persen	22,30	<13,6	< 13,6	-	13,33	13,22	13,22	< 13,5	Tercapai
79	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	persen	-	45	47,00	-	57,20	53,40	53,40	50,00	Tercapai
80	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	persen	-	35	70,00	42,86	42,86	42,86	42,86	100,00	Belum Tercapai
81	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	persen	-	75	90,00	55,56	55,56	55,56	55,56	100,00	Belum Tercapai
82	Persentase sarana kesehatan lainnya yang terakreditasi	persen	N/A	-	25,00	-	0,00	n/a	n/a	50,00	Belum Tersedia Data
83	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	indeks	-	<2	<2	-	1,82	2,71	2,71	<2	Belum Tercapai
84	Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	persen	-	100	100,00	-	100,00	78,43	78,43	100,00	Belum Tercapai
85	Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM)	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
86	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	persen	-	97	98,00	-	93,89	90,02	90,02	99,00	Akan Tercapai
87	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	persen	-	100	100,00	-	29,91	27,10	27,10	100,00	Belum Tercapai
88	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	persen	-	100	100,00	-	16,69	28,57	28,57	100,00	Belum Tercapai
89	Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	persen	-	100	100,00	-	96,34	100,00	100,00	100,00	Tercapai
90	Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	persen	-	100	100,00	-	69,68	100,00	100,00	100,00	Tercapai
91	Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	persen	-	43	45,00	-	103,32	103,25	103,25	50,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Tingkat kemandirian BLUD BKPM	persen	-	25	28,00	0,00	97,43	0,00	0,00	30,00	Tercapai
93	Tingkat kemandirian BLUD PSPJ	persen	-	18	23,00	-	99,29	72,90	72,90	25,00	Tercapai
94	Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	persen	-	51,85	55,56	-	77,78	77,78	77,78	59,26	Tercapai
95	Persentase kualitas air minum pada penyelenggara air minum	persen	-	79	81,00	-	82,99	82,21	82,21	84,00	Akan Tercapai
96	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan	persen	-	94	96,00	-	92,10	92,02	92,02	98,00	Akan Tercapai
97	Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal	persen	-	35	37,00	-	41,37	41,48	41,48	40,00	Tercapai
98	Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD	persen	-	30	35,00	0,00	33,33	0,00	0,00	40,00	Tercapai
99	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	persen	98,00	100	100,00	-	97,73	98,22	98,22	100,00	Akan Tercapai
100	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM)	persen	99,98	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
101	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	persen	99,10	100	100,00	-	99,88	99,59	99,59	100,00	Akan Tercapai
102	Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	persen	94,50	100	100,00	-	94,81	88,39	88,39	100,00	Belum Tercapai
103	Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja	persen	100,00	100	100,00	-	100,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
104	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM)	persen	58,70	64,7	64,90	-	100,00	70,57	70,57	65,00	Tercapai
105	Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	persen	-	90	95,00	81,00	80,08	77,15	77,15	95,00	Belum Tercapai
106	Persentase puskesmas yang memenuhi standar puskesmas	persen	-	90	95,00	-	100,00	100,00	100,00	95,00	Tercapai
107	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	persen	-	100	100,00	-	94,61	83,91	83,91	100,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	persen	-	14	16,00	-	27,00	6,88	6,88	18,00	Belum Tercapai
109	Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	persen	-	14	16,00	-	15,56	5,77	5,77	18,00	Belum Tercapai
110	Cakupan Posyandu strata mandiri	persen	-	25	28,00	24,64	24,33	24,40	24,40	30,00	Belum Tercapai
111	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	persen	-	100	100,00	-	99,29	52,54	52,54	100,00	Belum Tercapai
112	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dibutuhkan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
113	Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
114	Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	persen	-	98	99,00	-	93,18	95,42	95,42	100,00	Akan Tercapai
115	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	persen	-	≤ 1	≤ 1	-	4,29	4,00	4,00	≤ 1	Belum Tercapai
116	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre-eklampsia	persen	-	≤ 30	≤ 30	-	0,45	1,15	1,15	≤ 30	Tercapai
117	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh sepsis	persen	-	≤ 0,2	≤ 0,2	-	0,00	0,00	0,00	≤ 0,2	Tercapai
118	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS	persen	-	95	98,00	-	96,97	100,00	100,00	100,00	Tercapai
119	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari sama dengan 30 menit	menit	-	40	35,00	-	28,38	27,09	27,09	30,00	Tercapai
120	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit	menit	-	54	52,00	-	48,39	43,15	43,15	50,00	Tercapai
121	Skor Akreditasi RS	skor	-	terakreditasi snars	reakreditasi	-	terakreditasi snars	terakreditasi SNARS	terakreditasi SNARS	reakreditasi	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
123	Ketersediaan Sarpras Pengendali Banjir dan Rob	persen	-	72,09	81,40	-	86,96	88,37	38,00	43 unit	Belum Tercapai
124	Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus)	persen	14,29	71,4	85,70	-	78,57	92,86	92,86	100,00	Akan Tercapai
125	persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	persen	5,00	90	100,00	-	91,42	100,00	100,00	100,00	Tercapai
126	Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik	persen	N/A	88,24	94,44	-	90,00	90,00	90,00	94,74	Akan Tercapai
127	persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED	persen	N/A	33	36,00	-	33,23	43,98	43,98	40,00	Tercapai
128	Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	persen	-	71,4	85,70	80,00	71,43	82,86	82,86	100,00	Belum Tercapai
129	Peningkatan sarpas lokasi makam	persen	-	33	67,00	-	33,33	67	67,00	100,00	Belum Tercapai
130	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	persen	N/A	4,5	4,50	-	4,14	2,18	15125,00	16.286 unit	Akan Tercapai
131	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	-	92,21	92,21	-	89,31	89,31	89,31	92,21	Akan Tercapai
132	Persentase Trotoir dalam kondisi baik	persen	-	11,86	12,02	-	12,02	12,02	12,02	12,18	Akan Tercapai
133	Persentase Saluran Pematul Jalan dalam kondisi baik	persen	-	42,29	42,46	42,40	42,37	42,53	42,53	42,62	Akan Tercapai
134	Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	persen	-	100	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
136	persentase jaringan irigasi yang dipelihara	persen	-	76,73	77,33	-	NA	78,47	78,47	78,26	Tercapai
137	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	persen	-	60	65,02	62,05	58,90	62,40	62,40	70,14	Belum Tercapai
138	Persentase ketersediaan drainase lingkungan	persen	-	46,85	47,15	-	26,79	30,14	30,14	47,46	Belum Tercapai
139	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk	persen	-	91,99	93,99	83,95	88,60	88,79	88,79	95,99	Akan Tercapai
140	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	persen	-	94,65	95,99	-	99,26	99,32	99,32	97,33	Tercapai
141	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi mantap	persen	-	78,85	83,30	75,29	69,56	86,86	86,86	87,75	Akan Tercapai
142	Rasio Rumah Layak Huni	persen	-	95,95	97,35	97,29	96,93	97,30	97,30	98,74	Akan Tercapai
143	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	persen	-	4,05	2,65	2,71	3,07	2,70	2,70	1,26	Belum Tercapai
144	Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	persen	-	50	78,26	50,00	62,73	79,50	79,50	100,00	Belum Tercapai
145	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	persen	-	78,85	83,30	75,29	72,04	72,05	72,05	87,75	Belum Tercapai
146	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	persen	-	46,85	47,15	-	69,56	81,44	81,44	47,46	Tercapai
147	Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan	persen	-	91,99	93,99	83,95	83,33	88,79	88,79	95,99	Akan Tercapai
148	Cakupan akses sanitasi	persen	-	94,65	95,99	-	99,32	96,59	96,59	97,33	Akan Tercapai
149	Berkurangnya pelanggaran perda	kasus	-	1.500	1.000	-	1.382	1782,00	1782,00	500,00	Belum Tercapai
150	Waktu respon penanganan kebakaran	menit	-	15	15,00	-	15,50	15,00	15,00	15,00	Tercapai
151	Persentase korban bencana yang	persen	-	80	80,00	-	100,00	31,95	31,95	80,00	Belum

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ditangani										Tercapai
152	Persentase potensi kerawanan sosial yang dibina	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
153	Persentase tingkat partisipasi politik masyarakat	persen	tingkat partisipasi pemilu pada pilwalkot, pilgub, rata2 pilpres dan pilleg pada periode sblnnya	77,5	0	77,50	85,88	79,35	79,35	tingkat partisipasi mengikuti target KPU Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pilgub, pilpres, dan pilwalkot	Tercapai
154	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	persen	-	50	75,00	29,00	44,44	18,52	18,52	100,00	Belum Tercapai
155	persentase pemilih pemula yang terdidik politik	persen	-	34,96	0	17,12	17,47	17,21	17,21	21,11	Belum Tercapai
156	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
157	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
158	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
159	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	persen	-	100	100,00	-	99,35	98,71	98,71	100,00	Akan Tercapai
160	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
161	Persentase penurunan kasus narkoba	persen	N/A	19,05	23,53	-	12,00	11,76	11,76	23,08	Belum Tercapai
162	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	-	75	75,00	-	100,00	31,95	31,95	75,00	Belum Tercapai
163	peningkatan peran serta lembaga	persen	-	33,33	33,33	-	83,33	66,67	66,67	33,33	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana										
164	Persentase PMKS Tertangani	persen	-	6,95	6,95	-	7,29	8,56	47,44	41,68	Tercapai
165	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	persen	-	1,33	1,50	-	1,30	1,57	1,57	1,66	Akan Tercapai
166	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	persen	-	23,41	30,22	-	39,35	46,72	46,72	37,02	Tercapai
167	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
168	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	persen	-	58,33	66,67	-	75,00	75	75,00	75,00	Tercapai
169	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	-	68,89	69,26	-	72,32	66,45	66,45	69,64	Akan Tercapai
170	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	orang	-	800	800	560	1200	528,00	528,00	800,00	Belum Tercapai
171	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	persen	-	40	45,00	-	82,93	87,23	87,23	50,00	Tercapai
172	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	-	65	67,00	51,43	66,25	68,00	68,00	70,00	Akan Tercapai
173	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	persen	-	65	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	75,00	Belum Tercapai
174	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan penjanjian bersama	persen	-	54	54,00	-	75,00	60,00	60,00	55,00	Tercapai
175	Rasio kenaikan upah minimum	persen	-	8,72	8,73	-	8,03	8,66	8,66	8,74	Akan Tercapai
176	Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan	persen	-	46	48,00	43,00	47,80	45,83	45,83	50,00	Akan Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	persen	-	45	46,00	42,00	46,00	43,56	43,56	47,00	Akan Tercapai
178	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	64,38	64,48	-	60,95	58,29	58,29	64,58	Akan Tercapai
179	Predikat Kota Layak Anak	pratama	-	pratama	pratama	-	Madya	madya	madya	pratama	Tercapai
180	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	-	51,61	77,42	-	96,77	90,32	90,32	100,00	Akan Tercapai
181	Persentase kampung layak anak	persen	-	25	50,00	-	25,00	50,00	50,00	100,00	Belum Tercapai
182	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
183	Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	skor	-	91,1	91,80	76,02	91,13	83,00	83,00	92,50	Belum Tercapai
184	Peningkatan produksi tanaman pangan kg (persen per tahun)	persen	-	3	3,00	-	-8,00	11,54	11,54	3,00	Tercapai
185	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	skor	-	90,05	90,10	77,16	91,31	92,01	92,01	90,20	Tercapai
186	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota	persen	55,22	75	75,00	-	79,60	71,40	71,40	75,00	Akan Tercapai
187	Indeks Kualitas Air	indeks	-	43,46	43,47	-	46,00	35,33	35,33	43,48	Belum Tercapai
188	Indeks kualitas Udara	indeks	-	99,29	99,29	-	99,05	79,96	79,96	99,29	Belum Tercapai
189	Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	-	23,7	23,80	-	23,50	23,60	23,60	23,90	Akan Tercapai
190	Cakupan Layanan Persampahan	persen	-	86,05	89,74	-	65,84	76,07	76,07	93,43	Belum Tercapai
191	Tertib hukum lingkungan	persen	-	20	25,00	-	20,82	25,17	25,17	30,00	Belum Tercapai
192	Persentase sampah terangkut ke TPA	persen	69,05	61	74,00	-	79,15	92,53	92,53	72,00	Akan Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Persentase sampah terkelola di TPS3R	persen	30,95	39	26,00	-	20,85	7,47	7,47	43,00	Belum Tercapai
194	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	persen	-	75	87,00	-	75,00	43,58	43,58	100,00	Belum Tercapai
195	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	persen	-	80	90,00	-	80,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
196	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	persen	-	89	92,00	-	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
197	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	persen	-	0,1	0,10	-	NA	0,00	0,00	0,10	Belum Tercapai
198	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	persen	18,30	18,8	18,80	-	8,23	18,70	18,70	18,90	Akan Tercapai
199	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	persen	-	60	80,00	-	65,00	86,21	86,21	100,00	Belum Tercapai
200	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	persen	-	80	85,00	-	80,00	83,33	83,33	90,00	Akan Tercapai
201	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	persen	-	71,43	85,71	-	72,00	285,71	285,71	100 (70 titik ABT)	Tercapai
202	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	persen	-	50	75,00	-	74,00	266,67	266,67	100 (4 kampung)	Tercapai
203	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	persen	-	66,6	83,30	-	66,67	83,33	83,33	100 (24 titik)	Belum Tercapai
204	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	-	83,25	85,13	80,13	79,38	81,39	81,39	87,00	Akan Tercapai
205	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	perangkat daerah	-	9	13,00	-	1,00	1	1	26,00	Belum Tercapai
206	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data	pemangku kepentingan	-	26	26,00	-	26,00	26	26	78,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kependudukan	an									
207	Cakupan penerbitan KTP	persen	-	93	94,00	-	97,76	97,73	97,73	95,00	Tercapai
208	Cakupan penerbitan KK	persen	-	97	97,50	-	91,27	93,14	93,14	98,00	Akan Tercapai
209	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	persen	-	73	74,00	55,00	52,14	53,81	53,81	75,00	Belum Tercapai
210	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	persen	-	70	75,00	-	75,94	80,87	80,87	80,00	Tercapai
211	Persentase Swadaya Masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	persen	-	10	10,00	-	15,02	25,27	25,27	10,00	Tercapai
212	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
213	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	persen	-	33,33	66,67	-	33,33	66,67	66,67	100,00	Belum Tercapai
214	persentase kinerja kelembagaan masyarakat	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
215	Persentase akseptor KB	persen	-	62	64,00	-	65,06	69,02	69,02	66,00	Tercapai
216	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	persen	N/A	62	64,00	22,00	20,51	19,30	19,30	66,00	Belum Tercapai
217	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	persen	N/A	77,78	88,89	-	69,33	101,11	101,11	100,00	Tercapai
218	Kapasitas Jalan Perkotaan (satuan mobil penumpang per jam)		-	37.150	37.150	-	39.992	39992,36	39992,36	37.150	Tercapai
219	Skor Nilai dalam penghargaan WTN	skor	-	> 85	> 85	-	>85	> 85	> 85	> 85	Tercapai
220	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	persen	-	79,43	89,72	-	95,41	97,08	97,08	100,00	Akan Tercapai
221	Ketersediaan angkutan umum	persen	-	19,9	20,03	18,84	17,97	22,69	22,69	20,95	Tercapai
222	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	persen	-	92,22	92,34	-	84,52	83,21	83,21	92,40	Akan Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	persen	-	77,78	88,89	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
224	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
225	cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	kelompok	-	20	25,00	23,00	21,00	23,00	23,00	30,00	Belum Tercapai
226	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik".	persen	-	31,58	42,11	-	67,74	93,55	93,55	52,63	Tercapai
227	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	persen	-	66,67	83,33	63,64	70,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
228	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO)	persen	-	93,33	96,67	-	93,27	93,94	93,94	100,00	Akan Tercapai
229	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustudll)	persen	-	33,33	35,56	-	65,91	88,24	88,24	37,78	Tercapai
230	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	persen	-	21,65	24,74	-	20,00	24,74	24,74	27,84	Belum Tercapai
231	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	persen	-	87,1	93,55	-	87,10	100,00	100,00	100,00	Tercapai
232	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	persen	-	67	83,00	76,67	41,84	100,00	100,00	100,00	Tercapai
233	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan	persen	-	79,07	88,37	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik										
234	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	persen	-	59,26	62,96	-	71,43	74,07	74,07	66,67	Tercapai
235	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik"	persen	-	21,43	28,57	-	67,74	93,55	93,55	38,10	Tercapai
236	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
237	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp Trilyun	-	8,89	9,16	-	8,79	7,22	7,22	9,43	Belum Tercapai
238	Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	persen	-	53,28	56,81	-	99,39	69,82	69,82	60,27	Tercapai
239	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	570,00	13.000	14.000	-	22653,00	31603,00	31603,00	15.000	Tercapai
240	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	115,00	130	130,00	0	150	20,00	20,00	895,00	Belum Tercapai
241	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	22934,00	24.398	24.642	-	22.983	23.233	23233,00	24.888	Akan Tercapai
242	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	persen	81,11	93,33	96,67	-	79,29	73,00	73,00	100,00	Belum Tercapai
243	Persentase koperasi aktif	persen	-	98,34	98,76	-	84,38	89,77	89,77	99,18	Akan Tercapai
244	Persentase capaian target investasi	persen	-	78,27	88,53	-	256,02	264,18	5,15	1,95 triliun	Tercapai
245	Kepeminatan (Lol) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB	buah	-	75	75,00	0,00	68,00	0,00	0,00	85,00	Belum Tercapai
246	Nilai investasi per tahun (milyar)	milyar	-	232,8	200,10	-	3294,76	193,10	193,10	223,70	Belum

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rupiah									Tercapai
247	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	persen	-	93	94,00	85,00	83,45	97,27	97,27	95,00	Tercapai
248	Persentase ketersediaan sarana budaya	persen	-	2,15	2,15	-	2,15	2,47	2,47	2,69	Akan Tercapai
249	Persentase peningkatan kelompok budaya	persen	83 kel di 2015	92	96,00	-	129,60	47,20	59,00	125 kel di thn 2021	Belum Tercapai
250	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	event	-	2	2,00	-	2,00	1,00	5,00	12,00	Belum Tercapai
251	Event kesenian yang difasilitasi	event	-	7	7,00	-	21,00	6,00	40,00	42,00	Akan Tercapai
252	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	komunitas	-	5	5,00	-	100,00	59,00	165,00	30,00	Tercapai
253	Persentase pengunjung museum batik	persen	-	4,81	4,83	-	3,96	6,68	6,68	4,86	Tercapai
254	Kenaikan kunjungan Perpustakaan	persen	-	2	2,00	-	7,60	-46,79	-46,79	2,00	Belum Tercapai
255	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	indeks	-	26	26,50	14,00	36,21	15,40	15,40	27,00	Belum Tercapai
256	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	persen	-	11,11	18,52	-	11,11	7,41	7,41	25,93	Belum Tercapai
257	Persentase OPD+Kelurahan yang tertib administrasi kearsipan	persen	-	33,33	34,85	-	NA	35,38	35,38	36,36	Akan Tercapai
258	Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	persen	-	33,3	57,58	-	33,30	60,00	60,00	69,70	Belum Tercapai
259	Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	persen	-	100	42,11	34,84	53,33	35,38	35,38	63,16	Belum Tercapai
260	Arsip yang dilestarikan (statis)	arsip	-	9.000	10.000,00	-	9.296,00	18.496	18496,00	11.000	Tercapai
261	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	persen	-	1,42	1,42	-	0,39	1,04	1,04	1,42	Belum Tercapai
262	Prestasi olahraga tingkat provinsi (peringkat secara umum semua)	Jumlah	-	21	21,00	0,00	16,00	0,00	0,00	31,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	cabor)										
263	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	persen	-	26,67	36,36	-	26,67	106,67	106,67	85,71	Tercapai
264	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	orang	-	21	21,00	0,00	22,00	0,00	51,00	113,00	Belum Tercapai
265	Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	orang	-	3	3,00	0,00	1,00	0,00	3,00	14,00	Belum Tercapai
266	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	event	-	3	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	14,00	Belum Tercapai
267	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	persen	-	35	40,00	-	42,86	46,15	46,15	45,00	Tercapai
268	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	persen	100	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
269	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
270	Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar	persen	4,2 M di tahun 2015	94,55	96,36	90,91	37,73	96,46	5,30	5.5 M	Akan Tercapai
271	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	persen	187 M di Tahun 2015	2	2,00	1,95	13,23	-0,41	176,84	209 M	Belum Tercapai
272	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Milyar	4.2 M	2	2,00	1,95	13,23	-0,41	5,30	5.5 M	Akan Tercapai
273	Nelayan yang dibina	persen	600 orang	8	8,00	-	11,83	14,64	963,00	888 orang	Tercapai
274	Peningkatan produksi perikanan budidaya	persen	1382 ton	5	5,00	0,00	0,70	-53,97	809,03	1870,00	Belum Tercapai
275	peningkatan konsumsi makan ikan	persen	22,3 kg/kpt/tahun	6	6,00	-	12,73	8,10	33,64	28 kg/kpt/tahun	Tercapai
276	persentase pembudidaya yang dibina	persen	230 orang	30	30,00	-	30,00	29,81	1181,00	644 orang	Tercapai
277	Peningkatan <i>tenant</i> dan <i>non tenant</i>	persen	6 <i>tenant</i>	50	50,00	-	57,00	50,00	30,00	24 <i>tenant</i>	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Kunjungan wisata per tahun	orang	-	525.000	535.000	250.000	720.816	281858,00	281858,00	550000,00	Belum Tercapai
279	persentase destinasi wisata yang berkembang	persen	100,00	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
280	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	persen	100,00	1,55	1,69	-	1,55	0,60	0,60	1,85	Belum Tercapai
281	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	persen	N/A	25	25,00	-	25,00	25,00	25,00	100,00	Belum Tercapai
282	Peningkatan Produksi Pangan Hewani kg (persen per tahun)	persen	-	4	4,00	-	6,96	-35,98	-35,98	5,00	Belum Tercapai
283	Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	persen	-	4	4,00	-	6,96	-2,68	-2,68	4,00	Belum Tercapai
284	Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	persen	-	2	3,00	-	-34,00	-3,85	-3,85	5,00	Belum Tercapai
285	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	kasus	-	2.400	2400,00	-	0,00	2432,00	2432,00	2400,00	Akan Tercapai
286	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	persen	-	25	25,00	0,00	21,00	0,00	0,00	25,00	Belum Tercapai
287	Persentase peningkatan produksi padi	persen	-	3	3,00	-	-8,00	11,54	11,54	10,00	Tercapai
288	Pertumbuhan IKM Batik	IKM	-	780	790,00	-	780,00	790,00	790,00	800,00	Akan Tercapai
289	Pelaku IKM Batik Baru	IKM	-	10	10,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	Tercapai
290	Persentase IKM dalam LIK	persen	-	100	0	15,00	0,00	80,00	80,00	100,00	Belum Tercapai
291	Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	perda	-	1	0	-	1,00	0,00	1,00	1,00	Tercapai
292	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	IKM	-	45	50	30,00	75,00	30,00	205,00	255,00	Belum Tercapai
293	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	persen	-	-	0	-	-	100,00	100,00	100,00	Tercapai
294	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	persen	-	94	97,00	-	58,19	68,96	68,96	100,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	persen	-	90,43	94,68	-	100,00	101,06	101,06	100,00	Tercapai
296	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	12,00	16	17,00	-	21,00	21,00	21,00	18,00	Tercapai
297	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	UMKM	-	12	12,00	3,00	16,00	3,00	3,00	72,00	Belum Tercapai
298	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	10,00	60	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	300,00	Belum Tercapai
299	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	UMKM	-	70	70,00	-	70,00	70,00	70,00	70,00	Tercapai
300	Kawasan tertib PK5	kawasan	6,00	7	7,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00	Tercapai
301	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	persen	-	26,57	27,27	-	26,57	27,27	27,27	30,77	Belum Tercapai
302	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
303	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	persen	-	100	100,00	0,00	112,72	0,00	112,72	100,00	Tercapai
304	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
305	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
306	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
307	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	persen	-	100	100,00	-	89,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
308	Persentase ketersediaan dokumen	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Bidang Pemsosbud										
309	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
310	Persentase peningkatan PAD	persen	-	10	10,00	-	40,17	50,66	50,66	10,00	Tercapai
311	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	persen	-	4	4,00	-	4,90	22,73	22,73	4,50	Tercapai
312	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	persen	-	61,5	63,00	-	62,07	37,82	37,82	64,50	Belum Tercapai
313	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
314	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
315	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
316	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
317	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
318	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	persen	-	100	100,00	-	108,92	100,00	100,00	100,00	Tercapai
319	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	persen	-	100	100,00	-	27,71	100,00	100,00	100,00	Tercapai
320	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
321	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
322	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Profesionalitas Pegawai minimal 80	persen	-	83,87	93,55	60,54	60,54	n/a	n/a	100,00	Belum Tersedia Data
323	Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	persen	-	26	27,00	3,96	27,95	11,00	11,00	28,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	persen	-	28,83	30,66	1,38	0,62	1,23	1,23	32,53	Belum Tercapai
325	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	persen	-	23	28,00	-	23,00	40,05	40,05	25,00	Tercapai
326	Persentase Ketersediaan data PNS	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,60	100,60	100,00	Tercapai
327	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	persen	-	72	75,00	83,20	81,05	72,63	72,63	78,00	Akan Tercapai
328	Persentase PNS berkembang karier	persen	-	42	36,00	13,17	36,96	36,00	36,00	40,00	Akan Tercapai
329	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	-	45	45,00	-	54,55	80,00	80,00	50,00	Tercapai
330	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	persen	-	50	60,00	-	82,00	80,00	80,00	60,00	Tercapai
331	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	persen	-	95	95,00	0,00	100,00	100,00	100,00	95,00	Tercapai
332	Kategori evaluasi AKIP	Grade	C	B	B	-	BB	BB	BB	BB	Tercapai
333	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Skor	-	2,75	3	-	3,02	3,02	3,02	3,50	Belum Tercapai
334	Opini BPK atas LKD	Opini	WDP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
335	Persentase PD dengan IKM Baik	persen	N/A	93,55	96,77	-	93,94	95,38	95,38	100,00	Akan Tercapai
336	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	persen	-	50	78,95	-	67,74	38,71	38,71	100,00	Belum Tercapai
337	Efektivitas Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan	persen	-	98,25	98,50	-	NA	99,37	99,37	98,75	Tercapai
338	Level Kapabilitas APIP	Kategori	-	3 DC	3,00	-	3,00	3,00	3,00	4 DC	Belum Tercapai
339	Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	Skor	-	3	3,50	-	3,20	3,50	3,50	4,00	Belum Tercapai
340	Persentase penyelesaian kasus-	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil I										
341	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil II	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
342	Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	persen	-	32,26	48,39	-	35,48	41,94	41,94	64,52	Belum Tercapai
343	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	-	100	100,00	-	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
344	persentase perda inisiatif yang diterbitkan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
345	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	-	100	100,00	-	155,56	111,11	111,11	100,00	Tercapai
346	Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
347	Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan	Indeks	-	80	85,00	-	82,21	80,42	80,42	88,00	Akan Tercapai
348	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	persen	-	6,5	6,50	-	87,50	100,00	100,00	25,80	Tercapai
349	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	NA	-	12	14,00	-	11,09	11.09fe	11.09	15,00	Akan Tercapai
350	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,92	100,92	100,00	Tercapai
351	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,93	100,93	100,00	Tercapai
352	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
353	Tingkat kinerja bidang pembangunan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wilayah Barat										
354	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
355	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
356	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
357	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
358	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
359	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
360	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	persen	-	100	100,00	-	100,00	85,26	85,26	100,00	Belum Tercapai
361	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
362	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
363	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	persen	-	100	100,00	-	100,00	52,08	52,08	100,00	Belum Tercapai
364	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	persen	-	61,29	77,42	-	61,29	80,65	80,65	100,00	Belum Tercapai
365	Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	persen	-	48,39	64,52	-	54,84	67,74	67,74	80,65	Belum Tercapai
366	Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani	persen	-	72	72,00	-	100,00	100,00	100,00	80,00	Tercapai
367	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
368	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan		-	1	1,00	-	2,00	6,00	6,00	7,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
370	Persentase medical general check up	0	-	75	100,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	Belum Tercapai
371	Nilai LPPD	indeks	-	3,04	3,05	-	3,23	n/a	n/a	3,23	Belum Tersedia Data
372	Persentase efektivitas kerjasama daerah	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
373	Persentase realisasi patok batas wilayah	persen	-	33	67,00	-	51,40	92,52	92,52	100,00	Akan Tercapai
374	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	persen	-	100	100,00	-	99,57	99,37	99,37	100,00	Akan Tercapai
375	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	-	100	100,00	-	95,29	100,00	100,00	100,00	Tercapai
376	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
377	Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yang mendapatkan sertifikat/ syahadah	persen	-	90	95,00	-	99,07	100,00	100,00	100,00	Tercapai
378	Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial masyarakat	persen	-	90	95,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
379	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	-	85	90,00	-	100,00	100,00	100,00	95,00	Tercapai
380	Persentase kerjasama informasi dengan mas media yang efektif	persen	-	100	100,00	-	94,84	100,00	100,00	100,00	Tercapai
381	Persentase pelayanan keprotokoleraan dan kehumasan	persen	-	100	100,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
382	Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP	persen	-	60	70,00	-	64,24	70,00	70,00	80,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Persentase penyelesaian TLHP APF	persen	-	85	85,00	-	89,61	90,02	90,02	85,00	Tercapai
384	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	-	100	100,00	-	27,00	46,67	46,67	100,00	Belum Tercapai
385	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	persen	0	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
386	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	persen	0	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
387	Persentase kehadiran aparatur	persen	0	90	90,00	-	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
388	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0	100	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
389	Persentase capaian aparatur berkompeten	persen	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
390	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0	Tercapai
Aspek Daya Saing											
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	-	166,67	183,33	172,99	116,63	176,84	176,84	183,33	Akan Tercapai
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	-	23,41	23,88	8,41	21,89	30,78	30,78	24,36	Tercapai
3	nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	Juta US\$	-	18,82	19,19	-	22,92	25,42	25,42	19,58	Tercapai
4	Persentase penurunan Luas Genangan	persen	-	34,4	49,82	-	24,01	-63,67	-63,67	78,70	Belum Tercapai
5	Persentase lingkungan permukiman yang berkualitas	persen	-	98,97	99,55	99,61	99,61	99,79	99,79	100,00	Akan Tercapai
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan	persen	94,94	97,49	98,61	-	96,64	97,00	97,00	100,00	Akan Tercapai
7	Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan	persen	-	63,64	81,82	-	63,64	81,82	81,82	100,00	Belum Tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Target Akhir RPJMD	Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap	persen	-	76,64	77,58	-	84,06	80,03	80,03	78,48	Tercapai
9	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	Indeks	0,87	0,84	0,75	-	0,45	0,36	0,36	0,73	Tercapai
10	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	persen	-	71,4	85,70	80,00	71,43	82,86	82,86	100,00	Belum Tercapai
11	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	persen	-	87,88	90,75	88,17	88,17	90,74	90,74	93,63	Akan Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	52,67	52,72	-	52,92	50,84	50,84	52,76	Akan Tercapai
13	Persentase sekolah menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan	persen	-	44	49,00	40,00	93,08	n/a	n/a	54,00	Belum Tersedia Data
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	84	85,00	60,54	60,54	50,80	50,80	86,00	Belum Tercapai
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,88	70	78,00	-	68,97	68,91	68,91	85,00	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2020 pada 3 (tiga) Aspek Kinerja Pembangunan, dengan total indikator sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) Indikator, yang merupakan IKU Kota, Indikator Tujuan Kota, IKU Renstra dan Indikator Program dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Kesimpulan Capaian Berdasarkan Aspek dalam IKD

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan total 20 (dua puluh) indikator, status ketercapaian adalah sebagai berikut :
 - 5 (lima) indikator tercapai (tingkat capaian \geq 100 persen);
 - 5 (lima) indikator diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD (tingkat capaian 90-100 persen); dan
 - 10 (sepuluh) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian $<$ 90 persen).
2. Aspek Pelayanan Umum dengan total 390 (tiga ratus sembilan puluh) indikator, status ketercapaian adalah sebagai berikut :
 - 207 (dua ratus tujuh) indikator tercapai (tingkat capaian \geq 100 persen);
 - 61 (enam puluh satu) indikator diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD;
 - 114 (seratus empat belas) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian $<$ 90 persen); dan
 - 8 (delapan) indikator belum tersedia data.
3. Aspek Daya Saing dengan total 15 (lima belas) indikator, status ketercapaian adalah sebagai berikut :
 - 4 (empat) indikator tercapai (tingkat capaian \geq 100 persen);
 - 5 (lima) indikator diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD; dan
 - 5 (lima) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian $<$ 90 persen); dan
 - 1 (satu) indikator belum tersedia data.

b. Kesimpulan Capaian Berdasarkan Status Ketercapaian

1. Berdasarkan jumlah seluruh indikator 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) Indikator, dapat diketahui bahwa :
 - 216 (dua ratus enam belas) indikator atau 50,82 persen tercapai (tingkat capaian \geq 100 persen);
 - 71 (tujuh puluh satu) indikator atau 16,7 persen diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD (tingkat capaian 90-100 persen); dan
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) indikator atau 30,35 persen masih belum tercapai (tingkat capaian $<$ 90 persen); dan
 - 9 (sembilan) indikator atau 2,12 persen belum tersedia data.
2. Terhadap 129 indikator yang belum tercapai, telah dilakukan pemetaan penyebab ketidaktercapaian dengan hasil sebagai berikut :
 - 49 (empat puluh sembilan) indikator **masih relevan dengan Visi Misi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026**. Indikator tersebut akan menjadi kinerja dalam RPJMD 2021-2026, namun penempatan level indikator disesuaikan dengan cascading kinerja Kepala Daerah 2021-2026 dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil identifikasi terlampir dalam tabel Hasil Identifikasi Penyebab ketidaktercapaian IKD dan Pertimbangan Evaluasi;

- 36 (tiga puluh enam) indikator, setelah dilakukan evaluasi struktur kinerjanya akan **tetap digunakan dalam Renstra** Perangkat Daerah dalam level indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- 44 (empat puluh empat) Indikator, tidak digunakan dalam RPJMD dan/atau Renstra, karena indikator tersebut tidak lagi sesuai dengan struktur kinerja atau sudah terwakili dengan indikator lain yang lebih SMART.

Tabel 2.181 Hasil Identifikasi Penyebab ketidaktercapaian IKD dan Pertimbangan Evaluasi

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
1	Angka Kemiskinan	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> di tahun 2020	Indikator Makro, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
2	Konflik Sosial	1 kasus konflik sosial	Berkaitan visi-misi Kepala Daerah, untuk tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
3	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	Peningkatan luas genangan ini didasarkan titik genangan tertinggi dalam 1 (satu) tahun, yakni pada Bulan Juni 2020. Hal ini tidak dapat dihindari karena penyebab genangan tersebut adalah faktor alam yakni pasang air laut yang sangat tinggi.	Permasalahan krusial dan isu strategis, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
4	Persentase peningkatan penyelenggaraan event	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> di tahun 2020, larangan berkerumun	Berkaitan visi-misi Kepala Daerah, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD, dengan penyesuaian nomenklatur indikatornya
5	Pertumbuhan Ekonomi	dampak Pandemi <i>Covid-19</i> di tahun 2020	Indikator Makro, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> di tahun 2020	Indikator Makro, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
7	AKI	Adanya penyakit penyerta lain yang sulit diatasi selama masa kehamilan dan melahirkan	Permasalahan krusial, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
8	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Sangat mendukung capaian untuk indikator Makro TPT, untuk tetap digunakan dalam RPJMD
9	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	Dampak pandemi <i>Covid-19</i> , pengurangan kerumuman	Sangat mendukung capaian untuk indikator visi-misi, untuk tetap digunakan dalam RPJMD
10	Indeks Kualitas Air	Dalam kriteria perhitungan yang baru dari kementerian LHK ada kenaikan kelas sungai (dari kelas 3 menjadi kelas 2), sehingga mempengaruhi capaian	Permasalahan krusial, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
11	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	isu strategis dan berkaitan dengan visi-misi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
12	Kenaikan kunjungan Perpustakaan	Pandemi <i>Covid-19</i> yang menyebabkan kunjungan ke perpustakaan menurun	Mendukung target SDGS terkait peningkatan kemampuan literasi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
13	Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	Perubahan metode survei pola pangan harapan karena adanya pandemi. Dalam penetapan target, metode survei nya berdasarkan perhitungan mandiri namun demikian karena pandemi, metode survei PPH berdasarkan data susenas	isu strategis pada urusan pangan, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD namun perlu disesuaikan nomenklatur dan hierarki indikator sesuai peraturan yang berlaku
14	Kunjungan wisata per tahun	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> di tahun 2020	Mendukung target SDGS terkait promosi budaya dan produk lokal pada indikator jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara , tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
15	Level Kapabilitas APIP	Belum tercapai karena masih <i>on track</i> menuju target akhir RPJMD	Indikator urusan pengawasan, yang sangat mendukung pencapaian indikator dalam Visi-Misi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
16	Nilai investasi per tahun (milyar)	Dampak pandemi <i>Covid-19</i>	Indikator yang penting untuk mengukur pencapaian target indikator makro, pendapatan daerah dan lain-lain, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
17	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Penetapan target awal terlalu tinggi sehingga menemui kesulitan dalam pencapaian target.	Bagian dari isu strategis satu data indonesia, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
18	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	1. Dampak pandemi <i>Covid-19</i> sehingga omset para pedagang turun dan enggan tera timbangan. 2. Dampak pandemi <i>Covid-19</i> sehingga menunda layanan tera dirumah sakit	Indikator yang penting untuk mengukur pencapaian pendapatan daerah digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai.
19	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya yang sulit meningkat karena faktor alam (banjir hujan dibulan february dan rob di bulan mei, juni, okt, nov, des) serta dampak pembangunan tanggul pada tambak.	Permasalahan krusial pada urusan perikanan yang perlu menjadi perhatian, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
20	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	Pada saat pentargetan RPJMD akan dibangun 6 lokasi IPAL komunal dari APBD dan DAK. Namun sampai dengan tahun 2020 hanya terbangun 2 lokasi karena keterbatasan anggaran	Indikator yang penting untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai
21	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Indikator yang penting untuk mengukur dan mendukung capaian pada permasalahan penanganan genangan dan rob, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai
22	Persentase kampung layak anak	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan visi misi kepala daerah, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
23	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	Dampak pandemi <i>Covid-19</i> menyebabkan layanan ibu bersalin dengan resiko tinggi sulit dilakukan dengan optimal (keterbatasan ventilator dan antrian di RS Rujukan lainnya)	Indikator yang penting untuk mengukur dan mendukung capaian pada permasalahan angka kematian ibu yang merupakan indikator penting urusan kesehatan pada tingkat kota, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator
24	Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	Nilai produksi peternakan menurun cukup drastis pada jenis ternak yang bernilai tinggi (daging), sehingga total nilai produksi terlihat menurun signifikan	Permasalahan yang krusial pada urusan peternakan untuk menjaga ketersediaan pangan hewani bagi masyarakat, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator
25	Persentase ketersediaan drainase lingkungan	Capaian ini dapat maksimal karena tidak adanya penambahan drainase baru (jumlah drainase sudah cukup). Namun yang dilakukan adalah pembenahan/perbaikan/revitalisasi saluran drainase untuk mengatasi genangan	Indikator terkait drainase ini penting untuk mengukur dan menunjang pencapaian penanganan permasalahan Banjir dan Rob, namun perlu disesuaikan nomenklturnya yakni bukan ketersediaan drainase namun lebih pada kualitas drainase, mengingat berdasarkan hasil evaluasi jumlah drainase sudah cukup namun perlu dilakukan perbaikan kualitasnya, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
			disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator
26	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	Berdasarkan peraturan Deputi Bidang PengawasanKemenkop dan UKM RI Nomor : 06/PER/DEP/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan injam, terjadi kenaikan skor pada kelompok cukup sehat, semula skor 60 s/d 80 menjadi 66 s/d 80.jadi yang tadinya kategori koperasi cukup sehat menjadi kategori dalam pengawasan	Permasalahan krusial pada urusan koperasi dan UMKM karena status kesehatan koperasi akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi di Kota Pekalongan, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator
27	Persentase korban bencana alam yang ditangani	Korban bencana banjir dan rob yang tidak mau mengungsi tidak dihitung sebagai capaian penanganan korban bencana	Permasalahan krusial dan isu strategis pada urusan trantibum, khususnya terkait dengan penanganan bencana, selain itu sangat penting untuk mendukung pencapaian SPM pada Urusan Trantibum, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
28	Persentase korban bencana yang ditangani	Capaian ini hanya memperhitungkan penanganan korban bencana yg mengungsi (karena banjir dan rob) dibandingkan dengan korban terdampak bencana (mengungsi dan tidak mengungsi) dan tidak menghitung penanganan bagi korban bencana yang tidak mengungsi, yang dilakukan secara lintas koordinasi antar OPD, komunitas dan masyarakat	Permasalahan krusial dan isu strategis pada urusan trantibum, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
29	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> yang menyebabkan tidak terlaksananya Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan komponen nilai dari keterbukaan informasi public pada tingkat OPD sehingga OPD yang sebelumnya mengalami penurunan kategori nilai	Permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan visi misi kepala daerah, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
30	Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Indikator urusan pengawasan, yang sangat mendukung pencapaian indikator dalam Visi-Misi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD namun

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
			nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
31	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Indikator urusan pengawasan, yang sangat mendukung pencapaian indikator dalam Visi-Misi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD namun nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
32	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan krusial dan isu strategis pada urusan trantibum, Urusan Pemberdayaan Masyarakat digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
33	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	Belum ada fasilitasi akreditasi untuk fasyankes lainnya dan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium	Isu strategis pada urusan kesehatan digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
34	Persentase sampah terkelola di TPS3R	Kesadaran pengelolaan sampah di TPS3R yang masih rendah.	Indikator yang penting untuk mengukur dan mencapai target peningkatan kualitas lingkungan hidup, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai
35	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	Dampak pandemi Covid-19	Mendukung target SDGS terkait peningkatan kemampuan literasi, tetap digunakan sebagai indikator dalam RPJMD
36	Tertib hukum lingkungan	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Indikator yang penting untuk mengukur dan mencapai target peningkatan kualitas lingkungan hidup, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada level indikator yang sesuai
37	Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan visi misi kepala daerah, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan sesuai dengan struktur kinerja

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
38	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan visi misi kepala daerah, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan sesuai dengan struktur kinerja
39	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Dikarenakan Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan	Indikator ini sebaiknya tetap digunakan untuk pengukuran kinerja pada kecamatan, namun formulasi perlu diperbaiki
40	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	Dikarenakan Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan	Indikator ini sebaiknya tetap digunakan untuk pengukuran kinerja pada kecamatan, namun formulasi perlu diperbaiki
41	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan krusial dan isu strategis Pemuda dan Olahraga digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 namun nomenklatur perlu disesuaikan dengan struktur kinerja
42	Indeks Profesionalitas ASN	Dampak Pandemi menyebabkan pelaksanaan diklat / upaya peningkatan kualitas ASN sulit dilakukan	Indikator yang penting untuk mengukur dan mendukung capaian pada tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator
43	Persentase penurunan Luas Genangan	Adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan pasang air laut pada awal juni 2020, terjadi peningkatan genangan sebesar 1730 hektar	Indikator yang penting untuk mengukur dan mendukung capaian pada permasalahan penanganan genangan dan rob , digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026
44	Ketersediaan Sarpras Pengendali Banjir dan Rob	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Indikator terkait drainase ini penting untuk mengukur dan menunjang pencapaian penanganan permasalahan Banjir dan Rob, namun perlu disesuaikan nomenklaturnya yakni bukan ketersediaan jumlah sarpras namun lebih pada kualitas sarpras, mengingat perlu dilakukan peningkatan kualitasnya, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026, namun perlu disesuaikan nomenklatur sesuai dengan level indikator

No	Indikator yang belum tercapai	Penyebab Belum Tercapai	Pertimbangan hasil evaluasi untuk RPJMD 2021-2026
45	Cakupan Layanan Persampahan	Kapasitas infrastruktur TPA yang terbatas dan tingginya sampah yang belum ditangani masyarakat	Indikator yang penting untuk mengukur dan mencapai target peningkatan kualitas lingkungan hidup, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai
46	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Dampak pandemi <i>Covid-19</i> sehingga penyelenggaraan program penempatan tenaga kerja melalui job fair tidak dilaksanakan	Sangat mendukung capaian untuk indikator Makro TPT, untuk tetap digunakan dalam RPJMD
47	APM PAUD	Masih banyak anak usia jenjang PAUD yang sudah bersekolah di SD dan MI	Indikator ini sebaiknya tetap digunakan dalam RPJMD, namun perlu penyesuaian dalam nomenklatur sehingga dapat digunakan sekaligus untuk pengukuran SPM Pendidikan
48	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Sering terjadi banjir rob di parkiran truk TPI, sehingga suplay ikan dari truk juwana turun 43,9 %. Namun demikian produksi perikanan tangkap dari kapal sebenarnya mengalami kenaikan 13,06%	Permasalahan krusial pada urusan perikanan yang perlu menjadi perhatian, digunakan sebagai indikator dalam RPJMD periode 2021-2026 pada urusan yang sesuai
49	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum tercapai namun diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2021	Permasalahan krusial dan isu strategis tingkat kota terkait tata kelola pemerintahan, untuk tetap digunakan dalam RPJMD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.2. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

2.5.2.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2020, ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan :

1. Pada Pendidikan Dasar, jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 15 tahun mendapatkan layanan pendidikan dasar (Dikdas) yaitu sebanyak 41.886 orang dari target yang seharusnya 43.648 orang atau sebesar 89,79 persen. Karena banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah luar kota dan juga tidak sedikit penduduk Kota Pekalongan yang berdomisili di luar kota dan menyekolahkan anaknya di luar kota juga;
2. Pada Pendidikan Kesetaraan, Jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 18 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal dan mendapatkan layanan pendidikan

kesetaraan yaitu sebanyak 1.678 orang dari target yang seharusnya 6.582 orang atau sebesar 25,49 persen. Disebabkan belum adanya pendampingan khusus bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga mempunyai motivasi untuk bersekolah, dan juga tidak adanya proses pembelajaran tatap muka;

3. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Pekalongan usia 5 – 6 tahun mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yaitu sebanyak 10.045 orang dari target yang seharusnya 10.439 orang atau sebesar 96,23 persen. Karena banyak orang tua utamanya yang tidak mampu tidak menyekolahkan anaknya di PAUD.

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.182 berikut.

Tabel 2.182 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/ MTs)	100 persen	89,79 persen	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	25,49 persen	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	96,23 persen	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

2.5.2.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.183 berikut.

Tabel 2.183 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	98,22 persen	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100 persen	99,59 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100 persen	88,39 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	52,54 persen	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	28,57 persen	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	70,57 persen	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	27,1 persen	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga <i>Tuberculosis</i> (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	100 persen	78,43 persen	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinfeksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari ke 12 indikator tersebut, sebanyak 4 indikator mencapai target, dan sebanyak 8 indikator tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan :

1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6.122 orang atau sebesar 98,22 persen. Belum tercapai dikarenakan adanya kasus kematian pada ibu hamil dan ada beberapa ibu hamil yang pindah tempat tinggal;
2. Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.881 orang atau sebesar 99,59 persen dikarenakan adanya kasus kematian pada bayi;
3. Pada pelayanan kesehatan Balita, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 22.614 orang atau sebesar 88,39 persen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi *Covid-19* Posyandu banyak yang tutup sehingga banyak balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan balita;
4. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah warga negara pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 23.280 orang atau sebesar 52,54 persen. Hal ini disebabkan karena sekolah libur selama pandemi sehingga tidak semua siswa hadir atau diijinkan hadir saat pemeriksaan;
5. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah warga negara pada usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 59.357 orang atau sebesar 28,57 persen. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :
 - a. Pelayanan kesehatan usia produktif di masa pandemi, Posbindu PTM baru diijinkan mulai akhir Juli 2020, bulan September dihentikan lagi dan baru dimulai akhir bulan Oktober 2020 dan tidak semua Posbindu tetapi hanya Posbindu yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan melaksanakan kegiatan;
 - b. Target sasaran untuk pelayanan kesehatan/skrining kesehatan usia produktif terlalu tinggi;
 - c. Bahan pemeriksaan untuk usia produktif untuk gula darah belum mencukupi.
6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah warga negara pada usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 19.563 orang atau sebesar 70,57 persen. Hal ini dikarenakan masa Pandemi poksila tidak dibuka;
7. Pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 20.834 orang atau sebesar 27,10 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dari sasaran pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang semula 6 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun menjadi 32,2 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun sehingga menyebabkan sasarannya terlalu tinggi. Selain itu kegiatan Posbindu PTM untuk deteksi dini faktor resiko penyakit hipertensi, baru diijinkan mulai/buka akhir Juli 2020, dihentikan lagi pada September dan Oktober 2020 mulai kembali akhir Oktober 2020. Tidak semua Posbindu PTM mulai kegiatan, tetapi hanya Posbindu PTM yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan mulai kegiatan;
8. Pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 4.228 orang atau sebesar 78,43 persen. Hal ini dikarenakan kader kesehatan tidak dapat bekerja secara optimal dan penyuluhan kesehatan terkait tuberkolosis terhentisaat adanya pandemi *Covid-19*.

2.5.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.184 berikut.

Tabel 2.184 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/Tidak Tercapai
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sejumlah 31.321 KK untuk Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan sejumlah 60.627 KK untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik air minum.

2.5.2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.185 berikut.

Tabel 2.185 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/Tidak Tercapai
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
	program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut mencapai target karena untuk Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana Kab/Kota dapat dipenuhi yaitu sejumlah 66 orang, dan untuk fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Dearah Kab/Kota sejumlah 16 orang juga terpenuhi (relokasi warga yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Krapyak).

2.5.2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.186 berikut.

Tabel 2.186 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai / Tidak Tercapai
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	8,43 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	2,69 persen	Tidak Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai / Tidak Tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, 3 indikator mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target, dikarenakan :

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (jumlah warga negara yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota) sebanyak 26.306 orang atau sebesar 8,43 persen, terdiri dari :
 - a. Korban/terdampak banjir sebanyak 15.054 orang;
 - b. Korban/terdampak gelombang pasang/ abrasi sebanyak 9.158 orang;
 - c. Korban/terdampak angin puting beliung/ angin kencang/ cuaca ekstrem sebanyak 2.094 orang.
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat kab/kota), hanya sebanyak 8.404 orang yang bersedia untuk dievakuasi dan diungsikan ke posko pengungsian orang atau sebesar 2,69 persen.

2.5.2.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.187 berikut.

Tabel 2.187 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, semua dapat tercapai sesuai target 100 persen.

2.5.3. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDG's ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDG's Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.5.3.1. Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 47 target dan 77 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 65 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel 2.188 berikut.

**Tabel 2.188 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial
di Kota Pekalongan Tahun 2020**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	persen	5,70	7,17	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERIN AKER	persen		NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peserta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
1.3.2 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,18	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	10.695	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100 persen	90,02	Tidak Tercapai
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen	64	67,35	Tercapai
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKI M	persen	93,99	97,09	Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	DINPERKI M	persen	95,99	91,72	Tidak Tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	DINPERKI M	persen	1,77	3,79	Tercapai
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	95,5	82,93	Tidak Tercapai
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	77,5	60,89	Tidak Tercapai
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	55,58	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	DINDUKC APIL	persen	55	53,81	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	DINSOS P2KB	persen	PM	9	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	12.037.798.900	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak Tercapai
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERP A	skor	77,16	92,01	Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DINPERP A	persen	NA	NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	DINKES	persen	2,1	9,10	Tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat)	Prevalensi stunting (pendek dan	DINKES	persen	< 12 persen	9,42	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita					
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	DINKES	persen	6,85	5,82	Tercapai
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	DINKES	persen	<0,5	0,16	Tercapai
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah kasus anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	9,02	8,33	Tercapai
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	persen	47 persen	53,4	Tercapai
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERP A	skor	76,02	77,16	Tercapai
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	102	152,41	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terakhirnya di fasilitas kesehatan							
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	12,30	10,84	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	6,7	4,91	Tidak Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	9,6	8,81	Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Cakupan UCI desa	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Jumlah kasus HIV/ AIDS	DINKES	orang	100	Jumlah kasus HIV umur 15-49 tahun = 99	Tercapai
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	DINKES	kasus	-	172,31	Tidak Tercapai
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Angka Kesakitan Malaria	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	-	NA	Data tidak tersedia (tidak ada kasus malaria)
3.3.4 (a)	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah kasus hepatitis B	DINKES	kasus	PM	Jumlah kasus Hepatitis B = 45 kasus	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	70,83	Tidak Tercapai
3.3.5 (b)	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	Angka kasus filaria yang ditangani= 2 kasus	Tidak Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1	Prevalensi	Proporsi kasus	Cakupan	DINKES	persen	100	27,10	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b)	tekanan darah tinggi	hipertensi di fasyankes	pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Deteksi dini obesitas pada penduduk usia 15+ tahun di fasyankes	DINKES	persen	18	3,77	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahgunaan narkotika	KESBANG POL	orang	PM	11	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANG POL	orang		NA	Data tidak tersedia (indikator provinsi)
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	KESBANG POL	orang	PM	22	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	KESBANG POL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika	Prevalensi penyalahgunaan narkotika	Prevalensi penyalahgunaan narkotika	BNN/ Kesbangpol	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB		PM	67,35	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,252	2,166	Tercapai
3.7.2	Angka	Angka	Angka	DINSOS		24,00	19,63	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b)	penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	P2KB				
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1 (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need KB	DINSOS P2KB	persen	12,00	18,18	Tidak Tercapai
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	persen	PM	24,48 persen	Tidak ada target tetapi data tersedia
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	69,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (b)	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	68,42	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (c)	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B		DINDIK			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	100	101,31	Tercapai
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	100	105,44	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	60,28	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	62,5	60,28	Tidak Tercapai
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	1) APM SD/ MI/ sederajat 2) APM SMP/ MTs/ Sederajat (2018)	DINDIK		1) 96 2) 77,5	1) 82,93 2) 60,89	Tidak Tercapai
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Angka melek huruf	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi	persen Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/ MI dan SMP/ MTs sesuai standar nasional pendidikan	Dindik	persen	PM	99,7	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	semua (WASH)							
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/ SMALB/ MA/ SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	52,71	50,47	Tidak Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	SK (Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 463/806 Tahun 2020 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan, Keputusan Wali Kota Nomor 463/807 thn 2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, Perwal Nomor 65 B Thn 2020 tentang LPPAR = 3	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	perempuan dewasa = 27/ 110,241*100 = 0,02449	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	anak perempuan = 6/ 12,177= 0,04927	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang	persentase korban kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA	persen	100	=(27 perempuan+ 16 anak)*100= 100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	komprehensif	terlaporkan terlayani	dan anak yang terlaporkan terlayani					
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	250	245	Tercapai
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	persen	PM	36,07	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reuiv dari konferensikonferensi tersebut.								
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	12	18,18	Tidak Tercapai
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		64	67,35	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel 2.189 berikut.

Tabel 2.189 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN-ESDM-BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	95,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS			NA	Data tidak tersedia (belum ada bauran energi terbarukan di Kota Pekalongan)
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS / Bappeda	persen	5.70	-1,87	Tidak tercapai
8.1.1 (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	35,22	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS			NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Kota
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS	persen		NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen		NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah Minimum Kota	Dinperinaker	Rupiah	PM	2.139.754,00	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	3,60	7,02	Tidak Tercapai
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS			NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Jumlah pelatihan untuk pemuda	DINPERINAKER	orang	560	528	Tidak Tercapai
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	224	Tidak tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	534.400	283.658	Tidak tercapai
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPSTP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	DPMPSTP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	persen	77,58	80,03	Tercapai
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinhub	dermaga		NA	Data tidak tersedia
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Dinhub	pelabuhan		NA	Data tidak tersedia
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMI NFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
9.C.1. (a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
9.c.1.	Proporsi individu	Proporsi individu	Proporsi	BPS	Persen		NA	Data tidak

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b)	yang menggunakan internet	yang menggunakan internet	individu yang menggunakan internet					tersedia (BPS tidak melakukan survei)
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1 *	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS / Bappeda	-	0,34	0,314	Tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS / Bappeda	persen	5,70	7,17	Tidak tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS			NA	Data tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	DINPERIN AKER			NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerja

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								an dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peseta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERIN AKER	kegiatan		NA	Tidak ada kegiatan karena pandemi Covid-19
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKD/ BPS		981.36 1.482. 000	485.317.8 42.324,61	Tidak tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BKD		218.02 0.320. 000	NA	Data di BKD hanya target dan realisasi Pendapatan dan penerimaan pajak sedangkan data PDP ada di BPS
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	DINKOMINFO			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan	Proporsi individu yang menggunakan	Proporsi individu yang menggunakan	BPS			NA	Data Susenas BPS

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	internet	internet	internet					
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS			NA	data tersedia sampai level provinsi, untuk kabupaten/ kota susah diperoleh (pelabuhan sebagai titik ekspor impor)
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs Kota	Bappeda	indikator	222	195	Tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 6 goals 56 target dan 69 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota

Pekalongan adalah sebanyak 19 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel 2.190 berikut.

Tabel 2.190 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKI M	Persen	93,99	97,09	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKI M	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKI M	Persen	95,99	91,72	Tidak tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKI M	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	15	21	Tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH		50	50	Tercapai
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	97,35	97,30	Tidak tercapai
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2. 1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) Renstra)
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DPUPR			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD			NA	Data tidak tersedia (Kota Pekalongan belum memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	89,74	87,98	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan	Jumlah kota hijau yang menyediakan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	18,8	8,23	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang						
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak tercapai
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1 (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/tahun	PM	4.416	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	persen	26	26	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) ISO 14001
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak tercapai
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1 *	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha		-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		100	190	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 1 goals 12 target dan 23 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 13 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel 2.191 berikut.

Tabel 2.191 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES	kasus		NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang	Proporsi penduduk yang	Proporsi penduduk	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir					di luar kewenangan Pemkot)
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	DPMPPA		PM	anak L = 5/13,095*100 = 0,0382 , anak P = 6/12,177*100 = 0,0493	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	5	5	Tercapai
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum				NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS			NA	Data tersedia pada level nasional
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Realisasi APBD Pemerintah Kota	BKD		1.012.737.890.000	944.840.460.674	Serapan Anggaran sebesar : 93,30 persen
16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	BKD	WTP	WTP	WTP	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BAGIAN ORGANISASI		B	BB	Tercapai
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBELANJAN	persen	100	92	Tidak Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	IKM	BAGIAN ORGANISASI		83	80,42	Tidak Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	PM	36.07	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga	-			NA	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Demokrasi.					(bukan kewenangan kota)
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirnya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirnya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirnya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKC APIL	persen	PM	99,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	DINDUKC APIL			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKC APIL	Persen	PM	93,46	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10. 1.(a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10. 1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	27 pengaduan	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10. 2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, staurori	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi	DINKOMI NFO	Persen	PM	92,86	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi		berbasis komunitas					
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMI NFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Prospek perekonomian Kota Pekalongan diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 4,8 persen. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Jika wabah *Covid-19* dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berpotensi tumbuh tinggi.
- 2) Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi *Covid-19* yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan;
- 3) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscout* kredit.
- 4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), pembangunan obyek wisata pasir kencana, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus *Covid-19*, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non Migas.
- c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- d. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *Covid-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2)

perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

- e. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *Covid-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- f. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *Covid-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *Covid-19*.
- g. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- h. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
- i. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.

Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas *Covid-19*. Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, selanjutnya akan dibahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada perodesasi

RPJMD mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH

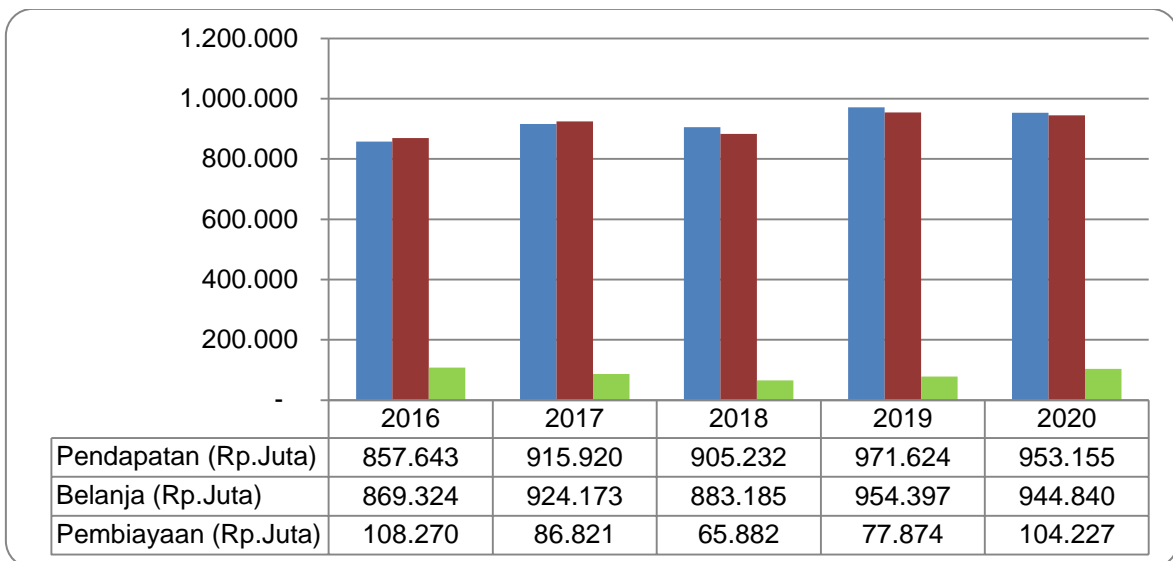
Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Pekalongan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti disajikan dalam gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,77 persen, dimana pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 857.642.985.779,- menjadi Rp. 953.155.394.615,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar 6,90 persen dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 0,99 persen. Walaupun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, pendapatan daerah untuk tahun 2018 mengalami penurunan. Yang berkontribusi terhadap penurunan pendapatan daerah ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Berikut penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 :

- 1) Retribusi Terminal yang kewenangannya ditarik oleh pemerintah pusat.
- 2) Dengan berlakunya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 bahwa sewa nilai titik strategis pada tanah negara, jalan nasional dan provinsi dipungut oleh Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemerintah Kota Pekalongan tidak berhak memungut retribusi sewa nilai titik strategis pada jalan nasional maupun jalan provinsi
- 3) Beberapa retribusi yang kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan retribusi.
- 4) Pada awal tahun 2018 Kota Pekalongan mengalami musibah terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Musibah ini yang menjadi salah satu faktor penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar.
- 5) Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan TPI karena :
 - Adanya perubahan *fishing ground* untuk kapal diatas 100GT beralih ke perairan Papua dan Natuna.
 - Pendangkalan alur muara sungai sehingga kapal ikan ukuran besar tidak dapat masuk pelabuhan Pekalongan
 - Tidak adanya pembeli ikan dengan kapasitas besar.

- 6) Banjir rob di Pantai Slamaran maupun Pantai Sari sehingga jumlah pengunjung rekreasi menjadi turun, yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 7) Terjadinya penurunan suku bunga deposito, dan Pemerintah Kota Pekalongan melakukan kebijakan menarik beberapa deposito di Bank-Bank, sehingga menurunkan realisasi pada Penerimaan Bunga Deposito.
- 8) Turunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambahkan Penyertaan Modalnya pada BUMD-BUMD milik Pemerintah Kota Pekalongan sehingga berkurangnya persentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD-BUMD milik Pemerintah Kota Pekalongan yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali.
- 9) Realisasi Pendapatan BLUD dibawah 75 persen karena terbitnya beberapa Peraturan Direktur BPJS dan kebijakan BPJS yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya sistem vedika yang menyebabkan segala penyelesaian klaim tidak berakhir di bulan pengklaiman (pending klaim)
 - Pembatasan pelayanan di Rumah Sakit untuk jenis pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, rehabilitasi medik sehingga mengurangi potensi pendapatan.
 - Adanya perlakuan rujukan berjenjang pada fasilitas kesehatan.
 - Adanya aturan jam waktu layanan dokter (pembatasan kuota pasien rajal perhari).
 - Pemberlakuan laporan polisi untuk kasus kecelakaan kerja yang memberlakukan manfaat dari pinjaman lain seperti Jasa Raharja, Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan.

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel 3.2.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 3.3. Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa SiLPA 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin baik.

**Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb (persen)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	857.642.985.779	915.920.377.495	905.231.572.568	971.624.464.121	953.155.394.615	2,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.604.460.870	192.002.871.181	179.224.408.698	212.777.435.294	229.867.935.361	6,90
Pendapatan Pajak Daerah	52.837.473.081	61.252.652.690	70.561.333.701	87.578.474.262	76.255.221.742	10,58
Hasil Retribusi Daerah	16.799.183.132	15.108.809.697	15.985.706.343	16.667.656.492	14.870.124.919	-2,69
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.977.587.231	4.966.677.891	5.920.239.113	6.101.173.105	5.821.083.050	-8,14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98.990.217.426	110.674.730.903	86.757.129.541	102.430.131.435	132.921.505.650	9,51
PENDAPATAN TRANSFER	677.038.524.909	723.917.506.314	702.228.404.048	734.897.351.238	700.838.013.854	0,99
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	598.621.163.830	636.772.088.314	619.629.794.858	643.593.762.948	625.666.101.409	1,19
Bagi Hasil Pajak	30.837.688.145	26.992.327.956	25.352.861.062	17.751.480.700	27.182.869.066	1,15
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.285.550.531	1.116.743.699	1.340.170.369	1.275.750.200	1.780.895.008	10,42
Dana Alokasi Umum	457.085.256.000	449.055.738.000	449.055.738.000	475.842.089.000	433.354.907.000	-1,18
Dana Alokasi Khusus	109.412.669.154	108.994.059.659	110.631.025.427	115.463.501.048	104.991.517.335	-0,90
Dana Insentif Daerah	-	50.613.219.000	33.250.000.000	33.260.942.000	58.355.913.000	10,29
Transfer Pemerintah Provinsi	78.417.361.079	87.145.418.000	82.598.609.190	91.303.588.290	75.171.912.445	-0,30
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	54.871.177.079	59.928.564.000	75.273.768.190	72.167.436.245	63.377.912.445	4,63
Bantuan Keuangan Provinsi	23.546.184.000	27.216.854.000	7.324.841.000	19.136.152.045	11.794.000.000	16,35
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000	-	23.778.759.822	23.949.677.589	22.449.445.400	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	-	23.778.759.822	23.949.677.589	22.449.445.400	-49,64

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

**Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb (persen)
	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	869.324.083.854	924.172.718.082	883.184.894.707	954.397.012.827	944.840.460.676	2,23
BELANJA OPERASI	665.776.828.523	701.915.666.134	734.880.485.431	771.512.589.320	760.543.104.728	3,42
Belanja Pegawai	356.664.316.161	319.969.885.876	352.531.365.055	390.898.339.975	394.421.563.850	2,92
Belanja Barang dan Jasa	264.202.277.152	327.506.725.286	317.053.705.432	336.953.793.745	327.664.407.878	6,07
Belanja Bunga	-	-	-	6.803.500	-	-
Belanja Subsidi	-	548.400.000	-	-	-	-
Belanja Hibah	40.945.754.210	45.614.517.972	53.429.595.944	30.031.913.000	36.250.151.000	1,36
Belanja Bantuan Sosial	3.964.481.000	8.276.137.000	11.865.819.000	13.621.739.100	2.206.982.000	20,78
BELANJA MODAL	201.951.325.331	220.686.788.384	146.382.593.476	182.153.984.579	126.926.093.953	-7,57
Belanja Modal Tanah	5.030.857.468	44.431.555.486	19.140.412.917	3.912.172.520	13.144.232.065	220,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.254.998.044	45.394.389.632	30.284.354.560	34.699.453.221	29.045.998.699	-13,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.211.214.723	61.475.605.346	53.081.582.337	71.367.203.715	33.911.226.174	-6,97
Belanja Modal Jalan	80.674.555.346	66.851.894.889	38.704.725.930	68.876.027.946	50.106.236.575	-2,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.576.186.800	2.011.726.350	5.171.517.732	3.299.127.177	644.610.440	17,01
Belanja Aset Lainnya	203.512.950	521.616.681	-	-	73.790.000	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.595.930.000	1.570.263.564	1.921.815.800	730.438.928	57.371.261.995	1928,29
Belanja Tak Terduga	1.595.930.000	1.570.263.564	1.921.815.800	730.438.928	57.371.261.995	1928,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

**Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb (persen)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PEMBIAYAAN	108.269.996.684	86.820.709.233	65.881.529.315	77.874.259.018	104.227.367.651	2,03
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.528.996.684	96.715.284.571	78.606.608.989	92.028.388.994	108.747.997.651	-0,47
Penggunaan SiLPA	118.485.815.372	96.588.644.609	78.568.368.646	87.928.207.176	95.101.710.312	-4,27
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	300.000.000	12.704.351.488	
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	1.800.000.000	-	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	43.181.312	126.639.962	38.240.343	2.000.181.818	941.935.851	1751,34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.259.000.000	9.894.575.338	12.725.079.674	14.154.129.976	4.520.630.000	-7,94
Pembentukan Dana Cadangan	-	4.094.575.338	4.302.387.924	4.607.388.226	-	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.259.000.000	5.800.000.000	8.400.000.000	7.742.000.000	4.518.000.000	-12,03
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	22.691.750	1.804.741.750	2.630.000	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kota Pekalongan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. Rincian Neraca Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Neraca Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016 (Rp. Milyar)	2017 (Rp. Milyar)	2018 (Rp. Milyar)	2019 (Rp. Milyar)	2020 (Rp. Milyar)	Rata-rata Pertumbu han
Aset Lancar						
Kas	98,07	78,72	87,93	95,10	112,54	4,62
Piutang	18,32	15,44	18,33	24,32	29,55	14,29
Piutang lainnya	8,94	15,77	11,19	19,06	9,28	76,53
Persediaan	9,06	11,16	12,21	15,59	36,75	49,00
Biaya dibayar dimuka	0,03	0,06	0,13	0,14	0,04	35,02
Jumlah aset lancar	134,42	121,16	129,79	154,21	188,16	9,52
Investasi jangka Panjang				-		
Investasi non permanen	3,19	3,19	3,20	1,20	0,28	-34,78
Investasi permanen	71,30	76,36	84,51	90,95	95,40	7,57
Jumlah investasi jangka Panjang	74,49	79,55	87,71	92,15	95,68	6,48
Aset tetap				-		
Tanah	1.036,97	1.014,73	1.048,42	1.311,20	1.333,44	6,98
Peralatan dan mesin	319,03	354,48	383,32	455,16	540,27	14,17
Gedung dan bangunan	633,77	706,51	697,20	763,79	805,61	6,30
Jalan, jaringan dan instalansi	534,75	625,26	723,05	829,61	883,80	13,46
Aset tetap lainnya	25,51	31,56	35,76	35,87	33,94	7,99
Konstruksi dalam pengerjaan	43,82	27,97	2,38	16,58	1,17	93,92
Akumulasi penyusutan	-660,63	-754,52	-825,68	-959,64	-1.105,10	13,76
Jumlah aset tetap	1.933,22	2.005,98	2.064,45	2.452,57	2.493,13	6,78
Dana cadangan				-		
Dana cadangan	-	4,09	8,40	12,70	-	-
Jumlah dana cadangan	-	4,09	8,40	12,70	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-
Tagihan piutang penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan pihak ketiga	12,33	16,81	16,81	12,58	12,33	2,29
Aset tidak berwujud	13,70	0,95	1,25	1,28	1,03	-19,63
Aset lain-lain	8,74	82,46	154,43	130,96	131,37	229,00
Aset rusak berat/proses penghapusan				-	-	
Uang Jaminan	0,15	0,17	0,22	0,22	0,23	11,49
Jumlah aset lainnya	34,92	100,39	172,71	145,04	144,96	60,86
JUMLAH ASET	2.177,05	2.311,17	2.463,05	2.856,67	2.921,92	7,75
KEWAJIBAN				-		

Uraian	2016 (Rp. Milyar)	2017 (Rp. Milyar)	2018 (Rp. Milyar)	2019 (Rp. Milyar)	2020 (Rp. Milyar)	Rata-rata Pertumbu han
Kewajiban jangka pendek						
Utang perhitungan pihak ketiga	0,03	0,15	0,00	-	0,00	49,04
Utang bunga	-	-	-	-	-	-
Utang pajak	-	-	-	-	-	-
Bagian lancar utang jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1,29	1,24	1,29	1,37	3,22	35,36
Utang Belanja	4,39	5,47	14,00	24,21	14,15	52,96
Utang jangka pendek lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek pada Kemitraan Pihak ketiga	3,99	6,18	0,04	0,04	0,07	
Utang uang jaminan	0,15	0,17	0,22	0,22	0,23	11,49
Jumlah kewajiban jangka pendek	9,85	13,22	15,54	25,84	17,68	21,62
Kewajiban jangka Panjang						-
Utang dalam negeri						-
Utang luar negeri						-
Jumlah kewajiban jangka Panjang						-
Jumlah kewajiban	9,85	13,22	15,54	25,84	17,68	21,62
				-		-
EKUITAS DANA				-		-
Ekuitas Dana	2.167,20	2.297,95	2.447,51	2.830,83	2.904,24	7,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.177,05	2.311,17	2.463,05	2.856,67	2.921,92	7,75

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

1. Rasio Kemandirian Daerah;
2. Proporsi Penggunaan Anggaran;
3. Rasio Belanja Modal; dan
4. Analisis Pembiayaan.

3.2.1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	857.642.985.779	915.920.377.495	905.231.572.568	971.624.464.121	953.155.394.615
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	178.604.460.870	192.002.871.181	179.224.408.698	212.777.435.294	229.867.935.361
Rasio PAD	20,83	20,96	19,80	21,90	24,12
Pendapatan Transfer	677.038.524.909	723.917.506.314	702.228.404.048	734.897.351.238	700.838.013.854
Rasio Transfer	78,94	79,04	77,57	75,64	73,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan masih termasuk dalam kategori rendah karena angka rasio transfer masih lebih besar dibanding rasio PAD. Namun untuk pergerakan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan atas rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan peningkatan rasio PAD (kecuali di tahun 2018) dan pada tahun 2020 rasio PAD mencapai 24,12 % dibanding tahun 2016 sebesar 20,83 %. Adapun rasio transfer menunjukkan perkembangan baik dari tahun ke tahun dibuktikan dengan penurunan rasio transfer dari semula 78,94 % pada tahun 2016 turun menjadi 73,53% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan meskipun memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat namun pergerakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dibuktikan dengan semakin bertambahnya rasio PAD dan semakin berkurangnya rasio transfer.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2016-2019 disajikan dalam tabel 3.6. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji pegawai dan tenaga kontrak Wali Kota. Khusus Tahun 2016, belanja pegawai termasuk di dalamnya adalah gaji guru SMA dan SMK, sehingga dalam analisis ini dikeluarkan dari perhitungan.

Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Total Belanja Pegawai (Rp. Juta)	316.657	319.970	352.531	390.898	394.422
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan) (Rp. Juta)	879.583	934.067	895.910	968.551	949.361
Proporsi Belanja Aparatur (persen)	36,00	34,26	39,35	40,36	41,55

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

Secara rupiah untuk belanja pegawai lima tahun terakhir mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 316.657.370.739,- dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 394.421.563.850,-. Secara proporsi juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 proporsi belanja pegawai sebesar 36,00 persen, dan tahun 2020 menjadi 41,55 persen. Kenaikan tersebut disebabkan kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2018 menjadi PNS di tahun 2020 (penerimaan gaji dan tunjangan 100 persen) dan kebutuhan penganggaran tambahan penghasilannya, kebutuhan penganggaran untuk PPPK yang telah lulus seleksi pada tahun 2019 serta memperhitungkan kebutuhan penganggaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2019 sebanyak 207 orang disamping

kenaikan komponen lainnya termasuk kenaikan belanja insentif pajak dan retribusi yang mengikuti kenaikan capaian realisasi target pendapatan.

3.2.3. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7 Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Modal	201.951.325.331	220.686.788.384	146.382.593.476	182.153.984.579	126.926.093.953
Belanja	869.324.083.854	924.172.718.082	883.184.894.707	954.397.012.827	944.840.460.676
Rasio Belanja Modal	23,23	23,88	16,57	19,09	13,43

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari rasio belanja modal 23,23 % di tahun 2016 turun menjadi 13,43 % di tahun 2020, hal ini menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.2.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari : Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, sisa belanja DAK, sisa belanja dana bagi hasil, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah, sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah), penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari : Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah. Defisit riil anggaran tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8 Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Juta)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	857.642,99	915.920,38	905.231,57	971.624,46	953.155,39
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	869.324,08	924.172,72	883.184,89	954.397,01	944.840,46
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.259,00	9.894,58	12.725,08	14.154,13	4.520,63
	Defisit riil	-21.940,10	-18.146,92	9.321,60	3.073,32	3.794,30

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terdapat defisit, namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 dan 2017 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9 Komposisi Penutup Riil Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penggunaan SiLPA	540,04	532,26	surplus	surplus	surplus
2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,20	0,70	surplus	surplus	surplus
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	surplus	surplus	surplus
4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	surplus	surplus	surplus

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

Tabel 3.10 menunjukkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang bersumber dari sisa penghematan belanja akibat lainnya. Namun demikian hal tersebut, bukan berarti bahwa target kinerja dari Pemerintah Kota Pekalongan tidak tercapai. Sisa penghematan belanja bisa disebabkan karena adanya sisa-sisa kontrak serta tidak terealisasinya pelaksanaan penggajian ASN karena tertundanya jadwal perekrutan ASN.

**Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020**

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	78.568,37		87.928,21		95.101,71	
2	Pelampuan Penerimaan PAD	-5.594,76	-7,12	-20.589,46	-23,42	3.200,34	3,37
3	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	-11.226,89	-14,29	-2.680,66	-3,05	-10.207,59	-10,73
4	Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.540,48	3,23	13.290,00	15,11	6.090,13	6,40
5	Sisa Penghematan Belanja akibat lainnya	92.817,74	118,14	96.817,56	110,11	95.715,40	100,65
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan	22,69	0,03	4,91	0,01	2,63	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKD Kota Pekalongan

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi.

Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas *Covid-19*.

Proyeksi pendapatan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.11. Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,31 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 933.461.232.000,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 999.679.542.000,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan tetap.

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016 – 2020 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak pandemi *Covid-19* sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 5,32 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp. 214.208.310.000,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 271.196.588.000,-. Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 5,46 persen dimana pada tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp. 5.803.900.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2026 sebesar Rp 7.356.451.000,-. Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang sah mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari target yang ditetapkan karena untuk pendapatan BLUD RSUD terdapat pembayaran piutang atas klaim BPJS yang nilainya sampai Rp. 36 Milyar. Oleh karena itu untuk proyeksi Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 akan mengalami penurunan jika dibanding realisasi 2020.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat asumsikan tetap. Sementara untuk pos Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2021-2026 diproyeksikan tetap. Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan diasumsikan tetap.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Dana Perimbangan. Seperti yang disajikan dalam tabel 3.11, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan, antara lain sebagai berikut:

1. E-monitoring pajak daerah merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : tapping box dan sejenisnya. Tujuan *e-monitoring* Pajak Daerah :
 - a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
 - b) Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan.
 - c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.

- d) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak.
 - e) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak.
 - f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2. Pemberian *Reward dan Punishment*
- a) Pemberian *Reward*, seperti :
 - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b) Pemberian *Punishment*, berupa :
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
 4. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
 5. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 6. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 7. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya).
 8. *House to house* dengan DPMPSTSP terkait perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, *house to house* dengan BPN terkait BPHTB dengan *update* data objek PBB serta *house to house* dengan Dindukcapil terkait data wajib pajak dan data kependudukan
 9. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
 10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
 11. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
 12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
 14. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah.
 15. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;

16. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, *update* data, pembayaran pajak daerah lainnya
17. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
18. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
19. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
20. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
21. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
22. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah disajikan dalam tabel 3.12. Belanja Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,26 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.043.503.533.000,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 1.084.120.322.000,-. Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,32 persen dengan perincian :
 - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2,17 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,41 persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar sekitar Rp. 2 miliar yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage*. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
 - c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan turun rata-rata sebesar 2,50 persen pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2022 diasumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 2021, yaitu sebesar Rp 1.288.796.000.
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 persen.
- 3) Belanja Tak Terduga sejak tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-/tahun.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan SPM serta belanja dalam rangka perwujudan Visi Misi Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih.

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 1,45 persen pertahun. Khusus tahun 2024 ada peningkatan penerimaan pembiayaan karena ada pencairan dana cadangan Pilkada sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan turun sebesar 1,00 persen pertahun. Selain itu, mulai Tahun 2021 sampai 2023 pada pos pengeluaran pembiayaan direncanakan pembentukan dana cadangan Pilkada Tahun 2024. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel 3.13.

**Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026**

URAIAN	Pertumb 2016- 2020	Kondisi Awal (Rp.)		PROYEKSI (Rp.)					Rata- rata Pertumb
		2020 (Audited)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	2,77%	953.155.394.615	930.643.232.000	948.948.959.000	958.646.537.000	969.900.012.000	985.829.532.000	999.679.542.000	1,31%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6,90%	229.867.935.361	214.208.310.000	220.466.005.000	230.163.583.000	241.417.058.000	257.346.578.000	271.196.588.000	5,32%
Pendapatan Pajak Daerah	10,58%	76.255.221.742	82.200.000.000	86.950.000.000	92.400.000.000	98.450.000.000	104.760.000.000	110.750.000.000	6,24%
Hasil Retribusi Daerah	-2,69%	14.870.124.919	16.282.910.000	17.309.414.000	18.132.193.000	19.008.320.000	19.854.558.000	21.002.240.000	4,95%
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-8,14%	5.821.083.050	5.803.900.000	5.951.841.000	6.473.378.000	6.862.472.000	7.179.472.000	7.356.451.000	5,46%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,51%	132.921.505.650	109.921.500.000	110.254.750.000	113.158.012.000	117.096.266.000	125.552.548.000	132.087.897.000	4,64%
PENDAPATAN TRANSFER	0,99%	700.838.013.854	693.447.857.000	706.104.314.000	706.104.314.000	706.104.314.000	706.104.314.000	706.104.314.000	0,00%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,19%	625.666.101.409	602.819.457.000	616.144.097.000	616.144.097.000	616.144.097.000	616.144.097.000	616.144.097.000	0,00%
Bagi Hasil Pajak	1,15%	27.182.869.066	25.068.114.756	23.583.183.000	23.583.183.000	23.583.183.000	23.583.183.000	23.583.183.000	0,00%
Bagi Hasil S	10,42%	1.780.895.008	1.925.086.244	1.504.841.000	1.504.841.000	1.504.841.000	1.504.841.000	1.504.841.000	0,00%
Dana Alokasi Umum	-1,18%	433.354.907.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	0,00%
Dana Alokasi Khusus	-0,90%	104.991.517.335	127.896.993.000	134.656.335.000	134.656.335.000	134.656.335.000	134.656.335.000	134.656.335.000	0,00%
Dana Insentif Daerah	10,29%	58.355.913.000	21.529.525.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0,00%
Transfer Pemerintah Provinsi	-0,30%	75.171.912.445	90.628.400.000	89.960.217.000	89.960.217.000	89.960.217.000	89.960.217.000	89.960.217.000	0,00%
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	4,63%	63.377.912.445	78.870.400.000	78.202.217.000	78.202.217.000	78.202.217.000	78.202.217.000	78.202.217.000	0,00%
Bantuan Keuangan Provinsi	16,35%	11.794.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22.449.445.400	22.987.065.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		22.449.445.400	22.987.065.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	22.378.640.000	0,00%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

**Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026**

URAIAN	Pertumb 2016-2020	Kondisi Awal (Rp.)		PROYEKSI (Rp.)					Rata- rata Pertumb
		2020 (Audited)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	2,23%	944.840.460.676	1.043.503.533.000	1.031.499.652.000	1.040.255.723.000	1.070.177.106.000	1.071.183.855.000	1.084.120.322.000	1,26%
BELANJA OPERASI	3,42%	760.543.104.728	843.482.367.000	839.891.302.000	846.781.289.000	874.817.928.000	873.921.085.000	884.934.924.000	1,32%
Belanja Pegawai	2,92%	394.421.563.850	428.945.009.000	469.249.575.000	475.612.262.000	489.095.975.000	500.802.157.000	511.233.922.000	2,17%
Belanja Barang dan Jasa	6,07%	327.664.407.878	377.996.610.000	334.982.278.000	336.368.844.000	337.759.555.000	339.156.530.000	340.555.444.000	0,41%
Belanja Hibah	1,36%	36.250.151.000	35.251.952.000	34.370.653.000	33.511.387.000	46.673.602.000	32.673.602.000	31.856.762.000	1,07%
Belanja Bantuan Sosial	20,78%	2.206.982.000	1.288.796.000	1.288.796.000	1.288.796.000	1.288.796.000	1.288.796.000	1.288.796.000	0,00%
BELANJA MODAL	-7,57%	126.926.093.953	184.760.743.000	186.608.350.000	188.474.434.000	190.359.178.000	192.262.770.000	194.185.398.000	1,00%
BELANJA TAK TERDUGA	1928,29%	57.371.261.995	15.260.423.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)

**Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026**

URAIAN	Pertumb 2016-2020	Kondisi Awal (Rp.)		PROYEKSI (Rp.)					Rata- rata Pertumb
		2020 (Audited)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	2,03%	104.227.367.651	110.042.301.000	82.550.693.000	81.609.186.000	100.277.094.000	85.354.323.000	84.440.780.000	1,45%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-0,47%	108.747.997.651	112.542.301.000	94.150.693.000	93.209.186.000	106.277.094.000	91.354.323.000	90.440.780.000	-0,51%
Penggunaan SiLPA	-4,27%	95.101.710.312	112.542.301.000	94.150.693.000	93.209.186.000	92.277.094.000	91.354.323.000	90.440.780.000	-1,00%
Pencairan Dana Cadangan		12.704.351.488	-	-	-	14.000.000.000	-	-	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1751,34%	941.935.851	-	-	-	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-7,94%	4.520.630.000	2.500.000.000	11.600.000.000	11.600.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-12,07%
Pembentukan Dana Cadangan		-	2.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-50,00%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-12,03%	4.518.000.000	500.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1,79%

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)

3.3.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Wali Kota.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Wali Kota.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.

2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ditunjukkan Tabel 3.12. Dari data tersebut, berdasarkan realisasi Tahun 2020, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2021-2026 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.13.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) disajikan dalam tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Operasi	345.916.373.669	351.548.234.238	387.624.539.006	433.265.820.640	443.967.880.650	6,53
1	Belanja Pegawai	316.657.370.739	319.969.885.876	352.531.365.055	390.898.339.975	394.421.563.850	5,75
2	Belanja Barang dan Jasa	29.259.002.930	31.578.348.362	35.093.173.951	42.367.480.665	49.546.316.800	14,18
3	Hibah						
B	Belanja Tidak Terduga	1.595.930.000	1.570.263.564	1.921.815.800	730.438.928	57.371.261.995	
4	Belanja Tidak Terduga	1.595.930.000	1.570.263.564	1.921.815.800	730.438.928	57.371.261.995	1928,29
C	Pengeluaran Pembiayaan	10.259.000.000	9.894.575.338	12.702.387.924	12.349.388.226	4.518.000.000	-10,34
5	Penyertaan Modal Daerah	10.259.000.000	5.800.000.000	8.400.000.000	7.742.000.000	4.518.000.000	-12,03
6	Pembentukan Dana Cadangan	-	4.094.575.338	4.302.387.924	4.607.388.226	-	-29,28
	Jumlah	357.771.303.669	363.013.073.140	402.248.742.730	446.345.647.794	505.857.142.645	9,14

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)

Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2021-2026

No.	Uraian	Rata-rata pertumb 2016-2020	Kondisi Awal (Rp.)		PROYEKSI (Rp.)					Rata-rata Pertumb (persen)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Belanja Operasi	6,53%	443.967.880.650	487.338.149.967	535.816.565.440	551.512.362.260	575.652.872.120	599.527.226.620	623.852.937.350	3,88
1	Belanja Pegawai	5,75%	394.421.563.850	428.945.009.000	469.249.575.000	475.612.262.000	489.095.975.000	500.802.157.000	511.233.922.000	2,17
2	Belanja Barang dan Jasa	14,18%	49.546.316.800	57.633.140.967	65.806.990.440	75.140.100.260	85.796.883.120	97.965.069.620	111.859.015.350	14,18
3	Hibah		760.000.000	760.000.000	760.000.000	760.000.000	760.014.000	760.000.000	760.000.000	0,00
B	Belanja Tidak Terduga		57.371.261.995	15.260.423.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
4	Belanja Tidak Terduga	19,28	57.371.261.995	15.260.423.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
C	Pengeluaran Pembiayaan	-10,34%	4.518.000.000	2.500.000.000	11.600.000.000	11.600.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-12,07
5	Penyertaan Modal Daerah	-12,03%	4.518.000.000	500.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1,79
6	Pembentukan Dana Cadangan	-29,28%	-	2.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	
Jumlah			505.857.142.645	505.098.572.967	552.416.565.440	568.112.362.260	586.652.872.120	610.527.226.620	634.852.937.350	3,54

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

**Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

URAIAN	Kondisi Awal (Rp.)		PROYEKSI (Rp.)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	953.155.394.615	933.461.232.000	948.948.959.000	958.646.537.000	969.900.012.000	985.829.532.000	999.679.542.000
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	14.000.000.000	-	-
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	95.101.710.312	112.542.301.000	94.150.693.000	93.209.186.000	92.277.094.000	91.354.323.000	90.440.780.000
4. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	1.048.257.104.927	1.046.003.533.000	1.043.099.652.000	1.051.855.723.000	1.076.177.106.000	1.077.183.855.000	1.090.120.322.000
DIKURANGI							
5. Belanja Wajib Mengikat	505.857.142.645	505.098.572.967	552.416.565.440	568.112.362.260	586.652.872.120	610.527.226.620	634.852.937.350
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	542.399.962.282	540.904.960.033	490.683.086.560	483.743.360.740	489.524.233.880	466.656.628.380	455.267.384.650

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.

Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Pekalongan, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi *Covid-19* yang dimulai pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi *Covid-19* harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

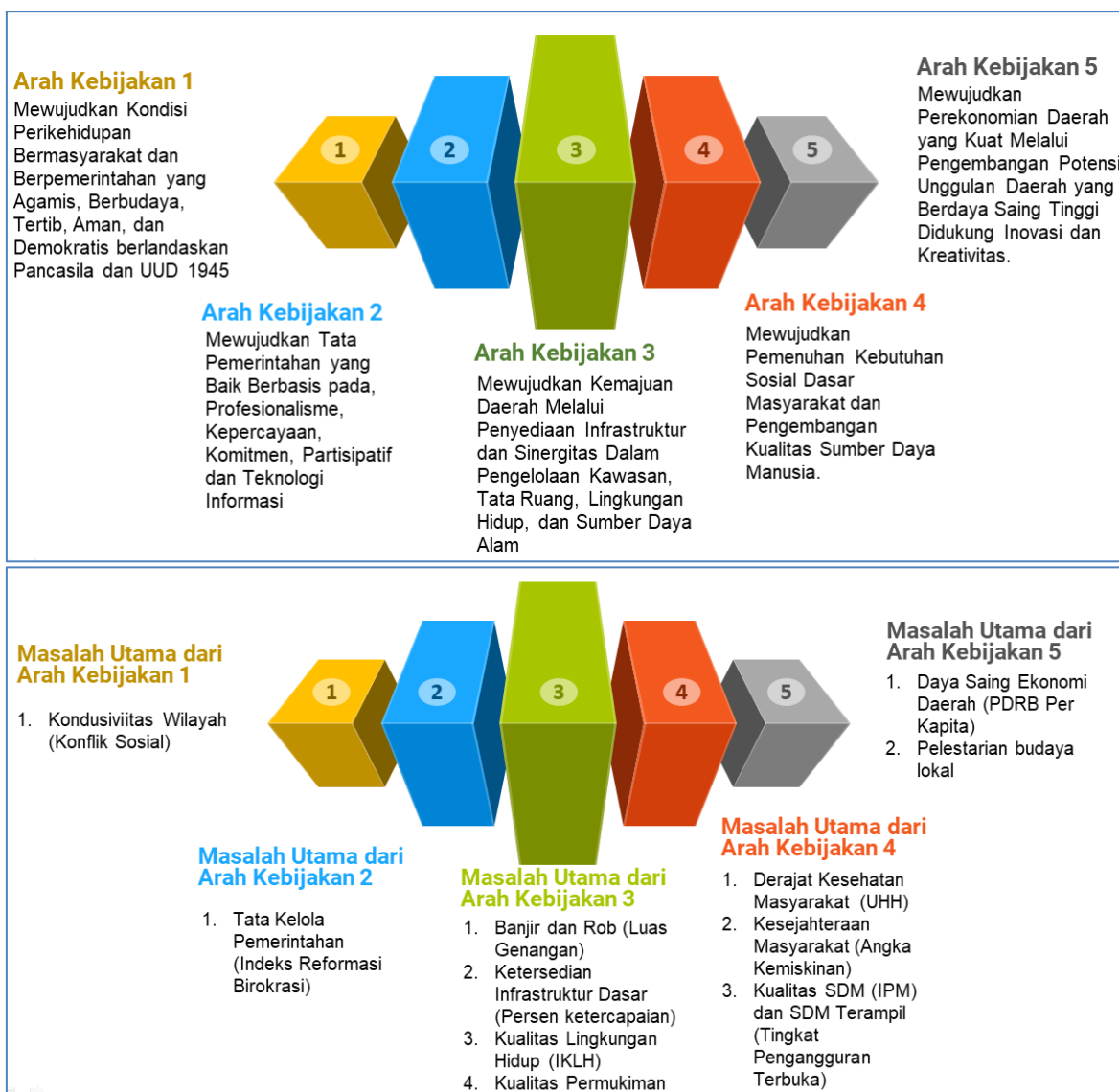
4.1.1. Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, ditemukan 11 (sebelas) masalah pokok di Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.1. Secara sistematis uraian

masalah pokok, masalah dan akar masalah sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 tahap IV dapat dijelaskan dalam sub bab 4.1.1.1 sampai dengan 4.1.1.5.



Gambar 4.1 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dengan Masalah Utama

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Dalam rangka perwujudan arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, terdapat 1 (satu) masalah pokok yaitu kondusivitas wilayah.

4.1.1.1.1. Kondusivitas Wilayah

Hasil pemetaan masalah pokok kondusivitas wilayah akan diukur dengan indikator ada atau tidaknya kasus konflik sosial. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa masih ada

konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kota Pekalongan. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah, yaitu belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial. Selanjutnya, masalah pokok kondusivitas wilayah dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Masalah Pokok Kondusivitas Wilayah, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kondusivitas Wilayah	Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM atas nilai-nilai kehidupan berbangsa
		Belum optimalnya pemahaman Partai Politik dan Lembaga Pendidikan akan Tata Kehidupan Politik
		Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban umum

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi, terdapat 1 (satu) masalah pokok yaitu Tata Kelola Pemerintahan.

4.1.1.2.1. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil pemetaan masalah pokok tata kelola akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Data Tahun 2019 menunjukkan bahwa Indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2019 adalah 68,97. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart Governance*)
- b. Belum optimalnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*)
- c. Belum optimalnya implementasi manajemen ASN
- d. Akuntabilitas Kinerja Masih perlu ditingkatkan
- e. Akuntabilitas Keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan
- f. Belum optimalnya kualitas pengawasan

Selanjutnya, masalah pokok tata kelola pemerintahan dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang secara lengkap ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keterkaitan Masalah Pokok Tata Kelola Pemerintahan, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata Kelola Pemerintahan	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (<i>Smart Governance</i>)	Belum optimalnya Indeks domain tata kelola SPBE
		Belum optimalnya Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemanfaatan data statistic sektoral
	Belum optimalnya kualitas layanan publik (<i>Smart Governance</i>)	Pelayanan Publik belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat
		Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik
		Belum optimalnya keterbukaan informasi publik tingkat kota dan tingkat OPD
		Belum optimalnya penanganan bencana
		Belum optimalnya pengawasan kearsipan tingkat kota
		Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan
		Terbatasnya kapasitas SDM Layanan Publik
		Penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat
		Belum optimalnya implementasi manajemen ASN
	Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan	
	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Konsistensi Perencanaan, Penganggaran masih perlu ditingkatkan
		Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan
		Belum optimalnya kualitas kelitbangan dalam mendukung perencanaan pembangunan
	Akuntabilitas keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan	Beratnya mempertahankan opini WTP dari BPK
		Rasio SiLPA masih cukup tinggi
		Manajemen pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan
		Kenaikan PAD yang belum optimal
	Belum optimalnya kualitas pengawasan	Belum optimalnya implementasi SPIP
		Belum optimalnya pengawasan internal OPD dan implementasi Zona Integritas

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, terdapat 4 (empat) masalah pokok yaitu ; banjir dan rob, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan infrastruktur dasar, dan kualitas permukiman.

4.1.1.3.1. Banjir dan Rob

Hasil pemetaan masalah pokok banjir dan rob akan diukur dengan indikator persentase penurunan luas genangan. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 justru terjadi kenaikan luas genangan banjir/rob. Masalah pokok ini kemudian

dijabarkan dalam masalah, yaitu: penataan sistem drainase yang belum optimal, dimana data capaian tahun 2020 luas genangan banjir/rob sebesar 37,27 persen. Selanjutnya, masalah pokok banjir dan rob dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3 Keterkaitan Masalah Pokok Banjir dan Rob, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Banjir dan Rob	Penataan sistem drainase yang belum optimal	Belum optimalnya kapasitas saluran dan masih diperlukan normalisasi, peningkatan / penambahan ruas saluran drainase
		Belum optimalnya sarpras pengendali banjir (pintu / pompa, kolam retensi.dsb)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.3.2. Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pemetaan masalah pokok kualitas lingkungan hidup akan diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Data tahun 2020 menunjukkan bahwa IKLH Kota Pekalongan adalah 50,84. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah, yaitu:

- Tingginya tingkat pencemaran air, dengan indeks kualitas air sebesar 35,33.
- Belum optimalnya tutupan hutan, dengan indeks tutupan hutan sebesar 23,60
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang akan diukur dengan indikator persentase peningkatan kawasan peruntukan budidaya.

Selanjutnya, masalah pokok sarana prasarana perkotaan dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Masalah Pokok Sarana Prasarana Perkotaan, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sarana Prasaran Perkotaan	Tingginya tingkat pencemaran air	Belum Optimalnya Sarpras Pengolah Limbah
		Kiriman limbah dari wilayah sekitarnya
	Belum optimalnya tutupan hutan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Masih rendahnya kepatuhan IMB
Masih lemahnya pengawasan penataan ruang		

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.3.3. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Hasil pemetaan masalah pokok ketersediaan infrastruktur dasar akan diukur dengan rata-rata ketercapaian layanan air minum, layanan persampahan dan layanan transportasi. Selanjutnya, masalah pokok ketersediaan infrastruktur dasar dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Keterkaitan Masalah Pokok Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya cakupan layanan air minum (perpipaan)	Belum optimalnya penyediaan sarpras air bersih
		Keterbatasan sumber air baku
		Eksplorasi sumber air dalam masih berlebih
	Belum optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah
		Belum optimalnya sarpras penanganan sampah
	Belum optimalnya layanan transportasi perkotaan	Belum optimalnya kapasitas jalan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
Belum optimalnya kondisi jalan kota		

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.3.4. Kualitas Permukiman

Hasil pemetaan masalah pokok kualitas permukiman akan diukur dengan persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah, yaitu belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh. Selanjutnya, masalah pokok kualitas permukiman dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Keterkaitan Masalah Pokok Kualitas Permukiman, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Permukiman	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh	Belum optimalnya pengembangan perumahan
		Belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
		Belum optimalnya cakupan layanan limbah domestik
		Belum optimalnya penyelenggaraan jalan lingkungan permukiman
		Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdapat 3 (tiga) masalah pokok yaitu ; derajat kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta kualitas Sumber Daya Manusia.

4.1.1.4.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pemetaan masalah pokok derajat kesehatan masyarakat akan diukur dengan Angka Usia Harapan Hidup. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup Kota Pekalongan adalah 74,38 tahun. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah, yaitu:

- a. Belum optimalnya capaian keluarga sehat, dengan indeks keluarga sehat sebesar 0,17 pada tahun 2020
- b. Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat, dengan skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2020 sebesar 83.

Selanjutnya, masalah pokok derajat kesehatan masyarakat daerah dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Keterkaitan Masalah Pokok Derajat Kesehatan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat Kesehatan Masyarakat	Belum optimalnya capaian keluarga sehat	Belum terpenuhinya SPM Kesehatan, sehingga masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), bayi (AKB), Balita (AKABA), angka stunting serta angka kesakitan
		Belum optimalnya kapasitas SDM Kesehatan
		Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
		Belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.4.2. Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pemetaan masalah pokok kesejahteraan masyarakat akan diukur dengan Angka Kemiskinan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kota Pekalongan adalah 7,17 persen sebagai salah satu dampak pandemi *Covid-19*. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah yaitu belum optimalnya penanganan kemiskinan. Selanjutnya, masalah pokok kesejahteraan masyarakat dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Keterkaitan Masalah Pokok Kesejahteraan Masyarakat, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Belum Optimalnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan-jaminan sosial
		Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil pemetaan masalah pokok kualitas SDM akan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa IPM Kota Pekalongan adalah 74,98 dan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 7,02 persen lebih tinggi dari capaian tahun 2019 sebagai salah satu dampak *Covid-19*. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah, yaitu:

- a. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan
- b. Belum optimalnya akses pendidikan, dimana Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020, sebesar 8,96 tahun
- c. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender, dengan indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 sebesar 60,95.
- d. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak, dengan capaian kota layak anak dengan kategori madya
- e. Masih tingginya angka pengangguran terbuka, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2020 adalah 66,45 persen.

Selanjutnya, masalah pokok kualitas SDM dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Keterkaitan Masalah Pokok Kualitas SDM, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas SDM	Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Belum optimalnya penyusunan kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan
	Belum optimalnya akses pendidikan	Belum optimalnya capaian SPM Pengelolaan Pendidikan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
		Belum optimalnya pelayanan perpustakaan
	Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender
		Masih adanya kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	
	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Tahap IV, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, terdapat 2 (dua) masalah pokok yaitu ; daya saing ekonomi dan pelestarian seni budaya.

4.1.1.5.1. Daya Saing Ekonomi

Hasil pemetaan masalah pokok daya saing ekonomi akan diukur dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, PDRB Per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 35,22 Juta/tahun. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah, yaitu Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi *Covid-19* serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berkontraksi pada level 1,87 persen. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, masalah pokok daya saing ekonomi dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Keterkaitan Masalah Pokok Daya Saing Ekonomi, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi <i>Covid-19</i> serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Pengembangan ekonomi Kreatif Belum Optimal
		Infrastruktur pariwisata belum memadai
		Keterbatasan media promosi pariwisata
		Pertumbuhan Investasi Belum Optimal
		Pertumbuhan industri batik melambat dan jumlah permintaan sangat menurun akibat pandemi <i>Covid-19</i>
		Peran koperasi dalam pengembangan UMKM belum optimal
		Kecenderungan produksi ikan menurun
		Produktivitas perikanan budidaya yang rendah
		Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan
		Belum optimalnya kontribusi PDRB sektor pertanian

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.1.5.2. Pelestarian Seni Budaya

Hasil pemetaan masalah pokok pelestarian seni budaya akan diukur dengan seberapa besar seni budaya dilestarikan. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah, yaitu terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan sebagai salah satu pelestarian budaya. Selanjutnya, masalah pokok pelestarian seni budaya dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Keterkaitan Masalah Pokok Pelestarian Budaya, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelestarian Budaya	Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal
		Infrastruktur kebudayaan masih terbatas
		Pengelolaan komunitas budaya belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan museum

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersaji dalam tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4.12 Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah**

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Belum optimalnya Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Belum optimalnya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Belum optimalnya Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran
	Belum optimalnya Rumah Tangga Sehat
	Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>
Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota	
Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik	
Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	
Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK <i>Outcome</i>)	
Belum optimalnya Rasio Persetujuan Bangunan Gedung	
Belum optimalnya Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	
Belum optimalnya Penetapan Rencana Tata Ruang kota	
Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	
Belum optimalnya Pengelolaan Sampah Regional	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>	Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga
	Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh
	Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Belum optimalnya penanganan kumuh

URUSAN	PERMASALAHAN
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan non alam
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i>	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota
	Belum optimalnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB
	Belum optimalnya Dekela (desa/kelurahan layak anak)
	Belum optimalnya anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</i>	Belum optimalnya Skor pola pangan harapan
	Belum optimalnya implementasi kelurahan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya penerapan pangan segar
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i>	Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah
	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
	Belum optimalnya usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya perolehan penghargaan bidang LH
Belum optimalnya persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	

URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>yang diberikan</p> <p>Belum optimalnya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i></p>	<p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil</p> <p>Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i></p>	<p>Belum optimalnya ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan</p> <p>Belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat</p> <p>Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang)</p> <p>Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i></p>	<p>Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)</p> <p>Belum optimalnya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun</p> <p>Belum optimalnya penurunan angka Unmeet need KB</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i></p>	<p>Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ</p> <p>Belum optimalnya Kinerja Lalu lintas kota</p> <p>Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala</p> <p>Belum optimalnya Rasio konektivitas kota</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan parkir yang berizin</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i></p>	<p>Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Belum optimalnya pencapaian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</i></p>	<p>Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas</p> <p>Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat</p> <p>Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan</p> <p>Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wira usaha</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</i></p>	<p>Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</p> <p>Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</p>

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Belum optimalnya peningkatan Investasi baru
	Belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor
	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
	Belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (<i>penetration testing</i>)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</i>	Belum optimalnya Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Belum optimalnya Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya
	Belum optimalnya pengunjung museum batik
	Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan Obyek Wisata Budaya
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</i>	Belum optimalnya rasio pengunjung perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)
	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</i>	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Belum optimalnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan Tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (<i>tenant</i>)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>	Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan
	Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</i>	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK <i>Outcome</i>))
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>	Belum optimalnya pelayanan hukum dalam penetapan Perda
	Belum optimalnyakoordinasi kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan
	Belum optimalnya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Belum optimalnya Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa
	Belum optimalnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>	Belum optimalnya pembahasan dokumen penganggaran yang tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>PERENCANAAN</i>	Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
<i>KEUANGAN</i>	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
	Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
<i>KEPEGAWAIAN</i>	Belum optimalnya pengembangan karier PNS
	Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN
	Belum optimalnya Keterisian Jabatan
	Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>	Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya (Latsar)
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>	Belum optimalnya Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)
	Belum optimalnya Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP
	Belum optimalnya penerapan SPIP pada OPD
UNSUR KEWILAYAHAN	
<i>KECAMATAN</i>	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Belum optimalnya penanganan konflik ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Belum optimalnya pendidikan politik bagi parpol dan lembaga pendidikan

URUSAN	PERMASALAHAN
Non Urusan	
<i>Non Urusan</i>	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD
	Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Internasional

a. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group* (OWG) on *Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pekalongan, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- c. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

- d. Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berkontraksi sebesar 1,87 persen. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi udara sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- b. Tenaga Kerja
- c. Investasi
- d. Perdagangan

- e. Institusi
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Karakter bangsa
- i. Infrastruktur
- j. Kewilayahan
- k. Lingkungan Hidup dan Bencana
- l. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan lokus di Kota Pekalongan, antara lain:

- a. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan 20 persen GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, pengamanan pesisir di 5 (lima) perkotaan pantura Jawa masuk dalam daftar proyek prioritas strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024, dengan benefit mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon.
- b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang disebutkan bahwa Program dan Kegiatan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah :
 - 1) Pengendalian banjir sistem sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN).
 - 2) Pengendalian banjir sistem sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN).
 - 3) Pengendalian banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
 - 4) Penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).
 - 5) Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN).
 - 6) Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak Kota Pekalongan (Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU).

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh sendi kehidupan terdampak oleh pandemi ini. Perekonomian Indonesia berkontraksi hebat dan diperkirakan pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021. Pendidikan pun juga sangat terdampak dengan dilakukannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sistem daring. Proses produksi, dalam industri dan bisnis, dan tatanan kehidupan sosial-budaya di masyarakat terdampak hebat dengan pandemi *Covid-19*.

Sebagai implikasi dari dampak pandemi ini maka Pemerintah telah menyiapkan reformasi sistem penganggaran dalam penyusunan APBN tahun 2021. Redesain penganggaran dilakukan guna merealisasikan belanja yang lebih optimal dan efektif dengan menerapkan konsep *money for value*. Dengan konsep ini maka programnya jelas sehingga uangnya jelas kenapa dianggarkan sekian. Redesain sistem penganggaran ditargetkan juga akan mampu lebih memperjelas hubungan antara program, kegiatan, *output* dan *Outcome*. Dengan reformasi ini pun diharapkan sistem teknologi informasi akan lebih terintegrasi dan organisasi menjadi lebih efisien.

4.2.3. Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan kemiskinan
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- 3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- 4) Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya Alam
- 5) Kedaulatan pangan dan energi
- 6) Kesenjangan wilayah
- 7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Beberapa kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah dengan lokus di Kota Pekalongan, antara lain:

- a. Arah pengembangan wilayah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 salah satunya darahkan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, yaitu dengan pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan).
- b. Pengembangan wilayah Petanglong dengan Konsep Mina Batik, yaitu mengembangkan potensi utama perikanan dan industri batik, namun juga tetap meningkatkan potensi pertanian dan wisata di wilayah selatan.
- c. Fasilitasi pengembangan potensi pendukung destinasi pariwisata melalui pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan.
- d. Obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu proyek-proyek potensial yang akan dibiayai diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan).

4.2.4. Hasil Telaahan RPJP Kota Pekalongan

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah “**Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera**”. Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada, profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi dan Teknologi Informasi.

- c. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
- d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- e. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan keempat, diarahkan pada:

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, dan Partisipatif.
3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam.
4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat, dan
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas.

4.2.5. Hasil Telaahan KLHS Kota Pekalongan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

- a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.
- b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau *Business As Usual* (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2024.
- c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) dengan *Business As Usual* (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.

- d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Pekalongan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang.
- e. Rekomendasi program. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan **telah terlampaui**, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Terhadap kelima aspek penting yang telah disebutkan di atas maka akan diuraikan dua hal aspek yang terpenting yaitu status lingkungan hidup serta penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah, karena kedua aspek harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi RPJMD Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

4.2.5.1. Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Berdasarkan kondisi lingkungan Kota Pekalongan, yaitu enam muatan KLHS dalam Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka kondisi lingkungan dan keterkaitannya dengan target dalam TPB dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 4.13 Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Keterkaitan dengan Target TPB

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
A	KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP			
A.1	Daya Dukung Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) mencapai 57 juta m³/tahun - Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 45 juta m³/tahun - Daya Dukung Air Permukaan sebesar 0,79 dengan status terlampaui 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlampauinya daya dukung air permukaan mendorong penggunaan air bawah tanah berlebihan yang mengakibatkan turunnya muka tanah - Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan air baku dari wilayah sekitar - Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat 	1.2; 1.4; 1.a; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
A.2	Daya Dukung Pangan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi beras 2.705 ton/tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlampauinya daya dukung pangan menyebabkan 	2.1; 2.3;

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan mencapai 33 ribu ton beras - Daya Dukung Pangan Pokok 0,08 dengan status terlampaui 	ketergantungan terhadap daerah sekitar untuk pasokan makanan untuk memenuhi konsumsi dan asupan gizi masyarakat	
A.3	Daya Dukung Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Dukung Lahan Terbangun 1,15 dengan status sedang atau bersyarat - Kecamatan Pekalongan Barat pada kondisi terlampaui (0,8), 3 kecamatan lain dalam kondisi sedang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan lahan untuk kegiatan terbangun mengindikasikan tingkat kepadatan kota dan rendahnya ruang terbuka baik hijau maupun non hijau - Kepadatan kota pada kawasan masyarakat miskin memicu tumbuhnya ruang-ruang kumuh 	1.4; 6.2; 6.5; 11.1; 11.7; 13.1;
A.4	Daya Dukung Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan terbangun memiliki fungsi lindung paling rendah, sedangkan tutupan lahan hutan memiliki fungsi lindung paling tinggi - Daya Dukung Fungsi Lindung 0,36 (skala 0 – 1) dalam kondisi sedang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi daya dukung fungsi lindung mencerminkan kondisi tutupan vegetasi dan peruntukan lahan - Kondisi fungsi lindung mengindikasikan kualitas RTH yang memberikan fungsi purifikasi polutan secara alami 	1.5; 6.3; 6.5; 11.5; 11.7; 11.b; 13.1; 15.1; 15.3; 15.9
B	KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM			
B.1	JE Penyedia Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - 50 persen dalam kondisi rendah (di kawasan pusat kota) - 42 persen dalam kondisi tinggi (di utara untuk perikanan dan selatan pertanian) 	- Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan yang rendah menyebabkan rendahnya pasokan pangan dari wilayah sendiri, sehingga memiliki ketergantungan pasokan dari wilayah sekitar	2.1; 2.3;
B.2	JE Penyedia Air	<ul style="list-style-type: none"> - 57 persen dalam kondisi rendah sehingga sulit menampung dan menyimpan air - 35 persen dalam kondisi tinggi dapat menyimpan dan menyediakan air tanah dan permukaan 	- Ruang yang sesuai untuk menyimpan dan menyediakan air mengakibatkan meningkatnya penggunaan air bawah tanah dan juga ketergantungan terhadap daerah sekitar	1.2; 1.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
B.3	JE Pengatur Iklim	<ul style="list-style-type: none"> - 64 persen dalam kondisi rendah pada kawasan padat pusat kota dan pesisir - 35 persen dalam kondisi tinggi pada kawasan pertanian dan kebun campur di wilayah tenggara dan barat daya 	- Rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengatur iklim menunjukkan rendahnya tutupan vegetasi lahan dan berdampak iklim mikro yang panas	3.3; 13.1;
B.4	JE Pengaturan Tata Air dan Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - 65 persen dalam kondisi rendah pada kawasan padat pusat kota - 35 persen dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan badan air 	- Rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan)	1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.4; 6.5; 11.5;
B.5	JE	- 64 persen dalam kondisi	- Ruang perlindungan	1.5; 1.a; 3.3;

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
	Perlindungan Pencegahan Bencana	rendah terutama pada kawasan pesisir - 35 persen dalam kondisi tinggi pada lahan non terbangun di tenggara	pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana hidro- meteorology	6.5; 11.5; 11.b;
B.6	JE Pemurnian Air	- 65 persen dalam kondisi rendah pada kawasan pusat kota dan pesisir - 35 persen dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan badan air	- Ruang pemurnian air yang rendah menyebabkan kemampuan purifikasi air polutan secara alami menjadi rendah dan menurunkan kualitas air permukaan dan tanah	1.4; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3;
B.7	JE Pengurai Limbah	- 64 persen dalam kondisi rendah pada kawasan padat perkotaan dan pesisir - 35 persen dalam kondisi tinggi di kawasan pertanian dan kebun campur	- Rendahnya kawasan dengan fungsi pengurai limbah menyebabkan kemampuan alam untuk meremediasi berbagai polutan rendah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah	1.4; 1.a; 3.3; 6.2; 6.3; 11.6; 12.5;
B.8	JE Kualitas Udara	- 65 persen dalam kondisi rendah terutama di kawasan pesisir - 30 persen dalam kondisi tinggi meskipun tidak ada yang masuk kategori sangat tinggi	- Rendahnya kawasan yang dapat menyediakan kualitas udara yang baik mengindikasikan rendahnya tutupan vegetasi lahan yang mampu mempurifikasi polusi udara	11.6;
B.9	JE Pendukung Biodiversity	- 64 persen dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota - 34 persen dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan pertanian	- Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami	2.1; 2.3; 11.7; 15.1; 15.3; 15.9;
C	SUMBER DAYA ALAM			
C.1	Pertanian	- Penyusutan lahan sawah irigasi teknis dari 1.162 ha pada 2015 menjadi 925 ha pada 2019 akibat pengembangan lahan terbangun - Kontribusi pertanian secara luas terhadap PDRB terus menurun dari 5,32 persen pada tahun 2015 menjadi 4,66 persen pada 2019	- Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian	2.1; 2.3;
C.2	Sumber Daya Air	- Tidak memiliki sumber mata air, sedangkan kualitas air permukaan kurang memadai sebagai sumber air baku - Sumber air baku berasal dari Kabupaten Batang (IPA Sungai Kupang Sambong dan Mata Air Kembangalit) dan Kabupaten Pekalongan (IPA dan Mata Air Kec. Doro)	- Tidak adanya sumber mata air dan kualitas air permukaan yang kurang layak untuk sumber air baku mengakibatkan ketergantungan yang tinggi akan pasokan air baku dari wilayah sekitar dan penggunaan air bawah tanah	1.2; 1.4; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 11.1;

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
		- Pemanfaatan langsung air baku dari air tanah di Kota Pekalongan yang merupakan bagian dari CAT Pekalongan – Pemalang		
D	RISIKO LINGKUNGAN HIDUP			
D.1	Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air meningkat tetapi dalam kondisi sangat kurang baik yaitu 44,67 pada 2017 dan 46,0 pada 2019 - Indeks Kualitas Udara dalam kondisi sangat baik yaitu 99,29 pada 2017 dan menjadi 99,05 pada 2019 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam kategori waspada karena hanya 23,5 dan tetap dari 2017 – 2019 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kondisi kurang baik yaitu 52,59 pada tahun 2017 dan menjadi 52,92 pada tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kualitas air yang sangat kurang baik menunjukkan bahwa kualitas air permukaan dan tanah yang kurang layak sebagai sumber air baku. - Indeks kualitas tutupan lahan yang rendah menunjukkan rendahnya ruang terbuka hijau atau lahan hutan. - Indeks kualitas udara yang tinggi menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah 	1.2; 1.4; 1.a; 2.1; 2.3; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 11.1; 11.6; 13.1; 15.1; 15.3; 15.9;
D.2	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan layanan terus meningkat dari 80,40 pada 2015 dan meningkat menjadi 86,30 pada tahun 2019 - TPA Degayu beroperasi sejak 1994 dengan usia teknis 15 tahun. Luas TPA 5,8 Ha dengan pengoperasian control landfill. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. - TPA telah melampaui usia teknis dan dekat dengan permukiman dan badan air berdampak pada kontaminasi sumber air - Terbatasnya lahan sesuai dengan kriteria layak untuk TPA menyebabkan ketergantungan lahan pada wilayah sekitar 	1.4; 11.6; 12.5;
D.3	Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Rawan bencana rob, bencana banjir, dan bencana abrasi. - Kawasan rawan bencana rob dan banjir sekitar 60 hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. - Kawasan rawan bencana abrasi sekitar 12 hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis bencana rob dan banjir merusak infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak - langsung - Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove 	1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.5; 11.1; 11.5; 11.b; 13.1;
D.4	Penurunan Muka Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan permukaan air tanah rata-rata selama 30 tahun mencapai 0,4 meter/tahun - Rata-rata pada kawasan pusat kota laju penurunan muka tanah pada kisaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan muka tanah disebabkan oleh penggunaan air bawah tanah yang berlebih karena keterbatasan sumber daya air - Penurunan muka tanah 	1.2; 1.4; 1.5; 1.a; 3.3; 6.1; 6.2; 6.4; 11.1; 11.5; 11.b;

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
		11-23 cm/tahun - Laju penurunan muka tanah tertinggi ada di Kelurahan Tirta (mencapai 34,5 cm/tahun), Jenggot dan Buaran Kradenan - Terdapat titik-titik di wilayah pesisir yang ketinggiannya lebih rendah dari titik 0 (bahkan hingga -4 m) di bawah muka tanah dan mengalami genangan permanen.	mengakibatkan lahan tergenang secara permanen terutama ketika air laut pasang (rob) - Genangan permanen akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengganggu kesehatan salah satunya penyakit filariasis	
E	KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM			
E.1	Kerentanan Perubahan Iklim	- Curah hujan di Atas Normal diprediksi pada 2021 akan cenderung lebih sering terjadi kecuali bulan Februari dan Desember, dengan dominasi kejadian terutama di wilayah hulu dan tengah - Pada wilayah hilir dan pesisir pada diperkirakan menunjukkan dominasi peluang sifat hujan yang Normal - Kenaikan muka air laut diproyeksikan pada 2040 akan mencapai kisaran 0,81 cm/tahun. Jika dibandingkan dengan 2017 maka diperkirakan kenaikannya mencapai 130 cm - Di periode 2021-2025 genangan dengan ketinggian >2m diprediksi akan meluas ke selatan dari daerah pesisir - Semakin meluas hingga daerah timur (Degayu, Gamer, Setono, Klego dan Kauman dengan tinggi genangan mencapai 1,2 m) di periode 2031-2035	- Curah hujan tinggi di Atas Normal pada bulan Januari pada wilayah hulu akan meningkatkan ancaman banjir kiriman atau banjir bandang - Kenaikan muka air laut akan meningkatkan intensitas dan jangkauan rob serta abrasi - Peningkatan intensitas dan jangkauan genangan rob dan banjir akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengganggu kesehatan salah satunya penyakit filariasis	1.2; 1.4; 1.5; 1.a; 2.1; 2.3; 3.3; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 11.1; 11.5; 11.b; 13.1;
E.2	Ruang Terbuka Hijau	- RTH publik seluas 907 Ha (sekitar 20 persen luas wilayah) dan RTH privat seluas 585 Ha (sekitar 12 persen dari luas wilayah) - Sebagian besar RTH publik berupa sempadan baik sungai, jalan, laut, SUTT dan sebagian kecil hutan dan taman kota	- Keterbatasan ruang terbuka hijau - berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi - udara serta terbatasnya ruang- ruang sosial bagi masyarakat	11.7; 13.1; 15.1; 15.3; 15.9;
F	KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI			
F.1	Kondisi Keanekaragaman Hayati	- Ancaman penurunan biodiversity pesisir akibat berkurangnya lahan hutan mangrove seperti spesies	- Kerusakan ekosistem pesisir dapat menurunkan produksi perikanan - Gangguan pada ekosistem	2.1; 2.3; 15.1; 15.3; 15.9;

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN	KETERKAITAN TERHADAP TARGET TPB
		ikan, hewan laut serta burung - Ancaman ekosistem kawasan pertanian seperti serangga, tikus serta tanaman pangan dan obat dapat mengganggu rantai ekosistem - Perlindungan keanekaragaman hayati pada taman kota dan hutan kota	kawasan pertanian menyebabkan ancaman serangga dan tikus pada permukiman penduduk yang dapat mengancam kesehatan masyarakat	
F.2	Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversity	- 64 persen dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota - 34 persen dalam kondisi tinggi pada kawasan kebun campur dan pertanian	- Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami	2.1; 2.3; 15.1; 15.3; 15.9;

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekalongan, 2020

4.2.5.2. Penentuan Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis Daerah

Berikut adalah uraian permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS RPJMD di Kota Pekalongan:

Tabel 4.14 Permasalahan dan Isu Strategis Kota Pekalongan Berdasarkan KLHS

PERMASALAHAN TPB & KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (<i>Covid-19</i>) - Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi masyarakat (<i>Covid-19</i>) - Meningkatnya penyandang disabilitas miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya (<i>Covid-19</i>) - Proporsi alokasi dana pemerintah untuk program pemberantasan kemiskinan (<i>Covid-19</i>) 	(1) Penanggulangan kemiskinan	Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin
<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat (DUT) - Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); SD/MI/ sederajat, dan SMP/MTs/sederajat (DUT) - Belum tercapainya rata-rata lama sekolah minimal penduduk umur ≥ 15 tahun (DUT) Proporsi anak-anak dan remaja dalam mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika (NA) 	(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan untuk semua penduduk
<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur untuk disabilitas, air minum layak, dan fasilitas sanitasi dasar untuk mendukung pengajaran (NA) - Peningkatan guru di semua tingkatan yang bersertifikat pendidik (DUT) 		Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dengan dukungan infrastruktur memadai
<ul style="list-style-type: none"> - Perlu melakukan deteksi dini untuk penyakit infeksi tekanan darah tinggi (DUT) - Menurunkan prevalensi tuberkulosis (DUT) - Perlu intervensi untuk mengeliminasi penyakit filariasis dan kusta (DUT) 	(3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan eliminasi epidemi penyakit menular dan perilaku hidup bersih dan sehat

PERMASALAHAN TPB & KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya menurunkan penduduk umur ≤ 18 tahun dan ≥ 15 tahun yang merokok (DUT) - Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air yang mempengaruhi Kesehatan masyarakat (D3TLH) 		
<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan dan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. (DUT) - Menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan kekurangan gizi (<i>Covid-19</i>) - Daya dukung pangan pokok yang terlampaui mengganggu pemenuhan asupan kalori minimum (D3TLH) - Rendahnya kawasan sebagai jasa ekosistem penyedia pangan serta menurunnya lahan pertanian (D3TLH) 		Menjamin asupan gizi yang didukung ketahanan pangan bagi seluruh penduduk
<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) (DUT) - Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (DUT) 		Mencegah kematian bayi baru lahir dan balita
<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (DUT) - Masih terbatasnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (DUT) 	(4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kebijakan responsif gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (DUT) - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 dan 18 tahun (NA) 		Meningkatkan layanan dan pemahaman kesehatan reproduksi
<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya meningkatkan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita (DUT) - Perlunya meningkatkan PDRB per kapita (DUT) - Perlunya menekan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran (DUT) - Meningkatkan persentase tenaga kerja formal (<i>Covid-19</i>) - Mempertahankan upah rata-rata per jam pekerja (<i>Covid-19</i>) 	(5) Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kontribusi PDRB	Mengembangkan sektor industri yang menyerap tenaga kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Akses UMKM ke layanan keuangan dan proporsi terhadap total kredit (NA) - Meningkatkan proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri (NA) - Peningkatan akses kantor bank dan ATM (NA) 		Meningkatkan akses keuangan UMKM
<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya jumlah wisatawan nusantara (DUT) - Menurunnya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata (DUT) - Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang mempengaruhi tingkat ketertarikan sektor pariwisata (D3TLH) 		Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang unggul
<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (DUT) - Belum semua kelurahan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (DUT) - Penerapan green waste dan pengelolaan limbah B3 (NA) - Perlunya meningkatkan kapasitas penanganan dan pengurangan sampah (D3TLH) - Rendahnya jasa ekosistem untuk pemurnian air, jasa ekosistem pengurai limbah yang mempengaruhi kualitas sumber daya air (D3TLH) - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan terbatasnya daya tampung TPA (D3TLH) - Rendahnya kualitas air permukaan menyebabkan tidak layak untuk sumber air baku (D3TLH) 	(6) Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi	Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui penanganan limbah
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air penduduk dari sumber air 		Meningkatkan pasokan

PERMASALAHAN TPB & KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
<p>permukaan (D3TLH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri (DUT) - Belum tersedianya tata kelola sumber daya air seperti insentif penghematan air pertanian dan industri; (DUT) - Belum terinternalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam RTRW (DUT) - Rendahnya jasa ekosistem penyedia air, dan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir yang mempengaruhi kapasitas penyerapan dan penampungan air (D3TLH) - Terlampauinya daya dukung air permukaan (D3TLH) - Tidak adanya sumber daya air selain air bawah tanah yang tersedia di Kota Pekalongan, sehingga seluruh pemenuhan sumber daya air permukaan dari wilayah sekitar (D3TLH) 		<p>air baku yang bersumber dari air permukaan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang (DUT) - Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (DUT) - Rehabilitasi lahan kritis (NA) - Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) (DUT) - Daya dukung fungsi lindung kategori sedang (D3TLH) - Rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kualitas tutupan lahan yang menyebabkan rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim (D3TLH) 	<p>(7) Perwujudan kota hijau</p>	<p>Meningkatkan dan melindungi ruang terbuka hijau</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya bauran energi terbarukan (NA) - Meningkatkan penggunaan transportasi umum (NA) - Meningkatkan jumlah perusahaan dalam penerapan SNI ISO 14001 dan produk ramah lingkungan (NA) 		<p>Mendorong perilaku ramah lingkungan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (DUT) - Kerugian ekonomi langsung akibat bencana (NA) - Belum seluruh lokasi bencana mendapatkan kegiatan penguatan pengurangan risiko bencana daerah (DUT) - Perlunya menurunkan Indeks Risiko Bencana (DUT) - Menjamin kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial bagi korban bencana (D3TLH) - Meningkatkan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan (D3TLH) - Peningkatan ancaman dampak perubahan iklim dengan meningkatnya cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut (D3TLH) 	<p>(8) Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim</p>	<p>Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana dan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir (D3TLH) - Terjadinya penurunan muka tanah (amblesan) akibat penggunaan air bawah tanah yang berlebihan (D3TLH) - Meningkatnya intensitas dan jangkauan kawasan rawan bencana rob, banjir dan abrasi pantai (D3TLH) - Daya dukung lahan terbangun yang hampir terlampaui berakibat pada berkurangnya kawasan resapan air (D3TLH) 		<p>Mengembangkan instrumen pembangunan untuk pencegahan bencana</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh penduduk memiliki akta kelahiran (DUT) - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register) (NA) - Perlunya meningkatkan konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan (DUT) 	<p>(9) Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan</p>	<p>Mengembangkan sistem data dan informasi untuk pembangunan dan publik</p>

PERMASALAHAN TPB & KONDISI LINGKUNGAN HIDUP	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
- Belum seluruh indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target (DUT)	masyarakat	
- Perlunya mengembangkan penyiapan dan pengembangan proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (DUT)		Mengembangkan inovasi untuk pembiayaan pemerintah
- Peningkatan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB (NA) - Menurunnya total pendapatan pemerintah dan kecilnya rasio pajak sebagai proporsi terhadap PDRB (<i>Covid-19</i>) - Rendahnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik (<i>Covid-19</i>)		
- Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) (NA) - Peningkatan indeks reformasi birokrasi (NA)		Meningkatkan kapasitas birokrasi yang akuntabel
- Konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥15 tahun (NA) - Kasus kejahatan serta konflik sosial (NA) - Tingkat keamanan penduduk yang berjalan sendirian pada area tempat tinggal (NA) - Kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun pada penduduk umur 18-24 tahun (NA)	(10) Kondusivitas wilayah	Melakukan upaya preventif untuk mencegah segala bentuk kejahatan kekerasan

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 8 isu strategis. Selain itu dalam kegiatan uji publik pertama untuk mendapatkan masukan dari stakeholder untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup. Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob. Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan berdasarkan kelompok pilar :

- a. **Pilar Sosial** : (1) Penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. **Pilar Ekonomi** : (5) Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kontribusi PDRB;
- c. **Pilar Lingkungan** : (6) Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi; (7) Perwujudan kota hijau; (7) Penurunan risiko bencana serta meningkatkan adaptasi perubahan iklim;
- d. **Pilar Hukum dan Tata Kelola** : (8) Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat; (9) Kondusivitas wilayah.

Sasaran strategis di atas disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari skenario pencapaian TPB, skenario lingkungan hidup, serta skenario *Covid-19* di Kota Pekalongan. Isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis merupakan rekomendasi KLHS dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021 – 2026. Selain itu sasaran strategis juga menjadi dasar dalam penyusunan program.

4.2.6. Hasil Telaahan RPJMD terhadap RPJMD Wilayah Sekitar

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, kedua

kabupaten tersebut memiliki keterhubungan sehingga di dalam satu region dapat saling mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD kedua kabupaten tersebut mempunyai visi dan misi yang sama-sama kuat dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, mereka mempunyai misi yang sebagian lingkup besarnya adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, maupun peningkatan kelembagaan pemerintahan.

Pada dokumen RPJMD kedua kabupaten tersebut mempunyai tujuan/sasaran yang melingkupi cakupan permasalahan daerah masing-masing dengan poin penting berupa tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi RPJMD masing-masing daerah. Berikut ini adalah telaah masing-masing dokumen yang mempunyai agenda yang berhubungan dengan Kota Pekalongan:

4.2.6.1. RPJMD Kabupaten Pekalongan

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan pada wilayah Barat dan Selatan. Hubungan yang erat antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan terjadi karena hubungan sosial, budaya dan ekonomi antar wilayah yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling membutuhkan. Dalam sistem perkotaan nasional pun, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), salah satu kawasan *hinterland*-nya adalah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan kebijakan Kabupaten Pekalongan karena dapat berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017. Isu strategis pembangunan Kabupaten Pekalongan meliputi:

1. Kemiskinan, pengangguran dan lapangan kerja;
2. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. Pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi;
4. Infrastruktur dan perhubungan;
5. Banjir dan rob;
6. Perumahan dan permukiman kumuh; dan
7. Reformasi birokrasi.

Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, religius dan berkelanjutan berbasis potensi lokal”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan yang disajikan dalam tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak. 2) Menurunnya angka gizi buruk. 3) Menurunnya angka kesakitan penduduk. 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda. 5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
		Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. 2) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. 3) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 4) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik. 5) Meningkatnya minat baca masyarakat.
		Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kesempatan kerja. 2) Meningkatnya penanganan PMKS.
		Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 2) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.
		Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM. 2) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil. 3) Meningkatnya aktivitas perdagangan. 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD.
		Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan 2) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
2	Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat	Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak 2) Azasi Manusia (HAM). 3) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. 4) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
3	Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik	Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik	Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama
4	Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>. 2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan PD dan lintas PD
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Perdesaan. 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi 5) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah	Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan <i>branding</i> produk daerah	Meningkatnya prestasi pemuda, olahraga dan teknologi
7	Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah 2) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, 2021

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal dirumuskan dua belas agenda prioritas yang disebut **DUABELAS MANDAT RAKYAT**, yaitu :

1. Penerbitan **KARTU KAJEN SEHAT** (Jaminan Kesehatan, Persalinan, Khitan, Santunan Kematian) dan **KARTU KAJEN CERDAS** (Gratis pendidikan dasar dan Menengah).

2. Subsidi biaya pendidikan di perguruan tinggi.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan percepatan pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, pasar, jaringan listrik bantuan aspal dan semen) dan jaminan ketersediaan air bersih melalui: menambah jumlah sumur bor dan sumur dalam, pembangunan embung baru.
4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah atas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti, guru dan guru madrasah (MI, MTs dan MA), guru MDA/TPQ/TPA; pengasuh pondok pesantren; Takmir masjid serta guru ngaji (ustadz).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian melalui: ketersediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan anorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain).
6. Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui: ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodal, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten.
7. Membuka kesempatan investasi melalui: kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja baru serta melindungi hak-hak normatif buruh.
8. Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan: ketersediaan BBM, kualitas pelayanan TPI, pembangunan dermaga dan pengerukan sungai jambean dan wonokerto serta pembangunan pabrik es balok.
9. Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir-rob.
10. Menanamkan kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan.
11. Melestarikan Seni dan Budaya.
12. Mewujudkan Birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih.

4.2.6.2. RPJMD Kabupaten Batang

Kota Pekalongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang pada wilayah Timur dan Selatan. Hubungan yang erat antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang terjadi karena hubungan sosial, budaya dan ekonomi antarwilayah yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling membutuhkan. Dalam sistem perkotaan nasional pun, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), salah satu kawasan *hinterland*-nya adalah Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan kebijakan Kabupaten Batang karena dapat berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan Kota Pekalongan. Acuan yang digunakan dalam tinjauan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 meliputi:

1. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38.
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan.
4. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (*E-Government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.

5. Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
6. Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang.
7. Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah).

Visi pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tenteram dan sejahtera pada tahun 2022”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City* yang didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batang yang disajikan dalam tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis <i>Smart City</i> yang didukung pengembangan kerjasama	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
		Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Meningkatnya sinergitas dan kerjasama antar daerah (KAD)
2	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu	Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya	1) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik 2) Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	1) Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	2) Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh
		Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif	1) Meningkatnya kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha 2) Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM
3	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur	Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah 2) Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi
		Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang	Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan
		Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktifitas perikanan dan kelautan yang lestari	Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari
4	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur	Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya	Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan kriminalitas
		Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

4.2.7. Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu regional, isu nasional, dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah

dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Hingga tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 68,97 dan pada tahun 2020 sebesar 68,91. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,14. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 93,94 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 60,54; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3.022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

4.2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh

terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Dari dokumen KLHS dapat diketahui bahwa beberapa indikator kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya. Dari Tabel Status Lingkungan tersebut dapat diidentifikasi bahwa kondisi lingkungan hidup Kota Pekalongan perlu dikelola dengan sangat hati-hati karena kondisinya yang semakin kritis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis agar kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan dapat dipertahankan, tidak semakin menurun, dan diupayakan dapat meningkat.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Namun demikian, hingga saat ini, luas genangan masih sebesar 37,27 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 58,9 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 3-4 cm per tahun; dan c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 0,69 persen.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi eksploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi

geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampaunya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 52,92 dan pada tahun 2020 turun menjadi 50,84. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kota Pekalongan karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30 persen dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob (Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024).

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres 19 Tahun 2019, antara lain : Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota

Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN)

4.2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar 88,60 persen dan pada tahun 2020 menjadi 88,79 persen. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, persentase layanan persampahan tahun 2019 sebesar 86,30 persen dan pada tahun 2020 menjadi 87,98 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2020, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,36), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Potensi kemacetan ini diperkirakan akan muncul kembali sebagaimana pernah terjadi pada saat sebelum pandemic *Covid-19* dan pasca uji coba penggunaan jalan tol dimana kendaraan berat seperti truck kembali ke jalan pantura.

Pembangunan kota yang berkelanjutan perlu didukung dengan transportasi yang berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi generasi yang akan datang. Rencana dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi massal yang terpadu, nyaman, ekonomis serta ramah lingkungan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalam pengembangan infrastruktur dasar, khususnya pengembangan jalan, yaitu jalan lingkaran Petanglong. Jalan lingkaran Petanglong melingkupi kawasan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan) sehingga membutuhkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Rencana pembangunan jalan lingkaran Petanglong telah tercantum pada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 maupun RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, tetapi hingga saat ini belum diketahui kapan akan diimplementasikan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat agar rencana jalan lingkaran Petanglong tersebut dapat segera diwujudkan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat

tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastrukturnya lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2020, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 10,74 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Persentase tersebut merupakan luasan yang cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

4.2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi Covid-19)

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi *Covid-19* sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumber daya kesehatan difokuskan pada penanganan pandemi, dan disisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan : a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2020 AKI masih bernilai 152,41 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2020 AKB masih bernilai 8,81 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya angka kematian balita (AKABA), tahun 2020 AKABA masih bernilai 10,84 per 1.000 KH; d). Masih tingginya angka kesakitan, tahun 2020 angka kesakitan sebesar 12,89 persen; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,07 persen pada tahun 2020 f) masih tingginya prevalensi stunting, dimana pada tahun 2020 prevalensi stunting Kota Pekalongan sebesar 9,42%; g) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,31 persen serta h) masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, pada tahun 2020 mencapai sebesar 18,18 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 sebesar 74,28 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,38 masih berada pada posisi terbawah jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah. Sehingga UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

4.2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Pandemi *Covid-19* yang berdampak sangat luas, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, membutuhkan upaya terintegrasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat segera pulih, sehingga dapat tumbuh dan berkembang kembali, agar kesejahteraan masyarakat kembali meningkat. Kondisi yang paling dominan dapat dicermati adalah angka kemiskinan yang kembali meningkat dan Tingkat Pengangguran Terpadu (TPT) pun juga menunjukkan peningkatan sehingga seolah-olah mengaburkan upaya terpadu yang telah dilaksanakan selama ini.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 6,60 persen. Namun akibat dampak pandemi *Covid-19*, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 meningkat menjadi 7,17 persen. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang belum optimal. Penanganan angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah ketika angka kemiskinan semakin rendah sehingga dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi *Covid-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2020 sebanyak 121.889 jiwa dari semula 112.613 jiwa pada tahun 2019, atau kenaikan sebanyak 9.276 jiwa. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SGD's)* yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung mengalami penurunan, terutama akibat adanya pandemic *Covid-19*. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan penurunan yang optimal dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 5,77 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,02 persen. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, *link and match* dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

4.2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 74,77 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,98. Meskipun IPM Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut menunjukkan angka terendah dibandingkan kota-kota yang ada Jawa Tengah.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika dilihat dari dimensi pengetahuan, IPM di Kota Pekalongan belum optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah sebesar 12,84 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,84 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 8 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak

berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

- b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 8,96 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 8,96 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP kelas 8 belum sampai kelas 9 SMP atau belum sampai lulus SMP. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi secara global sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini juga berdampak terhadap urusan pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar dimana proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sehingga pendidik dituntut untuk dapat menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Selain itu dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung serta kesiapan peserta didik dan orang tua.

- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 sebesar 58,29. Beberapa isu dalam kesetaraan gender antara lain:
- Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik.
 - Pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tingkat partisipasi penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibanding penduduk perempuan;
 - Masih rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan diri dan keluarga;
 - Belum optimalnya pendidikan politik dan hukum bagi perempuan;
 - Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan (28,53%);
 - Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

4.2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan

akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp 35,22 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi *Covid-19*, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 720.000 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 283.882 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 196,11 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2019 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2019 sebesar 4,84, persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,48 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2019 sebesar 5,72 persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar -4,37 persen; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi *Covid-19*, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui pendanaan tahun jamak Kementerian PUPR, di kawasan pesisir Kota Pekalongan sedang dibangun wisata laut terbesar di Indonesia. Wisata laut ini diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian Kota Pekalongan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka wisata laut Kota Pekalongan tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru dan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan.

Berkaitan dengan TOD, pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung

mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata. Sebagai Langkah awal, Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun konsep desain Pengembangan TOD Stasiun Pekalongan Kota Pekalongan dan tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan koordinasi dengan PT. KAI (DAOP 4 – Semarang) terkait rencana pengembangan TOD dan pemaparan konsep desain yang telah disusun. Langkah lain yang juga telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah dengan mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN terkait pengembangan TOD dimaksud. Pengembangan TOD yang direncanakan berlokasi di sekitar Gedung eks Sri Ratu Kota Pekalongan, juga memerlukan perencanaan dan penataan asset Gedung yang dalam hal ini tercatat di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah/BKD Kota Pekalongan. Sehingga dalam Pengembangan TOD Pemerintah Kota Pekalongan dapat melakukan revitalisasi asset milik kota Pekalongan sedangkan sarana prasarana pendukung lain dapat dibangun dan dikembangkan menggunakan dana BUMN. Hal lain yang juga harus direncanakan dan ditata adalah perlunya koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pengembangan TOD yang berada di ruas jalan nasional. Sehingga dalam perencanaan perlu adanya sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan (Bappeda dan BKD), Kementerian BUMN (PT. KAI) dan Kementerian PUPR.

Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Isu daya saing ekonomi yang menjadi perhatian di Kota Pekalongan selain yang disebutkan di atas, terdapat pula pada sektor perikanan. Kondisi Kota Pekalongan yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa menempatkan Kota Pekalongan sebagai Kota

Minapolitan. Sektor perikanan Kota Pekalongan pernah mengalami kejayaan pada era '90an, namun dalam kurun waktu 10 – 15 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain terkait dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana baik di laut maupun di darat, ataupun koordinasi dan komunikasi antar stakeholder perikanan. Sektor Perikanan di Kota Pekalongan tidak sebatas di sektor perikanan tangkap saja, tapi sektor perikanan budidaya juga perlu untuk mendapat perhatian lebih karena perikanan budidaya 10 (sepuluh) tahun terakhir menjadi alternatif usaha bagi masyarakat yang lahannya terinterusi air laut karena adanya fenomena rob.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

4.2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya

serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.7.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2019 berjumlah satu kasus dan pada tahun 2020 juga berjumlah satu kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pada tahun 2019 sebesar 4,59 (per 10.000 penduduk), namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2019 adalah sebesar 44 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

4.2.8. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Pekalongan dengan isu Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS dapat dijelaskan dalam tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17 Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Isu Strategis KLHS

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
1	Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (<i>Smart Governance</i>) b. Belum optimalnya kualitas layanan publik (<i>Smart Governance</i>) c. Belum optimalnya implementasi manajemen ASN d. Akuntabilitas Kinerja Masih perlu ditingkatkan e. Akuntabilitas Keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan f. Belum optimalnya penerapan zona integritas 	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	<ul style="list-style-type: none"> 5. Institusi 10. Kewilayahan 12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 	7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	9. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat
2	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan sistem drainase yang belum optimal b. Tingginya tingkat pencemaran air c. Belum optimalnya tutupan hutan d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> 11. Lingkungan Hidup dan Bencana <p>Selain itu salah satu program penanganan rob dan banjir dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres 79 Tahun 2019 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/ Pekalongan/Kupang - Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang. - Pengendalian Banjir dan Rob. 	4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> 7. Perwujudan kota hijau 8. Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
				- Penyempurnaan Sistem banjir dan rob		
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan infrastruktur Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya cakupan layanan air minum (perpipaan) b. Belum optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan c. Belum optimalnya layanan transportasi perkotaan d. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; .9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Infrastruktur 11. Lingkungan Hidup dan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 4) Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam <p>Selain itu salah satu program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi
4	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya capaian keluarga sehat 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Kesehatan <p>Selain itu salah satu program percepatan pembangunan ekonomi kawasan dengan lokus di Kota Pekalongan adalah Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak (Perpres 79 Tahun 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2). Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 5) Kedaulatan pangan dan energi <p>Selain itu salah satu program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai RPJMD Provinsi Jawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
					Tengah diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan)	
5	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya penanganan kemiskinan b. Masih tingginya angka pengangguran terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Karakter bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan kemiskinan 3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan kemiskinan
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan b. Belum optimalnya akses pendidikan c. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tenaga Kerja 6. Pendidikan 8. Karakter bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
		d. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;			4. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
7	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	a. Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi <i>Covid-19</i> serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 3. Investasi 4. Perdagangan Selain itu salah satu program percepatan pembangunan ekonomi kawasan dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) Stasiun Pekalongan	3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha Selain itu salah satu program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan	5. Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kontribusi PDRB
8	Pelestarian Budaya Lokal	a. Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;	8. Karakter bangsa	3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	5. Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kontribusi PDRB

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Masalah	Isu Internasional (SGDs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS
9	Kondusivitas Wilayah	a. Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	10. Kewilayahan 12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	6) Kesenjangan wilayah 7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	10. Kondusivitas wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan *Tahta Untuk Rakyat* sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

5.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu branch image yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk meng-eksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan Onshore. Pembangunan pelabuhan on shore ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal penting, yaitu upaya mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan, serta sinkronisasi dengan upaya pengendalian banjir dan rob.

Upaya untuk mewujudkan pelabuhan *onshore* sudah dimulai sejak tahun 2007. Upaya ini kemudian didorong untuk segera dapat diwujudkan mengingat semakin menurunnya produksi perikanan tangkap pada saat potensi kepemilikan kapal dan juga industri pembuatan kapal (galangan) semakin meningkat. Selain itu, pada saat sekarang ini, Pemerintah Pusat akan segera melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan rob pada sistem Kali Loji dimana kondisinya masih menjadi tambatan / labuh kapal. Dengan akan terwujudnya pelabuhan *onshore* ini, maka kapal-kapal dan juga industri pendukungnya (galangan dan bengkel kapal/docking) dapat dipindahkan ke area pelabuhan on shore, sehingga tidak mengganggu penerapan sistem pengendali banjir dan rob di Kali Loji.

Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi

operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi ke delapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

5.1.2. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pemaknaan sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

5.1.3. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

5.1.4. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religious ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya

disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

5.2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sarasannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

5.2.2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

5.2.3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

5.2.4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat.

Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan.

5.2.5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

5.2.6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan pujipujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong

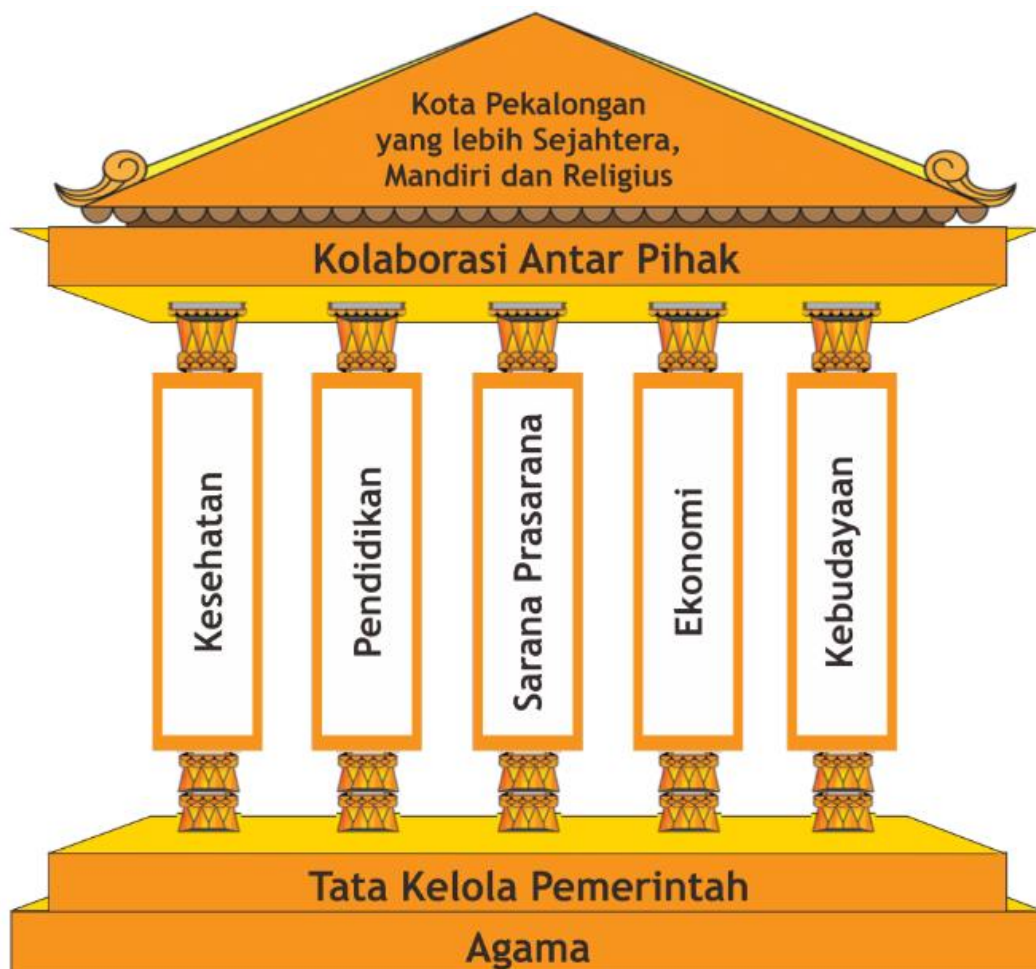
peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

5.2.7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

5.3.1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
- b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

5.3.2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif

SASARAN

- a. Meningkatnya akses pendidikan
- b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
- c. Optimalnya pengarusutamaan gender
- d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
- e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

5.3.3. Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

- a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

- a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

5.3.4. Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

- a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

- a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air
- c. Optimalnya kualitas lahan
- d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Optimalnya layanan air minum
- f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
- g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

5.3.5. Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

- a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

5.3.6. Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

- a. Melestarikan Seni Budaya
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

- a. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan
- b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

5.3.7. Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

- a. Optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
- b. Meningkatnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*)
- c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
- e. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
- f. Meningkatnya kualitas pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026

Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat												
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1 Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00	
2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Angka Kemiskinan		persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		1 Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan												
1 Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif		Indeks Pembangunan Manusia		indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1 Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
			2 Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3 Optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4 Optimalnya pengarusutamaan hak anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
		Tingkat Pengangguran Terbuka		persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1 Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman												
1	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen		persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1 Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan												
1	Menurunkan luas genangan banjir dan rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob		persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1 Optimalnya penanganan banjir dan rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.730,00	1.537,00	1.230,00	1.027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1 Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2 Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,600	23,601	23,602	23,603	23,604	23,605	23,606	23,606
		3 Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar		persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04	
		1	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal													
1	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita		Rp. Juta/jiwa/tahun	35,22	35,47-35,51	35,97-36,21	36,56-36,92	37,16-37,82	39,21	40,65	40,65	
		1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86-1,97	2,28-2,84	2,48-2,83	2,53-3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah													
1	Melestarikan seni budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan		persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		1	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial		kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government													
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69	
		1	Optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
				2	Meningkatnya kualitas layanan publik (<i>Smart Governance</i>)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor			91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD			2	3	4	5	6	7	8	8		

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 5.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan jalan dan jembatan lingkungan kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan luas genangan banjir dan rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Pertanian
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK <i>Outcome</i>)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah					
Melestarikan seni budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governmen					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. STRATEGI

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tujuan pada misi ini adalah usia harapan hidup dan angka kemiskinan, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas keluarga sehat.
- b. Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin.

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain). Program tersebut merupakan salah satu implementasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), serta angka kesakitan. Skema strategi pencapaian Misi 1 dijelaskan dalam gambar 6.1.



Gambar 6.1 Skema Strategi Pencapaian Misi 1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal, membentuk manusia yang religius melalui pendidikan karakter, serta pangarustaman gender dan hak anak. Indikator tujuan pada misi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu:

- Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
- Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta *stakeholder* terkait



Gambar 6.2 Skema Strategi Pencapaian Misi 2

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah jaminan akses pendidikan bagi setiap warga, memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga, serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren. Program tersebut merupakan salah satu implementasi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan peningkatan tingkat religiusitas warga Kota Pekalongan. Skema strategi pencapaian Misi 2 dijelaskan dalam Gambar 6.2.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah untuk kualitas permukiman. Indikator tujuan pada misi ini adalah persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah membangun sistem database infrastruktur permukiman. Program tersebut merupakan salah satu implementasi penanganan kawasan kumuh. Skema strategi pencapaian Misi 3 dijelaskan dalam gambar 6.3.



Gambar 6.3 Skema Strategi Pencapaian Misi 3

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah penanganan banjir dan rob, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan yang meliputi ; air minum, sampah, transportasi dan penataan ruang. Indikator tujuan pada misi ini adalah persentase luas genangan banjir-rob, indeks kualitas lingkungan hidup, dan layanan infrastruktur dasar perkotaan, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu:

- a. Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Strategi ini akan diawali dengan validasi data dan perumusan kebijakan penanganan banjir, rob dan penataan ruang serta lingkungan hidup.

b. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan



Gambar 6.4 Skema Strategi Pencapaian Misi 4

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota, penanganan rob dan banjir, serta menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga. Skema strategi pencapaian Misi 4 dijelaskan dalam gambar 6.4.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Misi ini fokus kepada pemulihan ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*. Indikator tujuan pada misi ini PDRB Per Kapita yang menunjukkan tingkat ekonomi Kota Pekalongan, yang akan dicapai melalui strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi



Gambar 6.5 Skema Strategi Pencapaian Misi 5

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern, membangun ekonomi kreatif dan digital *preneurship* bagi kalangan muda, penyediaan jaringan internet gratis, penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat *food street*, mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain, serta mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir. Program tersebut merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil di Kota Pekalongan. Skema strategi pencapaian Misi 5 dijelaskan dalam gambar 6.5.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Misi ini fokus kepada pelestarian budaya lokal dan mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah yang ditunjukkan dengan tingkat pelestarian seni budaya dan kerukunan umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya konflik sosial di masyarakat. Misi ini akan dicapai dengan strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu;

- a. Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
- b. Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah menambah sarana olahraga dan kesenian, guna menumbuhkembangkan seni, budaya dan olahraga di masyarakat. Skema strategi pencapaian Misi 6 dijelaskan dalam gambar 6.6.

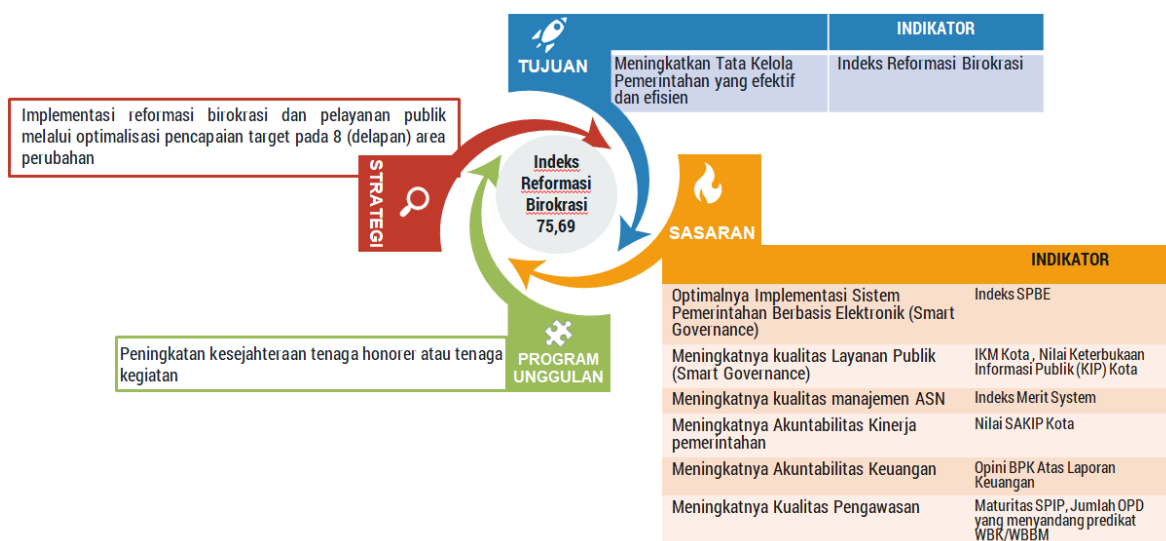


Gambar 6.6 Skema Strategi Pencapaian Misi 6

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini fokus kepada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi. Misi ini akan dicapai dengan strategi sesuai kewenangan Kota Pekalongan, yaitu Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.



Gambar 6.7 Skema Strategi Pencapaian Misi 7

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Skema strategi pencapaian Misi 7 dijelaskan dalam gambar 6.7.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan dijelaskan dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak		

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan luas genangan banjir dan rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	
Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan seni budaya	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tema Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **“Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada
- b. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.
- c. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukan anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
- d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- e. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
- f. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.
- h. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.
- i. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
- j. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk “**Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
- c. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
- d. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
- e. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- f. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- h. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
- j. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk “**Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.
- b. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan

- c. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
- f. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- h. Peningkatan peran serta stake holder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
- j. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk “**Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
- d. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.
- e. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
- f. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- g. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- j. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya loka
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk “**Penyempurnaan Pencapaian Target Visi Dan Misi Pembangunan Dalam Rangka Penataan Pembangunan Yang Berkelanjutan**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
- c. Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religius
- d. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
- e. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi
- f. Fasilitasi pengelolaan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani
- g. Peningkatan peran serta swasta/masyarakat untuk penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- h. Penguatan pengelolaan/kelembagaan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa
- j. Penguatan pondasi pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, pendiskripsian dan pendokumentasian seni tradisi lokal
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
- l. Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

Keterkaitan antara Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, disajikan dalam tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Keterkaitan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

NO	MISI, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</i>							
1	Peningkatan kualitas keluarga sehat	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada.	■				
		Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		■			
		Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.			■		
		Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.				■	
		Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.					■
2	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.	■				
		Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		■			
		Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan.			■		
		Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan .				■	
		Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.					■
<i>Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan</i>							
1	Peningkatan akses pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan karakter dan keagamaan.	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukan anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga.	■				

NO	MISI, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas.					
		Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan.					
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non, formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan.					
		Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religius.					
2	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.					
		Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.					
		Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.					
		Peningkatan <i>link and match</i> ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.					
		Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja.					
3	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak.					
		Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak					

NO	MISI, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Anak (PUHA).					
		Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.					
		Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.					
		Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi.					
<i>Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman</i>							
1	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.					
		Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.					
		Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.					
		Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.					
		Fasilitasi pengelolaan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani.					
<i>Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan</i>							
1	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.					
		Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.					
		Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.					
		Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.					

NO	MISI, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan peran serta swasta/masyarakat untuk penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.					
2	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.					
		Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.					
		Peningkatan peran serta stake holder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.					
		Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.					
		Penguatan pengelolaan/kelembagaan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.					
<i>Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal</i>							
1	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal..					
		Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.					
		Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif					
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.					
		Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.					
<i>Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah</i>							
1	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya.					
		Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.					
		Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya.					

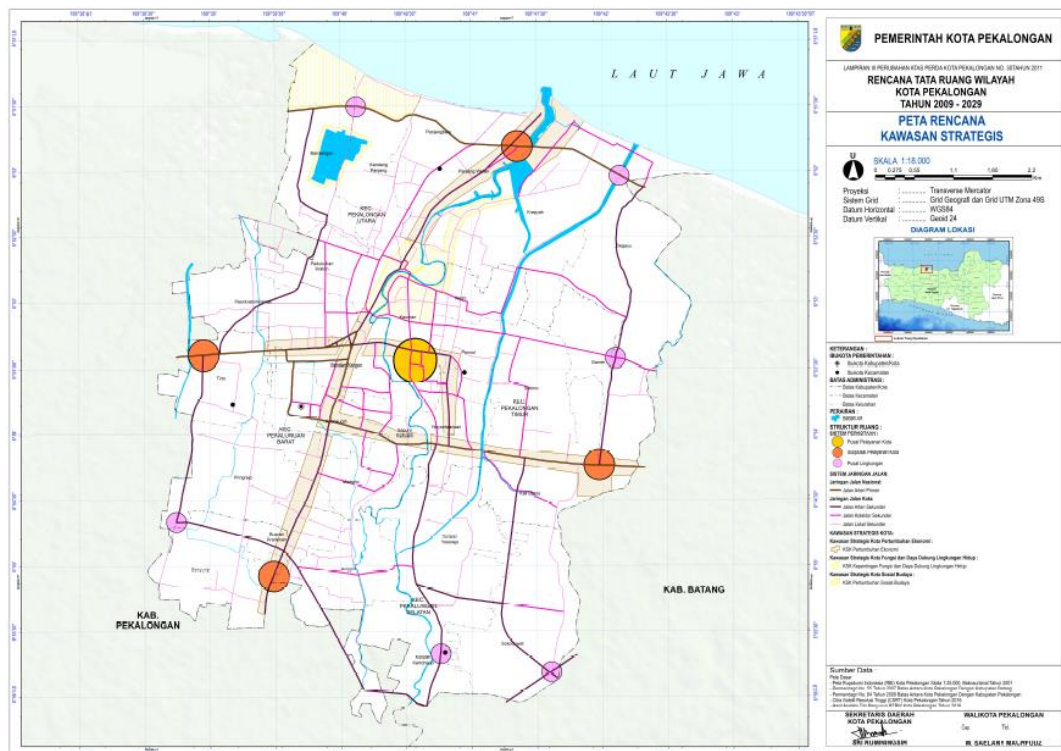
NO	MISI, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal.					
		Penguatan pondasi pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, pendiskripsian dan pendokumentasian seni tradisi lokal.					
2	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.					
<i>Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government</i>							
1	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.					
		Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.					
		Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.					
		Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> .					
		Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat.					

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

6.3. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

6.3.1. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pengembangan kawasan strategis kota meliputi: a) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 6.8 Kawasan Strategis Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

1. Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu berupa kawasan perdagangan jasa dan berbasis perikanan. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan jasa, yang meliputi:

- Kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda, di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, dan Kelurahan Bendan Kergon;
- Kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin, di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kauman, Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaansari;
- Kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi, di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Noyontaansari.
- Kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur;
- Kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Medono, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan dan Kelurahan Banyurip; dan
- Kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan berada di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

2. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Jetayu, yang terdiri atas:

- a. Kawasan Jetayu sebagai kawasan *heritage* berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Deliniasi kawasan dilakukan untuk melindungi dan melestarikan aset bangunan bersejarah.
- b. Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur. Deliniasi kawasan dilakukan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat tradisi syawalan.
- c. Lingkungan etnis sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, dilakukan sebagai tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, meliputi :
 - 1) Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - 2) Kampung Pecinan berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. kawasan sekitar polder pengendali banjir dan rob di Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- b. kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (*mangrove park*) berada di wilayah pantai Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

6.3.2. Keterkaitan Kota Pekalongan dengan Wilayah Sekitar (Petanglong)

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis, karena berlokasi pada titik tengah jalur transportasi regional pantai Utara Jawa (jalan raya maupun rel kereta api) antara Kota Surabaya dan Jakarta serta “titik lelah” tol trans Jawa. Posisi strategis tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan peran Kota Pekalongan dalam konteks regional dan peningkatan daya saing, sehingga dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Dalam kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Pekalongan. Kawasan Perkotaan Pekalongan merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah dan pusat dari Wilayah Pengembangan Petanglong. Wilayah Pengembangan Petanglong adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Arah

pengembangan Wilayah Pengembangan Petanglong adalah memadukan pembangunan Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya, serta pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi: industri, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan.

6.3.2.1. Sinergi Pengembangan Wilayah Dikaitkan Dengan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Dan Kawasan Industri Brebes

Setiap daerah harus meningkatkan daya saing wilayahnya agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Oleh karena itu, setiap daerah akan memanfaatkan sektorunggulannya dalam pengembangan wilayah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Tabel 2.7, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 meliputi: Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan (rata-rata kontribusi di atas 20 persen); LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata kontribusi di atas 20 persen); dan LU Konstruksi (rata-rata kontribusi di atas 14 persen). Sesuai dengan Tabel 2.8, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi PDRB meliputi: LU Informasi dan Komunikasi (rata-rata pertumbuhan di atas 10 persen); LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (rata-rata pertumbuhan di atas 8 persen); LU Jasa Perusahaan (rata-rata pertumbuhan di atas 8 persen). Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat diidentifikasi LU tersebut merupakan sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan.

Analisis LQ (*location quotient*), dengan menggunakan data PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020, untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3 Analisis LQ Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	LQ					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata ²
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.37	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Industri Pengolahan	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62	0.61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.79	1.78	1.78	1.74	1.69	1.76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.72	1.71	1.72	1.71	1.77	1.73
6	Konstruksi	1.36	1.33	1.33	1.32	1.34	1.34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.54	1.54	1.53	1.52	1.49	1.52
8	Transportasi dan Pergudangan	2.05	2.04	2.03	2.00	2.24	2.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.57	1.56	1.41	1.49	1.55	1.52

No	Lapangan Usaha	LQ					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata ²
10	Informasi dan Komunikasi	1.18	1.17	1.15	1.13	1.14	1.15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.13	2.17	2.21	2.20	2.16	2.17
12	Real Estat	1.55	1.54	1.55	1.54	1.53	1.54
13	Jasa Perusahaan	1.05	1.04	1.02	1.00	1.02	1.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.64	1.65	1.66	1.65	1.65	1.65
15	Jasa Pendidikan	1.08	1.08	1.07	1.02	1.01	1.05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.48	1.46	1.45	1.46	1.45	1.46
17	Jasa lainnya	1.23	1.22	1.22	1.20	1.28	1.23

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2021

Dari hasil analisis LQ tersebut dapat diketahui bahwa sektor basis di Kota Pekalongan sebanyak 14 dari 17 lapangan usaha (LU). Sesuai dengan perkembangan fungsi kota sebagai pusat pelayanan wilayah maka sektor primer yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Pertambangan dan Penggalian tidak menjadi sektor basis. Sektor yang memiliki rata-rata nilai LQ tertinggi adalah LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Pengadaan Listrik dan Gas. Satunya-satunya sektor sekunder yang bukan merupakan sektor basis adalah LU Industri Pengolahan, yang memiliki nilai rata-rata LQ sebesar 0,61.

LU Industri Pengolahan di Kota Pekalongan tidak menjadi sektor basis berarti bahwa sumbangan LU Industri Pengolahan Kota Pekalongan masih lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Padahal, LU Industri Pengolahan merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusinya terbesar yaitu di atas 20 persen, bersama LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Industri pengolahan tidak dapat berkembang di wilayah Kota Pekalongan secara maksimal karena sifat alamiah perkotaan, disebabkan keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai. Pengembangan kawasan budidaya yang paling berkembang adalah untuk kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa. Sesuai dengan RTRW Kota Pekalongan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029), luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha. Alokasi untuk Kawasan peruntukan industri seluas 189 Ha, Kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha dan Kawasan Perumahan seluas 2.430 Ha.

Jika dicermati dengan menggunakan analisis shift-share maka dapat diketahui struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional (Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah). Hasil perhitungannya disajikan dalam tabel 6.4 sebagai berikut.

Tabel 6.4 Analisis Shift-Share Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Provincial Share	Proportional Shift	Differential Shift
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44.41	-16.80	2.00
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00

No	Lapangan Usaha	Provincial Share	Proportional Shift	Differential Shift
3	Industri Pengolahan	311.66	-173.21	47.90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.86	-0.49	-0.59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.75	-0.29	0.37
6	Konstruksi	202.21	-72.18	5.34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323.33	-124.22	-28.08
8	Transportasi dan Pergudangan	99.28	-173.12	38.92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.19	-23.34	-1.07
10	Informasi dan Komunikasi	72.68	130.87	-13.15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	86.35	-29.83	11.83
12	Real Estat	42.27	-8.58	0.10
13	Jasa Perusahaan	5.46	-0.20	-0.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	64.00	-39.66	5.99
15	Jasa Pendidikan	58.44	1.91	-16.35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.63	10.33	-0.44
17	Jasa lainnya	28.33	-4.13	8.23
Jumlah		1,432.84	-522.93	60.65

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2021

Apabila nilai *provincial share* dan *differential shift* positif maka sektor yang bersangkutan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila nilainya negatif maka perekonomian daerah sektor tersebut masih dapat diperbaiki, antara lain dengan membandingkannya terhadap struktur perekonomian provinsi. Dari tabel di atas maka terdapat LU yang memiliki nilai *provincial share* dan *differential shift* positif. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa LU Industri Pengolahan juga merupakan sektor unggulan di Kota Pekalongan.

Dalam konteks regional, pengembangan wilayah Kota Pekalongan diarahkan untuk menjadi daerah tujuan, bukan hanya sebagai tempat persinggahan. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, terutama industri batik, dimanfaatkan sebagai penggerak utama (*prime mover*) untuk semakin tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya, seperti pariwisata, perdagangan jasa dan industri lainnya. Beberapa ikon atau destinasi akan dikembangkan di Kota Pekalongan seperti wisata pantai, TOD (*transit oriented development*) Stasiun Besar Pekalongan, serta Kawasan Pekalongan Baru. Kesemua upaya dari sinergi para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat peran strategis Kota Pekalongan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Pekalongan, tidak semata-mata didasarkan atas potensi yang dimiliki dan rencana pengembangan yang akan diimplementasikan, tetapi juga kebijakan pengembangan wilayah di kawasan sekitar Kota Pekalongan. Perkembangan terkini dari rencana Pemerintah Pusat yaitu dikembangkannya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan rencana yang sebelumnya telah ada adalah Kawasan Industri Brebes (KIB).

KITB direncanakan seluas ± 4.300 Ha dan terdiri atas 3 (tiga) klaster. Klaster 1 (seluas 3.100 Ha) akan dikembangkan untuk Industri Peralatan Otomotif dan Peralatan Transportasi, Industri Tekstil dan Baterai, serta Industri Kimia. Klaster 2 (seluas 800 Ha) akan dikembangkan untuk Industri Makanan dan Minuman, serta Industri Makanan dan Minuman. Klaster 3 (seluas 400 Ha) akan dikembangkan untuk R & D, serta Komersial. Kawasan Industri Brebes (KIB) memiliki luas 3.967 Ha.

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Brebes (KIB) harus dipandang Kota Pekalongan sebagai peluang dalam meningkatkan peran dan daya saing Kota Pekalongan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Strategi pengembangan wilayah dalam rangka memaksimalkan peran Kota Pekalongan terhadap Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Brebes (KIB), meliputi:

1. Penguatan Kerjasama

Penguatan kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka a) penguatan sektor unggulan Kota Pekalongan; b) peningkatan peran Kota Pekalongan untuk mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang dan Brebes; dan c) peningkatan kerjasama wilayah pengembangan Petanglong.

2. Meningkatkan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir

Pengembangan sektor unggulan atau produk di Kota Pekalongan diarahkan untuk mengaitkan usaha atau produk dengan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Brebes sehingga memperkuat posisi produk Kota Pekalongan dalam skala regional.

3. Spesialisasi produk unggulan industri

Produk industri Kota Pekalongan sebagai sektor basis, khususnya batik, harus diarahkan agar Kota Pekalongan semakin kuat posisinya dalam skala regional. Untuk mendukungnya, dibutuhkan jaminan ketersediaan bahan baku, penguatan permodalan, fasilitasi HAKI, serta peningkatan promosi produksi dan branding Kota Pekalongan.

4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja serta keterkaitan dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah, sehingga tenaga kerja Kota Pekalongan memiliki nilai kompetitif yang unggul dibanding tenaga kerja wilayah sekitar.

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif

Iklim usaha yang kondusif harus ditingkatkan sehingga pengembangan produk, utamanya produk basis di Kota Pekalongan dapat semakin meningkat.

6. Pengembangan prasarana perkotaan dan destinasi di Kota Pekalongan

Peningkatan peran Kota Pekalongan dalam skala regional juga dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan di Kota Pekalongan yang unggul dan berkualitas, termasuk destinasi yang kompetitif di Kota Pekalongan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan.

6.3.2.2. Urgensi Jalan Lingkar Kota Pekalongan dan Petanglong

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Meskipun dari pengukuran saat ini, VCR menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum operasionalnya jalan tol trans Jawa, tetapi pada waktu tertentu, kemacetan masih seringkali terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Hal ini juga sebagai implikasi terdapatnya beberapa perlintasan sebidang jalur kereta api.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota serta tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat besar. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal karena masyarakat lebih memilih kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fasilitas parkir yang lebih luas dan nyaman. Kondisi ini dapat diidentifikasi terutama pada kawasan perdagangan dan jasa koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang dan cenderung berkurang aktivitasnya. Padahal, salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan luas wilayah kota serta kawasan perdagangan dan jasa yang terbatas, tentunya penataan ruang di wilayah Kota Pekalongan sangat ditentukan dengan keberadaan jalan nasional yang mampu mendukung pengembangan wilayah. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya jalan lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi upaya mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan wilayah Petanglong pada umumnya.

Urgensi lainnya dengan keberadaan Jalan Lingkar Utara Petanglong, akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) dengan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) dan dengan rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) serta dengan jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi penataan ruang dan pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun 2014 dan 2015 yang lalu, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Batang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, telah mengadakan serangkaian pertemuan untuk merencanakan pembangunan jalan lingkar Utara (jalinkut) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Selanjutnya, BBPJN VII pun juga telah melakukan penyusunan *detail engineering design* (DED) rencana jalan tersebut. Rencana jalinkut Petanglong saat itu pun, merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional karena tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik di Kota Pekalongan, Wilayah Petanglong, Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, bahwa pembangunan jalan lingkar merupakan solusi sistemik dalam rangka penataan ruang dan pengembangan wilayah. Tidak hanya dampaknya dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang masih sering terjadi, tetapi yang utama adalah bagi tata ruang wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.3.2.3. SPAM Regional

Perkembangan kota dan wilayah berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kota. Kebutuhan penyediaan tersebut, bukan hanya aspek kuantitas semata, tetapi juga menyangkut kualitas ketersediaannya. Termasuk Kota Pekalongan yang semakin tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan peran pelayanan Kota Pekalongan yang semakin meningkat dan pertumbuhan jumlah penduduknya.

Peningkatan peran pelayanan dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Salah satu yang sangat dibutuhkan adalah penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga saat ini cakupan pelayanan air minum di Kota Pekalongan belum dapat mencapai 100 persen dan kualitas air minum pun juga harus terus ditingkatkan.

Permasalahan utama penyediaan air minum di Kota Pekalongan adalah terbatasnya air baku bagi air minum di wilayah Kota Pekalongan. Air baku yang bersumber dari air permukaan, hingga saat ini belum dapat diandalkan karena kondisi air permukaan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga teknologi dan biaya untuk mengolah menjadi air baku bagi air minum sangatlah mahal. Air baku yang berasal dari air tanah tersedia dalam jumlah terbatas sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih. Bahkan berdasarkan pendapat para ahli, meskipun masih diperdebatkan, bahwa penurunan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan, salah satunya, diakibatkan eksploitasi air tanah yang melebihi daya dukungnya.

Oleh karena itu, pemenuhan penyediaan air baku bagi air minum di wilayah Kota Pekalongan mengandalkan sumber dari wilayah sekitar, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Hingga saat ini, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, telah dikembangkan SPAM Regional Petanglong, namun ternyata debit atau volume air baku yang dikirimkan di wilayah Kota Pekalongan belum mampu mendukung cakupan pelayanan seluruh masyarakat.

Kerjasama pengelolaan SPAM Petanglong ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan, yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Komitmen dari seluruh

pemangku kepentingan pembangunan agar SPAM Petanglong dapat mendukung cakupan air minum 100 persen di wilayah Kota Pekalongan

6.3.2.4. TPA Regional

Prasarana perkotaan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Pekalongan adalah dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam penyediaan TPA (tempat pemrosesan akhir). TPA merupakan garda terakhir dalam pengelolaan sampah ketika upaya pengurangan sampah sudah maksimal dilakukan, maka penanganan sampah akan berakhir di TPA.

TPA Degayu Kota Pekalongan, saat ini, pada dasarnya telah melampaui kapasitas daya tampungnya (*overload*). Namun, karena tidak ada alternatif lain, maka TPA Degayu masih terus difungsikan hingga saat ini. Sesuai dengan ketentuan teknis tentang TPA, TPA minimal berjarak 1 km dari perumahan terdekat dan tidak berlokasi di pinggir atau berbatasan dengan laut. Persyaratan tersebut ditujukan untuk menjamin pengoperasian TPA tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Namun demikian, TPA Degayu malah berlokasi di pinggir laut dan jarak dengan perumahan terdekat yang kurang dari 1 km. Oleh karena itu, TPA Degayu sudah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pengelolaan sampah di Kota Pekalongan sangat membutuhkan pembangunan TPA Regional Petanglong, yang berlokasi di luar wilayah Kota Pekalongan karena tidak ada lahan di Kota Pekalongan yang memenuhi syarat teknis pembangunan TPA baru. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, akan dikembangkan TPA Regional di Wilayah Petanglong. Namun, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, TPA Regional Petanglong belum menjadi salah satu prioritas dalam implementasinya.

Namun demikian, dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tercantum rencana kegiatan pembangunan TPST Regional yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kalau kegiatan ini dapat segera diwujudkan, akan sangat membantu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Wilayah Petanglong dan Provinsi Jawa Tengah agar TPA Regional Petanglong atau TPST Regional Petanglong dapat segera diwujudkan. Peran Kota Pekalongan dan Wilayah Petanglong yang akan semakin meningkat di waktu yang akan datang membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas dan pelayanannya mampu mencakup seluruh wilayah

6.4. PENJABARAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN

Program unggulan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak sebagai berikut.

**Tabel 6.5 Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah
Tahun 2021-2026**

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Keterangan
1	Jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga;	Program ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> , serta optimalisasi peran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Jaminan Kesehatan bagi masyarakat - Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).. dengan memberdayakan fasilitator di tingkat kelurahan. 	- Pengampu Urusan Kesehatan	
2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain);	Program ini dilakukan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain)	Penambahan jumlah Puskesmas dalam rangka peningkatan upaya promotif dan preventif dengan mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat	- Pengampu Urusan Kesehatan	
3	Jaminan akses pendidikan bagi setiap warga;	Program ini dilakukan dalam rangka menjamin akses pendidikan masyarakat dan menaikkan angka Rata-Rata Lama Sekolah sebagai komposit indeks pembangunan manusia	Pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan perguruan tinggi yang tidak mampu dan atau berprestasi	- Pengampu Urusan Kesehatan	
4	Memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga;	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas masyarakat, dengan memberikan fasilitasi bagi lembaga pendidikan keagamaan	Pemberian fasilitasi sarana transportasi bagi lembaga pendidikan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Pengampu Fungsi Keuangan 	
5	Membangun sistem database infrastruktur permukiman;	Program ini dilakukan dalam upaya digitalisasi database infrastruktur permukiman, sebagai dasar pemberian layanan infrastruktur perumahan dan permukiman	Pembangunan aplikasi android database infrastruktur permukiman berbasis RT.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman, - Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika 	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Keterangan
6	Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota;	Program ini dilakukan dalam upaya mengurangi sampah pada sumber sampah sehingga meminimalisir sampah yang dibawa ke TPA.	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi TPS3R (pengadaan sarpras TPS3R, pendampingan dan monev. - Peningkatan peran tokoh agama tentang kesadaran mengelola sampah mandiri - Pemberian edukasi oleh Wali Kota & Forkompimda mengenai "tidak membuang sampah di sungai" dengan menyusuri sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Lingkungan Hidup 	
7	Penanganan rob dan banjir ;	Program ini dilakukan dalam upaya penanganan rob dan banjir melalui sinkronisasi program pusat, provinsi dan Kota Pekalongan.	Pembangunan stasiun pompa, rehab stasiun pompa, operasional stasiun pompa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	
8	Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga;	Program ini dilakukan dalam upaya memberikan ruang publik bagi kegiatan kreatif dan rekreasi warga Kota Pekalongan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan ruang publik agar lebih instagramable, ramah difable dan ramah lingkungan. - Penataan Monumen dengan sentuhan Artistik) - Penambahan ruang publik di wilayah Pekalongan selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Pariwisata, - Pengampu Urusan Kebudayaan dan - Pengampu Urusan Lingkungan Hidup 	
9	Menambah sarana olahraga dan kesenian;	Program ini dilakukan dalam upaya memberikan sarana olahraga dan kegiatan seni budaya masyarakat Kota Pekalongan secara merata.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan <i>sport center</i> - Pengadaan pelataran-pelataran untuk kegiatan kesenian di tiap wilayah kecamatan dengan memberdayakan pemuda/karang taruna 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Pemuda dan Olah Raga, - Pengampu Urusan Kebudayaan 	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Keterangan
10	Menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern;	Program ini dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pasar tradisional bagi warga Kota Pekalongan secara merata	Pembangunan pasar tradisional berkonsep modern pada tiap kecamatan	- Pengampu Urusan Perdagangan	
11	Membangun ekonomi kreatif dan <i>digitalpreneurship</i> bagi kalangan muda;	Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan/ memperluas pasar UMKM agar mengenal penjualan secara online - Mengenalkan bisnis digital ke kalangan muda (konten kreatif melalui media sosial) - Mengenalkan ekonomi kreatif (meningkatkan harga jual produk dengan kreatifitas pada kemasan, pada promosi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Perdagangan - Pengampu Urusan Koperasi-UKM - Pengampu Urusan Perindustrian - Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika 	
12	Penyediaan jaringan internet gratis;	Program ini dilakukan dalam rangka penyediaan internet gratis bagi masyarakat Kota Pekalongan	Pengadaan <i>access point</i> di tiap kelurahan	- Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	
13	Penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat <i>food street</i> ;	Program ini dilakukan dalam rangka penataa kawasan pedagang kaki lima dengan konsep modern sekaligus sebagai destinasi wisata kuliner	Pembangunan satu kawasan <i>food street</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu Urusan Perdagangan - Pengampu Urusan Pariwisata 	
14	Mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain;	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata reigius	Penataan akses jalan pada tempat wisata religius makan Sapuro, meliputi ruas Jalan Irian dan Jalan Madura.	- Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15	Mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir;	Program ini dilakukan dalam rangka mengenalkan makanan khas Kota Pekalongan kepada wisatawan	Pengelenggaraan festival kuliner khas Kota Pekalongan	- Pengampu Urusan Koperasi-UKM	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana	Keterangan
16	Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren;	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas masyarakat, dengan memberikan fasilitasi bagi pelaku pendidikan keagamaan	Fasilitasi bagi takmir masjid, takmir mushola, guru ngaji non formal, lebe non pns, guru TPQ, dan guru madrasah diniyah.	- Sekretariat Daerah	
17	Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik	Peningkatan kesejahteraan bagi SDM Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan kompetensi dan kinerja.	- Pengampu Fungsi Keuangan - Pengampu Fungsi Kepegawaian	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

6.5. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Mendasari pada strategi, arah kebijakan dan program unggulan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka program Perangkat Daerah dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.6 berikut.

**Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota**

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
<i>Misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat</i>						81.615		75.299		74.976		77.460		79.925		389.276	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	74,38	74,43	74,47	78.028	74,52	71.183	74,57	71.024	74,62	73.555	74,66	76.036	74,66	369.826	
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	78.028	0,30	71.183	0,35	71.024	0,40	73.555	0,50	76.036	0,50	369.826	
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28		116,21		104,14		92,08		80,01		80,01		
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21		7,91		7,60		7,30		7,00		7,00		
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23		9,92		9,61		9,31		9,00		9,00		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	85,59	88,00	89,00	37.330	90,00	35.685	91,00	36.715	92,00	37.831	92,00	39.852	92,00	187.413	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	0,00	100,00	100,00	61	100,00	133	100,00	134	100,00	136	100,00	142	100,00	606	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	68,22	70,00	75,00	11.598	80,00	11.448	85,00	10.734	90,00	12.027	90,00	12.387	90,00	58.194	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	59,67	60,00	62,50	12.736	65,00	10.078	67,50	9.820	70,00	10.067	72,50	10.072	72,50	52.774	RSUD Bendan
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	813	100,00	550	100,00	550	100,00	550	100,00	550	100,00	3.014	Puskesmas Bendan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	657	100,00	445	100,00	445	100,00	445	100,00	445	100,00	2.439	Puskesmas Kramatsari
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	882	100,00	598	100,00	598	100,00	598	100,00	598	100,00	3.274	Puskesmas Tirto
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	838	100,00	568	100,00	568	100,00	568	100,00	568	100,00	3.108	Puskesmas Medono
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	655	100,00	444	100,00	444	100,00	444	100,00	444	100,00	2.430	Puskesmas Noyontaan
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	670	100,00	454	100,00	454	100,00	454	100,00	454	100,00	2.488	Puskesmas Tondano
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	826	100,00	559	100,00	559	100,00	559	100,00	559	100,00	3.063	Puskesmas Klego
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	701	100,00	475	100,00	475	100,00	475	100,00	475	100,00	2.601	Puskesmas Sokorejo
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	730	100,00	494	100,00	494	100,00	494	100,00	494	100,00	2.708	Puskesmas Dukuh
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	800	100,00	542	100,00	542	100,00	542	100,00	542	100,00	2.966	Puskesmas Krapyak Kidul
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	958	100,00	649	100,00	649	100,00	649	100,00	649	100,00	3.553	Puskesmas Kusuma Bangsa
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	550	100,00	373	100,00	373	100,00	373	100,00	373	100,00	2.042	Puskesmas Jenggot
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	929	100,00	629	100,00	629	100,00	629	100,00	629	100,00	3.445	Puskesmas Pekalongan Selatan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	751	100,00	509	100,00	509	100,00	509	100,00	509	100,00	2.785	Puskesmas Buaran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	92,15	93,00	93,50	333	94,00	92	94,50	229	95,00	105	95,50	114	95,50	873	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	30,00	35,00	40,00	71	45,00	64	50,00	63	55,00	62	60,00	63	60,00	322	RSUD Bendan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	89,71	100,00	100,00	105	100,00	117	100,00	116	100,00	116	100,00	119	100,00	573	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	90,00	92,00	94,00	426	96,00	481	98,00	481	100,00	481	100,00	481	100,00	2.350	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	92,02	95,00	95,00	0	96,00	74	96,00	74	97,00	75	97,00	78	97,00	302	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	96,95	90,00	91,00	71	92,00	1.779	93,00	1.784	94,00	1.791	95,00	1.811	95,00	7.236	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4,30	3,80	4,30	803	4,40	729	4,60	727	4,70	725	4,80	732	4,80	3.716	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100,00	100,00	100,00	24	100,00	19	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00	97	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	80,00	80,00	81,60	75	83,20	44	84,80	43	86,40	42	88,00	43	88,00	247	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,56	55,56	55,62	206	55,67	185	55,73	184	55,78	183	55,84	188	55,84	946	OPD Pengampu Urusan Pertanian

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	180,84	184,46	188,15	75	191,91	55	195,75	54	199,66	54	203,65	55	203,65	292	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	777	100,00	1.164	100,00	638	100,00	634	100,00	641	100,00	3.854	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	824kasus	5,00	5,00	654	5,00	235	5,00	231	5,00	227	5,00	231	5,00	1.579	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	0,00	100,00	100,00	66	100,00	56	100,00	55	100,00	54	100,00	55	100,00	285	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	0,00	0,00	20,00	37	50,00	33	75,00	32	100,00	31	100,00	32	100,00	164	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	0,00	5,00	5,00	81	5,00	70	5,00	68	5,00	67	5,00	68	5,00	354	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	persen	7,17	6,94	6,71	3.587	6,50	4.116	6,29	3.952	6,09	3.906	5,89	3.888	5,89	19.450	
Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	3.587	2,00	4.116	2,50	3.952	3,00	3.906	3,00	3.888	11,89	19.450	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	0,00	100,00	100,00	80	100,00	72	100,00	71	100,00	71	100,00	73	100,00	366	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	8,41	8,20	8,00	3.404	7,80	2.917	7,60	2.566	7,40	2.560	7,20	2.602	7,20	14.050	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	persen	18,50	17,00	16,00	152	15,00	163	14,00	160	13,00	157	12,00	160	12,00	792	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	0,00	100,00	100,00	561	100,00	498	100,00	488	100,00	481	100,00	488	100,00	2.516	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100,00	100,00	100,00	54	100,00	543	100,00	441	100,00	435	100,00	351	100,00	1.825	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	100,00	42,00	50,00	288	58,00	401	67,00	403	75,00	408	75,00	428	75,00	1.927	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00	1.638	100,00	1.666	100,00	1.633	100,00	1.609	100,00	1.633	100,00	8.178	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	62,67	60,45	58,46	1.046	56,69	1.008	55,12	988	53,73	973	52,49	988	52,49	5.004	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan						93.151		120.670		120.890		120.700		122.922		578.333	
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,98	75,10	75,32	91.877	75,52	117.146	75,71	117.718	75,88	117.466	76,03	119.515	76,03	563.722	
Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	90.663	9,43	116.398	9,59	116.964	9,75	116.715	9,92	118.751	9,92	559.490	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	74,31	76,37	80,17	77.444	83,97	101.180	89,50	100.912	100,00	100.936	100,00	102.702	100,00	483.173	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	160,00	100,00	100,00	12.737	100,00	14.684	100,00	15.481	100,00	15.257	100,00	15.489	100,00	73.647	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	212	100,00	306	100,00	300	100,00	296	100,00	300	100,00	1.413	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	100,00	212	100,00	306	100,00	300	100,00	296	100,00	300	100,00	1.413	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	387	59,14	126	59,59	161	60,28	142	61,00	163	61,00	978	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	0,00	1,85	3,70	105	5,55	60	7,39	97	9,24	78	11,09	98	11,09	438	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	23,99	23,99	23,99	282	23,99	66	23,99	65	23,99	64	23,99	65	23,99	540	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	616	Madya	316	Madya	292	Madya	314	Madya	302	Madya	1.840	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekelra (desa/kelurahan layak anak)	persen	22,22	25,93	29,63	322	33,33	266	40,74	243	48,15	265	55,56	252	55,56	1.349	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	0,00	0,00	100,00	293	100,00	50	100,00	49	100,00	49	100,00	50	100,00	491	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
																	Anak
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,02	6,84	6,66	1.275	6,48	3.524	6,31	3.172	6,15	3.234	5,99	3.407	5,99	14.612	
Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	1.275	70,54	3.524	70,81	3.172	71,08	3.234	71,34	3.407	71,34	14.612	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	0,29	0,33	0,37	972	0,42	2.312	0,46	1.894	0,50	1.885	0,55	2.002	0,55	9.065	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	17,93	19,93	21,93	129	23,93	925	25,93	998	27,93	1.073	29,93	1.125	29,93	4.251	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	44,62	45,33	46,05	173	46,80	286	47,51	280	48,27	276	49,02	280	49,02	1.296	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman						26.083		25.909		24.447		24.139		24.565		125.142	
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	55,56	55,56	62,96	26.083	74,07	25.909	77,78	24.447	88,89	24.139	100,00	24.565	100,00	125.142	
Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SKBaru)	89,26	90,96	26.083	93,72	25.909	96,24	24.447	98,44	24.139	100,00	24.565	100,00	125.142	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	0,00	0,00	91,02	1.890	91,35	2.613	91,68	1.658	92,02	1.641	92,35	1.674	92,35	9.475	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	508,47	498,47	419,47	17.384	291,47	17.419	174,47	17.031	72,47	16.823	0,00	17.130	0,00	85.785	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
																		Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1639,41	1649,41	1728,41	5.287	1856,41	4.691	1973,41	4.597	2075,41	4.530	2147,88	4.599	2147,88	23.704		OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14,44	14,44	14,46	708	14,48	628	14,51	616	14,53	607	14,55	616	14,55	3.175		OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	9,27	9,87	10,47	815	11,07	557	11,67	546	12,27	538	12,87	546	12,87	3.003		OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan							97.574	112.121		146.409		139.415		129.992		625.511		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	37,27	33,11	26,50	26.289	22,12	33.419	19,58	32.528	17,02	32.733	12,17	33.679	12,17	158.647		
Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	26.289	1027,00	33.419	909,00	32.528	790,00	32.733	565,00	33.679	565,00	158.647		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	62,07	82,76	93,10	17.432	93,10	23.953	93,10	23.202	93,10	23.506	93,10	24.349	93,10	112.442		OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	65,44	66,45	67,46	8.857	68,47	9.466	69,48	9.326	70,48	9.227	71,49	9.329	71,49	46.205		OPD Pengampu Urusan PU-PR
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,84	50,85	50,86	10.546	50,87	12.822	50,88	11.576	50,89	9.014	50,90	11.599	50,90	55.557		
Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	1.342	35,36	4.651	35,37	4.453	35,38	1.424	35,39	3.603	35,39	15.473		
Program Pengendalian	Persentase limbah yang diolah	persen	0,00	33,37	39,29	1.337	40,95	4.649	45,02	4.451	45,97	1.422	49,01	3.601	49,01	15.459		OPD Pengampu Urusan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	0,00	0,00	31,11	5	13,33	2	13,33	2	13,33	2	15,56	2	100,00	14		OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	4.635	23,60	4.033	23,60	3.941	23,61	3.995	23,61	4.198	23,61	20.802		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,89	2,89	2,91	4.635	2,92	4.033	2,93	3.941	2,94	3.995	2,95	4.198	2,95	20.802		OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4	4	6	4.569	7	4.137	7	3.182	7	3.595	7	3.798	7	19.282		
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	0,00	0,00	100,00	523	100,00	1.115	100,00	1.092	100,00	1.076	100,00	1.093	100,00	4.900		OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	0,00	0,00	50,00	0	50,00	9	50,00	9	50,00	9	50,00	9	50,00	36		OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	16,94	17,24	17,54	2.318	17,84	2.791	18,14	1.862	18,44	2.295	18,74	2.477	18,74	11.743		OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	5,20	7,87	10,53	262	13,20	163	15,87	159	18,53	157	21,20	159	21,20	900		OPD Pengampu Urusan PU-PR

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	0,00	0,00	100,00	1.466	100,00	60	100,00	59	100,00	58	100,00	59	100,00	1.703	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	88,11	88,44	88,77	60.740	89,11	65.880	90,37	102.305	90,71	97.669	91,04	84.714	91,04	411.308	
Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	4.319	100,00	1.389	100,00	1.381	100,00	1.375	100,00	1.381	100,00	9.844	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	86,06	85,77	87,09	4.319	88,39	1.389	89,66	1.381	90,90	1.375	92,11	1.381	92,11	9.844	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	13.997	70,12	22.331	71,12	13.374	72,12	12.202	73,12	12.029	73,12	73.933	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,00	2,19	0,27	9.181	0,28	10.631	0,29	10.557	0,30	10.996	0,31	10.804	0,31	52.168	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	0,00	0,00	20,00	4.816	40,00	11.700	60,00	2.817	80,00	1.207	100,00	1.225	100,00	21.765	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	B	6.888	B	8.296	B	8.295	B	7.619	B	7.732	B	38.830	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	84,00	87,00	89,00	2.467	92,00	3.747	95,00	3.988	97,00	3.370	100,00	3.421	100,00	16.994	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,31	0,35	0,40	3.421	0,44	3.574	0,44	3.572	0,44	3.520	0,44	3.564	0,44	17.650	OPD Pengampu Urusan Perhubungan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	-20,83	17,94	0,76	1.000	0,75	975	0,75	735	0,74	729	0,74	747	0,74	4.186	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	35.536	97,20	33.864	100,00	79.255	100,00	76.473	100,00	63.573	100,00	288.701	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	0,00	81,12	82,21	35.536	83,30	33.864	84,39	79.255	85,48	76.473	86,57	63.573	86,57	288.701	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal							21.298		26.439		27.138		25.098		23.616		123.589
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47-35,51	35,97-36,21	21.298	36,56-36,92	26.439	37,16-37,82	27.138	39,21	25.098	40,65	23.616	40,65	123.589	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86-1,97	2,28-2,84	21.298	2,48-2,83	26.439	2,53-3,32	27.138	4,55	25.098	4,55	23.616	4,55	123.589	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	115	1	93	1	118	1	144	1	96	6	565	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	50,00	50,00	100,00	47	100,00	84	100,00	82	100,00	81	100,00	82	100,00	375	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	9.115	2.500	2.500	921	2.500	922	2.500	926	2.500	930	2.500	962	2.500	4.662	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6,30	6,42	6,55	396	6,68	436	6,82	434	6,95	433	7,09	434	40,53	2.134	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	126	100,00	112	100,00	113	100,00	114	100,00	120	100,00	584	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21,40	20,59	20,41	503	20,43	682	20,75	447	20,97	443	21,04	452	21,04	2.527	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IU) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	23,00	23,00	24,00	21	24,00	14	25,00	14	25,00	13	26,00	14	26,00	76	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	N/a	100,00	0,00	0	100,00	36	100,00	126	100,00	35	100,00	126	100,00	322	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	68,75	75,00	75,00	5.915	81,25	8.551	93,75	9.973	100,00	7.998	100,00	6.060	100,00	38.497	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	76,00	80,00	84,00	147	88,00	493	92,00	483	96,00	476	100,00	483	100,00	2.081	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,06	7,24	7,42	147	7,60	120	7,79	118	7,99	116	8,19	118	8,19	619	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	73,36	73,99	75,99	390	77,99	367	79,99	373	81,99	381	83,99	355	83,99	1.866	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	1,01	2,09	3,17	314	4,26	481	5,34	471	6,42	465	7,50	472	7,50	2.203	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	73,20	73,93	0,00	0	75,42	3	76,17	3	76,93	3	77,70	3	77,70	11	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	30,69	24,59	29,41	73	30,94	112	31,49	114	32,36	117	33,23	124	33,23	540	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Koperasi																	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	34,65	38,36	57,84	565	58,31	618	58,77	632	59,22	646	59,68	668	59,68	3.129	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	11,74	11,85	11,95	503	12,06	1.124	12,16	1.352	12,27	1.220	12,37	1.421	12,37	5.619	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	-0,07	1,00	1,00	1.006	1,00	374	1,00	368	1,00	276	1,00	282	6,15	2.306	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	0,00	1,00	1,00	2.587	1,00	2.332	1,00	2.313	1,00	2.307	1,00	2.372	6,15	11.910	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	-0,54	1,00	1,00	295	1,00	587	1,00	537	1,00	540	1,00	558	6,15	2.518	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,20	12,20	0,00	0	12,20	1.071	12,20	1.069	12,20	1.078	12,20	1.089	12,20	4.307	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	5	2	2	547	2	335	2	350	2	365	2	380	12	1.977	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	8,05	10,00	10,50	3.344	11,00	3.891	11,50	3.867	12,00	3.911	12,50	4.076	12,50	19.090	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	17,00	21,98	26,98	1.054	31,98	1.060	36,98	1.050	41,98	1.039	46,98	1.053	46,98	5.256	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi	persen	0,00	0,00	16,67	0	30,30	464	41,67	273	51,28	449	59,52	273	59,52	1.459	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	0,00	0,00	20,00	387	40,00	279	60,00	273	80,00	269	100,00	273	100,00	1.481	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Misi Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah							10.017		11.510		11.326		11.179		11.341		55.373
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	100,00	2.672	100,00	3.645	100,00	3.613	100,00	3.571	100,00	3.615	100,00	17.116	
Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	2.672	91,11	3.645	93,33	3.613	97,78	3.571	100,00	3.615	100,00	17.116	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	0,00	100,00	100,00	959	100,00	1.814	100,00	1.780	100,00	1.755	100,00	1.781	100,00	8.090	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	0,00	100,00	100,00	368	100,00	544	100,00	536	100,00	528	100,00	536	100,00	2.514	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	0,00	100,00	100,00	0	100,00	46	100,00	68	100,00	67	100,00	68	100,00	250	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	0,00	88,65	90,43	26	92,20	20	93,97	20	95,74	19	97,52	20	97,52	104	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	persen	3,59	4,55	4,60	1.319	4,66	1.219	4,71	1.209	4,75	1.202	4,80	1.209	4,80	6.158	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	kasus	1	0	0	7.345	0	7.865	0	7.712	0	7.608	0	7.726	0	38.257	
Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	7.345	100,00	7.865	100,00	7.712	100,00	7.608	100,00	7.726	100,00	38.257	

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100,00	100,00	100,00	374	100,00	286	100,00	281	100,00	278	100,00	284	100,00	1.503	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	0	0	16	970	16	875	16	858	16	847	16	861	16	4.411	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100,00	100,00	100,00	382	100,00	139	100,00	137	100,00	135	100,00	137	100,00	929	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	0,00	100,00	100,00	111	100,00	213	100,00	210	100,00	208	100,00	212	100,00	955	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	215	100,00	94	100,00	92	100,00	90	100,00	92	100,00	583	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Outcome)	persen	0,00	60,00	62,00	5.293	64,00	6.258	66,00	6.134	68,00	6.050	70,00	6.141	70,00	29.876	Satpol PP
Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government							701.762		668.309		664.992		673.192		691.759		3.400.013
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	n/a	70,69	71,69	701.762	72,69	668.309	73,69	664.992	74,69	673.192	75,69	691.759	75,69	3.400.013	

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	3.795	2,95	3.105	3,05	2.936	3,15	2.926	3,25	3.001	3,25	15.762	
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	n/a	2,80	2,90	3.529	3,00	2.843	3,10	2.674	3,20	2.647	3,30	2.711	3,30	14.404	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100,00	66,00	100,00	115	100,00	111	100,00	109	100,00	108	100,00	109	100,00	553	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	0,00	0,93	1,87	151	2,80	150	2,80	153	3,74	172	3,74	180	3,74	806	OPD Pengampu Urusan Persandian
Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	47.382	83,64	43.506	83,79	41.608	83,94	41.678	84,09	39.713	84,09	213.887	
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	31,49	100,00	100,00	954	100,00	3.058	100,00	1.474	100,00	1.298	100,00	532	100,00	7.316	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	0,00	33,33	40,00	217	46,67	255	53,33	254	60,00	254	66,67	262	66,67	1.241	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK <i>Outcome</i>)	Indeks	37,25	40,00	42,50	71	45,00	91	47,50	94	50,00	88	52,50	89	52,50	434	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK <i>Outcome</i>)	persen	100,00	100,00	100,00	163	100,00	160	100,00	159	100,00	168	100,00	164	100,00	814	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	100,00	10	0,00	0	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	38	OPD Pengampu Urusan Kearsipan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	15,62	15,77	15,93	483	16,09	534	16,25	554	16,41	522	16,58	561	16,58	2.652	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	regulasi	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	1	18	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	0,00	80,00	81,77	339	83,53	329	85,30	331	87,07	337	88,75	352	88,75	1.687	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	0,00	93,25	93,40	285	93,55	274	93,70	276	93,85	280	94,00	292	94,00	1.408	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	N/A	5	7	122	9	268	10	174	12	174	14	179	14	916	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	100,00	22.143	100,00	19.478	100,00	19.451	100,00	18.812	100,00	19.100	100,00	98.983	Set DPRD
	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	471	100,00	418	100,00	410	100,00	404	100,00	410	100,00	2.112	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	106,67	91,95	92,93	1.042	93,69	1.070	94,31	1.048	94,81	1.033	95,24	1.049	95,24	5.242	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	0,00	11,43	28,57	4.670	34,29	2.353	34,29	2.362	40,00	3.505	42,86	2.374	42,86	15.264	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	51,85	16,67	33,33	1.065	50,00	1.251	66,67	1.241	83,33	1.235	100,00	1.242	100,00	6.033	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	51,85	51,85	55,56	59	59,26	52	62,96	51	66,67	50	70,37	51	70,37	263	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
																	Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	95,97	95,97	96,16	804	96,35	812	96,54	933	96,73	789	96,92	649	96,92	3.987	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0,00	0,00	80,00	370	0,00	0	0,00	0	20,00	90	0,00	0	100,00	459	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	0,00	16,67	16,67	181	16,67	161	16,67	67	16,67	66	16,67	67	100,00	541	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	0,00	0,00	50,00	458	50,00	404	50,00	405	50,00	408	50,00	423	50,00	2.098	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	0,00	75,00	75,00	131	75,00	88	75,00	114	75,00	85	75,00	87	75,00	505	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	0,00	100,00	100,00	21	100,00	19	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00	94	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00	643	100,00	1.185	100,00	1.176	100,00	1.169	100,00	1.176	100,00	5.349	Satpol PP

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	52	100,00	51	100,00	51	100,00	51	100,00	222	Kec. Pekalongan Utara
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	55	Kec. Pekalongan Selatan
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	42	100,00	41	100,00	40	100,00	41	100,00	180	Kec. Pekalongan Barat
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	32	100,00	31	100,00	31	100,00	31	100,00	140	Kec. Pekalongan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100,00	1,00	100,00	139	100,00	113	100,00	111	100,00	109	100,00	88	100,00	559	Kec. Pekalongan Utara
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	427	100,00	379	100,00	372	100,00	367	100,00	372	100,00	1.917	Kel. Kandang Panjang
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	449	100,00	399	100,00	391	100,00	385	100,00	391	100,00	2.014	Kel. Panjang Wetan
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	357	100,00	316	100,00	310	100,00	306	100,00	310	100,00	1.599	Kel. Degayu
	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	334	100,00	296	100,00	290	100,00	286	100,00	291	100,00	1.498	Kel. Bandengan
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	572	100,00	506	100,00	496	100,00	488	100,00	496	100,00	2.559	Kel. Krapyak
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	470	100,00	417	100,00	408	100,00	402	100,00	408	100,00	2.105	Kel. Padukuhan Kraton
	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	406	100,00	360	100,00	353	100,00	348	100,00	353	100,00	1.819	Kel. Panjang Baru
	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	113	100,00	111	100,00	110	100,00	85	100,00	558	Kec. Pekalongan Selatan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	407	100,00	361	100,00	354	100,00	348	100,00	354	100,00	1.823	Kel. Jenggot
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	405	100,00	352	100,00	343	100,00	337	100,00	343	100,00	1.781	Kel. Buaran Kradenan
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	337	100,00	299	100,00	293	100,00	288	100,00	293	100,00	1.511	Kel. Kuripan Kertoharjo
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	404	100,00	359	100,00	352	100,00	347	100,00	352	100,00	1.815	Kel. Kuripan Yosorejo
	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	368	100,00	327	100,00	320	100,00	315	100,00	320	100,00	1.651	Kel. Soko duwet
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	414	100,00	367	100,00	360	100,00	355	100,00	361	100,00	1.856	Kel. Banyurip
	Presentase tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	68	100,00	67	100,00	66	100,00	67	100,00	407	Kec. Pekalongan Barat
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	443	100,00	393	100,00	385	100,00	379	100,00	385	100,00	1.985	Kel. Medono
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	357	100,00	316	100,00	310	100,00	306	100,00	310	100,00	1.599	Kel. Podosugih
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	399	100,00	340	100,00	334	100,00	329	100,00	334	100,00	1.736	Kel. Tirto
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	437	100,00	388	100,00	380	100,00	374	100,00	380	100,00	1.959	Kel. Sapuro Kebulen
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	515	100,00	457	100,00	448	100,00	441	100,00	448	100,00	2.309	Kel. Bendan Kergon
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	540	100,00	479	100,00	470	100,00	463	100,00	470	100,00	2.422	Kel. Pasirkratonkramat
	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	511	100,00	556	100,00	559	100,00	560	100,00	236	100,00	2.423	Kel. Pringrejo
	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	102	100,00	100	100,00	99	100,00	77	100,00	517	Kec. Pekalongan Timur
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	530	100,00	471	100,00	461	100,00	454	100,00	461	100,00	2.378	Kel. Kauman
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	461	100,00	409	100,00	401	100,00	395	100,00	401	100,00	2.066	Kel. Poncol

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	393	100,00	348	100,00	341	100,00	336	100,00	342	100,00	1.760	Kel. Klego
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	349	100,00	306	100,00	298	100,00	293	100,00	299	100,00	1.545	Kel. Gamer
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	424	100,00	377	100,00	369	100,00	364	100,00	369	100,00	1.903	Kel. Noyontaansari
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	468	100,00	415	100,00	406	100,00	401	100,00	407	100,00	2.096	Kel. Setono
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	377	100,00	335	100,00	328	100,00	323	100,00	328	100,00	1.691	Kel. Kali Baros
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	293	100,00	265	100,00	259	100,00	255	100,00	259	100,00	1.332	Kec. Pekalongan Utara
	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	255	100,00	225	100,00	224	100,00	225	100,00	232	100,00	1.161	Kec. Pekalongan Selatan
	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	206	100,00	189	100,00	187	100,00	187	100,00	192	100,00	961	Kec. Pekalongan Barat
	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	192	100,00	206	100,00	203	100,00	201	100,00	205	100,00	1.007	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	37	Kec. Pekalongan Utara
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	12	100,00	11	100,00	11	100,00	11	100,00	57	Kec. Pekalongan Selatan
	Presentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	52	Kec. Pekalongan Barat
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	7	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	37	Kec. Pekalongan Timur
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	4.754	96,00	4.963	97,00	5.985	97,20	4.979	97,50	4.778	97,50	25.459	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100,00	100,00	100,00	4.754	100,00	4.963	100,00	5.985	100,00	4.979	100,00	4.778	100,00	25.459	OPD Pengampu Urusan Kominfo

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	3.249	240,00	5.426	250,00	5.228	255,00	5.021	260,00	5.145	260,00	24.069	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	persen	52,00	50,00	50,00	283	50,00	592	50,00	580	50,00	437	50,00	490	50,00	2.383	OPD Pengampu Kepegawaian
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	20,00	100,00	100,00	94	100,00	237	100,00	141	100,00	140	100,00	141	100,00	754	OPD Pengampu Kepegawaian
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	80,00	90,00	90,00	132	90,00	105	90,00	103	90,00	101	90,00	103	90,00	545	OPD Pengampu Kepegawaian
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	70,00	80,00	80,00	169	80,00	780	80,00	767	80,00	758	80,00	773	80,00	3.246	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	117,00	100,00	100,00	2.570	100,00	3.711	100,00	3.637	100,00	3.584	100,00	3.639	100,00	17.141	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	630.063	74,57	601.742	75,07	599.963	75,57	609.425	76,07	629.780	76,07	3.070.973	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	260	100,00	256	100,00	253	100,00	258	100,00	1.289	OPD Pengampu Litbang
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	304	100,00	299	100,00	296	100,00	302	100,00	1.464	OPD Pengampu Litbang
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	0,00	70,93	72,00	485	73,00	709	74,00	695	75,00	685	76,00	695	76,00	3.270	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100,00	100,00	100,00	432	100,00	416	100,00	407	100,00	442	100,00	448	100,00	2.144	Bag. Organisasi
	Persentase pelayanan keprotokoleraan	persen	100,00	100,00	100,00	1.249	100,00	1.245	100,00	1.230	100,00	1.222	100,00	1.246	100,00	6.193	Bag. Prokompim
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.555	100,00	1.507	100,00	1.496	100,00	1.492	100,00	1.530	100,00	8.580	Bag. Umum
	Presentase ketersediaan laporan kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	14.782	100,00	14.280	100,00	14.381	100,00	14.522	100,00	15.028	100,00	72.994	Bag. Umum

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100,00	100,00	100,00	9.928	100,00	8.944	100,00	8.794	100,00	8.867	100,00	8.862	100,00	45.395	Bag. Umum
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.339	100,00	4.883	100,00	4.813	100,00	4.771	100,00	4.874	100,00	23.680	Bag. Umum
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.300	100,00	5.860	100,00	5.901	100,00	5.958	100,00	6.156	100,00	29.176	OPD Pengampu Perencanaan
	persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	554	100,00	503	100,00	495	100,00	490	100,00	500	100,00	2.541	OPD Pengampu Perencanaan
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	0,00	100,00	100,00	94	100,00	79	100,00	79	100,00	78	100,00	80	100,00	409	OPD Pengampu Perencanaan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	13.501	100,00	12.542	100,00	12.633	100,00	12.751	100,00	13.206	100,00	64.633	OPD Pengampu Keuangan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.735	100,00	1.516	100,00	1.487	100,00	1.468	100,00	1.492	100,00	7.698	OPD Pengampu Keuangan
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	5.112	100,00	1.884	100,00	251	100,00	248	100,00	252	100,00	7.746	OPD Pengampu Keuangan
	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.649	100,00	4.227	100,00	4.258	100,00	4.302	100,00	4.450	100,00	21.886	OPD Pengampu Kepegawaian
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	492	100,00	469	100,00	461	100,00	456	100,00	464	100,00	2.341	OPD Pengampu Kepegawaian
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	184	100,00	2.033	100,00	173	100,00	172	100,00	176	100,00	2.737	OPD Pengampu Kepegawaian
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.437	100,00	1.455	100,00	1.465	100,00	1.484	100,00	1.530	100,00	7.371	BPBD
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	218	100,00	261	100,00	283	100,00	252	100,00	256	100,00	1.271	BPBD

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	136	100,00	139	100,00	136	100,00	134	100,00	136	100,00	681	BPBD
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.984	100,00	2.308	100,00	2.324	100,00	2.348	100,00	2.427	100,00	11.390	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	612	100,00	630	100,00	620	100,00	613	100,00	625	100,00	3.100	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	154	100,00	176	100,00	173	100,00	171	100,00	174	100,00	848	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.601	100,00	7.590	100,00	7.645	100,00	7.720	100,00	7.992	100,00	38.547	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	777	100,00	868	100,00	851	100,00	839	100,00	851	100,00	4.186	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	480	100,00	362	100,00	355	100,00	350	100,00	355	100,00	1.902	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.048	100,00	3.304	100,00	3.327	100,00	3.363	100,00	3.476	100,00	16.517	OPD Pengampu Urusan Admindak dan Capil
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.123	100,00	1.681	100,00	1.652	100,00	1.634	100,00	1.664	100,00	7.755	OPD Pengampu Urusan Admindak dan Capil
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	96	100,00	103	100,00	101	100,00	99	100,00	101	100,00	499	OPD Pengampu Urusan Admindak dan Capil
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.291	100,00	5.267	100,00	5.305	100,00	5.353	100,00	5.544	100,00	26.759	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	14.954	100,00	13.410	100,00	13.322	100,00	13.077	100,00	13.495	100,00	68.257	OPD Pengampu Urusan Perhubungan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	714	100,00	748	100,00	2.217	100,00	1.018	100,00	1.034	100,00	5.731	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	60.171	100,00	56.337	100,00	56.765	100,00	57.287	100,00	59.362	100,00	289.922	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.664	100,00	1.476	100,00	1.446	100,00	1.425	100,00	1.447	100,00	7.457	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	530	100,00	586	100,00	585	100,00	588	100,00	608	100,00	2.897	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.260	100,00	3.315	100,00	3.341	100,00	3.371	100,00	3.498	100,00	16.785	OPD Pengampu Urusan Kominfo
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	963	100,00	962	100,00	1.007	100,00	1.043	100,00	1.067	100,00	5.041	OPD Pengampu Urusan Kominfo
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	404	100,00	453	100,00	453	100,00	455	100,00	1.587	100,00	3.352	OPD Pengampu Urusan Kominfo
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.327	100,00	4.714	100,00	4.747	100,00	4.796	100,00	4.961	100,00	23.545	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	764	100,00	1.016	100,00	999	100,00	987	100,00	1.005	100,00	4.771	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	179	100,00	161	100,00	157	100,00	155	100,00	157	100,00	809	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.209	100,00	5.745	100,00	5.786	100,00	5.844	100,00	6.048	100,00	29.632	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	597	100,00	718	100,00	718	100,00	722	100,00	745	100,00	3.499	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	530	100,00	130	100,00	128	100,00	126	100,00	119	100,00	1.032	OPD Pengampu Urusan Perindustrian

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.655	100,00	3.353	100,00	3.376	100,00	3.412	100,00	3.528	100,00	17.324	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.348	100,00	1.204	100,00	1.186	100,00	1.174	100,00	1.198	100,00	6.109	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	330	100,00	293	100,00	287	100,00	283	100,00	287	100,00	1.479	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.106	100,00	6.004	100,00	6.048	100,00	6.108	100,00	6.321	100,00	29.586	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	563	100,00	430	100,00	426	100,00	423	100,00	434	100,00	2.276	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	681	100,00	749	100,00	734	100,00	724	100,00	735	100,00	3.623	OPD Pengampu Urusan Pertanian
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.204	100,00	3.214	100,00	3.237	100,00	3.265	100,00	3.384	100,00	16.304	OPD Pengampu Urusan Sosial
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	509	100,00	529	100,00	518	100,00	511	100,00	518	100,00	2.585	OPD Pengampu Urusan Sosial
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	477	100,00	273	100,00	268	100,00	264	100,00	268	100,00	1.549	OPD Pengampu Urusan Sosial
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.478	100,00	4.064	100,00	4.093	100,00	4.136	100,00	4.277	100,00	21.047	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	persen	100,00	100,00	100,00	613	100,00	508	100,00	504	100,00	507	100,00	521	100,00	2.653	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	pemerintah daerah																
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	303	100,00	559	100,00	547	100,00	549	100,00	235	100,00	2.193	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	9.591	100,00	9.800	100,00	9.872	100,00	9.966	100,00	10.319	100,00	49.549	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	896	100,00	825	100,00	817	100,00	814	100,00	836	100,00	4.188	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.817	100,00	2.240	100,00	2.195	100,00	2.163	100,00	2.196	100,00	11.611	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.136	100,00	2.705	100,00	2.724	100,00	2.753	100,00	2.847	100,00	13.167	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	393	100,00	385	100,00	382	100,00	382	100,00	392	100,00	1.935	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	200	100,00	2.504	100,00	178	100,00	176	100,00	178	100,00	3.236	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.723	100,00	3.679	100,00	3.705	100,00	3.745	100,00	3.872	100,00	18.724	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.076	100,00	888	100,00	807	100,00	828	100,00	865	100,00	4.465	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.248	100,00	1.020	100,00	90	100,00	89	100,00	92	100,00	2.538	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.413	100,00	7.551	100,00	7.604	100,00	7.677	100,00	7.946	100,00	39.192	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.141	100,00	3.444	100,00	3.398	100,00	3.372	100,00	3.448	100,00	17.803	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	3.633	100,00	2.083	100,00	1.217	100,00	2.105	100,00	2.137	100,00	11.176	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.701	100,00	4.838	100,00	4.874	100,00	4.924	100,00	5.095	100,00	24.432	Inspektorat Daerah
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	322	100,00	266	100,00	273	100,00	271	100,00	275	100,00	1.408	Inspektorat Daerah
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	129	100,00	134	100,00	133	100,00	134	100,00	136	100,00	667	Inspektorat Daerah
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.461	100,00	7.528	100,00	7.577	100,00	7.647	100,00	7.912	100,00	38.125	Kec. Pekalongan Barat
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.334	100,00	1.258	100,00	1.241	100,00	1.231	100,00	1.258	100,00	6.321	Kec. Pekalongan Barat
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	251	100,00	221	100,00	216	100,00	213	100,00	216	100,00	1.118	Kec. Pekalongan Barat
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.459	100,00	6.796	100,00	6.841	100,00	6.904	100,00	7.143	100,00	34.143	Kec. Pekalongan Selatan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	persen	100,00	100,00	100,00	1.196	100,00	1.080	100,00	1.064	100,00	1.055	100,00	1.078	100,00	5.474	Kec. Pekalongan Selatan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	pemerintah daerah																
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	217	100,00	192	100,00	188	100,00	185	100,00	188	100,00	971	Kec. Pekalongan Selatan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.756	100,00	7.856	100,00	7.908	100,00	7.981	100,00	8.258	100,00	39.759	Kec.Pekalongan Timur
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	5.282	100,00	1.338	100,00	1.315	100,00	1.300	100,00	1.324	100,00	10.559	Kec.Pekalongan Timur
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	221	100,00	216	100,00	213	100,00	217	100,00	1.129	Kec.Pekalongan Timur
	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.346	100,00	7.560	100,00	7.610	100,00	7.680	100,00	7.946	100,00	38.143	Kec. Pekalongan Utara
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.209	100,00	1.192	100,00	1.169	100,00	1.153	100,00	1.172	100,00	5.894	Kec. Pekalongan Utara
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	238	100,00	245	100,00	240	100,00	236	100,00	240	100,00	1.199	Kec. Pekalongan Utara
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.601	100,00	1.675	100,00	1.686	100,00	1.708	100,00	1.762	100,00	8.433	Badan Kesbangpol
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	277	100,00	166	100,00	164	100,00	162	100,00	166	100,00	935	Badan Kesbangpol
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	94	100,00	41	100,00	40	100,00	40	100,00	40	100,00	255	Badan Kesbangpol
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.264	100,00	1.151	100,00	1.128	100,00	1.112	100,00	1.129	100,00	5.783	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	221	100,00	196	100,00	192	100,00	189	100,00	192	100,00	989	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	171.042	100,00	165.370	100,00	166.221	100,00	167.252	100,00	171.457	100,00	841.342	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	2.825	100,00	2.765	100,00	2.834	100,00	2.905	100,00	2.978	100,00	14.307	Puskesmas Bendan
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	629	100,00	616	100,00	631	100,00	647	100,00	663	100,00	3.185	Puskesmas Buaran
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.004	100,00	983	100,00	1.008	100,00	1.033	100,00	1.059	100,00	5.088	Puskesmas Dukuh
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.487	100,00	1.456	100,00	1.493	100,00	1.530	100,00	1.568	100,00	7.534	Puskesmas Jenggot
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	897	100,00	878	100,00	900	100,00	923	100,00	946	100,00	4.544	Puskesmas Klego
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	843	100,00	826	100,00	846	100,00	868	100,00	889	100,00	4.273	Puskesmas Kramatsari
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.165	100,00	1.141	100,00	1.170	100,00	1.199	100,00	1.229	100,00	5.903	Puskesmas Krapyak Kidul
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	2.131	100,00	2.087	100,00	2.139	100,00	2.192	100,00	2.247	100,00	10.796	Puskesmas Kusuma Bangsa
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	629	100,00	616	100,00	631	100,00	647	100,00	663	100,00	3.185	Puskesmas Medono
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	951	100,00	931	100,00	954	100,00	978	100,00	1.002	100,00	4.816	Puskesmas Noyontaan
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.917	100,00	1.876	100,00	1.923	100,00	1.971	100,00	2.021	100,00	9.708	Puskesmas Pekalongan Selatan
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.273	100,00	1.246	100,00	1.277	100,00	1.309	100,00	1.342	100,00	6.447	Puskesmas Sokorejo
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.058	100,00	1.036	100,00	1.062	100,00	1.088	100,00	1.116	100,00	5.360	Puskesmas Tirto
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	897	100,00	878	100,00	900	100,00	923	100,00	946	100,00	4.544	Puskesmas Tondano
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	86.898	100,00	85.000	100,00	87.846	100,00	95.000	100,00	100.000	100,00	454.744	RSUD Bendan
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	71	100,00	62	100,00	61	100,00	61	100,00	61	100,00	317	RSUD Bendan
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	74	100,00	829	100,00	812	100,00	801	100,00	813	100,00	3.328	RSUD Bendan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.156	100,00	4.415	100,00	4.447	100,00	4.487	100,00	4.648	100,00	23.154	Satpol PP
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	472	100,00	448	100,00	442	100,00	442	100,00	448	100,00	2.253	Satpol PP
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	378	100,00	572	100,00	560	100,00	552	100,00	561	100,00	2.623	Satpol PP
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.889	100,00	3.184	100,00	3.206	100,00	3.237	100,00	3.350	100,00	15.866	Set DPRD
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.126	100,00	3.674	100,00	3.621	100,00	3.590	100,00	3.666	100,00	18.677	Set DPRD
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	0,00	100,00	100,00	22.037	100,00	19.814	100,00	19.908	100,00	19.818	100,00	20.503	100,00	102.080	Set DPRD
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.390	100,00	1.460	100,00	1.431	100,00	1.411	100,00	1.434	100,00	8.127	Set DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	368	100,00	552	100,00	610	100,00	652	100,00	499	100,00	2.682	OPD Pengampu Perencanaan
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	21	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	13	100,00	69	OPD Pengampu Perencanaan
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	88	100,00	107	100,00	107	100,00	107	100,00	110	100,00	518	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemosbud	persen	100,00	100,00	100,00	272	100,00	299	100,00	199	100,00	197	100,00	217	100,00	1.184	OPD Pengampu Perencanaan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100,00	100,00	100,00	183	100,00	261	100,00	256	100,00	163	100,00	166	100,00	1.030	OPD Pengampu Perencanaan
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100,00	100,00	100,00	461	100,00	418	100,00	410	100,00	404	100,00	410	100,00	2.102	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	1.006	100,00	891	100,00	873	100,00	860	100,00	873	100,00	4.503	Bag. Pemerintahan
	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100,00	100,00	100,00	899	100,00	1.027	100,00	1.009	100,00	997	100,00	1.012	100,00	4.944	Bag. Hukum
	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	20.634	100,00	16.385	100,00	16.055	100,00	15.823	100,00	16.064	100,00	84.960	Bag. Kesra
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100,00	100,00	100,00	709	100,00	897	100,00	894	100,00	891	100,00	895	100,00	4.287	Bag. Perekonomian dan SDA
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	8,10	7,00	7,00	100	6,00	112	6,00	110	6,00	109	6,00	110	6,00	541	Bag. PBJ Minbang
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	96,97	100,00	100,00	538	100,00	517	100,00	508	100,00	503	100,00	514	100,00	2.580	Bag. PBJ Minbang
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	WTP	12.107	WTP	9.159	WTP	8.854	WTP	8.742	WTP	8.902	WTP	47.765	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	9,96	11,91	8,33	8.254	8,08	6.216	7,66	6.094	7,50	6.009	7,26	6.105	7,26	32.678	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00	2.011	100,00	1.356	100,00	1.196	100,00	1.183	100,00	1.214	100,00	6.961	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK	persen	0,33	0,05	0,05	1.842	0,05	1.587	0,05	1.564	0,05	1.550	0,05	1.583	0,05	8.126	OPD Pengampu Keuangan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
			2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
	<i>Outcome)</i>																
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	280	3,40	295	3,60	301	3,80	304	4,00	315	4,00	1.495	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	nilai	3,00	3,00	3,00	280	3,00	295	3,00	301	3,00	304	3,00	315	3,00	1.495	Inspektorat Daerah
	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2	3	4	133	5	113	6	115	7	118	8	124	8	603	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85,00	85,00	85,00	133	85,00	113	85,00	115	85,00	118	85,00	124	85,00	603	Inspektorat Daerah
Jumlah						1.031.500		1.040.256		1.070.177		1.071.184		1.084.120		5.297.237	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang dapat digunakan untuk membiaya belanja daerah dijelaskan dalam tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2022-2026**

URAIAN	Kondisi Awal (Rp.Juta)		PROYEKSI (Rp.Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	953.155	930.643	948.949	958.647	969.900	985.830	999.680
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.868	214.208	220.466	230.164	241.417	257.347	271.197
Pendapatan Pajak Daerah	76.255	82.200	86.950	92.400	98.450	104.760	110.750
Hasil Retribusi Daerah	14.870	16.283	17.309	18.132	19.008	19.855	21.002
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.821	5.804	5.952	6.473	6.862	7.179	7.356
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.922	109.922	110.255	113.158	117.096	125.553	132.088
PENDAPATAN TRANSFER	700.838	693.448	706.104	706.104	706.104	706.104	706.104
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	625.666	602.819	616.144	616.144	616.144	616.144	616.144
Bagi Hasil Pajak	27.183	25.068	23.583	23.583	23.583	23.583	23.583
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.781	1.925	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
Dana Alokasi Umum	433.355	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
Dana Alokasi Khusus	104.992	127.897	134.656	134.656	134.656	134.656	134.656
Dana Insentif Daerah	58.356	21.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transfer Pemerintah Provinsi	75.172	90.628	89.960	89.960	89.960	89.960	89.960
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	63.378	78.870	78.202	78.202	78.202	78.202	78.202
Bantuan Keuangan Provinsi	11.794	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758	11.758
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.449	22.987	22.379	22.379	22.379	22.379	22.379
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.449	22.987	22.379	22.379	22.379	22.379	22.379

URAIAN	Kondisi Awal (Rp.Juta)		PROYEKSI (Rp.Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA	944.840	1.043.504	1.031.500	1.040.256	1.070.177	1.071.184	1.084.120
BELANJA OPERASI	760.543	843.482	839.891	846.781	874.818	873.921	884.935
Belanja Pegawai	394.422	428.945	469.250	475.612	489.096	500.802	511.234
Belanja Barang dan Jasa	327.664	377.997	334.982	336.369	337.760	339.157	340.555
Belanja Hibah	36.250	35.252	34.371	33.511	46.674	32.674	31.857
Belanja Bantuan Sosial	2.207	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
BELANJA MODAL	126.926	184.761	186.608	188.474	190.359	192.263	194.185
BELANJA TAK TERDUGA	57.371	15.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PEMBIAYAAN	104.227	110.042	82.551	81.609	100.277	85.354	84.441
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.748	112.542	94.151	93.209	106.277	91.354	90.441
Penggunaan SiLPA	95.102	112.542	94.151	93.209	92.277	91.354	90.441
Pencairan Dana Cadangan	12.704	-	-	-	14.000	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	942	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.521	2.500	11.600	11.600	6.000	6.000	6.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	2.000	6.000	6.000	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.518	500	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah, 2021

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan partisipasi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal/kesetaraan, pengelolaan pendidikan, peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan

kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

7.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen, persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 90 Persen, dan persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 72,5%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 95,5 persen dan persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 60%.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 97 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 95 Persen.

7.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob (penurunan luas genangan), serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 Persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 92,11 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah penyediaan sarana persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan sarana persampahan regional sebesar 100 persen.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 12,87 persen

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 71,49 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,74 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kemantapan jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 86,57 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 21,20 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota sebesar 100 persen.

7.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga sebesar 92,35 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu luas kawasan permukiman kumuh sebesar 0 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 2147,88 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,55 persen.

7.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (*IKK Outcome*) sebesar 70 Persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (*SPM / IKK Outcome*) sebesar 100 Persen.

7.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 75 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (*SPM/IKK Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 52,49 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (*SPM*) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja melalui pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,55 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 29,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 49,02 persen.

7.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 11,09 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Dekelara (desa/kelurahan layak anak) sebesar 55,56 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah perlindungan khusus terhadap anak. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

7.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,8 persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 88 persen.

7.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

7.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 100 persen.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran air. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase limbah yang diolah sebesar 49,01 persen.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,949 persen.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 100 persen.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi atas hukum lingkungan termasuk izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 100 persen.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah termasuk pengelolaan sampah di TPS3R. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,31 persen.

7.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 88,75 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 94 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebesar 14 OPD.

7.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 100 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria “cepat berkembang” sebesar 70,37 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,92 Persen.

7.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7.2 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu *Unmeet need* KB sebesar 12 Persen.

7.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 100 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR sebesar 0,74 persen.

7.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,30.

7.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 33,23 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 59,68 persen

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,37 persen.

7.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penambahan peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebesar 6 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Nilai Investasi Baru pertahun sebesar Rp.40,53 Miliar.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

7.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 95,24 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor sebesar 42,86 persen.

7.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

7.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sebesar 3,74 Persen.

7.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya termasuk penyelenggaraan event budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (*IKK Outcome*) sebesar 97,52 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 4,8 Persen.

7.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu rasio

pengunjung perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,58.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Indikator yang akan dicapai yaitu regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan sejumlah 1 regulasi.

7.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 66,67 persen dan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 52,5.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Fokus program adalah penyusunan dan penetapan sop penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK sebesar 100 persen.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

7.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 6,15 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,2 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (*tenant*) sebanyak 2 pelaku usaha.

7.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 12,5 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 46,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi sebesar 59,52 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 100 persen.

7.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55,84 Miliar dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 203,65 Miliar.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 100 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

7.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 77,70 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, termasuk pembangunan pasar tradisional yang diawali kajian untuk mendekatkan pelayanan serta penataan pedagang dan pedagang kaki lima. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 100 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 100 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 8,19 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Alat-Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 83,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK *Output*) sebesar 7,5 persen.

7.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 21,04 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 26 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

7.2.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, persentase

Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan persentase keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

7.2.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislatif dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

7.2.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

7.2.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 7,26 Persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah termasuk optimalisasi aset daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Indeks pengelolaan aset baik (persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 0,05 Persen.

7.2.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan Assesment Center, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

7.2.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

7.2.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah implementasi Sistem Inovasi Daerah, pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbang, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Litbang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 76, dan Persentase pemberdayaan stakeholder kelitbang sebesar 100 persen.

7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

7.2.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai 3.

7.2.7. Unsur Kewilayahan

7.2.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah timur sebesar 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 Persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

7.2.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

7.2.9. Non Urusan

7.2.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah sebesar 100 persen, serta Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen.

**Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah
Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					275.448		307.320		339.377		337.328		329.754		1.589.227	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					90.392		116.170		116.692		116.488		118.491		558.233	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					77.444		101.180		100.912		100.936		102.702		483.173	
Persentase capaian SPM pendidikan	persen	74,31	76,37	80,17	77.444	83,97	101.180	89,50	100.912	100,00	100.936	100,00	102.702	100,00	483.173	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					212		306		300		296		300		1.413	
Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	100,00	212	100,00	306	100,00	300	100,00	296	100,00	300	100,00	1.413	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					12.737		14.684		15.481		15.257		15.489		73.647	
Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	160,00	100,00	100,00	12.737	100,00	14.684	100,00	15.481	100,00	15.257	100,00	15.489	100,00	73.647	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					73.490		67.240		67.440		69.981		72.408		350.558	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					72.484		64.634		64.693		67.350		69.742		338.903	
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	85,59	88,00	89,00	37.330	90,00	35.685	91,00	36.715	92,00	37.831	92,00	39.852	92,00	187.413	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	0,00	100,00	100,00	61	100,00	133	100,00	134	100,00	136	100,00	142	100,00	606	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	68,22	70,00	75,00	11.598	80,00	11.448	85,00	10.734	90,00	12.027	90,00	12.387	90,00	58.194	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	59,67	60,00	62,50	12.736	65,00	10.078	67,50	9.820	70,00	10.067	72,50	10.072	72,50	52.774	RSUD Bendan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	813	100,00	550	100,00	550	100,00	550	100,00	550	100,00	3.014	Puskesmas Bendan
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	657	100,00	445	100,00	445	100,00	445	100,00	445	100,00	2.439	Puskesmas Kramatsari
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	882	100,00	598	100,00	598	100,00	598	100,00	598	100,00	3.274	Puskesmas Tirto
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	838	100,00	568	100,00	568	100,00	568	100,00	568	100,00	3.108	Puskesmas Medono
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	655	100,00	444	100,00	444	100,00	444	100,00	444	100,00	2.430	Puskesmas Noyontaan
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	670	100,00	454	100,00	454	100,00	454	100,00	454	100,00	2.488	Puskesmas Tondano
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	826	100,00	559	100,00	559	100,00	559	100,00	559	100,00	3.063	Puskesmas Klego
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	701	100,00	475	100,00	475	100,00	475	100,00	475	100,00	2.601	Puskesmas Sokorejo
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	730	100,00	494	100,00	494	100,00	494	100,00	494	100,00	2.708	Puskesmas Dukuh
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	800	100,00	542	100,00	542	100,00	542	100,00	542	100,00	2.966	Puskesmas Krapyak Kidul
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	958	100,00	649	100,00	649	100,00	649	100,00	649	100,00	3.553	Puskesmas Kusuma Bangsa
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	550	100,00	373	100,00	373	100,00	373	100,00	373	100,00	2.042	Puskesmas Jenggot
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	929	100,00	629	100,00	629	100,00	629	100,00	629	100,00	3.445	Puskesmas Pekalongan Selatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	751	100,00	509	100,00	509	100,00	509	100,00	509	100,00	2.785	Puskesmas Buaran
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					404		156		292		166		177		1.195	
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	92,15	93,00	93,50	333	94,00	92	94,50	229	95,00	105	95,50	114	95,50	873	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	30,00	35,00	40,00	71	45,00	64	50,00	63	55,00	62	60,00	63	60,00	322	RSUD Bendan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					531		671		671		672		679		3.224	
Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	89,71	100,00	100,00	105	100,00	117	100,00	116	100,00	116	100,00	119	100,00	573	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	90,00	92,00	94,00	426	96,00	481	98,00	481	100,00	481	100,00	481	100,00	2.350	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	92,02	95,00	95,00	0	96,00	74	96,00	74	97,00	75	97,00	78	97,00	302	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					71		1.779		1.784		1.791		1.811		7.236	
Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	96,95	90,00	91,00	71	92,00	1.779	93,00	1.784	94,00	1.791	95,00	1.811	95,00	7.236	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					75.820		83.942		118.608		114.835		103.100		496.304	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.432		23.953		23.202		23.506		24.349		112.442	
Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	62,07	82,76	93,10	17.432	93,10	23.953	93,10	23.202	93,10	23.506	93,10	24.349	93,10	112.442	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4.319		1.389		1.381		1.375		1.381		9.844	
Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	86,06	85,77	87,09	4.319	88,39	1.389	89,66	1.381	90,90	1.375	92,11	1.381	92,11	9.844	OPD Pengampu Urusan PU-PR

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					4.816		11.700		2.817		1.207		1.225		21.765	
Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	0,00	0,00	20,00	4.816	40,00	11.700	60,00	2.817	80,00	1.207	100,00	1.225	100,00	21.765	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					815		557		546		538		546		3.003	
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK <i>Outcome</i>)	persen	9,27	9,87	10,47	815	11,07	557	11,67	546	12,27	538	12,87	546	12,87	3.003	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.857		9.466		9.326		9.227		9.329		46.205	
Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	65,44	66,45	67,46	8.857	68,47	9.466	69,48	9.326	70,48	9.227	71,49	9.329	71,49	46.205	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.318		2.791		1.862		2.295		2.477		11.743	
Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	16,94	17,24	17,54	2.318	17,84	2.791	18,14	1.862	18,44	2.295	18,74	2.477	18,74	11.743	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					35.536		33.864		79.255		76.473		63.573		288.701	
Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK <i>Outcome</i>)	persen	0,00	81,12	82,21	35.536	83,30	33.864	84,39	79.255	85,48	76.473	86,57	63.573	86,57	288.701	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					262		163		159		157		159		900	
Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	5,20	7,87	10,53	262	13,20	163	15,87	159	18,53	157	21,20	159	21,20	900	OPD Pengampu Urusan PU-PR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.466		60		59		58		59		1.703	
Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	0,00	0,00	100,00	1.466	100,00	60	100,00	59	100,00	58	100,00	59	100,00	1.703	OPD Pengampu Urusan PU-PR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					25.269		25.351		23.900		23.601		24.019		122.139	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.890		2.613		1.658		1.641		1.674		9.475	
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	0,00	0,00	91,02	1.890	91,35	2.613	91,68	1.658	92,02	1.641	92,35	1.674	92,35	9.475	OPD Pengampu Urusan Perumahan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
																	dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					17.384		17.419		17.031		16.823		17.130		85.785		
Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	508,47	498,47	419,47	17.384	291,47	17.419	174,47	17.031	72,47	16.823	0,00	17.130	0,00	85.785		OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.287		4.691		4.597		4.530		4.599		23.704		
Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1.639,41	1.649,41	1.728,41	5.287	1.856,41	4.691	1.973,41	4.597	2.075,41	4.530	2.147,88	4.599	2.147,88	23.704		OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					708		628		616		607		616		3.175		
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK <i>Outcome</i>)	persen	14,44	14,44	14,46	708	14,48	628	14,51	616	14,53	607	14,55	616	14,55	3.175		OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.890		10.501		8.784		8.518		7.849		42.541		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.293		6.258		6.134		6.050		6.141		29.876		
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK <i>Outcome</i>)	persen	0,00	60,00	62,00	5.293	64,00	6.258	66,00	6.134	68,00	6.050	70,00	6.141	70,00	29.876		Satpol PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					954		3.058		1.474		1.298		532		7.316		
persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	31,49	100,00	100,00	954	100,00	3.058	100,00	1.474	100,00	1.298	100,00	532	100,00	7.316		BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					643		1.185		1.176		1.169		1.176		5.349		
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK	persen	100,00	100,00	100,00	643	100,00	1.185	100,00	1.176	100,00	1.169	100,00	1.176	100,00	5.349		Satpol PP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
<i>Outcome)</i>																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.587		4.116		3.952		3.906		3.888		19.450	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					288		401		403		408		428		1.927	
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	100,00	42,00	50,00	288	58,00	401	67,00	403	75,00	408	75,00	428	75,00	1.927	OPD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.638		1.666		1.633		1.609		1.633		8.178	
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK <i>Outcome</i>)	persen	100,00	100,00	100,00	1.638	100,00	1.666	100,00	1.633	100,00	1.609	100,00	1.633	100,00	8.178	OPD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.046		1.008		988		973		988		5.004	
Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	62,67	60,45	58,46	1.046	56,69	1.008	55,12	988	53,73	973	52,49	988	52,49	5.004	OPD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					561		498		488		481		488		2.516	
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	0,00	100,00	100,00	561	100,00	498	100,00	488	100,00	481	100,00	488	100,00	2.516	OPD Pengampu Urusan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					54		543		441		435		351		1.825	
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100,00	100,00	100,00	54	100,00	543	100,00	441	100,00	435	100,00	351	100,00	1.825	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					53.839		59.978		59.970		56.652		58.106		288.545	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.275		3.524		3.172		3.234		3.407		14.612	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					972		2.312		1.894		1.885		2.002		9.065	
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK <i>Outcome</i>)	persen	0,29	0,33	0,37	972	0,42	2.312	0,46	1.894	0,50	1.885	0,55	2.002	0,55	9.065	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					129		925		998		1.073		1.125		4.251	
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK <i>Outcome</i>)	persen	17,93	19,93	21,93	129	23,93	925	25,93	998	27,93	1.073	29,93	1.125	29,93	4.251	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					173		286		280		276		280		1.296	
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK <i>Outcome</i>)	persen	44,62	45,33	46,05	173	46,80	286	47,51	280	48,27	276	49,02	280	49,02	1.296	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.002		443		454		455		464		2.818	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					105		60		97		78		98		438	
Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	0,00	1,85	3,70	105	5,55	60	7,39	97	9,24	78	11,09	98	11,09	438	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					282		66		65		64		65		540	
Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK <i>Outcome</i>)	persen	23,99	23,99	23,99	282	23,99	66	23,99	65	23,99	64	23,99	65	23,99	540	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					322		266		243		265		252		1.349	
Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	22,22	25,93	29,63	322	33,33	266	40,74	243	48,15	265	55,56	252	55,56	1.349	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					902		792		788		785		793		4.060	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					803		729		727		725		732		3.716	
Persentase cadangan pangan daerah	persen	4,30	3,80	4,30	803	4,40	729	4,60	727	4,70	725	4,80	732	4,80	3.716	OPD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					24		19		18		18		18		97	
Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100,00	100,00	100,00	24	100,00	19	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00	97	OPD Pengampu Urusan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					75		44		43		42		43		247	
Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	80,00	80,00	81,60	75	83,20	44	84,80	43	86,40	42	88,00	43	88,00	247	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					523		1.124		1.101		1.085		1.102		4.936	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					523		1.115		1.092		1.076		1.093		4.900	
Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	0,00	0,00	100,00	523	100,00	1.115	100,00	1.092	100,00	1.076	100,00	1.093	100,00	4.900	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0		9		9		9		9		36	
Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	0,00	0,00	50,00	0	50,00	9	50,00	9	50,00	9	50,00	9	50,00	36	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					16.317		19.988		19.555		17.081		19.200		92.140	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					370		0		0		90		0		459	
Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0,00	0,00	80,00	370	0,00	0	0,00	0	20,00	90	0,00	0	100,00	459	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.337		4.649		4.451		1.422		3.601		15.459	
Persentase limbah yang diolah	persen	0,00	33,37	39,29	1.337	40,95	4.649	45,02	4.451	45,97	1.422	49,01	3.601	49,01	15.459	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.635		4.033		3.941		3.995		4.198		20.802	
Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,889	2,889	2,909	4.635	2,919	4.033	2,929	3.941	2,939	3.995	2,949	4.198	2,949	20.802	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5		2		2		2		2		14	
Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	0,00	0,00	31,11	5	13,33	2	13,33	2	13,33	2	15,56	2	100,00	14	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					181		161		67		66		67		541	
Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	0,00	16,67	16,67	181	16,67	161	16,67	67	16,67	66	16,67	67	100,00	541	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					458		404		405		408		423		2.098	
Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	0,00	0,00	50,00	458	50,00	404	50,00	405	50,00	408	50,00	423	50,00	2.098	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					131		88		114		85		87		505	
Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	0,00	75,00	75,00	131	75,00	88	75,00	114	75,00	85	75,00	87	75,00	505	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					21		19		18		18		18		94	
Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	0,00	100,00	100,00	21	100,00	19	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00	94	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.181		10.631		10.557		10.996		10.804		52.168	
Persentase pengelolaan sampah	persen	0,00	2,19	0,27	9.181	0,28	10.631	0,29	10.557	0,30	10.996	0,31	10.804	0,31	52.168	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					746		871		782		790		823		4.011	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					339		329		331		337		352		1.687	
Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	0,00	80,00	81,77	339	83,53	329	85,30	331	87,07	337	88,75	352	88,75	1.687	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Cakil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					285		274		276		280		292		1.408	
Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	0,00	93,25	93,40	285	93,55	274	93,70	276	93,85	280	94,00	292	94,00	1.408	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Cakil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					122		268		174		174		179		916	
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	N/A	5,00	7	122	9	268	10	174	12	174	14	179	14	916	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Cakil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.927		2.115		2.225		2.073		1.942		10.283	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					1.065		1.251		1.241		1.235		1.242		6.033	
Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	persen	51,85	16,67	33,33	1.065	50,00	1.251	66,67	1.241	83,33	1.235	100,00	1.242	100,00	6.033	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					59		52		51		50		51		263	
Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	51,85	51,85	55,56	59	59,26	52	62,96	51	66,67	50	70,37	51	70,37	263	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					804		812		933		789		649		3.987	
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	95,97	95,97	96,16	804	96,35	812	96,54	933	96,73	789	96,92	649	96,92	3.987	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.636		3.151		2.796		2.789		2.835		15.207	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					80		72		71		71		73		366	
Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	0,00	100,00	100,00	80	100,00	72	100,00	71	100,00	71	100,00	73	100,00	366	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.404		2.917		2.566		2.560		2.602		14.050	
Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	8,41	8,20	8,00	3.404	7,80	2.917	7,60	2.566	7,40	2.560	7,20	2.602	7,20	14.050	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					152		163		160		157		160		792	
Unmeet need KB	persen	18,50	17,00	16,00	152	15,00	163	14,00	160	13,00	157	12,00	160	12,00	792	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.888		8.296		8.295		7.619		7.732		38.830	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.888		8.296		8.295		7.619		7.732		38.830	
Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	84,00	87,00	89,00	2.467	92,00	3.747	95,00	3.988	97,00	3.370	100,00	3.421	100,00	16.994	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK <i>Outcome</i>)	Ratio	0,31	0,35	0,40	3.421	0,44	3.574	0,44	3.572	0,44	3.520	0,44	3.564	0,44	17.650	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	-20,83	17,94	0,76	1.000	0,75	975	0,75	735	0,74	729	0,74	747	0,74	4.186	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.283		7.806		8.659		7.625		7.489		39.863	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.754		4.963		5.985		4.979		4.778		25.459	
Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100,00	100,00	100,00	4.754	100,00	4.963	100,00	5.985	100,00	4.979	100,00	4.778	100,00	25.459	OPD Pengampu Urusan Kominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					3.529		2.843		2.674		2.647		2.711		14.404	
Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	n/a	2,80	2,90	3.529	3,00	2.843	3,10	2.674	3,20	2.647	3,30	2.711	3,30	14.404	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.141		1.854		2.097		1.983		2.213		9.287	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					73		112		114		117		124		540	
Persentase koperasi yang berkualitas (IKK <i>Outcome</i>)	persen	30,69	24,59	29,41	73	30,94	112	31,49	114	32,36	117	33,23	124	33,23	540	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					565		618		632		646		668		3.129	
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	34,65	38,36	57,84	565	58,31	618	58,77	632	59,22	646	59,68	668	59,68	3.129	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					503		1.124		1.352		1.220		1.421		5.619	
Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK <i>Outcome</i>)	persen	11,74	11,85	11,95	503	12,06	1.124	12,16	1.352	12,27	1.220	12,37	1.421	12,37	5.619	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.605		1.646		1.673		1.702		1.694		8.320	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					115		93		118		144		96		565	
Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1,00	1	115	1	93	1	118	1	144	1	96	6	565	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					47		84		82		81		82		375	
Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	50,00	50,00	100,00	47	100,00	84	100,00	82	100,00	81	100,00	82	100,00	375	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					921		922		926		930		962		4.662	
Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	9.115	2.500	2.500	921	2.500	922	2.500	926	2.500	930	2.500	962	2.500	4.662	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					396		436		434		433		434		2.134	
Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6,30	6,42	6,55	396	6,68	436	6,82	434	6,95	433	7,09	434	40,53	2.134	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					126		112		113		114		120		584	
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	0,00	100,00	100,00	126	100,00	112	100,00	113	100,00	114	100,00	120	100,00	584	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					5.711		3.423		3.411		4.538		3.423		20.507	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042		1.070		1.048		1.033		1.049		5.242	
Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	106,67	91,95	92,93	1.042	93,69	1.070	94,31	1.048	94,81	1.033	95,24	1.049	95,24	5.242	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.670		2.353		2.362		3.505		2.374		15.264	
Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	0,00	11,43	28,57	4.670	34,29	2.353	34,29	2.362	40,00	3.505	42,86	2.374	42,86	15.264	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					115		111		109		108		109		553	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					115		111		109		108		109		553	
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100,00	66,00	100,00	115	100,00	111	100,00	109	100,00	108	100,00	109	100,00	553	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					151		150		153		172		180		806	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					151		150		153		172		180		806	
Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	0,00	0,93	1,87	151	2,80	150	2,80	153	3,74	172	3,74	180	3,74	806	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.672		3.645		3.613		3.571		3.615		17.116	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					959		1.814		1.780		1.755		1.781		8.090	
Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	0,00	100,00	100,00	959	100,00	1.814	100,00	1.780	100,00	1.755	100,00	1.781	100,00	8.090	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					368		544		536		528		536		2.514	
Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	0,00	100,00	100,00	368	100,00	544	100,00	536	100,00	528	100,00	536	100,00	2.514	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0		46		68		67		68		250	
Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	0,00	100,00	100,00	0	100,00	46	100,00	68	100,00	67	100,00	68	100,00	250	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					26		20		20		19		20		104	
Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	0,00	88,65	90,43	26	92,20	20	93,97	20	95,74	19	97,52	20	97,52	104	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1.319		1.219		1.209		1.202		1.209		6.158	
Persentase pengunjung museum batik	persen	3,59	4,55	4,60	1.319	4,66	1.219	4,71	1.209	4,75	1.202	4,80	1.209	4,80	6.158	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					483		534		572		522		561		2.670	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					483		534		554		522		561		2.652	
Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	15,62	15,77	15,93	483	16,09	534	16,25	554	16,41	522	16,58	561	16,58	2.652	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0		0		18		0		0		18	
regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	regulasi	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	1	18	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					462		506		516		519		524		2.527	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					288		346		348		342		351		1.675	
Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	0,00	33,33	40,00	217	46,67	255	53,33	254	60,00	254	66,67	262	66,67	1.241	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK Outcome)	Indeks	37,25	40,00	42,50	71	45,00	91	47,50	94	50,00	88	52,50	89	52,50	434	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					163		160		159		168		164		814	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	100,00	163	100,00	160	100,00	159	100,00	168	100,00	164	100,00	814	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					10		0		9		9		9		38	
Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	100,00	10	0,00	0	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	38	OPD Pengampu Urusan Kearsipan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					18.552		22.939		23.368		21.414		19.710		105.982	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.435		4.700		4.637		4.565		4.681		23.018	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.593		2.706		2.681		2.583		2.653		14.216	
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	-0,07	1,00	1,00	1.006	1,00	374	1,00	368	1,00	276	1,00	282	6,15	2.306	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	0,00	1,00	1,00	2.587	1,00	2.332	1,00	2.313	1,00	2.307	1,00	2.372	6,15	11.910	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					295		587		537		540		558		2.518	
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	-0,54	1,00	1,00	295	1,00	587	1,00	537	1,00	540	1,00	558	6,15	2.518	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					547		1.406		1.419		1.443		1.469		6.284	
Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,20	12,20	0,00	0	12,20	1.071	12,20	1.069	12,20	1.078	12,20	1.089	12,20	4.307	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (<i>tenant</i>)	pelaku usaha	5	2	2	547	2	335	2	350	2	365	2	380	12	1.977	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.786		5.695		5.462		5.668		5.676		27.287	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.344		3.891		3.867		3.911		4.076		19.090	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK <i>Outcome</i>)	persen	8,05	10,00	10,50	3.344	11,00	3.891	11,50	3.867	12,00	3.911	12,50	4.076	12,50	19.090	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.054		1.060		1.050		1.039		1.053		5.256	
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK <i>Outcome</i>)	persen	17,00	21,98	26,98	1.054	31,98	1.060	36,98	1.050	41,98	1.039	46,98	1.053	46,98	5.256	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0		464		273		449		273		1.459	
Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	0,00	0,00	16,67	0	30,30	464	41,67	273	51,28	449	59,52	273	59,52	1.459	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					387		279		273		269		273		1.481	
Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	0,00	0,00	20,00	387	40,00	279	60,00	273	80,00	269	100,00	273	100,00	1.481	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.896		1.798		1.261		1.251		1.270		7.475	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					281		240		238		237		243		1.238	
Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,56	55,56	55,62	206	55,67	185	55,73	184	55,78	183	55,84	188	55,84	946	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	180,84	184,46	188,15	75	191,91	55	195,75	54	199,66	54	203,65	55	203,65	292	OPD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					777		1.164		638		634		641		3.854	
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	777	100,00	1.164	100,00	638	100,00	634	100,00	641	100,00	3.854	OPD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					654		235		231		227		231		1.579	
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	824kasus	5,00	5,00	654	5,00	235	5,00	231	5,00	227	5,00	231	5,00	1.579	OPD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					66		56		55		54		55		285	
Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	0,00	100,00	100,00	66	100,00	56	100,00	55	100,00	54	100,00	55	100,00	285	OPD Pengampu Urusan Pertanian

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					37		33		32		31		32		164	
persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	0,00	0,00	20,00	37	50,00	33	75,00	32	100,00	31	100,00	32	100,00	164	OPD Pengampu Urusan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					81		70		68		67		68		354	
Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	0,00	5,00	5,00	81	5,00	70	5,00	68	5,00	67	5,00	68	5,00	354	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6.912		10.015		11.421		9.439		7.491		45.278	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0		3		3		3		3		11	
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK <i>Outcome</i>))	persen	73,20	73,93	0,00	0	75,42	3	76,17	3	76,93	3	77,70	3	77,70	11	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					5.915		8.551		9.973		7.998		6.060		38.497	
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	68,75	75,00	75,00	5.915	81,25	8.551	93,75	9.973	100,00	7.998	100,00	6.060	100,00	38.497	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					147		493		483		476		483		2.081	
Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	persen	76,00	80,00	84,00	147	88,00	493	92,00	483	96,00	476	100,00	483	100,00	2.081	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					147		120		118		116		118		619	
Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,06	7,24	7,42	147	7,60	120	7,79	118	7,99	116	8,19	118	8,19	619	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					390		367		373		381		355		1.866	
Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK <i>Outcome</i>)	persen	73,36	73,99	75,99	390	77,99	367	79,99	373	81,99	381	83,99	355	83,99	1.866	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					314		481		471		465		472		2.203	
Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	1,01	2,09	3,17	314	4,26	481	5,34	471	6,42	465	7,50	472	7,50	2.203	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					523		731		587		491		592		2.925	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					503		682		447		443		452		2.527	
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21,40	20,59	20,41	503	20,43	682	20,75	447	20,97	443	21,04	452	21,04	2.527	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					21		14		14		13		14		76	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	23,00	23,00	24,00	21	24,00	14	25,00	14	25,00	13	26,00	14	26,00	76	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		36		126		35		126		322	
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	N/a	100,00	0,00	0	100,00	36	100,00	126	100,00	35	100,00	126	100,00	322	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					46.501		39.725		39.309		38.398		38.978		202.911	
SEKRETARIAT DAERAH					23.886		19.829		19.449		19.183		19.468		101.816	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					22.539		18.302		17.937		17.680		17.949		94.407	
Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	1.006	100,00	891	100,00	873	100,00	860	100,00	873	100,00	4.503	Bag. Pemerintahan
Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100,00	100,00	100,00	899	100,00	1.027	100,00	1.009	100,00	997	100,00	1.012	100,00	4.944	Bag. Hukum
Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	20.634	100,00	16.385	100,00	16.055	100,00	15.823	100,00	16.064	100,00	84.960	Bag. Kesra

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.347		1.526		1.512		1.503		1.519		7.409	
Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100,00	100,00	100,00	709	100,00	897	100,00	894	100,00	891	100,00	895	100,00	4.287	Bag. Perekonomian dan SDA
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK <i>Outcome</i>)	persen	8,10	7,00	7,00	100	6,00	112	6,00	110	6,00	109	6,00	110	6,00	541	Bag. PBJ Minbang
Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	96,97	100,00	100,00	538	100,00	517	100,00	508	100,00	503	100,00	514	100,00	2.580	Bag. PBJ Minbang
SEKRETARIAT DPRD					22.614		19.896		19.860		19.215		19.510		101.096	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					22.614		19.896		19.860		19.215		19.510		101.096	
Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	100,00	22.143	100,00	19.478	100,00	19.451	100,00	18.812	100,00	19.100	100,00	98.983	Set DPRD
Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	471	100,00	418	100,00	410	100,00	404	100,00	410	100,00	2.112	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					17.757		17.508		16.926		16.533		16.718		85.442	
PERENCANAAN					1.393		1.649		1.594		1.535		1.415		7.586	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					477		671		729		771		622		3.270	
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	368	100,00	552	100,00	610	100,00	652	100,00	499	100,00	2.682	OPD Pengampu Perencanaan
Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	21	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	13	100,00	69	OPD Pengampu Perencanaan
Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	88	100,00	107	100,00	107	100,00	107	100,00	110	100,00	518	OPD Pengampu Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					916		978		865		764		793		4.316	
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100,00	100,00	100,00	272	100,00	299	100,00	199	100,00	197	100,00	217	100,00	1.184	OPD Pengampu Perencanaan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang	persen	100,00	100,00	100,00	183	100,00	261	100,00	256	100,00	163	100,00	166	100,00	1.030	OPD Pengampu Perencanaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
Perekonomian																	
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100,00	100,00	100,00	461	100,00	418	100,00	410	100,00	404	100,00	410	100,00	2.102		OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN					12.107		9.159		8.854		8.742		8.902		47.765		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					8.254		6.216		6.094		6.009		6.105		32.678		
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK <i>Outcome</i>)	persen	9,96	11,91	8,33	8.254	8,08	6.216	7,66	6.094	7,50	6.009	7,26	6.105	7,26	32.678		OPD Pengampu Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.011		1.356		1.196		1.183		1.214		6.961		
Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK <i>Outcome</i>)	persen	100,00	100,00	100,00	2.011	100,00	1.356	100,00	1.196	100,00	1.183	100,00	1.214	100,00	6.961		OPD Pengampu Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.842		1.587		1.564		1.550		1.583		8.126		
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK <i>Outcome</i>)	persen	0,33	0,05	0,05	1.842	0,05	1.587	0,05	1.564	0,05	1.550	0,05	1.583	0,05	8.126		OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN					679		1.714		1.591		1.437		1.507		6.928		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					679		1.714		1.591		1.437		1.507		6.928		
Persentase PNS berkembang karier	persen	52,00	50,00	50,00	283	50,00	592	50,00	580	50,00	437	50,00	490	50,00	2.383		OPD Pengampu Kepegawaian
Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	20,00	100,00	100,00	94	100,00	237	100,00	141	100,00	140	100,00	141	100,00	754		OPD Pengampu Kepegawaian
Persentase Keterisian Jabatan	persen	80,00	90,00	90,00	132	90,00	105	90,00	103	90,00	101	90,00	103	90,00	545		OPD Pengampu Kepegawaian
Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	70,00	80,00	80,00	169	80,00	780	80,00	767	80,00	758	80,00	773	80,00	3.246		OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.570		3.711		3.637		3.584		3.639		17.141		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.570		3.711		3.637		3.584		3.639		17.141		
Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	117,00	100,00	100,00	2.570	100,00	3.711	100,00	3.637	100,00	3.584	100,00	3.639	100,00	17.141		OPD Pendidikan dan Pelatihan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.009		1.274		1.250		1.234		1.255		6.022	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.009		1.274		1.250		1.234		1.255		6.022	
Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	260	100,00	256	100,00	253	100,00	258	100,00	1.289	OPD Pengampu Litbang
Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	304	100,00	299	100,00	296	100,00	302	100,00	1.464	OPD Pengampu Litbang
Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	0,00	70,93	72,00	485	73,00	709	74,00	695	75,00	685	76,00	695	76,00	3.270	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					413		408		417		421		439		2.098	
INSPEKTORAT DAERAH					413		408		417		421		439		2.098	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					133		113		115		118		124		603	
Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85,00	85,00	85,00	133	85,00	113	85,00	115	85,00	118	85,00	124	85,00	603	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					280		295		301		304		315		1.495	
Level Kapabilitas APIP	nilai	3,00	3,00	3,00	280	3,00	295	3,00	301	3,00	304	3,00	315	3,00	1.495	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN					13.164		11.781		11.561		11.407		11.189		59.102	
KECAMATAN					13.164		11.781		11.561		11.407		11.189		59.102	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					63		136		133		132		134		598	
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	52	100,00	51	100,00	51	100,00	51	100,00	222	Kec. Pekalongan Utara
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	55	Kec. Pekalongan Selatan
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	42	100,00	41	100,00	40	100,00	41	100,00	180	Kec. Pekalongan Barat
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	16	100,00	32	100,00	31	100,00	31	100,00	31	100,00	140	Kec. Pekalongan Timur

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					12.108		10.726		10.521		10.374		10.132		53.862	
Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100,00	1,00	100,00	139	100,00	113	100,00	111	100,00	109	100,00	88	100,00	559	Kec. Pekalongan Utara
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	427	100,00	379	100,00	372	100,00	367	100,00	372	100,00	1.917	Kel. Kandang Panjang
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	449	100,00	399	100,00	391	100,00	385	100,00	391	100,00	2.014	Kel. Panjang Wetan
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	357	100,00	316	100,00	310	100,00	306	100,00	310	100,00	1.599	Kel. Degayu
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	334	100,00	296	100,00	290	100,00	286	100,00	291	100,00	1.498	Kel. Bandengan
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	572	100,00	506	100,00	496	100,00	488	100,00	496	100,00	2.559	Kel. Krapyak
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	470	100,00	417	100,00	408	100,00	402	100,00	408	100,00	2.105	Kel. Padukuhan Kraton
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	406	100,00	360	100,00	353	100,00	348	100,00	353	100,00	1.819	Kel. Panjang Baru
Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	113	100,00	111	100,00	110	100,00	85	100,00	558	Kec. Pekalongan Selatan
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	407	100,00	361	100,00	354	100,00	348	100,00	354	100,00	1.823	Kel. Jenggot
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	405	100,00	352	100,00	343	100,00	337	100,00	343	100,00	1.781	Kel. Buaran Kradenan
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	337	100,00	299	100,00	293	100,00	288	100,00	293	100,00	1.511	Kel. Kuripan Kertoharjo
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	404	100,00	359	100,00	352	100,00	347	100,00	352	100,00	1.815	Kel. Kuripan Yosorejo
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	368	100,00	327	100,00	320	100,00	315	100,00	320	100,00	1.651	Kel. Soko duwet
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	414	100,00	367	100,00	360	100,00	355	100,00	361	100,00	1.856	Kel. Banyurip
Presentase tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	68	100,00	67	100,00	66	100,00	67	100,00	407	Kec. Pekalongan Barat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	443	100,00	393	100,00	385	100,00	379	100,00	385	100,00	1.985	Kel. Medono
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	357	100,00	316	100,00	310	100,00	306	100,00	310	100,00	1.599	Kel. Podosugih
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	399	100,00	340	100,00	334	100,00	329	100,00	334	100,00	1.736	Kel. Tirto
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	437	100,00	388	100,00	380	100,00	374	100,00	380	100,00	1.959	Kel. Sapuro Kebulen
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	515	100,00	457	100,00	448	100,00	441	100,00	448	100,00	2.309	Kel. Bendan Kergon
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	540	100,00	479	100,00	470	100,00	463	100,00	470	100,00	2.422	Kel. Pasirkratonkramat
Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	511	100,00	556	100,00	559	100,00	560	100,00	236	100,00	2.423	Kel. Pringrejo
Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	139	100,00	102	100,00	100	100,00	99	100,00	77	100,00	517	Kec. Pekalongan Timur
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	530	100,00	471	100,00	461	100,00	454	100,00	461	100,00	2.378	Kel. Kauman
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	461	100,00	409	100,00	401	100,00	395	100,00	401	100,00	2.066	Kel. Poncol
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	393	100,00	348	100,00	341	100,00	336	100,00	342	100,00	1.760	Kel. Klego
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	349	100,00	306	100,00	298	100,00	293	100,00	299	100,00	1.545	Kel. Gamer
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	424	100,00	377	100,00	369	100,00	364	100,00	369	100,00	1.903	Kel. Noyontaansari
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	468	100,00	415	100,00	406	100,00	401	100,00	407	100,00	2.096	Kel. Setono
Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	0,00	100,00	100,00	377	100,00	335	100,00	328	100,00	323	100,00	328	100,00	1.691	Kel. Kali Baros
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					947		884		873		868		889		4.460	
Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	293	100,00	265	100,00	259	100,00	255	100,00	259	100,00	1.332	Kec. Pekalongan Utara
Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	255	100,00	225	100,00	224	100,00	225	100,00	232	100,00	1.161	Kec. Pekalongan Selatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026				
		2020	2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100,00	100,00	100,00	206	100,00	189	100,00	187	100,00	187	100,00	192	100,00	961	Kec. Pekalongan Barat
Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	192	100,00	206	100,00	203	100,00	201	100,00	205	100,00	1.007	Kec. Pekalongan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					46		35		34		33		34		182	
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	37	Kec. Pekalongan Utara
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	12	100,00	11	100,00	11	100,00	11	100,00	57	Kec. Pekalongan Selatan
Presentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah barat	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	52	Kec. Pekalongan Barat
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	100,00	12	100,00	7	100,00	6	100,00	6	100,00	6	100,00	37	Kec. Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.052		1.607		1.578		1.558		1.585		8.380	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.052		1.607		1.578		1.558		1.585		8.380	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					374		286		281		278		284		1.503	
persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100,00	100,00	100,00	374	100,00	286	100,00	281	100,00	278	100,00	284	100,00	1.503	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					970		875		858		847		861		4.411	
Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	0	0,00	16	970	16	875	16	858	16	847	16	861	16	4.411	Badan Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					382		139		137		135		137		929	
Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100,00	100,00	100,00	382	100,00	139	100,00	137	100,00	135	100,00	137	100,00	929	Badan Kesbangpol

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					111		213		210		208		212		955	
Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	0,00	100,00	100,00	111	100,00	213	100,00	210	100,00	208	100,00	212	100,00	955	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					215		94		92		90		92		583	
persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	215	100,00	94	100,00	92	100,00	90	100,00	92	100,00	583	Badan Kesbangpol
Non Urusan					603.775		578.990		577.670		587.473		607.642		2.955.549	
Non Urusan					603.775		578.990		577.670		587.473		607.642		2.955.549	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					603.775		578.990		577.670		587.473		607.642		2.955.549	
Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100,00	100,00	100,00	432	100,00	416	100,00	407	100,00	442	100,00	448	100,00	2.144	Bag. Organisasi
Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100,00	100,00	100,00	1.249	100,00	1.245	100,00	1.230	100,00	1.222	100,00	1.246	100,00	6.193	Bag. Prokompim
Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.555	100,00	1.507	100,00	1.496	100,00	1.492	100,00	1.530	100,00	8.580	Bag. Umum
Presentase ketersediaan laporan kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	14.782	100,00	14.280	100,00	14.381	100,00	14.522	100,00	15.028	100,00	72.994	Bag. Umum
Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100,00	100,00	100,00	9.928	100,00	8.944	100,00	8.794	100,00	8.867	100,00	8.862	100,00	45.395	Bag. Umum
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.339	100,00	4.883	100,00	4.813	100,00	4.771	100,00	4.874	100,00	23.680	Bag. Umum
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.300	100,00	5.860	100,00	5.901	100,00	5.958	100,00	6.156	100,00	29.176	OPD Pengampu Perencanaan
persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	554	100,00	503	100,00	495	100,00	490	100,00	500	100,00	2.541	OPD Pengampu Perencanaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	0,00	100,00	100,00	94	100,00	79	100,00	79	100,00	78	100,00	80	100,00	409	OPD Pengampu Perencanaan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	13.501	100,00	12.542	100,00	12.633	100,00	12.751	100,00	13.206	100,00	64.633	OPD Pengampu Keuangan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.735	100,00	1.516	100,00	1.487	100,00	1.468	100,00	1.492	100,00	7.698	OPD Pengampu Keuangan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	5.112	100,00	1.884	100,00	251	100,00	248	100,00	252	100,00	7.746	OPD Pengampu Keuangan
Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.649	100,00	4.227	100,00	4.258	100,00	4.302	100,00	4.450	100,00	21.886	OPD Pengampu Kepegawaian
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	492	100,00	469	100,00	461	100,00	456	100,00	464	100,00	2.341	OPD Pengampu Kepegawaian
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	184	100,00	2.033	100,00	173	100,00	172	100,00	176	100,00	2.737	OPD Pengampu Kepegawaian
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.437	100,00	1.455	100,00	1.465	100,00	1.484	100,00	1.530	100,00	7.371	BPBD
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	218	100,00	261	100,00	283	100,00	252	100,00	256	100,00	1.271	BPBD
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	136	100,00	139	100,00	136	100,00	134	100,00	136	100,00	681	BPBD
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.984	100,00	2.308	100,00	2.324	100,00	2.348	100,00	2.427	100,00	11.390	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	612	100,00	630	100,00	620	100,00	613	100,00	625	100,00	3.100	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	154	100,00	176	100,00	173	100,00	171	100,00	174	100,00	848	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.601	100,00	7.590	100,00	7.645	100,00	7.720	100,00	7.992	100,00	38.547	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	persen	100,00	100,00	100,00	777	100,00	868	100,00	851	100,00	839	100,00	851	100,00	4.186	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	480	100,00	362	100,00	355	100,00	350	100,00	355	100,00	1.902		OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.048	100,00	3.304	100,00	3.327	100,00	3.363	100,00	3.476	100,00	16.517		OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.123	100,00	1.681	100,00	1.652	100,00	1.634	100,00	1.664	100,00	7.755		OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	96	100,00	103	100,00	101	100,00	99	100,00	101	100,00	499		OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.291	100,00	5.267	100,00	5.305	100,00	5.353	100,00	5.544	100,00	26.759		OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	14.954	100,00	13.410	100,00	13.322	100,00	13.077	100,00	13.495	100,00	68.257		OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	714	100,00	748	100,00	2.217	100,00	1.018	100,00	1.034	100,00	5.731		OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	60.171	100,00	56.337	100,00	56.765	100,00	57.287	100,00	59.362	100,00	289.922		OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.664	100,00	1.476	100,00	1.446	100,00	1.425	100,00	1.447	100,00	7.457		OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	530	100,00	586	100,00	585	100,00	588	100,00	608	100,00	2.897		OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.260	100,00	3.315	100,00	3.341	100,00	3.371	100,00	3.498	100,00	16.785		OPD Pengampu Urusan Kominfo
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	963	100,00	962	100,00	1.007	100,00	1.043	100,00	1.067	100,00	5.041		OPD Pengampu Urusan Kominfo
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	404	100,00	453	100,00	453	100,00	455	100,00	1.587	100,00	3.352		OPD Pengampu Urusan Kominfo

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.327	100,00	4.714	100,00	4.747	100,00	4.796	100,00	4.961	100,00	23.545	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	764	100,00	1.016	100,00	999	100,00	987	100,00	1.005	100,00	4.771	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	179	100,00	161	100,00	157	100,00	155	100,00	157	100,00	809	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.209	100,00	5.745	100,00	5.786	100,00	5.844	100,00	6.048	100,00	29.632	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	597	100,00	718	100,00	718	100,00	722	100,00	745	100,00	3.499	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	530	100,00	130	100,00	128	100,00	126	100,00	119	100,00	1.032	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.655	100,00	3.353	100,00	3.376	100,00	3.412	100,00	3.528	100,00	17.324	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.348	100,00	1.204	100,00	1.186	100,00	1.174	100,00	1.198	100,00	6.109	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	330	100,00	293	100,00	287	100,00	283	100,00	287	100,00	1.479	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.106	100,00	6.004	100,00	6.048	100,00	6.108	100,00	6.321	100,00	29.586	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	563	100,00	430	100,00	426	100,00	423	100,00	434	100,00	2.276	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	681	100,00	749	100,00	734	100,00	724	100,00	735	100,00	3.623	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.204	100,00	3.214	100,00	3.237	100,00	3.265	100,00	3.384	100,00	16.304	OPD Pengampu Urusan Sosial

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	509	100,00	529	100,00	518	100,00	511	100,00	518	100,00	2.585	OPD Pengampu Urusan Sosial
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	477	100,00	273	100,00	268	100,00	264	100,00	268	100,00	1.549	OPD Pengampu Urusan Sosial
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.478	100,00	4.064	100,00	4.093	100,00	4.136	100,00	4.277	100,00	21.047	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	613	100,00	508	100,00	504	100,00	507	100,00	521	100,00	2.653	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	303	100,00	559	100,00	547	100,00	549	100,00	235	100,00	2.193	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	9.591	100,00	9.800	100,00	9.872	100,00	9.966	100,00	10.319	100,00	49.549	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	896	100,00	825	100,00	817	100,00	814	100,00	836	100,00	4.188	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.817	100,00	2.240	100,00	2.195	100,00	2.163	100,00	2.196	100,00	11.611	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.136	100,00	2.705	100,00	2.724	100,00	2.753	100,00	2.847	100,00	13.167	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	393	100,00	385	100,00	382	100,00	382	100,00	392	100,00	1.935	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	200	100,00	2.504	100,00	178	100,00	176	100,00	178	100,00	3.236	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.723	100,00	3.679	100,00	3.705	100,00	3.745	100,00	3.872	100,00	18.724	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.076	100,00	888	100,00	807	100,00	828	100,00	865	100,00	4.465	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.248	100,00	1.020	100,00	90	100,00	89	100,00	92	100,00	2.538	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.413	100,00	7.551	100,00	7.604	100,00	7.677	100,00	7.946	100,00	39.192	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.141	100,00	3.444	100,00	3.398	100,00	3.372	100,00	3.448	100,00	17.803	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	3.633	100,00	2.083	100,00	1.217	100,00	2.105	100,00	2.137	100,00	11.176	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.701	100,00	4.838	100,00	4.874	100,00	4.924	100,00	5.095	100,00	24.432	Inspektorat Daerah
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	322	100,00	266	100,00	273	100,00	271	100,00	275	100,00	1.408	Inspektorat Daerah
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	129	100,00	134	100,00	133	100,00	134	100,00	136	100,00	667	Inspektorat Daerah
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.461	100,00	7.528	100,00	7.577	100,00	7.647	100,00	7.912	100,00	38.125	Kec. Pekalongan Barat
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.334	100,00	1.258	100,00	1.241	100,00	1.231	100,00	1.258	100,00	6.321	Kec. Pekalongan Barat
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	251	100,00	221	100,00	216	100,00	213	100,00	216	100,00	1.118	Kec. Pekalongan Barat
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.459	100,00	6.796	100,00	6.841	100,00	6.904	100,00	7.143	100,00	34.143	Kec. Pekalongan Selatan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	persen	100,00	100,00	100,00	1.196	100,00	1.080	100,00	1.064	100,00	1.055	100,00	1.078	100,00	5.474	Kec. Pekalongan Selatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
pemerintah daerah																	
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	217	100,00	192	100,00	188	100,00	185	100,00	188	100,00	971		Kec. Pekalongan Selatan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.756	100,00	7.856	100,00	7.908	100,00	7.981	100,00	8.258	100,00	39.759		Kec.Pekalongan Timur
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	5.282	100,00	1.338	100,00	1.315	100,00	1.300	100,00	1.324	100,00	10.559		Kec.Pekalongan Timur
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	262	100,00	221	100,00	216	100,00	213	100,00	217	100,00	1.129		Kec.Pekalongan Timur
Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.346	100,00	7.560	100,00	7.610	100,00	7.680	100,00	7.946	100,00	38.143		Kec. Pekalongan Utara
Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.209	100,00	1.192	100,00	1.169	100,00	1.153	100,00	1.172	100,00	5.894		Kec. Pekalongan Utara
Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	238	100,00	245	100,00	240	100,00	236	100,00	240	100,00	1.199		Kec. Pekalongan Utara
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.601	100,00	1.675	100,00	1.686	100,00	1.708	100,00	1.762	100,00	8.433		Badan Kesbangpol
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	277	100,00	166	100,00	164	100,00	162	100,00	166	100,00	935		Badan Kesbangpol
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	94	100,00	41	100,00	40	100,00	40	100,00	40	100,00	255		Badan Kesbangpol
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	1.264	100,00	1.151	100,00	1.128	100,00	1.112	100,00	1.129	100,00	5.783		OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	221	100,00	196	100,00	192	100,00	189	100,00	192	100,00	989		OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	171.042	100,00	165.370	100,00	166.221	100,00	167.252	100,00	171.457	100,00	841.342		OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	2.825	100,00	2.765	100,00	2.834	100,00	2.905	100,00	2.978	100,00	14.307		Puskesmas Bendan
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	629	100,00	616	100,00	631	100,00	647	100,00	663	100,00	3.185		Puskesmas Buaran
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.004	100,00	983	100,00	1.008	100,00	1.033	100,00	1.059	100,00	5.088		Puskesmas Dukuh

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.487	100,00	1.456	100,00	1.493	100,00	1.530	100,00	1.568	100,00	7.534	Puskesmas Jenggot
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	897	100,00	878	100,00	900	100,00	923	100,00	946	100,00	4.544	Puskesmas Klego
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	843	100,00	826	100,00	846	100,00	868	100,00	889	100,00	4.273	Puskesmas Kramatsari
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.165	100,00	1.141	100,00	1.170	100,00	1.199	100,00	1.229	100,00	5.903	Puskesmas Krapyak Kidul
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	2.131	100,00	2.087	100,00	2.139	100,00	2.192	100,00	2.247	100,00	10.796	Puskesmas Kusuma Bangsa
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	629	100,00	616	100,00	631	100,00	647	100,00	663	100,00	3.185	Puskesmas Medono
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	951	100,00	931	100,00	954	100,00	978	100,00	1.002	100,00	4.816	Puskesmas Noyontaan
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.917	100,00	1.876	100,00	1.923	100,00	1.971	100,00	2.021	100,00	9.708	Puskesmas Pekalongan Selatan
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.273	100,00	1.246	100,00	1.277	100,00	1.309	100,00	1.342	100,00	6.447	Puskesmas Sokorejo
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	1.058	100,00	1.036	100,00	1.062	100,00	1.088	100,00	1.116	100,00	5.360	Puskesmas Tirto
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	897	100,00	878	100,00	900	100,00	923	100,00	946	100,00	4.544	Puskesmas Tondano
Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	100,00	86.898	100,00	85.000	100,00	87.846	100,00	95.000	100,00	100.000	100,00	454.744	RSUD Bendan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	71	100,00	62	100,00	61	100,00	61	100,00	61	100,00	317	RSUD Bendan
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	74	100,00	829	100,00	812	100,00	801	100,00	813	100,00	3.328	RSUD Bendan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.156	100,00	4.415	100,00	4.447	100,00	4.487	100,00	4.648	100,00	23.154	Satpol PP
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	472	100,00	448	100,00	442	100,00	442	100,00	448	100,00	2.253	Satpol PP
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	378	100,00	572	100,00	560	100,00	552	100,00	561	100,00	2.623	Satpol PP
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.889	100,00	3.184	100,00	3.206	100,00	3.237	100,00	3.350	100,00	15.866	Set DPRD
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	4.126	100,00	3.674	100,00	3.621	100,00	3.590	100,00	3.666	100,00	18.677	Set DPRD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN & PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		KINERJA DAN USULAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	0,00	100,00	100,00	22.037	100,00	19.814	100,00	19.908	100,00	19.818	100,00	20.503	100,00	102.080	Set DPRD
Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	2.390	100,00	1.460	100,00	1.431	100,00	1.411	100,00	1.434	100,00	8.127	Set DPRD
Jumlah					1.031.500		1.040.256		1.070.177		1.071.184		1.084.120		5.297.237	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pekalongan. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*Outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*Outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan disajikan dalam tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan dalam tabel 8.2.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	DATA AWAL RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.730,00	1.537,00	1.230,00	1.027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
18	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	DATA AWAL RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
24	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
26	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,00
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2	3	4	5	6	7	8	8

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

**Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan**

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66	Tujuan Kota	Kota
- Angka Kemiskinan	persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03	Tujuan Kota	Kota
- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99	Tujuan Kota	Kota
- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04	Tujuan Kota	Kota
- PDRB Perkapita	Rp. Juta/ jiwa/ tahun	35,22	35,47- 35,51	35,97- 36,21	36,56- 36,92	37,16- 37,82	39,21	40,65	40,65	Tujuan Kota	Kota
- Jumlah konflik sosial	kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50	IKU Kota	Kota
- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00	IKU Kota	Kota
- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89	IKU Kota	Kota
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00	IKU Kota	Kota
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SKBaru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00	IKU Kota	Kota
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
- Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12	IKU Kota	Kota
- Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86-1,97	2,28-2,84	2,48-2,83	2,53-3,32	4,55	4,55	4,55	IKU Kota	Kota
- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
B. ASPEK PELAYANAN UMUM											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
<i>URUSAN PENDIDIKAN</i>											
- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	0,00	100	100	100	100	100	100	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	0,00	100	100	100	100	100	100	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
<i>URUSAN KESEHATAN</i>											
- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	78.62	85	88	90	95	100	100	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
<i>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>											
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	98,40	98,40	98,60	98,80	99,00	99,20	99,40	99,40	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	62,93	66,89	73,50	77,88	80,42	82,98	87,83	87,83	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	86,059	85,766	87,092	88,389	89,659	90,900	92,115	92,115	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	0	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,179	96,187	96,203	96,211	96,219	96,243	96,251	96,251	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	0	0	20	40	60	80	100	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	0,00	92,5	93,12	93,74	94,36	94,97	95,58	95,58	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS											
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	n/a	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL											
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	0,00	3.21	3.32	3.43	3.55	3.68	3.82	3.82	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN TENAGA KERJA											
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	N/A	52,17	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36	52,36	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<i>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>											
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,50	28,50	28,51	28,51	28,52	28,52	28,53	28,53	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	626,00	626,00	628,00	630,00	632,00	634,00	636,00	636,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<i>URUSAN PANGAN</i>											
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
<i>URUSAN PERTANAHAN</i>											
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
<i>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</i>											
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	65.71	65.71	62.86	62.86	60.00	60.00	60.00	60.00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70,95	71,90	71,48	71,07	70,68	70,29	69,91	69,91	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	0,00	16,50	25,30	34,42	43	51,90	60,10	60,10	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<i>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>											
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	N/A	86.63	87.59	88.54	89.50	90.46	91.38	91.38	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
<i>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>											
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	7,14	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00	10,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<i>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>											
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	persen	67,35	67,40	67,45	67,50	67,55	67,60	67,65	67,65	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<i>URUSAN PERHUBUNGAN</i>											
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28	28	28	28	28	28	28	28	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
<i>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>											
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	N/A	2.75	2.85	2.95	3.05	3.15	3.25	3.25	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	0,00	Baik (Nilai 76.61–88.30)	Baik (Nilai 76.61–88.30)	Baik (Nilai 76.61–88.30)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
<i>URUSAN KOPERASI DAN UKM</i>											
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	7.22	7.52	7.82	8.12	8.42	8.72	9.02	9.02	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<i>URUSAN PENANAMAN MODAL</i>											
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	192,25	196,35	200,28	204,28	208,37	212,53	216,78	216,78	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
<i>URUSAN KEBUDAYAAN</i>											
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	125,00	1,57	1,55	1,53	1,5	1,48	1,46	1,46	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
<i>URUSAN PERPUSTAKAAN</i>											
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	indeks	19,53	19,72	19,92	20,12	20,32	20,52	20,73	20,73	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
<i>URUSAN KEARSIPAN</i>											
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	72,00	72,40	72,80	73,20	73,60	74,00	74,40	74,40	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
<i>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>											
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,04	1,10	1,15	1,21	1,26	1,31	1,37	1,37	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	13	13	13	14	14	15	15	15	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
<i>URUSAN STATISTIK</i>											
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	64,29	66,00	68,00	70,00	73,00	76,00	80,00	80,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
<i>URUSAN PERSANDIAN</i>											
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	0,00	I	I	I	II	II	II	II	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
URUSAN PILIHAN											
<i>URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</i>											
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	14696,00	14843,00	14991,00	15141,00	15293,00	15446,00	15600,00	15600,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
<i>URUSAN PARIWISATA</i>											
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	535.000,00	550.000	565.000	580.000	595.000	610.000	625.000	625000,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
<i>URUSAN PERTANIAN</i>											
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	236,40	240,017	243,76	247,58	251,474	255,45	259,49	259,49	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
<i>URUSAN PERINDUSTRIAN</i>											
- Pertumbuhan Industri	persen	0,828	-0,255	0,10	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
<i>URUSAN PERDAGANGAN</i>											
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	25.92	26.18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	27,51	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN											
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>											
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	91.90	93,00	93,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	IKU Renstra	Setda
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>											
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Set DPRD

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
<i>PERENCANAAN</i>												
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	98,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
<i>KEUANGAN</i>												
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2,12	1,95	1,95	1,98	2,01	2,05	2,06	2,06	2,06	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
<i>KEPEGAWAIAN</i>												
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	86,00	86,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	90,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>												
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>												
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>												
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	0	48.39	58.06	67,74	77,42	87,10	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	N/A	11	12	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
UNSUR KEWILAYAHAN												
<i>KECAMATAN</i>												
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>												
- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C. ASPEK DAYA SAING												
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90	Tujuan Kota	Kota	
- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tujuan Kota	Kota	

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	KET	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69	Tujuan Kota	Kota
- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92	IKU Kota	Kota
- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61	IKU Kota	Kota
- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	IKU Kota	Kota
- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	IKU Kota	Kota
- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00	IKU Kota	Kota
- Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25	IKU Kota	Kota
- IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09	IKU Kota	Kota
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50	IKU Kota	Kota
- Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00	IKU Kota	Kota
- Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07	IKU Kota	Kota
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Kota	Kota
- Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00	IKU Kota	Kota
- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	IKU Kota	Kota

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

BAB IX PENUTUP

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026–2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Pekalongan serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku.

9.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
- e. Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kota Pekalongan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, penerahan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta Indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang

ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, Wali Kota dan Wakil juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2020). Kota Pekalongan Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Jawa Tengah Dalam Angka.